Srawung Kampung-Kota

Kontestasi Kampung Diriuhnya Perubahan Kota

Penyunting : Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah

Srawung Kampung-Kota

Kontestasi Kampung Diriuhnya Perubahan Kota

Penyunting : Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah

Srawung Kampung-Kota
Kontestasi Kampung Diriuhnya Perubahan Kota

Penulis	Andesha Hermintomo, Anindita Taufani, Adil Abdullah Albatati, Devy Dhian Cahyati, A. Nimas Kesuma Negari, Ginani Hening Utami, Jovita Calista Romauli Sitorus, Yoga Adi Santoso, Martin L Katoppo, Ruth E. Oppusunggu, Sugeng Triyadi, M. Jehansyah Siregar, Ahmad Khairudin, Dwiyanti Kusumaningrum, Wida Ayu Puspitosari, Sarkawi B. Husain, Ilham Daeng Makkelo, Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah
Penyunting	Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah
Perancang Sampul	Ibnu Teguh W
Penata Letak	Ibnu Teguh W

Diterbitkan oleh:
Buku Litera
Minggiran MJ II/1121, RT 53/15 Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
Telp. 08179407446 e-mail: bukulitera@gmail.com

Bekerjasama dengan

KampungnesiaPress, Sosiologi FISIP UNS
dan Rujak Center for Urban Studies

Cetakan Pertama, 2017
14 x 21 cm, xii + 202 hal
ISBN : 978-602-6751-61-4

DAFTAR ISI

PRAKATA

Satu dekade lebih, narasi kota-kota di Indonesia mengalami banyak perubahan yang bersifat fundamental, dimana pemicu utamanya adalah bergesernya bandul kekuasaan yang bergerak dari pusat ke daerah. Nalar desentralisasi serta merta menjadi titik mula gelombang proses, dinamika maupun perubahan yang terjadi dalam beragam dimensi. Ada banyak kebimbangan untuk mencari bentuk dari perubahan yang bersifat transisi maupun tantangan untuk merespon ketimpangan yang ada. Sebab beragam kisah yang hadir sesudahnya adalah gambar tentang kota yang tumbuh dalam ragam kepentingan, dan tak lagi menempatkan negara sebagai orientasi tunggal tapi juga kepentingan-kepentingan politis, modal maupun kombinasi keduanya.

Skema kota yang lahir dalam beberapa dekade terakhir adalah perubahan dengan lapis praktek-praktek kekuasaan yang tersebar. Tersebar oleh kemungkinan untuk membangun kebijakan dan kepentingan kota tidak hanya dari nalar negara namun juga membesarnya peluang bagi keterlibatan publik secara lebih luas. Namun publik kota nan luas dan tersebar dikampung-kampung, tetap menjadi potret gelap dari kota yang tumbuh terlalu cepat, dan melaju dalam kepentingan yang semakin tak terjangkau oleh warga. Relasi kampung-kota juga mengalami pergeseran oleh sebab pergerakan kota yang liar, sekaligus kesediaan menahan beban dari skenario kota yang harus tumbuh menjulang ke atas. Setiap ruang dalam kampung-kota lalu hadir sekadar menyangga berbagai kebutuhan kota untuk mampu memenuhi indikator perubahan sekaligus penanda kemajuan.

Buku ini adalah hasil Srawung Kampung (2016); dimana kerja-kerja kami selama ini dalam mendokumentasikan kampung tiba pada beberapa moment untuk berjejaring. Skema Srawung Kampung kemudian jadi agenda untuk mengundang banyak teman diberbagai kota, lintas disiplin pengetahuan untuk menulis dan berbagi semua bentuk pengalaman berada dikampung-kota, menjadi bagian dari kampung maupun mendampingi kampung-kota. Beberapa workshop dengan agenda dari berbagai komunitas juga dibuat menjadi agenda yang tak terpisahkan dari Srawung Kampung yang kami lakukan. Buku ini hadir, sebagai penanda atas moment Srawung Kampung yang pernah kami buat, sekaligus memberi sumbangan kecil bagi upaya untuk meletakkan kota pada skema perubahan dan menempatkan pengetahuan sebagai basis pengambilan kebijakan. Memotret, merekam, mendokumentasikan dan menghadirkan narasi keseharian kampung-kota dalam beragam dimensi, baik dalam fisik maupun non fisik adalah upaya untuk menempatkan kampung sebagai bagian nan substansial dari kota. Eksistensi kota yang tumbuh dan membentuk sejarah kota-kota modern di nusantara tak bisa dilepaskan begitu saja dari semua penggalan mentalitas budaya warga yang membentuk kota dan kini hadir menghuni kampung-kota.

Buku ini, mencoba memberi paparan bagaimana wajah kota dibentuk oleh narasi-narasi yang disusun dari kepingan perubahan yang terjadi dikampung-kampung. Ada kemungkinan kota dan kampung hadir bersamaan sebagai sebuah relasi namun tak sebanding. Namun besar kemungkinan, kota dan kampung hadir tidak bersamaan karena ketiadaan orientasi nan kolektif. Konsekuensi dari dua kondisi tersebut tetaplah sama bahwa kampung-kota hadir jadi hanya sebagai pelengkap dari narasi-narasi kota yang dibentuk oleh kepentingan kapital. Kontestasi kampung dan kota kemudian membentuk beragam narasi dengan bingkai ruang dan mentalitas organik nan khas bagi warganya. Diskusi buku ini diawali oleh Andesha Hermintomo dan Anindita Taufani yang memulai dengan membuka kembali diskursus kampung-kota dengan melihat beberapa pengalaman dibeberapa

kota. Konsekuensi yang bisa ditemukan dinarasi diskursus kampung-kota yang dipersoalkan adalah arus perubahan yang dicermati Adil Abdullah Albatati ketika kampung Arab Surabaya dijadikan kawasan heritage, Nimas Kesuma Negari yang melihat kampung Pogung Kidul Yogyakarta kini penuh hunian megah nan berpagar, sampai hadirnya ancaman penggusuran kampung Kebun Sayur di Ciracas oleh Devy Dhian Cahyati sebagai sebuah kontestasi.

Bagian lainnya adalah bentuk-bentuk respon atas kompleksitas relasi kampung dan kota, dimana memahami dan mengukur fleksibilitas ruang bersama di kampung Babakan Ciamis Bandung menjadi Ginani Hening Utami, Jovita Calista Romauli Sitorus, dan Yoga Adi Santoso. Pendekatan anak atas ruang tempat mereka tinggal dengan pendekatan yang memberdayakan di kampung Pondok Pucung Tangerang Selatan ditulis Martin L Katoppo, Ruth E Opposunggu, Sugeng Triyadi dan M Jehansyah Siregar. Di Semarang folklore kemudian dijadikan ritual warga kampung Bustaman untuk membangun solidaritas tempat dimana warga tinggal, menjadi cara yang dituturkan oleh Ahmad Khairudin. Polarisasi kota akibat pertumbuhan ekonomi juga menggerakkan warga kampung-kota dalam pola-pola konsumsi, analisis generasi yang dilakukan Dwiyanti Kusumaningrum mengurai perubahan gaya hidup warga kampung di Karawaci Tangerang. Relasi konsumsi dan adaptasi etnis diurai oleh Wida Ayu Puspitosari di Kediri. Situasi yang relevan juga bisa ditemui dalam perspektif etnoeokologi Sarkawi B. Husain ketika mengurai relasi sungai Jagir dan warga kampung Ngagelrejo di Surabaya. Analisa Ilham Daeng Makkelo, Akhmad Ramdhon dan Siti Zunariyah hadir dengan perspektif sosio-historis lewat kisah perubahan kampung-kota di Makassar dan uraian transformasi di kampung Laweyan Surakarta. Untuk kemudian semua narasi kampung-kota yang ada diberi prolog oleh Marco Kusumawijaya yang mengingatkan kita kembali pada jejaring Urbanisme Warga yang berujung pada reproduksi pengetahuan bagi pondasi kebijakan dimasa depan.

Buku ini tidak bisa hadir tanpa budi banyak pihak. Terima kasih buat semua teman-teman yang menjadi bagian dari sesi-sesi Srawung Kampung 2016; Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret, Rujak Center for Urban Studies, Marco Kusumawijaya, Anindita Taufani, Andesha Hermintomo, Gatot Subroto, Lilik Rohmad Ahmadi, Aris Kurniawan, dan Saddam Rajief untuk sesi berbagi workshopnya. Tak lupa juga Argyo Demartoto, Suprapto Suryodharmo, Maulana Kurnia Putra, The Mudub dan semua teman-teman Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret untuk semua bentuk kebersamaannya. Alokasi waktu untuk diskusi sangatlah terbatas namun keinginan untuk Srawung dan berbagi pengalaman menjadi momen yang harus dikenang lewat buku. Terima kasih untuk sesi berbagi A Nimas Kesuma-Yogyakarta, Ahmad Khairudin-Semarang, Dadan Wirahadikusuma-Bandung, Dede Rohayati-Bandung, Devi Dhyan Cahyati-Jakarta, Dian Tri Irawaty-Jakarta, Dita Rahayu Margatino-Surakarta, Dwiyanti Kusumaningrum-Jakarta, Ign Susiadi Wibowo-Tangerang, Ilham Daeng Makkelo-Makassar, Arianti Ina Restiani Hunga, dkk-Salatiga, Jovita Calista Sitorus, dkk-Bandung, Martin L Katoppo-Tangerang, Pratitou Arafat-Aceh, Reza Adhiatma-Bogor, Sarkawi B Husain-Surabaya, Fiqri Sulthony–Pontianak, Wida Ayu Puspitosari-Malang dan Zsa Zsa Wulan Permatasari-Surakarta.

Terakhir, buku ini tidak berdiri sendiri. Proses belajar untuk menjadi bagian dari kota terus dilakukan bersama-sama, untuk itu beberapa publikasi terkait menjadi rangkaian upaya pengetahuan yang diproduksi bersama dalam platform kampungnesia. Adapun semua kekurangan yang masih tersisa akan menjadi tanggung jawab kami agar bisa memperbaikinya dengan agenda-agenda lebih lanjut. Untuk itu, kritik dan semua bentuk upaya perbaikan mutlak kami butuhkan.

Nuwun,
Akhmad Ramdhon
Siti Zunariyah

PENGANTAR
URBANISME WARGA DAN KAMPUNG-KOTA

Gagasan urbanisme setidak-tidaknya melingkupi pengetahuan, paham, pemikiran, gagasan, persepsi dan visi tentang kota dan kekotaan; yang perseorangan maupun yang bersama. Sehingga setiap orang memiliki urbanisme, setiap orang berhak mengembangkan urbanisme dan setiap orang berhak berperan dalam membentuk kota. Oleh karenanya Urbanisme Warga adalah suatu program yang diselenggarakan oleh RUJAK Center for Urban Studies bekerjasama dengan komunitas dibeberapa kota di Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat menggali pengetahuan tentang lingkungan dan kota masing-masing[1]. Berbagai cara ditempuh di tiap kota. Karena sering ada pertemuan bersama, maka kota-kota dan RUJAK sendiri juga saling belajar satu dari yang lain dalam hal metoda kreatif dan kerjasama dengan masyarakat.

Irisan perhatian pun muncul. Di semua kota, kampung misalnya menjadi perhatian penting. Kampung-kota memuat esensi keragaman dan intensitas, narasi kesejarahan asal-usul dan pegolahan keadaan kontemporer, pergulatan hidup sehari-hari yang intim serta pandangan ke seluruh kota yang berjarak. Semuanya organik. Kampung adalah kekotaan yang sesungguhnya. Pada saat yang sama muncul kesadaran akan ancaman terhadap kampung

---

[1] Para mitra itu adalah ICAIOS (International Center for Aceh and Indian Ocean Studies) di Banda Aceh, LPS-AIR (Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional), Deman Huri dan Cawan di Pontianak, Gerobak Hysteria di Semarang, DAG (Design as Generator) dan LabTanya di Tangerang Selatan, Kampoeng Bogor di Bogor, GreS Institute di Bandung, Kampungnesia-UNS dan URDC-UNS di Surakarta dan C2O Library di Surabaya.

di seluruh Indonesia. Ada kemendesakan. Sesuatu bernama pembangunan dan modernitas sedang menerpa.

Apa yang disampaikan koreografer Suprapto Suryodarmo pada diskusi "Srawung Kampung Kota" di Wisma Seni TBJT Surakarta pada tanggal (31/8-1/9/2016) sangat mengena. Beliau mengatakan bahwa di masa mudanya beliau merasa hanya "kampungnya" yang rumah. Di luar kampung, yaitu ruang-ruang kota yang publik dan sebagian besar adalah produksi ruang kolonial, terasa asing, tidak untuk beliau dan kawan-kawannya. Kampung-kota terasa rumah besar, karena kecairan batas-batas kepemilikan, antara yang pribadi dan yang bukan, dengan interaksi yang kerap, dengan rasa teritorial dan solidaritas yang kental. Selanjutnya bahkan makin menarik ketika beliau mengatakan bahwa sesudah kemerdekaan pun perasaan asing akan ruang kota itu masih berlanjut, dan diperlukan waktu cukup lama untuk tumbuh dan berkembangnya rasa memiliki ruang kota melampaui batas-batas kampungnya. Keterasingan ini pun selalu pasang surut, karena perubahan yang cepat dan terpaan hal-hal asing yang kerap belum sempat dipahami. Apa yang datang sering tidak diundang, tidak permisi, dan tidak memperkenalkan diri seperti di kampung. Warga tidak diajak dan tidak tahu-menahu tentang hajatan kota berikutnya, tidak seperti di kampung.

Pada saat yang sama, yang baru dan datang begitu saja itu seringkali mencaplok ruang kampung, menimbulkan keretakan, keterbelahan, interupsi, bahkan hingga menggusur keseluruhan kampung. Tiba-tiba ada "kompleks perumahan" atau pusat perbelanjaan atau gedung tinggi perkantoran yang bayangannya panjang hingga ke tengah kampung. Bayangan ini gelap, tetapi kegelapan itu pula yang membuat kehadirannya dan kehadiran kampung itu sendiri menjadi makin terang terasa. Tapi kegelisahan sekaligus muncul. Apakah kampung memang akan habis? Apakah kampung tida dapat di-reproduksi, kalaupun harus dalam bentuk lain, misalnya yang mampu menampung lebih banyak orang dengan lebih banyak lantai terbangun, prasarana dan sarana?

Antariksa (Kunci Cultural Studies Center) pernah mengatakan bahwa di beberapa "kompleks perumahan" real-estate di Yogya, pemaknaan ruang kembali sedang terjadi. Penghuni kompleks mulai saling berkenalan dan menjalin interaksi lebih cair. Ruang jalan dan terbuka lainnya mulai dipakai untuk berbagai kegiatan bersama. Kampung sedang menjadi di dalam kompleks-kompleks formal itu, seperti embrio yang sedang tumbuh dari dalam. Karena itu memang kita bisa beranggapan bahwa kampung atau kekampungan ada dalam kebiasaan sosial dan budaya kita, dan mungkin akan mereproduksi dirinya selalu. Tetapi barangkali kita juga dapat berpikir sedikit lebih maju: barangkali proyek-proyek dan praktik-praktik membangun kota dapat memudahkan dan bahkan mengasuh proses reproduksi tersebut secara progresif, termasuk mempertimbangkan hingga menyerap berbagai hal baik dari luar atau dari masa depan? Hal ini sebenarnya secara kelembagaan dapat disalurkan dalam berbagai kebijakan pembangunan perumahan dan kota. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah memperkenalkan gagasan, bahwa kebijakan progresif seperti itu mungkin dan dapat dilakukan. Hanya diperlukan kerepotan dan kreativitas.

Untuk waktu yang lama, kita memang belum punya kebiasaan membuat kebijakan yang sekaligus mendalam dan progresif seperti di atas. "Kebijakan publik" di negeri kita masih kedengaran seperti sesuatu yang asing. Tapi sekarang dengan lebih banyak pengetahuan, termasuk yang dikumpulkan dalam buku ini dan kegiatan-kegiatan yang mendahului, menyertai dan nanti melanjutkannya, banyak hal menjadi lebih mungkin.

Memetakan menjadi siasat yang membiasa dan merutin. Ada kegembiraan dan kegandrungan akan rinci-rinci keragaman bagian-bagian kota dan cara-cara hidup, kesenian, identitas, arsitektur, sejarah setempat, kebudayaan, proses *mixing* dan *remixing* di setiap tempat dan komunitas. Betapa mencengangkan! Lalu muncullah berbagai hasrat untuk mengalami kekayaan kota secara lebih

langsung. Perjalanan mengunjungi bagian-bagian kota diurus, pertemuan antar komunitas diselenggarakan, perekaman dan penyebaran dihidupkan. Betapa menggairahkan! Pergaulan antara bagian dan komunitas perkotaan terjadi melalui pemaparan dan keterpaparan sepanjang program. Aktor-aktor baru ditemukan. Rinci-rinci baru terbuka diketahui dan dicintai, kerjasama baru terbuka di antara sesama (kelompok) warga, LSM, pemerintah dan lain-lain penghuni kota.

Kesadaran kritis akan masalah-masalah lingkungan, ancaman kehilangan atau ketergusuran dan keinginan membayangkan kemungkinan perubahan, perlahan mengental. Produksi-bersama pengetahuan menguak keterbukaan untuk secara aktif mulai mendaku kembali kepemilikan atas masa depan kota, karena ia memunculkan kemampuan membayangkan —sendiri maupun bersama-sama— masa depan, bukan semata terserah kepada kekuatan dari luar, baik itu atas nama pendekatan teknokratis maupun kepentingan "lebih besar" yang didaku pihak-pihak lain.

Tentu saja diduga dan memang diharapkan bahwa tujuan serta proses itu menghasilkan berbagai hal lainnya, yang pada pokoknya kita sebut: Perubahan dalam berbagai bentuk dan tingkat kemajuan: Dimana para peneliti akademik makin sering berbagi dan bekerjasama dengan masyarakat dan komunitas, kelompok seniman dan aktivis kesenian makin terlibat dalam menggugah dan menggairahkan kesertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan kebijakaan pembangunan. Kemudian muncul pemahaman dan ketertarikan akan "pusaka rakyat" (*vernacular heritage*) selain yang adiluhung, makin banyak warga menjadi peneliti-penulis "amatir" tentang lingkungan dan kotanya. Tak terhitung pertemuan membahas atau berbagi berbagai pengetahuan yang baru "ditemukan" tentang tempat-tempat yang sebenarnya dekat tapi tak terperhatikan sebelumnya dan akumulasi serta ketersebaran pengetahuan tentang berbagai aspek perkotaan serta keragaman bagian-bagian serta kehidupan di dalamnya.

Harapannya adalah semua itu berlanjut dan semacam menjadi kebiasaan, karena keyakinan bahwa perubahan harus terus-menerus dimiliki dan diarahkan dengan sadar berdasarkan pengetahuan yang sekaya-kayanya, bukan menjadi sesuatu yang menerpa kita begitu saja tanpa dapat disikapi pada waktunya. Kini kota-kota makin cepat berubah. Indonesia bukan lagi negara miskin, melainkan mulai menjadi negeri berpenghasilan menengah. Nilai tambah makin menumpuk di kota-kota. Penduduk pun demikian. Produktivitas dan konsumsi pun demikian. Tanpa pengetahuan, tanpa kesadaran kritis mayoritas warga, kota-kota hanya akan menjadi lokasi brutal, banal dan tragis bagi modernitas datang menimpa tanpa diundang, tanpa perundingan dan pengolahan.

Tantangan-tantangan harus dihadapi: Bagaimana melakukan pengarsipan? Bagaimana mengelola kompleksitas keragaman, kedalaman, kerincian, tanpa melakukan penyederhanaan yang abai dan memiskinkan? Bagaimana mengatasi frustrasi kerjasama yang panjang dan menuntut kesabaran serta toleransi, dan kadang memaksa perubahan paradigma? Bagaimana menyalurkan dan menerjemahkan kompleksitas pengetahuan itu ke dalam kebijakan tentang masa depan? Bagaimana mengajak lebih banyak orang dan pihak untuk mau repot dan kreativitas dalam tiap tindakan agar tidak berdampak kehilangan kekayaan kota-kota kita? Jadi, mari melakukannya bersama-sama.

Marco Kusumawijaya

DISKURSUS KAMPUNG-KOTA

Andesha Hermintomo
Anindita Taufani

Memotret kampung-kota[1] pada hari ini berarti melihat berbagai elemen yang mencakupinya- interaksi sosial, aliran barang dan jasa, pengetahuan, transaksi ekonomi, kegiatan bermukim, ekologi, dan geografi-yang saling menanggapi satu sama lain-berinteraksi, bernegosiasi, memproduksi pengetahuan dan merekayasa (engineering). Kampung sebagai sebuah keseharian terdengar sebagai hal yang akrab dengan kehidupan manusia namun maknanya menjadi tereduksi ketika dibicarakan dalam aspek tata ruang. Contohnya, didalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta, kampung didefinisikan sebagai sub-layer dari kategori hunian (bukan pemukiman), dan harus memiliki nilai historis. Padahal kampung memiliki keragaman aktifitas dan identitas yang jauh lebih kaya. Di dalamnya, terdapat kegiatan berhuni, berdagang, berproduksi yang tidak jarang menempati ruang yang sama. Relasi sosial dan ekonomi yang berlangsung didalamnya pun tidak sebatas kegiatan transaksional semata, tapi juga ada tenggang rasa, empati dan kepemilikan bersama atas apapun yang terjadi di dalamnya. Sebagai contoh, seorang pelanggan masih bisa berhutang ke warung, pemuda terlibat aktif dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), atau gotong royong. Kekeliruan dalam memaknai kampung sekedar turunan dari kategori hunian menyebabkan banyak kebijakan keliru yang dilakukan pemerintah kota dalam

[1] Makalah ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan dari riset aksi penulis bersama Rujak Center for Urban Studies (RCUS) dan mitra-mitra RCUS di beberapa kota di Indonesia. Dalam pembahasan makalah ini beberapa kota dijadikan contoh kasus mengenai penekanan isu terkait kampung kota

menangani isu ini. Misalnya, hanya menawarkan solusi tunggal berupa penggantian ruang huni berupa rumah susun bagi setiap keluarga atau warga kampung yang tergusur, tanpa ada skenario yang jelas mengenai keberlangsungan kegiatan komersial ataupun ruang interaksi sosial, suatu hal yang sebelumnya disediakan oleh tipologi kampung.

Diskursus Kampung-Kota

Keberagaman latar belakang kampung-kampung diperkotaan memberikan identitas yang tidak seragam. Ada yang kampung memiliki latar belakang sejarah sebagai cikal bakal sebuah kota, namun ada pula kampung yang belakangan hadir mengisi ruang-ruang terbengkalai di tengah kota. Urbanisasi merupakan sebuah proses 'menjadi kota', diantaranya karena pembangunan yang terus-menerus terjadi. Proses tersebut kemudian tidak terlepas dari diskursus mengenai kampung-kampung di perkotaan yang kemudian memengaruhi arah kebijakan sebuah kota. Berbagai diskursus mengenai keberadaan kampung-kampung di perkotaan secara empirik dapat ditemui dalam diskusi sehari-hari. Diantaranya adalah sebagai berikut: kampung versus kota (vs) yakni dengan menempatkan identitas kampung bertentangan dengan identitas kota, melalui penuturan yang hampir selalu sama. Identitas kampung dan kota dibentuk dari hal-hal yang bertentangan satu sama lain. Pada kampung, dilekatkan identitas hubungan sosial yang kuat, dominasi profesi berbasis agraria atau bahari dasar (petani, nelayan, peternak), kebudayaan yang berbasis tradisi, dll. Sedangkan pada kota, dilekatkan identitas yang sebaliknya, yakni nilai-nilai individualistis, profesi berbasis jasa atau industri manufaktur, kebudayaan yang berbasis terobosan, menerima nilai-nilai baru dan tidak ragu mengkritisi tradisi. Dalam kronologi waktu, Kampung lebih cenderung dikategorikan dalam kurun masa lalu, sedangkan kota dikategorikan dalam kurun masa kini dan masa depan. Narasi konflik yang cenderung bipolar, antara benar–salah, tua–muda,

kolot–moderen, terbangun setiap kali dua identitas ini berhadapan. Kemungkinan munculnya ruang negosiasi atau zona abu-abu relatif kecil. Narasi semacam ini menuntut adanya hasil, yakni siapa yang menjadi pecundang dan pemenang, yang mengantar kita kepada babak pembahasan berikutnya.

Kampung lebih besar dari kota (<), dimana narasi kampung sebagai inferior dari kota, kota menjadi pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan kampung, salah satunya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Infrastruktur dan kebijakan pun dibuat terutama untuk mendukung proses ini. Jaringan jalur kereta api dan jalan raya dibuat untuk menyalurkan berbagai produk perkebunan, pertambangan, pertanian dan tenaga kerja dari seluruh pelosok wilayah menuju kawasan perkotaan. Kota adalah mesin, sedangkan kampung adalah bahan bakarnya. Sedangkan kampung lebih besar dari kota (>), akan menempatkan kampung pada posisi superior dihadapan kota. Berangkat dari kesadaran bahwa secara mendasar, kota lebih membutuhkan kampung dibandingkan sebaliknya. Ketidakmampuan kota dalam memproduksi air minum, bahan pangan, bahan pembangkit energi dan bahan bangunan menjadi hal krusial yang menempatkan resiko lebih besar di pihak kota. Misalnya dengan munculnya perlawanan dari pihak kampung kepada kota atas sistem yang dinilai tidak lagi adil.

Salah satu contoh, kita melihat bagaimana penduduk kota Jakarta dibuat tidak berdaya ketika penguasa wilayah Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Bantargebang, Bekasi menolak menerima kiriman sampah selama beberapa waktu. Atau, ketika terjadi gagal panen cabe dan bawang di Brebes yang menyebabkan melonjaknya harga komoditas, berlanjut ke harga makanan di kota Jakarta dan sekitarnya. Hal yang serupa terjadi juga di Bandung, Semarang, Makassar, dan berbagai kota lain. Ketahanan kampung untuk bertahan lebih kuat dan lama dibandingkan kota juga lahir dari beberapa contoh komunitas kampung yang mandiri dan lestari,

seperti komunitas Kanekes (lebih dikenal sebagai suku Badui), komunitas Ciptagelar, dan kampung Naga di Jawa Barat. Pada diskursus ini, kota tidak mungkin ada tanpa adanya kampung namun tidak sebaliknya.

Kampung sama dengan kota (=), akan menempatkan kampung pada kedudukan yang sama dengan kota. Diskursus ini lahir dari upaya kritis terhadap narasi mengenai identitas kampung maupun kota. Darimana persyaratan identitas kota itu berasal? Citra apa yang kita jadikan acuan identitas kota? darimana dan bagaimana lahirnya istilah “kampungan”, “mudik”, “rantau”, atau “pembangunan” dalam narasi kampung-kota? Kolonialisme telah mengenalkan kita (penduduk Indonesia) kepada narasi kota yang belum pernah didengar sebelumnya. Perkampungan nelayan di berbagai wilayah pesisir pantai mengalami perubahan kuantitas wilayah dan kualitas mata pencaharian penduduk ketika pemukiman mereka tiba-tiba berubah menjadi gerbang perdagangan internasional. Semakin besar dan penting pelabuhan yang ada di kota tersebut, akan semakin luas wilayahnya pemukimannya, semakin bertambah penduduknya dan semakin beragam profesi maupun karakter budaya penduduknya.

Jakarta, Semarang, Cirebon, Surabaya, Makassar adalah beberapa contoh kota-kota besar di Indonesia yang lahir, tumbuh dan berkembang melalui narasi ini. Tanpa adanya preseden, kota-kota tersebut dibangun mengikuti model tata ruang kota-kota di Eropa. Sungai yang berkelok dibuat lurus. Kota dibuat di dalam tembok tebal dan tinggi, lengkap dengan menara jaga dan benteng militer. Disadari atau tidak, proses peniruan ini masih kerap dilakukan oleh perencana kota-kota di Indonesia. Berkurangnya pengaruh pemerintah sebagai perencana kota dibarengi dengan menguatnya kewenangan pengembang konstruksi dari pihak swasta, yang memiliki keluasan ruang dalam menentukan desain tata ruang di wilayah pengembangannya.

Meskipun bingar, namun narasi-narasi tersebut tetap tidak sepenuhnya berhasil mendominasi total karakter kota-kota yang ada. Tetap muncul fenomena unik seperti “Starling–Starbucks Keliling” yakni penjual kopi instan bersepeda yang ‘mangkal’ di berbagai titik strategis kota, “Warteg-Warung Tegal” yang selalu ramai dipenuhi pekerja kantoran, atau ‘kost–kamar sewa’ dengan harga relatif terjangkau bagi kelas pekerja. Masih ada berbagai kawasan hunian yang disebut “kampung” tepat di tengah-tengah “kota”. Ada kampung Melayu dan kampung Luar Batang di Jakarta, hingga kampung Arab di Surabaya. Lalu bagian mana dari “kota” yang disebut kota dan bagian mana yang masih disebut kampung? Apakah Dayeuh Kolot itu begitu berbeda dari Kota Baru Parahyangan di wilayah “kota” Bandung? Lalu bagaimana nasib kampung Gedebage yang akan bersanding dengan “Bandung Technopolis”, atau bagaimana dengan masa depan kampung-kampung Betawi yang terkepung perumahan mewah di Bintaro ? Begitu banyak narasi tentang identitas kota yang memiliki kontradiksi diantara parameter-parameternya sendiri.

Berbagai kondisi ini mengantar penulis kepada kesimpulan, bahwa tidak mungkin membangun narasi kampung-kota yang tepat tanpa melakukan kritik terhadap konsensus yang ada. Salah satu hipotesa yang muncul, “kampung” adalah tipologi bermukim spesifik, yang dihasilkan secara alami oleh ragam kebudayaan di Indonesia, sebagai jawaban atas kebutuhan pemukiman berkepadatan tinggi di wilayah strategis. Meskipun kita dapat menelusuri unsur pembentuk kampung sampai ke tingkat rumah, keluarga atau bahkan individu. Namun kampung memiliki nilai lebih dari hanya sekedar kumpulan rumah, keluarga atau individu tersebut. Kampung hanya mungkin menjadi, jika unsur-unsur pembentuknya (rumah/keluarga/individu) berada pada komposisi dan bentuk interaksi yang pas. Jika salah satu saja unsur pembentuknya ini mengalami perubahan kualiatas ataupun kuantitas, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap karakter maupun keberlangsungan hidup kampung tersebut.

Kampung, Kebijakan Kota dan Keamanan Bermukim

Alih-alih mengidentifikasi kampung sebagai sebuah tipologi bukan kota, belum kota atau bahkan gagal "mengkota", mengapa tidak menerima kampung kota justru sebagai sebuah tipologi perkotaan yang khas, di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia. Keberhasilan kampung-kota dalam menyediakan hunian sewa dengan harga terjangkau (kamar kost), makanan murah (nasi dan lauk-pauk hanya Rp 15.000,- sudah termasuk es teh manis dan nasi boleh menambah), lahan pertanian produktif (pisang, pepaya, singkong, dan cabai yang ditanam dan dirawat secara mandiri di pekarangan rumah) dan tingkat kriminalitas yang rendah (karena warga saling kenal dan mengawasi satu sama lain), baiknya dihargai oleh pemangku kebijakan tata kota melalui pengakuan kampung sebagai lapisan (*layer*) tata ruang yang setara dengan lapisan tata ruang yang lain (hunian, komersial, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru). Lebih jauh lagi, tipologi kampung justru memerlukan perlindungan dan pengembangan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Terkait aspek legalitas keberadaan kampung, mungkinkah terjadi dialog saling menghargai dan menguntungkan antara pemerintah dengan warga kampung? Misalnya sebuah jaminan tidak adanya penggusuran dalam jangka waktu tertentu, jika sebuah kampung menampilkan perbaikan kualitas. Sebagai contoh, apabila kampung tersebut mampu mengolah sampahnya secara mandiri, maka warga kampung memperoleh jaminan keamanan untuk tinggal (tidak digusur) selama 5 tahun. Apabila sampah yang dikelola mampu dikembangkan menjadi kegiatan pengadaan pangan mandiri melalui pertanian sayur organik, maka kampung tersebut memperoleh tambahan jaminan keamanan untuk 5 tahun lagi, dan seterusnya.

Fenomena penggusuran menggunakan asumsi bahwa daya dukung kota telah jenuh. Benarkah demikian? Apakah daya dukung kota tidak bisa direkayasa (*engineered*), misalnya ditingkatkan

melalui intervensi pada kebijakan tata ruang; menaikkan KLB menjadi 4 lantai, dengan pertimbangan 4 lantai diasumsikan masih dalam kemampuan pengelolaan pembangunan secara mandiri, atau setidaknya kontraktor skala kecil, bukan developer besar. Di dalam bangunan 4 lantai tersebut, sangat dimungkinkan untuk dibuat pembagian ruang hunian untuk beberapa keluarga sekaligus. Pada kenyataannya, kampung-kota menampung lebih banyak penghuni pada tiap meter perseginya dibandingkan rumah mewah, dan tidak hanya kepadatan kuantitas penghuni, tapi juga kepadatan keragaman aktifitas dan latar belakang sosial, ekonomi dan budaya.

Kampung sebagai Sumber Daya Milik Bersama

Tidak seperti sumber daya berupa barang ataupun benda yang ketika memiliki status kepemilikan besama rawan memicu konfilik ketika skala barang maupun benda itu semakin besar, pengambil manfaat memiliki sumber daya kapital yang beragam, dan minimnya komunikasi diantara pengambil manfaat. Pengetahuan justru akan terus berkembang dan beramplifikasi menimbulkan diskusi, inovasi, bahkan negosiasi-negosiasi baru. Dengan demikian, tidak hanya faktor fisik semata yang harus dipertimbangkan dalam sebuah kebijakan kota, namun juga hal-hal terkait ekonomi, sosial, budaya dan kondisi politik. Telah dibahas pada awal makalah mengenai berbagai diskursus tentang kampung dan kota, hal tersebut hanyalah sebagian kecil pengelompokan diskursus yang dapat diamati. Tentu saja kenyataannya berbagai irisan dan potongan dapat terjadi diantara keempat diskursus yang telah dibahas sebelumnya. Akses akan pengetahuan tentang kampung, narasi dan informasi tentang kampung kota kurang-lebih dapat memengaruhi kebijakan sebuah perkotaan.

Kampung sebagai milik bersama, yang juga melingkupi pengetahuan yang terpatri pada keberadaannya, memiliki kemampuan amplifikasi yang semakin besar ketika semakin banyak

disebarluaskan, didiseminasikan dan didiskusikan banyak pihak. Misal, solusi menghadapi banjir, atau pengetahuan memperbaiki rumah, jika terdistribusi dengan baik akan menjadi pengetahuan bersama yang terus berkembang dan memicu bentuk negosiasi-negosiasi yang lain tanpa mensyaratkan transkasi ekonomi dalam proses diseminasi pengetahuan tersebut. Tanpa menghakimi pengetahuan apa yang lebih baik dan mana yang tidak, diskursus pengetahuan yang diperbincangkan juga akan menjadi proses verifikasi atas pengetahuan itu sendiri. Dan, dengan bergulirnya proses tersebut reevaluasi akan solusi permasalahan, cara hidup, tradisi bahkan hingga bentukan fisik akan terus terjadi.

Sebagai contoh, kampung Kemijen hari ini menghadapi permasalahan ekologi berupa banjir rob, penurunan muka tanah dan sampah. Pada sisi lain, permasalahan ini menjadi 'pemicu' nilai bersama yang diperjuangkan bersama agar warga di wilayah tersebut bisa hidup dalam kondisi yang lebih baik. Kelompok-kelompok warga terbentuk untuk memfasilitasi pengadaan dan pengelolaan pompa air bersama, lalu ada juga upaya membersihkan kali secara berkala dan bersama-sama, serta menyelenggarakan festival dayung, yang semuanya memperlihatkan bagaimana air menjadi bagian dari keseharian mereka.

Pengetahuan berkembang pula dalam desain rumah-rumah tinggalnya. Dengan kecepatan penurunan permukaan tanah hingga 10 cm per tahun, warga membangun rumah baru pada posisi lantai dasar yang tinggi dari permukaan tanah eksisting (lebih dari 1 m), meskipun penggunaan material dan model konstruksi masih menggunakan tipologi yang sama dengan bangunan pada wilayah tanah stabil. Perlu dikaji lebih lanjut apakah kecepatan penurunan bangunan berbanding lurus dengan berat bangunan itu sendiri. Mungkinkah warga dikenalkan dengan arsitektur yang lebih peka terhadap fenomena yang ada? bangunan yang jauh lebih ringan sehingga tidak mudah "tenggelam", atau yang mengapung, atau

mudah bergerak dan dibongkar-pasang ? Kenyataannya, jika diamati hal-hal seperti ini dalam konteks yang berbeda di tempat yang berbeda terus terjadi. Amplifikasi pengetahuan, negosiasi-negosiasi dan reevaluasi atas apa yang telah ada sebelumnya menjadi sesuatu yang berubah sebagian atau berubah sepenuhnya. Namun seringkali proses ini berjalan tidak revolusioner sehingga tidak disadari keberlangsungannya.

Berbagai definisi dan pengelompokan-pengelompokan terjadi atas diskursus kampung kota. Berbagai pihak juga berupaya membangun definisi berdasarkan kepentingan masing-masing. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, hanya saja keterbukaan diskusi mengenai kampung-kota baiknya tidak terutup aksesnya bagi siapapun. Sehingga pengetahuan tentang kampung, keamanan bermukim dan berkarya didalamnya dapat menjadi sebuah diskursus yang dimiliki bersama. Tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, penghuni kampung-kota itu sendiri namun juga dimiliki oleh seluruh warga kota.

TAMAN SAFARI MASUK KAMPUNG
PEMBEKUAN KAMPUNG ARAB SURABAYA SEBAGAI HERITAGE

Adil Abdullah Albatati

Pembacaan terhadap kota tua hari ini sangat dikaitkan dengan sarat dan kayanya potensi sejarah terutama dengan meningkatnya minat pemerintah beserta warganya akan tema heritage sebagai tujuan wisata berbalut eksotisme. Bagaimana sebenarnya kawasan-kawasan ini bertahan dalam tantangan zaman dengan tetap berusaha menjadi semodern mungkin, baik wilayah ataupun masyarakat di dalamnya? Lalu saya melihat rumah saya sendiri, Kampung Arab Surabaya. Kawasan ini sejak lama telah dilihat sebagai contoh destinasi wisata kota tua yang sempurna: diorama raksasa lengkap dengan masyarakat asli dan kebudayaan pekat yang tak lekang oleh waktu. Seingat saya, ketika masih berada di bangku Sekolah Menengah Pertama, kawasan ini dicanangkan sebagai destinasi religi akibat dari adanya Masjid Sunan Ampel beserta segala aksesoris pendukungnya berkumpul di sana.

Dewasa ini kondisinya berubah menjadi tujuan wisata bagi konsumen yang kian beragam, baik turis tingkat lokal hingga internasional atau bahkan mereka yang memiliki dana terbatas, seakan tak berhenti menggali kekaguman dan mencicip budaya yang selama ini hanya bisa mereka nikmati dalam cerita dimedia. Namun yang paling sering kita lewatkan adalah kampung Arab Surabaya juga berubah mengikuti zaman. Hal ini bisa dilihat munculnya sektor ekonomi dan sosial yang sangat terasa kebaruannya. Sebut saja beberapa cafe modern yang memunculkan kebiasaan baru dikalangan masyarakat, terutama anak-anak mudanya dalam berkumpul. Termasuk mulai terlihatnya penghancuran dan

pembangunan kembali rumah-rumah dalam bentuk dan rasa yang lebih modern. Masyarakat juga mulai memiliki ketertarikan, baik sebagai hobi atau profesi terhadap beberapa sektor baru seperti fotografi, wedding organizer, dan beberapa lainnya. Maka dirasa diperlukan pembacaan kembali atas tantangan yang dihadapi kampung Arab Surabaya hari ini dan bagaimana menerjemahkan keinginan masyarakat dalam dan luar terhadap kawasan ini, tidak hanya ketertarikan atas eksotisme masjid kuno atau nikmatnya kopi rempah di kala sore.

Terlahir Tua

Bayangkan, seorang kakek berusia jelang 100 tahun yang sebelumnya tinggal sendirian dalam rumah sempitnya dan berkutat dengan benda-benda yang sudah dimilikinya entah mulai kapan, melakukan hal-hal yang telah dipelajarinya sejak kelahirannya, tiba-tiba saja suatu hari dihadapkan pada kenyataan bahwa di luar rumahnya, dunia berkembang dengan pesat. Teman-teman lamanya telah digantikan anak-anak muda yang haus akan kebaruan dan modernitas. Tak cukup sampai disana, sang anak-anak modern ini tumbuh menguat dan kini kian acap mengetuk pintu rumah sang kakek, mengintip dari balik jendela atau bahkan mencari cara untuk masuk ke rumahnya. Mereka merayu sang kakek dengan benda-benda berkilau yang belum pernah dilihatnya, mencicip buah yang belum pernah dikecapnya. Sang kakek sangat suka dengan semuanya hingga lupa bahwa perlu juga menjadi toleran namun teredukasi untuk menerima hal-hal baru dari luar. Sang kakek yang awalnya digambarkan sebagai sosok seram dan tidak bersahabat akhirnya melunak. Kini sang kakek dan anak-anak zaman itu hidup bersama dalam rumah sempitnya dan lambat laun terbiasa dengan pola hidup anak-anak muda tadi tanpa sadar bahwa kebijaksanaan yang selama ini dimilikinya bergeser perlahan.

Sekarang bayangkan ini: sang kakek adalah kampung Arab Surabaya, dan anak-anak modern itu adalah kota Surabaya dengan segala perkembangan dan kemajuannya yang kian pesat. Kampung Arab Surabaya bisa dikatakan lahir dari rahim Masjid Ampel bentukan Raden Rachmad atau Sunan Ampel, salah satu dari sembilan tokoh utama penyebar Islam di pulau Jawa. Sunan Ampel mendirikan Masjid Ampel sekitar abad 15 di tanah pemberian Majapahit kala itu setelah Raden Rachmad menikahi putrinya. Masjid Ampel pada perkembangannya menjadi pusat pendidikan agama dengan para santrinya berasal dari beragam asal dan latar belakang, utusan kerajaan hingga rakyat jelata. Guna menunjang kehidupan, mereka mendirikan pemukiman di sekitar Masjid dan juga termasuk jaringan sosial dan ekonomi yang akhirnya membentuk pasar tradisional Ampel Suci sebagai salah satu pasar rakyat tertua di Jawa Timur dengan komoditas perdagangan yang tentu saja tidak lepas dari kaitannya dengan Masjid Ampel sebagai simbol religi. Meski pedagang Arab dari Hadhramaut (Yaman Selatan) telah diketahui berada dan menetap di Nusantara sebelum abad ke-10, namun baru abad ke 15 penyebaran mereka juga membawa misi keagamaan hingga ke pulau Jawa sebagai pulau terakhir yang terjamah.

Abad ke-16, para pendatang Arab dengan misi ekonomi dan penyebaran agama mulai masuk ke wilayah Jawa Timur melalui jalur darat dari Jawa Barat. Kala itu kondisi di Batavia tengah kacau akibat pertikaian ekonomi sehingga para pedagang ini banyak yang menyelamatkan bisnisnya dengan berpindah tempat. Sebagian berpindah menuju Singapura yang kala itu dilihat sebagai daratan baru, sedang sisanya bergerak ke Surabaya dan Gresik. Sudah menjadi kebiasaan bagi pendatang Arab untuk membangun atau menemukan masjid ketika memasuki suatu wilayah baru. Bagi mereka, masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat peribadatan namun lebih jauh berfungsi pula sebagai pusat sosial dan ekonomi karena disana masyarakat berkumpul dan berinteraksi. Maka begitu pula yang terjadi ketika mereka memasuki Surabaya untuk

pertamakali, koloni ini memilih kawasan Ampel sebagai tempat menyambung kehidupan. Ditambah nama Masjid Ampel yang sudah tersohor dan ekosistem perdagangan sudah terbentuk oleh para santri Ampel.

Seabad berikutnya kolonial Belanda mulai masuk ke wilayah ini dan menetapkan aturan, termasuk juga aturan mengenai wilayah (*wijkenstelsel*) yang dibagi berdasarkan golongan ras: Golongan Eropa, golongan Asia Jauh (Arab, Cina, India), dan Bumiputera (pribumi). Peraturan tersebut mempersulit gerak para pedagang Arab ini untuk berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas di luar kawasan Ampel. Bisa dipastikan yang berikutnya terjadi adalah mereka mulai membentuk kota satelit, sebuah konsep kota mandiri yang menunjang fasilitas kehidupan masyarakat di dalamnnya, mulai perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Faktor tersebut secara kuat mengakibatkan melemahnya hubungan kawasan ini dengan wilayah di luarnya, sebuah penyebab besar atas terbentuknya "teori pembekuan" yang akan dibahas pada uraian berikutnya.

Uang, Uang, dan Uang

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa salah satu tujuan utama atas masuknya pendatang Arab di masa lalu adalah untuk memenuhi kebutuhan akan ekspansi perekonomian yang sebelumnya mereka dapatkan dari ekosistem di pelabuhan-pelabuhan negara asal mereka sebagai jembatan dengan dunia luar, baik sebagai jalur transportasi atau komoditas perdagangan itu sendiri. Kondisi geografis Hadhramaut yang kurang bersahabat ditambah sulit dan lamanya perjalanan ke daratan-daratan baru telah memupuk mental mereka menjadi pekerja keras dan pemikir dengan semangat bertahan hidup ditemani minimnya persediaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hingga hari inipun, meski mereka bukan lagi pendatang yang hanya bertujuan dagang namun orientasi mereka terhadap perekonomian masih terlihat cukup bergairah dan bahkan menjadi satir di antara

obrolan mereka sehari-hari. Jiwa dagang tersebut sayangnya tidak diimbangi dengan referensi secara mapan dalam bidang bisnis yang mereka geluti ini dan relatif tidak mengalami perkembangan secara berarti sehingga ketika jumlah bisnis secara kuantitas berkembang, persaingan terjadi cukup ketat.

Dalam sebuah survei yang dibuat pada tahun 2014 mengenai perbandingan usia di kawasan seluas kurang lebih 64 ha itu ditemukan bahwa angka usia tertinggi adalah usia produktif 26-43 tahun yang sebenarnya sangat memungkinkan untuk membuat perkembangan sektor bisnis menjadi cepat karena usia produktif memiliki kecenderungan menemukan kebaruan. Sayangnya dari angka itu juga ditemukan bahwa rata-rata dari usia produktif tersebut mayoritas hanya menjangkau tingkat pendidikan SLTA/SMA yang berdampak pada minimnya referensi mengenai informasi dan pergaulan luas dan berpengaruh besar dalam kemampuan mengelola informasi dan referensi kebaruan. Masalah lain adalah kian banyaknya penjualan properti pribadi untuk kebutuhan toko, bank, atau hotel yang dikelola pihak luar sehingga mengikis lahan bagi warga lokal untuk mengelola kepentingan ekonomi mereka terkait bisnis yang sudah umum atau sudah ada sebelumnya. Mulai hilangnya kenyamanan sebagai daerah tempat tinggal hingga tingginya penawaran pembelian menjadi alasan-alasan dibalik penjualan tersebut dan membuat kawasan kampung Arab Surabaya perlahan menjadi distrik ekonomi, menggeser fungsi lainnya sebagai wilayah bersosialisasi.

Menemukan Lintas Kehilangan: Sebuah Krisis Identitas

Dapat dipahami bahwa masyarakat Arab adalah salah satu masyarakat pemegang konsep *ius soli*, dimana tanah kelahirannya adalah tanah air, tanah perjuangannya. Hal ini muncul dari tradisi pendatang Arab yang ketika meninggalkan tanah air aslinya, mereka meninggalkan istri dan wanita sehingga ketika tiba di tanah baru

cenderung melakukan pernikahan dengan wanita pribumi dan kemudian menghasilkan generasi peranakan sebagai pengemban tugas besar dalam perjalanan pencarian dan memetakan kembali identitas mereka: Apakah Arab ataukah Indonesia? Ataukah keduanya? Generasi peranakan atau dikenal sebagai *muwallad* ini berada dalam himpitan dilema teramat besar, baik dari generasi sebelumnya yang lebih menekankan pada orientasi tanah nenek moyang mereka sedang di sisi lain juga tidak secara mudah diterima oleh penduduk asli yang tetap mencurigai mereka sebagai orang luar dengan misi terselubung.

Puncak dari polemik ini adalah dengan dicetuskannya Sumpah Pemuda Keturunan Arab di Semarang pada tahun 1934 hasil inisiasi tokoh-tokoh peranakan Arab asal Surabaya yang merasa pemikirannya tidak diterima di kota asalnya. Tentu fenomena ini menjadi menggemparkan karena Sumpah Pemuda Keturunan Arab tidak hanya dibaca sebagai pernyataan atas dukungan mereka terhadap terbentuknya negara Indonesia berdaulat tapi juga penemuan atas identitas *blasteran* mereka. Aksi lebih jauh mereka lakukan dengan membentuk Partai Arab Indonesia (PAI) sebagai badan resmi yang turut menggerakkan roda perpolitikan Nusantara. Jika Sarekat Dagang Islam (SDI) adalah perjuangan para pendatang Arab lewat ekonomi maka PAI adalah tonggak sejarah pergerakan oleh golongan peranakan Arab melalui jalur politik. Ketika Indonesia akhirnya mencapai kemerdekan di tahun 1945, PAI membubarkan diri dan membaur dengan partai-partai Nasional sebagai pernyataan bahwa misi mereka telah selesai dengan tercapainya Indonesia sebagai negara merdeka.

Pembauran tersebut akhirnya menuntut peranan peranakan Arab ini tidak lagi dipandang sebagai pergerakan berdasar golongan ras, namun telah secara resmi menjadi bagian dari perjuangan nasional yang sayangnya tidak banyak tercatat dalam sejarah nasional. Perlu diketahui bahwa masyarakat Arab lebih

familiar dalam menerapkan Islam melalui manifestasi keaksian, bukan simbolik. Salah satunya adalah mereka sangat menghindari sikap *riya'* (memamerkan kebaikan) sehingga sikap nasionalisme semacam itu dianggap sebagai kewajiban dan bukan sesuatu yang perlu dipamerkan atau diceritakan. Sebuah "amalan" yang akhirnya malah membuat pencatatan terhadap perjuangan mereka di masa lampau mengalami kesulitan. Masyarakat Arab juga dikenal sebagai penyampai pesan secara oral, dibanding masyarakat Tionghoa yang memiliki tradisi pencatatan. Informasi yang diwariskan secara turun temurun juga mengalami perubahan tergantung pada siapa yang berbicara.

Hasilnya adalah kesadaran nasionalisme kelompok keturunan Arab di Indonesia bisa dikatakan kurang sehingga melemahkan kesadaran beridentitas mereka. Dan lagi, hal ini lebih jauh menyebabkan kepekaan mereka atas kontribusi kenegaraan dan keterbukaan atau toleransi masih dianggap kurang penting dibandingkan pemenuhan sektor ekonomi. Lalu apa kaitan antara identitas nasionalisme dan isu perubahan wajah kampung Arab Surabaya hari ini? Dianggap tidak ada pengaruh secara langsung, tingkat pemahaman mengenai identitas tentu menjadi tolok ukur atas konsep *sense of belonging* dan penghargaan terhadap lingkungan lokal sebagai tempat berkembang dan beraktifitas yang juga mempengaruhi image terhadap kelompok di luar kelompoknya, berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sama.

Jejak-Jejak Keselamatan

Irisan besar antara Arab dan Islam telah menempatkan kedua entitas ini begitu lekat hampir di bagian dunia manapun. penyebab paling umum adalah karena tempat lahir dan berkembangnya Islam di daratan Arabia (Arab Saudi, Yaman, dan hingga sebagian Afrika) membawa pengaruh dan perubahan besar bagi tatanan

pemikiran masyarakat disana. Pengaruh tersebut tentu saja menjadi salah satu komoditas yang turut dibawa ketika mereka meninggalkan negaranya dan memulai perjalanan yang awalnya hanya bermisi ekonomi hingga akhirnya juga bermisi keagamaan. Semangat Islam yang diambil dari kata *salaam* (keselamatan) telah memberikan pengaruh besar dalam merubah budaya asli di Indonesia, tentunya dengan pendekatan yang berbeda-beda. Pada masa kesunanan, kebudayaan dan kesenian menjadi senjata utama dalam menyebarkan Islam dengan efisien. Adapula faktor luar yang membuat Islam akhirnya dapat diterima dengan cepat, yakni adanya perpecahan dalam jaringan kerajaan Hindu yang membutuhkan branding dan identitas baru. Atas kemunculannya di saat yang tepat maka Islam dipilih sebagai wajah baru kerajaan-kerajaan ini.

Di kampung Arab Surabaya sendiri perkembangan Islam juga mengalami dinamika yang cukup menarik karena strategi pergerakan Islam mengalami perubahan bentuk berdasarkan era. Setelah masa Sunan Ampel dengan pendekatan kebudayaannya, masuknya pedagang Arab menyuntikkan budaya asli dan bawaan mereka ke dalam budaya lokal sehingga menghadirkan akulturasi. Pengaruh pan-Islam di awal abad ke-20 berikutnya menjadi dasar masuknya Islam ke dalam ranah perjuangan dan pergerakan politik Nasional keturunan Arab di seluruh Indonesia. Namun hari ini gagasan perspektif masyarakat keturunan Arab di Indonesia terhadap Islam dapat ditarik ke tahun 1990an, yakni ketika gesekan politik-religi antara Arab Saudi dan Iran mencapai puncaknya. Ada masanya ketika kedua kubu ini menemukan musuh bersama yang mau tidak mau menyatukan keduanya, yakni ketika masa pan-Islam dengan mengusung kampanye perlawanan Islam terhadap penjajahan kolonialisme Barat.

Sama seperti dalam sejarah lainnya, ketika misi bersama oleh dua kubu telah tercapai akhirnya malah menjadikan keduanya musuh satu sama lain. Hingga hari ini konflik tersebut masih memakan porsi

yang cukup besar dalam obrolan santai hingga ceramah-ceramah keagamaan sehingga menjadi semacam pengalihan isu terhadap persoalan sosial dan pendidikan yang lebih dekat dan mampu diraih. Dengan adanya masjid dan makam Sunan Ampel, sumur, serta pasar religi, maka sekitar awal tahun 2000 Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan kampung Arab Surabaya sebagai kawasan wisata religi yang bernilai menjadi salah satu komponen penting dari rangkaian tur Sunan di Pulau Jawa. Tanggungjawab atas citra sebagai Arab dan Muslim taat ini akhirnya menjadi beban moral tersendiri karena tidak diimbangi dengan pemahaman yang baik atas Islam secara duniawi dan kontemporer sehingga memunculkan dualisme dalam sudut pandang masyarakatnya.

Kematian Tetangga Sang Koloni Terakhir

Pasca upaya-upaya penghapusan komunisme di Indonesia, dampaknya bahkan bisa dirasakan terhadap kawasan Pecinan Surabaya di sepanjang jalan Kapasan dan Kembang Jepun yang mulai bergeser fungsinya. Rumah-rumah komunitas Tionghoa mulai ditinggalkan dan berubah menjadi toko, bank, dan bangunan-bangunan ekonomis lainnya. Hari ini dapat ditemui kawasan tersebut telah mati aktifitas di atas jam kantor. Pola yang sama mulai ditemui dan lazim terjadi di Kampung Arab di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur. Pembelian rumah-rumah dan aset properti untuk kebutuhan ekonomi saat ini kian diminati, sedang pemukiman penduduk bergeser masuk ke dalam kampung di Ampel dan Kalimas. Pola yang sama akan mengakibatkan kedepannya kampung Arab Surabaya akan mati selayaknya tetangganya Pecinan di Kembang Jepun dan Kapasan.

Kampung Arab Surabaya sebagai wilayah berdasarkan kelompok keturunan asing, kampung Arab bisa dikatakan sebagai satu-satunya yang masih dihuni oleh penduduk aslinya dan masih pula berkebudayaan dan berperilaku dasar selayaknya ratusan tahun

BANK BRI

silam dengan sedikit referensi dan informasi mengenai modernitas dan pengembangan sumber daya manusia terbarui. Pola pikir perdagangan sangat kuat menancap hingga masyarakat ini melihat wilayahnya sebagai pasar raksasa, bukan lagi wilayah tempat tinggal dan wadah bersosialisasi. Ekspresi diri mereka adalah menjual, dengan tujuan finansial sebagai jiwanya. Begitu juga dengan perspektif terhadap dunia di luar mereka yang cenderung diabaikan dan tidak terlalu dianggap penting karena dirasa tidak memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan mereka. Jika diperhatikan secara wajah wilayahnya, kampung Arab Surabaya tetap memertahankan rumah-rumah bercorak Eropa, Cina, Melayu, dan bahkan Hindu Jawa seperti yang bisa dilihat pada Masjid Ampel sendiri sebagai salah satu monumen penting yang pertama-tama dibangun di wilayah ini.

Memang para pendatang Arab tidak memberikan kontribusi pengaruh yang besar terhadap arsitektur, namun orang-orang ini memiliki semacam Feng Shui yang diadaptasi dari aturan-aturan dalam *al-Qur'an* dan *al Hadits*, memberikan pengaruh besar terhadap tatanan ruang dalam sebuah gedung, seperti pembagian wilayah privasi dan publik, ruang antara pria dan wanita, hingga letak kamar mandi. Belum lagi pembahasan mengenai dunia kuliner yang tidak kalah menariknya sebagai pemancing kedatangan wisatawan. Kesemuanya ini telah membentuk kawasan kampung Arab Surabaya begitu seksi dan eksotisnya sebagai komoditas pariwisata kota yang mampu membuat turis datang berbondong. Di saat kekhawatiran ini mulai terjadi, justru nafas dari kawasan tua ini tetap bertahan dengan "bantuan" dari pihak-pihak ketiga yang sering dikonotasikan negatif. Adanya kesempatan terhadap bisnis pendukung akhirnya melahirkan celah-celah ekonomi yang dikelola oleh pelaku di luar komunitas lokal, membentuk kelompok pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan KH Mas Mansyur. Ironisnya, jika di masa lalu kehadiran PKL ini dikatakan menumpang eksistensi toko-toko yang ada, maka kondisi hari ini menunjukkan justru keberadaan

PKL ini menjadi kekuatan utama ekonomi yang menghidupkan suasana di kawasan ini. Kompleksitas tersebut membuat upaya-upaya pendekatan pemerintah terhadap kawasan ini menjadi agak terhambat dan mengalami dilema dengan hadir dan menguatnya PKL sebagai pihak ketiga dari rencana tersebut.

Seperti halnya di wilayah manapun, kemunculan PKL selalu dibaca sebagai kesempatan dalam memanfaatkan ruang kosong, dimana hal ini selalu berusaha dihapuskan dengan diciptakannya sentra yang dikhususkan bagi para pedagang ini. Dan seperti halnya di wilayah-wilayah itu, upaya ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan karena kurangnya sosialisasi atau pendekatan yang *mumpuni* secara waktu dan publikasi. Alhasil solusi itu malah menambah masalah lainnya, yakni munculnya bangunan kosong karena diacuhkan perdagangan yang berusaha disentralkan itu, dimana mereka kembali menempati ruang-ruang kosong "kesempatan" mereka sebelumnya.

Dilema Taman Safari

Tahun 2016 Surabaya dinobatkan sebagai *sustainable city,* kota layak huni yang dipilih oleh PBB dengan program tahunannya UN Habitat yang diikuti sekitar 5000 peserta dari sekitar 50 negara. UN Habitat menawarkan program-program terkait urbanisme termasuk pengenalan dan tur dalam kampung-kampung yang digelar selama sekitar satu minggu di beberapa kampung terpilih dan ditata sedemikian rupa hingga siap menerima tamu-tamu tersebut. Penganugerahan ini dipandang sebagai kemenangan besar atas jerih upaya pembangunan kota Surabaya, terutama walikotanya, Risma Triharini yang sejak awal memiliki misi besar dalam menggalakkan Surabaya sebagai kota pariwisata. Melihat potensi dan sejarah Surabaya yang memang dimaksudkan sebagai kota perdagangan dan sedikitnya memiliki potensi alam maka jawaban dari keinginan tersebut adalah mengangkat kearifan masyarakat dan

segala aspeknya, termasuk wilayah dan wajahnya, atau singkatnya kehidupan urban Surabaya.

Kampung-kampung di Surabaya yang jumlahnya ratusan dengan karakter masing-masing telah menawarkan potensi wisata teramat besar dan menarik sebagai alternatif yang juga bersifat edukatif. Dengan durasi program kerja yang tidak terlalu lama ketika eksperimen wisata terhadap kampung ini mulai dijalankan, muncul satu pertanyaan besar mengingat peraturan hukum oleh pemerintah yang mengaitkan isu heritage dengan segala sesuatu yang bersifat terlihat (*tangible*). Dimana agenda mendiskusikan kembali sumber daya manusia di kampung-kampung dalam tataran pemikiran dan edukasi tersebut sudah cukup mapan dan bijaksana dalam mengelola perubahan yang datangnya sedemikian cepat dan bahkan tak jarang mengusik kebiasaan yang telah berjalan ratusan tahun, terasa penting.

Pertanyaan yang sama juga muncul dalam kaitannya dengan upaya menjadikan kawasan Kampung Arab Surabaya sebagai kawasan wisata heritage, melihat kawasan ini sebelumnya terkesan eksklusif dan lugas dengan segala atribut budaya dan kebiasaan mereka lalu tiba-tiba saja muncul gejala-gejala kebaruan di tiap sudut toko dan ruang tamu rumah mereka. Tentunya pemikiran ini sifatnya masih berupa teori atau ramalan mengingat belum adanya perubahan signifikan yang terjadi hari ini. Namun kita bisa belajar dari dampak di beberapa kota lainnya yang sebelumnya telah lebih dulu menyerap kebaruan-kebaruan tanpa mengetahui dan mampu mengelola hal tersebut dengan bijak. Eksploitasi besar-besaran, baik oleh pihak luar dan terlebih oleh pihak dari dalam, harga komoditas perdagangan menjadi tidak lazim dan terjadi persaingan bisnis yang kurang sehat. Hingga tergesernya budaya asli oleh kebiasan-kebiasaan baru yang belum tentu cocok dan dibutuhkan wilayah maupun masyarakat tersebut. Di sisi lain banyak pihak yang mengharapkan kawasan ini tetap “terbekukan” dengan

segala keindahan dan kecantikan visualnya khas romantisme masa silam. Kurangnya kesadaran-jika tidak bisa disebut sebagai ketidakpeduliaan-atas dampak jangka panjang dari pola pikir dan pemikiran semacam ini akan merubah kawasan tersebut menjadi Taman Safari. Sebuah diorama raksasa bagi wisata budaya dengan pemandangan aslinya, baik dari segi bangunan hingga aktifitas penduduknya tanpa diimbangi penyerapan informasi dan pengelolaan pengetahuan bagi warganya.

Maka persoalan mengenai sumber daya manusia cukup memiliki urgensi dilihat dari dampaknya terhadap arah perkembangan kawasan kampung Arab Surabaya hari ini dan kedepannya. Jika pola yang terjadi saat ini tidak mampu dirubah maka dapat dibayangkan bahwa di masa depan kawasan ini akan dimiliki dan dikelola oleh pihak luar yang tidak segan untuk merubah aset-aset yang ada sesuai dengan keinginan mereka. Lalu bagaimana dengan masyarakatnya? Entah mereka akan tergeser posisinya atau bahkan terusir dari rumahnya sendiri, dan yang lebih buruk adalah mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika hari itu datang. Hari berubahnya wajah dan nilai dari kampung Arab Surabaya. Kawasan kampung Arab Surabaya dengan segala latar belakang sejarah dan budayanya telah menawarkan alternatif baru bagi gairah pariwisata dan aspek-aspek kebaruan dalam masyarakatnya yang masih dianggap belum bijak mengelola informasi dan modernitas yang kini kian cepat bergerak di sekitar mereka. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, yang pertama yakni dampak sejarah sebagai kawasan lokalisasi bentukan pemerintahan kolonial yang menghasilkan tatanan wilayah kota satelit nan mandiri sehingga memampetkan komunikasi dengan dunia luar. Faktor kedua yakni pertanyaan mengenai identitas Arab hari ini yang semakin ditantang oleh zaman, dimana di masa lalu cukup pekat menjadi perdebatan dan membawa dilema terhadap sudut pandang mengenai pentingnya identitas dalam skala pribadi, wilayah lokal, hingga pemikiran perihal dunia luas dan dinamikanya.

Faktor lainnya yang juga penting terkait dengan pemaknaan, pemahaman, dan penerapan Islam sebagai identitas yang memberikan pengaruh kuat dalam pembentukan budaya di kawasan kampung Arab Surabaya, yang di satu sisi diamini sebagai pemersatu perbedaan namun di sisi lain dinilai sebagai pembatasan terhadap nilai-nilai baru, sehingga terjadi dualisme bersikap masyarakatnya dalam menentukan nilai berdasarkan aturan agama dengan keinginan akan modernitas itu sendiri. Semua faktor di atas dalam perjalanannya dikhawatirkan menjadi isu sosial yang saat ini masih belum dirasakan terjadi secara intens, namun terasa semakin kuat dengan adanya keinginan-keinginan yang saling beradu antara kelompok pembaharu dengan kebutuhan akan perubahan dan kebaruan, berbenturan dengan kelompok yang melihat kawasan ini sebagai kawasan heritage yang seharusnya dipertahankan seperti demikian adanya. Dari kesemuanya, yang paling penting adalah tingkat pengetahuan manusianya dalam menemukan kesadaran dan kebijakan mengolah kebaruan sehingga di masa depan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ditawarkan zaman.

EKSKLUSI DAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
STUDI KASUS ANCAMAN PENGGUSURAN WARGA KAMPUNG KEBUN SAYUR, CIRACAS

Devy Dhian Cahyati

Pembangunan Indonesia memusatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan sejak masa orde baru. Jakarta sebagai pusat pembangunan menjadi tujuan arus urbanisasi dari kota-kota kecil di sekelilingnya maupun dari kota-kota di luar pulau. Dorongan utama bermigrasi dari desa ke kota adalah untuk memperoleh penghasilan yang lebih baik.[1] Desa dengan pertaniannya dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan, sementara kota dengan industrialisasi yang semakin berkembang dianggap mampu memberikan penghasilan dalam jumlah banyak. Asumsi demikiannya yang mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar, khususnya Jakarta. Pertumbuhan kota yang semakin pesat membutuhkan ruang-ruang baru. Ruang-ruang kosong berubah menjadi gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, dan pemukiman. Kondisi demikian menyebabkan ketersediaan tanah kosong semakin sedikit, sementara industrialisasi semakin tidak terkendali. Demi mendapatkan ruang baru untuk pembangunan, salah satu caranya yaitu dengan menggusur orang-orang yang dianggap sebagai pemukim liar yang menempati kawasan tanpa kepemilikan atas tanah tersebut.

Kampung Kebun Sayur, wilayah seluas 7,5 hektar di Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, menjadi potret penggusuran atas nama pembangunan ibukota. Warga yang tinggal di wilayah ini dianggap

---

[1] Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota.* Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM. Hlm. 7

sebagai pemukim liar sehingga layak untuk digusur. Tulisan ini akan memaparkan mengenai eksklusi yang dialami oleh warga ketika mereka mendapatkan ancaman penggusuran. Lebih jauh, tulisan ini akan membahas perjuangan warga dalam menghadapi penggusuran hingga sampai saat ini tetap dapat mempertahankan kampung Kebun Sayur. Persoalan eksklusi bukanlah hal baru dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Eksklusi banyak dikonotasikan sebagai ketidaksamarataan *(inequality)* dan marginalisasi. Istilah ini muncul pada tahun 1974 oleh Rene Lenoir yang berasal dari Perancis. Eksklusi sosial mengacu pada situasi kerugian berlipat dalam marginalisasi pasar tenaga kerja, kemiskinan dan isolasi sosial. Ada dua definisi dari eksklusi sosial.[2] Pertama, definisi yang relatif sempit yaitu terkait dengan kemiskinan dimana kekurangan sumber daya material. Kedua, ada definisi eksklusi sosial yang lebih luas yang meliputi kemiskinan, nasionalisme, etinisitas, umur, jenis kelamin, dan disabilitas yang dapat mengarah pada eksklusi sosial. Menurut Gordon, ada empat dimensi eksklusi yaitu eksklusi dari pendapatan dan sumber daya, eksklusi dari pasar tenaga kerja, eksklusi pelayanan dan eksklusi dari hubungan sosial. Lebih luas, Marshal Wolfe menjabarkan enam dimensi eksklusi yaitu eksklusi dari pendapatan *livelihood*, pelayanan sosial, kesejahteraan dan jaringan keamanan, eksklusi dari budaya konsumen, eksklusi dari pilihan politik, eksklusi dari basis organisasi populer dan solidaritas, serta ekslusi dari pengetahuan mengenai yang terjadi di masyarakat dan dirinya. Eksklusi kota sendiri memiliki banyak aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan spasial.

Ada 3 paradigma mengenai eksklusi yang tumbuh di negara-negara maju.[3] Pertama yaitu paradigma solidaritas yang berakar dari pemikiran Perancis. Paradigma ini melihat eksklusi sebagai

[2] Michal Nowosielski. Challenging Urban Exclusion? Theory and Practice. Polish Sociological Review, No. 179 (2012), pp. 369-383. Hlm 370

[3] Silver dalam A.S. Bhalla and Frederic Lapeyre. 2004. Poverty and Exclusion in a Global World. New York: Palgrave Macmillan. Hlm. 8

berkurangnya hubungan sosial antara individu dan masyarakat, putusnya ikatan solidaritas, sehingga eksklusi sosial dilihat sebagai kegagalan negara dalam menjaga kohesi sosial. Paradigma solidaritas lebih berfokus pada eksklusi yang melekat pada solidaritas bangsa, ras, etnisitas, lokalitas dan budaya lain atau ikatan primordial yang tidak membatasi batasan-batasan kelompok yang ada. Kedua, paradigma spesialisasi yang merupakan hasil dari pemikiran liberal Amerika Serikat. Eksklusi dipertimbangkan sebagai akibat dari spesialisasi berupa: diferensiasi sosial, pembagian kerja secara ekonomi, dan pemisahan ruang lingkup/lapisan. Basis dari paradigma ini adalah kebebasan individu dalam melakukan pertukaran dengan individu lain. Sehingga eksklusi bukan dilihat sebagai dominasi maupun eksploitasi, tetapi lebih dilihat sebagai hasil dari pertukaran kontrak antara individu yang bebas. Paradigma spesialisasi melindungi kebebasan selama individu yang tereksklusi mempunyai hak-hak untuk bergerak melampaui batasan yang ada. Peran negara disini yaitu sebatas melindungi hak-hak individu dan kelompok seperti melindungi dari diskriminasi dan menolong individu merealisasikan potensi mereka dan berkonsentrasi pada sumberdaya terbatas untuk orang yang benar-benar memerlukan.

Ketiga yaitu paradigma monopoli yang berasal dari pemikiran kiri Eropa Barat. Eksklusi dilihat sebagai upaya beberapa kelompok (disebut *insider)* yang mengendalikan atau memonopoli sumber daya untuk keuntungan mereka sendiri. Berpijak pada teori Weber mengenai “sosial closure”, *closure* dimaksudkan sebagai eksklusi dimana ada upaya menghalangi akses seseorang untuk mendapatkan peluang sosial dan ekonomi. Monopoli terjadi ketika adanya dominasi dan ketidaksetaraan kekuasaan. Tilly sendiri menggambarkan eksklusi dalam istilah eksploitasi dan *opportunity hoarding.* Eksploitasi terjadi ketika sumber daya dimonopoli oleh beberapa kelompok dan mengeksklusi orang lain. Ada perbedaan antara eksplotasi dan *opportunity hoarding*. Pertama, pengeksploitasi adalah elit yang memiliki kekuasaan sementara *hoarders* tidak

memiliki. Kedua, pengeksploitasi membutuhkan beberapa kelompok untuk mengeksploitasi, sementara *hoarders* melakukan eksklusi berbasis etnis dan pertemanan. Rodgers menguraikan enam bidang kehidupan dari mana individu-individu atau suatu kelompok tereksklusi.[4] Pertama, eksklusi dari Barang dan Jasa. Kedua, eksklusi dari Pasar Kerja yaitu terkait dengan meningkatnya kekerasan dan rasa tidak aman, dengan munculnya berbagai upaya memperoleh penghasilan yang minim, serta munculnya gejala anomie dan perasaan tidak berdaya pada individu. Ketiga, eksklusi dari Lahan. Keempat, eksklusi dari rasa aman yang terkait dengan keamanan secara fisik, dalam arti keselamatan, atau kebebasan dari risiko terkena kekerasan fisik, serta kebebasan dari ketidakamanan lingkungan, keamanan yang berkaitan dengan penghidupan. risiko kehilangan tanah atau pekerjaan, serta kesulitan untuk menemukan sumber penghasilan yang lain. Kelima, eksklusi dari Hak Asasi. Dan keenam adalah eksklusi dari Strategi Pembangunan Ekonomi.

Derek Hall, Philip Hirsch dan Tania Murray Li dalam bukunya *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia* menghubungnya eksklusi dengan konsep akses.[5] Hall, dkk, berpijak pada teori akses yang dikemukakan oleh Ribot dan Peluso yaitu memaknai akses bukan sebagai hak, tetapi lebih pada kemampuan seseorang mendapatkan manfaat dari sesuatu.[6] Eksklusi dipahami ketika seserang dicegah untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yaitu tanah. Mengacu pada Hall, dkk dan paradigma monopoli, dapat dipahami bahwa eksklusi merupakan bentuk pencekalan akses seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu karena adanya dominasi dari suatu kelompok. Berdasarkan penelitiannya di desa wilayah Asia Tenggara, Hall, dkk melihat eksklusi tanah dapat dipahami sebagai

[4] Dalam Rusydi Syahra. Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Edisi Khusus, tahun 2010. Hlm 15

[5] Hall, Derek, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* Singapura: NUS Press. Hlm.7.

[6] Ribot, Jesse C dan Nancy Lee Peluso. Theory of Access. Rural Sociology, Juni 2003;68.2; PA Research II Periodical. Hlm. 154

interaksi antara regulasi, kekuatan, pasar dan legitimasi.[7]

Eksklusi sebagai bentuk ketidakadilan yang berakar pada tiga dimensi sosial yaitu struktur ekonomi, budaya dan politik, mencoba menghalangi partisipasi sehingga menyebabkan kemiskinan.[8] Ketika seseorang dihalangi dalam mengakses tanah maka hak dasarnya ada yang tercerabut, seperti hak untuk mendapatkan pangan, hak pekerjaan, dan juga hak mendapatkan keadilan. Disini pula sumber penghidupan (*livelihood*) berupa aset alami dan asset fisik seseorang coba dihilangkan. Atas bentuk-bentuk eksklusi tanah yang merugikan, warga menggunakan strategi untuk meniadakan eksklusi.[9] Karl Polanyi menyebut bentuk-bentuk counter atas eksklusi yang terjadi sebagai gerakan perlawanan (*countermovements)* untuk perlindungan social.[10] Konsep countermovement Polanyi melihat bahwa meningkatnya agen politik bukan dari pembagian hubungan produksi, tetapi dari pengalaman berbeda dengan dislokasi pasar.

Gerakan perkotaan berkontribusi untuk perjuangan melawan eksklusi yang terjadi di kota. Gerakan sosial perkotaan yang dikategorikan ke dalam *new social movement* didefinisikan sebagai agen yang berfungsi melakukan perubahan sosial yang mempengaruhi kesadaran umum serta menentang proses dan hasil dari keputusan sosial politik.[11] Seiring dengan perkembangan kapitalisme di daerah perkotaan, menyebabkan banyak masyarakat yang menjadi termarginal karena adanya ketimpangan sosial dan

---

[7] *Ibid*, Hall, hlm. 15; Hall, Derek. *Land grabs, land control, and Southeast Asian Crop Booms.* The Journal of Peasant Studies Vol 38 No. 4, October 2011, 837-857.Hlm. 839.

[8] Fraser, Nancy. *Injustice at intersecting scales: on 'social exclusion' and the global poor*. European journal of social theory 2010 13:363-371. Sage publication. Hlm. 365.

[9] *Ibid*, hlm.369; Gray, Leslie and Michael Kevane. *Diminished Access, Diverted Exclusion: Women and Land Tenure in Sub- Saharan Afrika.* African Studies Review, Vol 42, No.2 (Sep., 1999). Hlm. 17

[10] *Ibid*, hall, hlm.22; Levien, Michael. *The Politics of Dipossession: Theorizing India's "Land Wars"*. Politic & Society 2013: 351 DOI: 10.1177/0032329213493751. Sage Publication. Hlm. 377

[11] David Judge et al., eds., *Theories of Urban Politics.* London: Sage Publication, 1995. hal 181

ekonomi. Kontradiksi kota memunculkan gerakan sosial untuk menambah konsumsi kolektif, kondisi kehidupan, mempertahankan budaya komunitas dan mewujudkan pemerintahan sendiri (otonomi).[12] Gerakan sosial perkotaan juga dapat terbentuk karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan masyarakat. Misalnya saja pembagian kerja yang tidak adil, dominasi pemilik modal, dan tindakan pemerintah kota yang cenderung merugikan masyarakat. Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan mengenai eksklusi dalam penggusuran yang seringkali terjadi di kota. Untuk mendapatkan data yang akurat dan efektif penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara, pengamatan dan terlibat langsung dalam aktivitas melawan penggusuran dalam periode tahun 2009 hingga 2010.

Kebun Sayur: Kampung di Tengah Gemerlap Ibukota

Kebun Sayur, Kelurahan Ciracas merupakan' sebuah kampung yang berada diantara hiruk pikuknya ibukota. Nama Kebun Sayur digunakan sebagai penanda bahwa kampung ini merupakan penghasil sayuran seperti bayam, kangkung, sawi dll, dan mampu memasok kebutuhan sayuran di Pasar Induk Jakarta. Kampung ini menjadi potret dari dampak sentralisasi pembangunan pada masa orde baru yang mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota besar. Sebelum dihuni oleh masyarakat, kampung seluas 5,6 hektar ini awalnya adalah tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar dan berupa rawa-rawa. Semakin padatnya Jakarta dan adanya kebutuhan akan tempat tinggal, mendorong masyarakat yang berasal dari Kerawang, Medan dan daerah lain menempati tanah kosong ini. Arus urbanisasi yang besar justru dikemudian hari memunculkan masalah di perkotaan. Keen Koonings dan Dirk Kruijt menyebut ada dua konsekuensi urbanisasi yaitu mematerialkan

[12] Joe Foweraker. 1995.*Theorizing Social Movement*. London:Pluto Press. Hal 25

pembangunan kota dan munculnya pola kemiskinan global, informalitas dan eksklusi.[13] Kebutuhan akan tempat tinggal mendorong beberapa orang berdatangan ke wilayah tersebut dan mengolah lahan hingga menjadi tanah pertanian yang subur. Pada tahun 2009, terhitung ada sekitar ±300 Kepala Keluarga dan 1200 jiwa yang menghuni kampung ini. Warga yang berasal dari berbagai macam daerah seperti Kerawang, Brebes, Madiun, Ambon membangun rumah sederhana yang terbuat dari bilik bambu dengan berlantai tanah.

Meskipun pembangunan terpusat di Jakarta sehingga menyediakan banyak lapangan pekerjaan, pada kenyataannya tidak mudah mendapatkan pekerjaan bagi setiap orang. . Bagi sebagian pendatang, tidak mudah bekerja di sektor formal karena terhampat jenjang pendidikan. Sehingga pilihan pekerjaan yang memungkinkan yaitu pekerjaan di sektor informal. Sebagaimana yang dialami oleh warga Kebun Sayur yang telah menghuni wilayah tersebut selama lima hingga 20 tahun. Sebagian besar warga hingga kini bekerja di sektor informal seperti bertani, beternak (kambing, ayam, bebek, ikan), menjadi sopir angkutan, membuat kasur dan keset, berdagang hingga mengumpulkan barang-barang bekas. Bekerja di sektor informal menjadi sumber penghidupan warga untuk dapat bertahan di ibukota dan juga untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kendati harus bekerja keras untuk bertahan hidup di Jakarta, warga dapat hidup dengan tenang. Namun, Kehidupan warga Kebun Sayur yang tenang telah terusik sejak pada bulan Juni 2009 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) mengklaim tanah yang selama ini mereka huni. Perum PPD berencana membangun pool bus sebagai ganti pool yang berada di Cawang. Alasan penjualan pool di Cawang karena PPD mengalami kerugian dan harus membayar gaji dan pesangon 2.300 karyawan PPD yang dikenai program *lay off*.

---

[13] Kees Koonings dan Dirk Kruijt. 2009. *Megacities: The Politics of Urban Exclusion and Violence in The Global South.* London: Zedbookk. Hlm 8

Penggusuran yang dilakukan oleh PPD dilakukan dengan menggunakan kekuatan regulasi pemerintah. PPD mengklaim tanah tersebut berdasarkan PP No.42 tahun 2003. Produk hukum yang dikeluarkan pemerintah ini telah memperkuat klaim PPD untuk mengeksklusi warga Kebun Sayur dari tanah yang telah dihuni selama puluhan tahun. Lebih dari itu, tanpa memiliki bukti kepemilikan tanah yang syah, PPD memasang plang bertuliskan "Tanah Milik Perum PPD: Dilarang mendirikan bangunan di lahan ini tanpa izin Perum PPD". PPD mengeluarkan Surat peringatan pertama dengan Nomor 10 /RTP/VI/2009. Dalam surat tersebut PPD memberi waktu kepada warga untuk meninggalkan tanah tersebut terhitung sejak 4 Juni sampai 10 Agustus 2009. Atas penggusuran yang dilakukan oleh PPD, warga mengirimkan surat pengaduan kepada Komnas HAM untuk menanyakan soal permintaan pengosongan tanah oleh PPD. Namun, Komnas HAM dengan nomor surat 2.390/K/PMT/VIII/2009 menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan asset PPD sejak tahun anggaran 1982/1983. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa institusi negara yang berkewajiban untuk memastikan penjaminan hak asasi warga negara, justru turut melegitimasi eksklusi yang sarat dengan terjadinya pelanggaran HAM.

Ancaman penggusuran tidak lantas membuat warga meninggalkan tanah yang menjadi sumber penghidupannya. Masih bertahannya warga di lahan tersebut membuat PPD mengeluarkan surat peringatan kedua dengan No:272/MU/IX/2009 pada tanggal 17 September 2009. Surat tersebut merupakan surat pemberitahuan ke II tentang batas waktu pengosongan lahan/tanah milik Perum PPD. Warga diminta meninggalkan lahan tersebut paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2009. Pelaksanaan eksekusi oleh PPD tidak jadi dilakukan karena pada saat itu PPD hanya mengirimkan perwakilan dari Polres. Pada tanggal 12 Oktober 2009 pihak PPD kembali mengeluarkan surat peringatan ketiga yang meminta masyarakat meninggalkan lahan tersebut dengan batas waktu 7x24 jam (sampai dengan tanggal 18 Oktober 2009). Sebelumnya, perwakilan

PPD datang dan mendesak warga untuk menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan lahan tersebut tanpa tuntutan ganti rugi apapun apabila lahan tersebut akan digunakan oleh Perum PPD. Kendati demikian, LBH Jakarta yang mendampingi warga Kebun Sayur menyatakan bahwa PPD telah menelantarkan dan tidak memelihara tanah tersebut lebih dari 25 tahun. Selain itu, PPD pun telah lalai dalam proses administrasi yaitu tidak membayar pajak selama 5 tahun sebesar 780 juta rupiah. Sedang warga yang menempati Kebun Sayur tidak memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat maupun girik dan hanya mempunyai bukti penguasaan fisik selama 20 tahun. Meskipun tidak ada bukti kepemilikan, secara administrasi warga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar iuaran RT, RW dan kelurahan.

Bentuk Ekslusi dalam Ancaman Penggusuran

Penggusuran Kampung Kebun Sayur tidak lain menjadi salah satu wujud dari eksklusi di perkotaan. Warga dibatasi untuk mengakses manfaat dari tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Mereka yang selama ini hidup dalam kemiskinan, mengalami ketidakadilan lain ketika diusir dari wilayah ini. Dengan adanya ancaman penggusuran oleh PPD ini, masyarakat Kebun Sayur mengalami mengalami eksklusi dalam berbagai macam bentuk. Pertama, eksklusi dari barang dan jasa. Untuk mengusir warga dari lahan tersebut, PPD mengambil langkah awal dengan meminta PLN Jakarta Timur melalui surat permohonan No.10/RTP/VI/2009 untuk memutuskan aliran listrik Kebun Sayur. Tetapi permintaan PPD tersebut tidak ditanggapi oleh PLN. Menurut penuturan dari warga, PLN tidak memutus aliran listrik di Kebun Sayur karena warga memasang listrik secara resmi. Jadi PLN disini berprinsip melayani konsumen dan tidak akan memutus aliran listrik selama mereka membayar tagihan listrik dengan lancar.

Selain dalam bentuk layanan listrik, masyarakat juga mengalami eksklusi dalam pelayanan administrasi. Warga Kebun Sayur tidak

dapat mengurus berkas administrasi dengan alasan lahan yang ditempati merupakan milik orang lain. Atas diskriminasi ini, warga melapor kepada Komnas HAM. Komnas HAM pun menyampaikan masalah ini kepada Walikota Jakarta Timur mengenai perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Rt.05 Kebun Sayur (Vide: Surat Komnas HAM Nomor 005/K/Mediasi/I/2011 tanggal 12 Januari 2011). Namun Walikota Jakarta Timur membalas surat Komnas HAM tersebut (Vide: Surat Nomor 381/-1.86 tanggal 31 Januari 2011, point 3) dengan mengatakan bahwa*:*

"(a) Masyarakat pemilik bangunan liar tersebut bermaksud untuk memiliki administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP), namun pihak Pemerintah Kelurahan Ciracas dan Kecamatan Ciracas tidak mengijinkan maksud tersebut, karena lokasi tempat tinggalnya tidak memiliki alas hak atas tanah yang ditempati. (b) Ketentuan lain yang tidak mengijinkan masyarakat tersebut mendapatkan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tidak boleh memiliki KTP lebih dari satu dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. (c) Untuk proses pembuatan KTP harus melalui tahapan berupa Surat pengantar dari RT, sementara masyarakat pemilik bangunan liar tersebut tidak memiliki RT".

Selain itu, warga juga melapor kepada Ombudsman Republik Indonesia pada 27 April 2011 atas tindakan diskriminatif Kelurahan Ciracas dan Walikota Jakarta Timur yang menolak memberikan pelayanan administrasi kepada warga setempat, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain karena dianggap "warga liar". Sebelumnya warga dilayani Rt 05 Rw 06 Kelurahan itu, bahkan pernah ada warga Kebun Sayur yang menjadi anggota pengurus RT tersebut, terakhir tahun 2006.[14] Memang menurut penuturan seorang warga, kelurahan tidak mengakui adanya warga dan menganggap sebagai warga liar.

[14] http://ahok.org/berita/ombudsman-tinjau-warga-kebun-sayur-ciracas-jakarta-timur/

Padahal di satu sisi warga telah membayar iuran RT dan sebagainya. Iuran RT dan RW itu tiap bulan sebesar 3000 rupiah. Kedua, eksklusi dari pasar kerja. Penggusuran berpotensi memutus akses warga dari lapangan pekerjaannya. Seperti halnya warga Kebun Sayur yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penggusuran. Warga telah berpuluh-puluh tahun mengolah tanah ini menjadi tanah pertanian produktif, beternak, dan berdagang. Apabila mereka kehilangan pekerjaan, maka akan semakin menambah jumlah pengangguran di ibukota. Lebih dari itu, hilangnya lapangan kerja dapat menyebabkan kelaparan, hingga putus sekolah.

Ketiga, eksklusi dari lahan. Di luar bahwa warga kampung Kebun Sayur tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan akses memanfaatkan tanah. Terlebih, mereka telah mengolah tanah yang awalnya terlantar menjadi tanah produktif. Sebagaimana yang disebut oleh Kunnemann dan Suarez, *the human right to land as the right of every human being to access—individually or as a community—local natural resources in order to feed themselves sustainably, to house themselves, and to live their culture.*[15] Tanah sendiri memiliki arti penting bagi masyarakat dan (terutama) petani yang menggantungkan hidup dari pengolahan tanah. Bagi petani, tanah menjadi alat produksi pokok yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Di dalam UU Pokok Agraria disebutkan bahwa hak-hak atas tanah adalah hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Di dalam hak atas tanah ini melekat fungsi sosial.

[15] Rolf Kunnemann dan Sofia Monsalve Suarez. 2013. *International Human Rights and Governing Land Grabbing: A View from Global Civil Society*. Globalization, 10:1, 123-131. DOI: 10.1080/14747731.2013.760933. Hlm. 131

Keempat, warga kampung Kebun Sayur juga mengalami eksklusi dari rasa aman. Kekuatan paksaan digunakan untuk mengeksklusi warga Kebun Sayur dari akses memanfaatkan tanah. Menurut pengakuan warga, PPD mengancam ibu-ibu yang ada di rumah sehingga merasa ketakutan. Sikap PPD yang tidak mau bernegosiasi pun membuat warga menjadi semakin terancam. PPD kembali datang pada 7 November 2009 bersama dengan satpol PP, Polisi dan kecamatan. Kedatangan PPD bertujuan untuk memberikan uang Rp 500.000 kepada siapa saja yang mau meninggalkan lahan tersebut dengan baik-baik. Atas bujukan PPD, sekitar 20 Kepala Keluarga yang sebagian besar berasal dari Kerawang mau menerima uang tersebut dan meninggalkan lahan tersebut.

Ancaman penggusuran juga menyebabkan ketakutan bagi anak-anak Kebun Sayur. Intimidasi preman-preman sewaan PPD bukan hanya dilakukan terhadap orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Preman-preman tersebut menghadang akses jalan masuk ke Kebun Sayur. Sehingga anak-anak yang hendak pergi ke sekolah atau bermain harus melalui jalan keluar alternatif yang tidak dihadang oleh preman. Teror yang dilakukan preman memunculkan trauma bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Kebun Sayur. Kelima, eksklusi dari Hak Asasi. Penggusuran yang dialami oleh warga Kebun Sayur merupakan bentuk eksklusi hak asasi. Human Rights Watch mencatat bahwa ketika pemerintah mengusir orang secara paksa dari rumah mereka, hal tersebut merupakan perampasan salah satu hak asasi dan kebutuhan mendasar mereka, yaitu hak atas tempat tinggal yang memadai, dan mengekspos mereka terhadap pelanggaran atas hak dasar lain.[16] Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang mendampingi warga Kebun Sayur menyatakan bahwa jika penggusuran dilaksanakan maka terjadi pelanggaran hak asasi. Pertama yaitu hak atas tempat tinggal. Warga Kebun Sayur tidak

[16] Ringkasan Laporan Human Rights Watch, "Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta". Volume 18 No.10 (C). Hlm. 2. Diakses melalui https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf

memiliki tempat tinggal lain selain di wilayah ini. Jika di gusur, maka mereka tidak memiliki tempat tinggal. Kedua, hak atas pendidikan. Penggusuran hanya akan menyebabkan anak-anak kehilangan pendidikannya untuk sementara waktu maupun selamanya. Selain itu, di wilayah Kebun Sayur juga terdapat pendidikan informal untuk menunjang kebutuhan anak-anak. Ketiga, pelanggaran hak atas pekerjaan. Warga yang menggunakan wilayah ini untuk kegiatan pertanian produktif, akan kehilangan tanah apabila terjadi pengosongan tanah.

Bentuk eksklusi keenam yaitu eksklusi dari strategi pembangunan ekonomi. Warga Kebun Sayur yang selama ini dianggap sebagai pemukim liar, mengalami eksklusi dari strategi pembangunan ekonomi pemerintah. PPD yang berada di bawah BUMN, pemerintah Jakarta Timur dan pemerintah provinsi Jakarta, menjadi bagian dari negara yang seharusnya melibatkan masyarakat secara adil dalam menentukan penggunaan ruang. Penggusuran yang dilakukan terhadap warga Kebun Sayur merupakan wujud dari eksklusi yang terjadi di perkotaan. Penggusuran merupakan pengusiran orang secara paksa yang erat kaitannya dengan eksklusi tanah. Namun, penggusuran juga dapat memunculkan bentuk eksklusi lain yang dapat semakin memiskinkan warga.

Perjuangan Melawan Eksklusi

Gerakan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran menunjukkan adanya ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan dari PPD sebagai instansi pemerintah. Gerakan masyarakat dilakukan untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat, dalam hal ini mengubah ancaman penggusuran yang dapat merusak tatanan masyarakat Kebun Sayur. Ancaman penggusuran yang ditandai dengan keluarnya surat peringatan pertama menyebabkan masyarakat mulai menetapkan tujuan untuk melawan penggusuran dan memiliki keyakinan untuk tetap bertahan di lahan tersebut. Pada

tahapan selanjutnya, masyarakat terdorong untuk mobilisasi karena adanya kebijakan dari PPD yang cenderung merugikan masyarakat.

Ancaman penggusuran oleh PPD mendorong anggota masyarakat untuk berkumpul dan membahas langkah apa saja yang akan diambil agar mereka tidak kehilangan lahan tersebut dan tetap bisa bertahan. Mereka melakukan musyawarah sehingga terbentuk perwakilan dari masing-masing blok Kebun Sayur sejumlah sembilan orang. Perwakilan ini dinamakan dengan Tim Sembilan yang diketuai oleh Abdul Razak. Setelah Tim Sembilan terbentuk, mereka meminta bantuan LBH Jakarta untuk mendampingi mereka secara hukum dalam menghentikan penggusuran. Ancaman penggusuran membuat LSM-LSM prihatin dan ikut mendukung masyarakat Kebun Sayur dalam melawan penggusuran. Gabungan dari Tim Sembilan, LBH Jakarta, PRP, Gipsi dan Gas Bumi dinamakan dengan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran. Bersama-sama mereka melakukan advokasi yang dilakukan melalui jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Dalam gerakan melawan penggusuran, terdapat adanya terminasi dimana muncul perbedaan peluang dalam gerakan. Dalam hal ini tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi ketika sedang melakukan auidensi untuk mencari dukungan. Hanya perwakilan warga dalam tim Sembilan serta perwakilan dari LBH dan LSM lain yang secara aktif mengajukan permohonan dukungan kepada DPRD, DPR RI, BUMN, maupun instansi lain. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan semua warga untuk mengikuti setiap proses advokasi karena mereka harus bekerja, mahalnya biaya transportasi dll. Tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak mendukung perlawanan terhadap penggusuran.

Gerakan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran merupakan bentuk gerakan sosial perkotaan karena dapat berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang dapat mempengaruhi kesadaran umum dan menentang adanya keputusan penggusuran yang sangat merugikan masyarakat kebun Sayur sebagai warga negara.

Perjuangan-perjuangan politik dan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh warga Kebun Sayur banyak muncul di negara *global south* akibat dari meluasnya proses akumulasi lewat penjarahan[17] terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia. Penggusuran akan menyebabkan bertambahnya ketimpangan sosial dan ekonomi pada masyarakat Kebun Sayur yang mayoritas tergolong miskin. Alasan PPD menggunakan lahan tersebut untuk membangun pool bus juga terlihat tidak masuk akal. Hal ini karena PPD masih memiliki tanggungan pajak atas lahan tersebut sebesar Rp 780.000.000,- dan tanggungan karyawannya yang belum dibayar. Selain itu, lahan tersebut tidak memiki akses yang baik untuk dilewati oleh bus-bus. Besar kemungkinan ada kepentingan lain dari para pemilik modal dalam penggunaan lahan tersebut.

Tuntutan dilakukan aliansi rakyat melawan penggusuran dengan melakukan audiensi ke berbagai macam instansi dan perundingan dengan PPD dimana masyarakat meminta lahan tersebut dihibahkan jika lahan itu memang milik PPD. Tuntutan juga dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi saat akan ada eksekusi penggusuran, pembayaran lahan dan aksi demonstrasi keluar seperti ke DPRD, DPR RI, dan Meneg BUMN. Gerakan sosial perkotaan yang muncul di Kebun Sayur menuntut adanya perubahan dari kebijakan pemerintah dalam masalah penggusuran. Pada dasarnya pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini, namun yang terlihat adalah bahwa pemerintah lepas tangan dan menyerahkannya semua urusan tersebut kepada PPD. Masyarakat Kebun Sayur akan

---

[17] Akumulasi lewat penjarahan merupakan pengembangan dari akumulasi primitive menurut Marx. David Harvey menjelaskan bahwa akumulasi lewat penjarahan ini dilakukan oleh *hedge-hedge fund* dan institusi kapital keuangan, penjarahan stok sumber genetic oleh perusahaan farmasi, perusakan sumber lingkungan (tanah, air, udara) secara global, privatisasi barang publik. Bukan hanya itu, akumulasi lewat penjarahan juga dilakukan dengan komodifikasi bentuk-bentuk cultural, sejarah dan kreativitas intelektual. Proses akumulasi lewat penjarahan ini dapat terjadi kapan saja dalam dalam berbagai macam pola, baik legal maupun illegal. Lihat Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Insist Press. Hlm. 162

terus mempertahankan lahan tersebut. Ketidakjelasan siapa pemilik siapa lahan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mereka masih tetap bertahan. Disisi lain, mereka masih tetap bergerak untuk mencari dukungan dalam mempertahankan lahan tersebut hingga sekarang.

Penggusuran yang mengancam warga kampung Kebun Sayur merupakan wujud dari eksklusi yang sering kali terjadi di perkotaan, baik pada pedagang kaki lima maupun warga yang dianggap liar. Warga dibatasi aksesnya untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Warga yang hidup dalam kemiskinan akan mengalami kehidupan yang jauh lebih miskin ketika ada perampasan atas akses sumber daya. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam menyejahterakan dan melindungi hak asasi warganya, ternyata seringkali melegitimasi terjadinya eksklusi. Perjuangan yang dilakukan masyarakat perkotaan merupakan salah satu langkah untuk mengatasi eksklusi. Sebagaimana perjuangan warga Kebun Sayur yang didukung oleh organisasi lain telah berhasil meredam ancaman penggusuran yang dilakukan PPD hingga sekarang. Meskipun penggusuran tidak lagi mengancam, bukan berarti keberadaan warga di wilayah tersebut terjamin aman. Sebab, ancaman dapat kembali datang ketika pemerintah lebih mementingkan pembangunan daripada kesejahteraan masyarakat.

PERUBAHAN DAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KAMPUNG POGUNG KIDUL, YOGYAKARTA

A. Nimas Kesuma Negari

Berbicara tentang kampung selalu menjadi pembahasan yang menarik di Indonesia, mengingat kota-kota di Indonesia adalah kota kampung, kota-kota kita tidak dapat dipisahkan dari kehadiran kampung-kampungnya. Kampung-kampung kita adalah bagian dari sejarah kota-kota kita yang sedang berkembang. Kampung merupakan unit terpenting dari kehidupan perkotaan, merupakan akar dari pertumbuhan kota-kota kita hari ini. Di sisi lain, kampung juga merupakan wilayah yang sarat dengan masalah, menjadi tempat bertemunya politik massa rakyat dengan kontrol pemerintah. Sebuah kampung-kota merekam banyak kisah dan cerita yang tak jarang adalah cerita tentang kisah perjuangan masyarakat melawan penggusuran, ancaman kehilangan kehidupan, alih fungsi dan penyempitan lahan, atau pembersihan kampung sebagai wilayah kumuh.

Dalam geliat perkembangan kota, kampung senantiasa berhadapan dengan tantangan dan tekanan dari berbagai sisi, baik melalui intervensi pemerintah maupun kekuatan pengusaha. Pada akhirnya, tidak semua kampung mampu beradaptasi, ada yang bertahan namun banyak pula yang tergusur. Kendatipun bertahan, kampung selalu tampak telah berubah atau sedang dalam proses perubahan. Kesemuanya bertransformasi, menyesuaikan diri dengan progresivitas kota dan kebutuhan masyarakat kota. Bagaimana masyarakat kampung, rumah-rumah di kampung, tradisi di kampung mulai atau telah berubah adalah potret realitas yang dinamis yang terus menuntut kampung bergerak menuju bentuk-bentuk yang

dirasa sesuai dengan tuntutan dunia modern. Kampung-kampung kita merekam perjalanan terbentuknya kota dan masyarakat kota hari ini. Tak terkecuali kampung Pogung Kidul, sebuah kampung agraris yang kini menjadi lahan subur bagi tumbuhnya berbagai hunian elit dan komunitas berpagar di Yogyakarta.

Kampung Pogung: Dari Kebun *Puhung* ke Komunitas Berpagar

Kampung Pogung bukanlah bagian dari Kota Yogyakarta yang paling dikenal. Tidak seperti kampung-kampung budaya yang berada dalam lingkaran kraton yang banyak menarik perhatian orang karena keterkaitannya dengan peran dan tugas penghuninya terhadap kraton. Kampung Pogung Kidul, hanya satu diantara kampung-kampung yang bertebaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah kampung yang terletak di sudut utara Yogyakarta, namun keberadaannya menjadi bagian dari ingatan yang sudah lengket dalam kepala sebagian besar orang yang pernah berkuliah di Kota itu, khususnya di universitas tertua di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan Kota Yogyakarta. Pada periode 80an silam kampung Pogung Kidul merupakan wilayah pedesaan di pinggiran Kota Yogyakarta. Sebelum dikenal sebagai salah satu wilayah yang banyak menghasilkan produk pertanian, khususnya padi, Pogung adalah sebuah desa gersang yang dipenuhi pohon-pohon bambu dan ketela atau puhung. Tanah di kampung Pogung sangat kering karena belum ada sistem pengairan atau irigasi. Nama "Pogung" menunjukkan asal-usul kampung itu, sebuah nama yang disematkan setelah ada hasil bumi yang tumbuh melimpah disana, yaitu 'Puhung'. Puhung dalam bahasa Jawa berarti ketela atau singkong, kata puhung/ pohung kemudian lebih sering disebut Pogung.

Pada Tahun 1944 irigasi mulai masuk ke kampung Pogung, tanah-tanah di kampung Pogung yang kering akhirnya dapat

ditanami padi setelah ada sistem pengairan yang baik. Sebagian besar lahan yang mulanya merupakan kebun puhung berubah menjadi sawah. Irigasi ini berasal dari Selokan Mataram yang dibangun pada awal zaman penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1943 (Kurasawa, 1993). Memasuki tahun 1970-an beberapa tanah warga mulai dibeli oleh pihak Universitas Gadjah Mada untuk kebutuhan perluasan kampus. Karena mendapat penawaran yang cukup tinggi, warga pun menyetujui tanahnya dibeli oleh pihak universitas. Hasil dari penjualan tanah tersebut kemudian digunakan untuk memperbaiki rumahnya dan menambah kamar-kamar untuk disewakan sebagai kos-kosan. Meskipun usaha kos-kosan sudah berkembang pada tahun 70-an namun pada waktu itu harga yang diberikan masyarakat masih sangat terjangkau, orang dapat dengan mudah menemukan kos-kosan kecil nan sederhana dengan ukuran 2,5 x 3 meter persegi berfasilitas minim seadanya.

Pada tahun 1980-an lahan-lahan persawahan di kampung Pogung Kidul menyusut drastis, nyaris hampir semuanya terdesak oleh kebutuhan akan perumahan atau pemukiman baru. Sejak berkembangnya kampus UGM, tanah di Pogung adalah lahan produktif yang menjadi sasaran utama banyak pihak karena letaknya yang berdekatan dengan universitas menjanjikan keuntungan dalam dunia investasi. Banyak warga yang memutuskan menjual tanahnya kepada pihak universitas karena dihargai dengan harga yang cukup tinggi, dan sebagian lagi menjualnya kepada pihak lain, yaitu pendatang dan pengembang yang menangkap peluang-peluang semacam ini sebagai sebuah keuntungan material.

Melihat kesempatan dan peluang yang ada, baik warga setempat, pendatang maupun pengembang, semakin hari semakin berlomba mendirikan rumah atau pemukiman-pemukinan baru di atas tanah-tanah produktif. Akibatnya wilayah-wilayah kampung Pogung Kidul yang dulunya dikenal sebagai areal persawahan yang subur dan sangat produktif kini berubah menjadi kawasan

pemukiman dan kos-kosan. Tahun 1990 menunjukkan perkembangan yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jika sebelumnya kos-kosan yang berkembang di Kampung Pogung Kidul adalah kos-kosan sederhana yang dapat diakses semua kalangan, memasuki tahun 1990-an mendirikan kos-kosan dengan citra elitis dan mewah menjadi trend baru yang berkembang di kampung Pogung. Di tahun 2000 di wilayah Pogung Baru Padukuham Pogung Kidul yang sebelumnya memang telah mengembangkan model perumahan yang lebih tertata pun menghadirkan bentuk bangunan baru yang lebih modern, *Pastika Pogung Residence*. Agak berbeda dari bangunan-bangunan lainnya di kawasan itu, *Pastika Pogung Residence* ditandai dengan elemen fisik yang lebih khas, dan lebih menyerupai apa yang disebut Blakely (1997) dengan 'Komunitas Berpagar', hanya saja dalam skala yang lebih kecil, yang terdiri dari 10 sampai 15 unit rumah saja dan bukan merupakan bagian proyek yang dilaksanakan oleh para pengembang melainkan proyek individual yang didirikan oleh pemilik modal, atau warga biasa menyebutnya tuan tanah.

Riset terdahulu tentang komunitas berpagar, seperti survei yang dilakukan Maharika dkk (2006) pada bulan Februari-April 2005 dan Mei 2006, telah memetakan bahwa sebagian besar perumahan baru (berumur kurang dari 10 tahun) dapat dikategorikan sebagai komunitas berpagar. Terdapat indikasi bahwa ada kecenderungan perkembangan yang cukup signifikan yaitu perkembangan ke arah utara dan barat Yogyakarta. Secara geografis, arah utara dan barat Yogyakarta memang wilayah yang didominasi lahan produktif pertanian. Di kampung Pogung sendiri menjadi sebuah pemandangan yang menarik memang terkait dengan adanya kawasan perumahan elit berupa residence berdampingan dengan beberapa petak sawah yang masi tersisa, tak jauh dari rumah-rumah penduduk yang sebagian masih terlihat sederhana. Beberapa penanda yang mencolok dari tipe-tipe hunian ini adalah dengan adanya pagar keliling berupa tembok, pos satpam yang dijaga oleh beberapa orang satpam selama 24 jam, pintu masuk satu

arah yang diportal, gerbang penanda dilengkapi dengan beberapa tulisan berjejer disekitarnya ‘Tamu harap lapor’ dan ‘Dilarang masuk’. Pagar yang melintang dan berbagai penanda yang dihadirkan oleh residence ini seolah menjadi batas pembeda antara penghuninya dengan masyarakat lain yang tidak berada di lingkungan berpagar di dalam kampung.

Secara fisik, kesan elit yang terlihat dari bentuk Pogung Pastika Residence menunjukkan tingkat status sosial ekonomi penghuninya yang tentu lebih tinggi dari penduduk kampung lainnya yang berada di luar kompleks tersebut. Menariknya justru model tempat tinggal semacam inilah yang kian diminati oleh pendatang yang sebagian besar adalah mahasiswa. Citra pemukiman semacam ini tentu saja bertolak belakang dengan perumahan penduduk di sekitarnya yang meskipun tidak dapat dikatakan kumuh, namun masih terlihat sederhana. Memang citra dan harga rumah yang dipatok di lingkungan berpagar biasanya lebih mewah, elitis, dan mahal (Derajad, 2009). Interaksi dan relasi sosial dengan masyarakat sekitar pun sangat lemah. Penduduk satu sama lain tak jarang tak saling megenal, terutama antara penduduk kampung dengan penduduk di kompleks tersebut, meskipun tinggal di kampung yang sama. Secara sosial sebenarnya masyarakat sekitar merasa tidak diuntungkan dengan adanya komunitas berpagar tersebut. Meskipun demikian masyarakat sekitar tidak bisa menutup mata dengan perkembangan maupun permintaan pemukiman.

Fenomena pemukiman berpagar di kampung Pogung mengalami penambahan yang cukup berarti dan makin kasat mata sejak tahun 2000-an. Mulai banyak iklan-iklan yang menawarkan unit-unit rumah dengan daya tarik kenyamanan dan keeksklusifan yang dipasang di sepanjang jalan. Hal ini menurut Hirschman dan Myrdal (1979) tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan sosial-ekonomi kota yang tumbuh cepat dan meluas yang mendorong akumulasi perkembangan ekonomi masyarakat. Meningkatnya

kebutuhan dan daya beli masyarakat seringkali menjadi alasan utama kemunculan fenomena permukiman tersebut. Namun di sisi lain perkembangan residence di kampung Pogung juga tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kehadiran Universitas gadjah Mada sebagai magnet yang memicu perkembangan pemukiman di sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Lynch (1962) bahwa keberadaan suatu kampus pada suatu wilayah akan mempengaruhi struktur ruang wilayah sekitarnya untuk mendukung aktivitas yang ada. Saat ini di Kampung Pogung Kidul yang berkembang tidak hanya residensial, tetapi juga mulai dibangunnya apartemen, yaitu Apartemen Mlati Sinduadi, asrama mahasiswa eksklusif, kos-kosan eksklusif, hotel, dan sebagainya.

Alih Pekerjaan dan Komodifikasi Rumah Tinggal

Setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian di kampung Pogung, penduduk kampung yang sebelumnya bekerja sebagai petani harus mengganti pekerjaan mereka menjadi pekerja di sektor informal yang meliputi antara lain sebagai pedagang, pemilik kos-kosan, pemilik persewaan kendaraan, tukang cuci, tukang ojek, dan sebagainya. Dalam hal ini masyarakat menunjukkan respons adaptif dengan segera mengganti mata pencahariannya ketika pekerjaan di bidang pertanian tidak dapat lagi diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari berbagai macam jenis pekerjaan tersebut, menjadi pemilik kos-kosan dan pedagang adalah yang paling banyak dilakukan oleh penduduk kampung. Hal ini dilakukan karena kos-kosan dianggap dapat memberikan penghasilan yang lebih banyak daripada bekerja di bidang pertanian. Untuk membuat kos-kosan masyarakat harus merombak rumahnya dengan menambah jumlah kamar-kamar yang ada untuk disewakan terutama kepada mahasiswa. Aktivitas menyewakan kamar-kamar di rumah ini penulis sebut sebagai bentuk komodifikasi rumah tinggal. Secara teoritik, komodifikasi menjelaskan cara kapitalis dalam menjaga suatu tujuan untuk mengakumulasi kapital atau merealisasi nilai

melalui transformasi nilai guna kepada nilai tukar. Komodifikasi telah mengubah objek, kualitas dan tanda-tanda menjadi komoditas dimana komoditas merupakan item yang dapat diperjualbelikan di pasar. Rumah-rumah di kampung yang semula hanya berfungsi sebagai tempat kediaman diubah menjadi sebuah komoditas yang dapat disewakan untuk mendatangkan keuntungan.

Dalam kajian tentang kampung perkotaan di Indonesia, mengkomodifikasikan rumah adalah hal yang biasa terjadi dalam masyarakat kampung-kota. Penelitian oleh Setiawan di beberapa kampung di Yogyakarta (2000) menyebutkan bahwa 80% rumah di kampung dimanfaatkan oleh kegiatan produktif penghuninya, hal ini tidak dapat dihindarkan mengingat adanya tuntutan ekonomi yang semakin besar sehingga menyebabkan penduduk kampung semakin melihat ruang sebagai komoditas dan dikomersialkan. Hal demikian boleh jadi juga terjadi di kampung Pogung Kidul, hampir seluruh dari penduduk asli kampung Pogung Kidul menjadikan rumahnya sebagai kos-kosan atau kontrakan sekaligus warung makan. Tanah di Kampung Pogung sebagian besar adalah hasil warisan, yang dibagi-bagikan secara turun temurun sehingga semakin lama setiap keturunannya akan mendapatkan jatah tanah yang semakin kecil. Lahan yang kecil ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Pogung Kidul tidak hanya untuk membangun sebuah rumah tetapi di lahan itu juga mereka mendirikan kos-kosan. Rumah-rumah yang ada dirombak dengan menambahkan 8 hingga 10 kamar lagi untuk disewakan. Karena lahan yang terbatas penambahan kamar dilakukan dengan cara membuat rumahnya bertingkat. Masalah bentuk agaknya tidak terlalu menjadi soal, yang penting ada cukup kamar untuk disewakan. Alhasil, bentuk rumah-rumah di kampung yang terpaksa dirombak menjadi kos-kosan itu terlihat tidak tertata, bertumpuk-tumpuk, sempit, tidak ada halaman, bahkan mepet jalan.

Menurut Newberry (2013) bangunan rumah di kampung di Jawa mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang membuatnya dan

hubungan antara mereka yang tinggal di dalamnya. Temuan menarik dari penelitian Newberry di kampung Rumah Putri di Yogyakarta memperlihatkan bahwa meskipun sudah banyak transformasi, rumah di Jawa tetap berperan sebagai simbol utama. Newberry menggambarkan peran utama yang dimainkan rumah di dalam kampung melalui perhelatan warga seperti upacara perkawinan dan *slametan*. Pemandangan ini membawa Newberry melihat rumah sebagai saluran yang terbuka untuk umum, rumah terhubung dengan gang-gang kecil di sekitar rumah dan rumah-rumah lain melalui pintu belakang dalam acara berbagi makanan (*slametan*). Dalam hal ini, pengamatan Newberry atas rumah di kampung menunjukkan bahwa rumah berperan sebagai sebuah struktur yang signifikan untuk nilai-nilai budaya dan untuk organisasi sosial. Di kampung Pogung, pemandangan semacam itu saat ini sudah sangat jarang ditemui. Menurut masyarakat setempat, kini acara-acara seperti perkawinan lebih sering dilaksanakan di kelurahan yang lahannya cukup lebar, atau bagi yang mampu akan menyewa gedung. Sangat jarang upacara perkawinan digelar di rumah karena terbatasnya lahan, jika terpaksa mengadakan acara dirumah maka harus menutup jalan, dan itu dinilai merepotkan. Maka sulit untuk melihat peran yang dimainkan rumah dalam kaitannya dengan kehidupan sosial di kampung-kota saat ini.

Sejak tahun 1980-an ketika banyak dari masyarakat kampung yang merenovasi rumahnya, rumah-rumah di kampung Pogung dibangun dengan model yang lebih modern, sebagian besar bertingkat, dan tidak banyak masyarakat yang mementingkan apakah rumah harus memiliki pintu belakang atau tidak. Jika dalam penelitian Newberry di kampung Rumah Putri (2013) menunjukkan betapa pentingnya kehadiran pintu belakang dalam sebuah rumah di kampung sebagai pintu masuk bagi arus angin serta arus manusia dan barang. Ketiadaan pintu belakang dalam sebuah rumah akan menghambat arus lalu lintas pertukaran sehari-hari antara rumah-rumah di kampung. Kampung Pogung menunjukkan

pemandangan yang berbeda, rumah-rumah di Kampung Pogung saat ini melambangkan lebih daripada sekedar kesulitan bergerak antara rumah-rumah yang sebelumnya terhubung oleh pintu belakang, tetapi juga kesulitan pertukaran sosial yang terjadi di masayrakat, walaupun perubahan bentuk rumah itu diakui cukup besar pengaruhnya di kampung itu. Sekarang sudah menjadi lumrah semua pertukaran sehari-hari menjadi kegiatan yang terjadi di depan umum, seperti tetangga yang mengembalikan barang atau mengantar makanan harus melalui bagian depan rumah, di jalan, dan di depan pandangan mata para tetangga.

Selain sebagai bentuk hubungan sosial, rumah juga melambangkan tempat kediaman, sebuah tempat berlindung, tempat menghormati orang tua, dan tempat dimana ikatan batin dan nilai-nilai keluarga ditanamkan (Newberry, 2013 :166). Rumah sebagai tempat kediaman barangkali masih dapat dirasakan di kampung Pogung Kidul. Namun yang berbeda rumah kini tidak saja sebagai tempat kediaman, di Pogung, rumah juga sebagai tempat investasi. Seperti diketahui, usaha kos-kosan mulai menjadi jenis investasi yang banyak diminati karena menurut masyarakat peluang untuk kembalinya modal dalam waktu cepat sangatlah besar serta passive income yang akan terus didapatkan selama masih ada universitas yang menjadi tempat tujuan mahasiswa. Kehadiran mahasiswa ke Pogung Kidul memicu terjadinya perubahan dalam berbagai aspek, salah satunya ekonomi. Munculnya berbagai jenis usaha yang menyediakan berbagai kebutuhan mahasiswa berupa beragam kos-kosan dengan beragam fasilitas tersedia, hingga aneka rumah makan yang sesuai dengan kantong mahasiswa pun tersedia. Perumahan di Kampung Pogung saat ini menjadi ajang dan pusat berbagai kegiatan produktif penghuninya seperti kos-kosan, warung makan, laundry, warung klontong, konter pulsa, foto copy, rental, warnet, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, dari 827 bangunan kos-kosan di kampung Pogung Kidul, terdapat 166 bangunan kos-kosan yang

merupakan hasil investasi atau milik pendatang. Dengan kata lain kepemilikan kos-kosan di kampung Pogung Kidul didominasi oleh penduduk lokal kampung Pogung. Alih-alih mempertimbangkan bentuk rumah, agaknya menjadi lebih penting adalah mempertimbangkan berapa banyak ruang di rumah yang dapat disewakan atau dimanfaatkan menjadi kos-kosan. Menurut Granda (2013) dimensi lokasi yang berkenaan dengan tempat-tempat atau lokasi-lokasi tertentu pada suatu kawasan yang dianggap strategis memberikan rangsangan pada individu yang bermukim disana untuk mendapatkan keuntungan dengan merubah lahan/rumah/bangunannya untuk kegiatan usaha, inilah yang terjadi di kampung Pogung Kidul. Rumah di kampung tak luput dari perubahan dan bagian-bagiannya tak lagi melambangkan nilai-nilai budaya.

Overpricing Tanah

Kepemilikan atas tanah di Pogung bersumber dari hak menggarap secara turun temurun. Orang pertama yang mendiami kampung Pogung yang juga merupakan lurah pertama di kampung itu adalah seorang abdi dalem yang diberi hak menempati lahan Pogung seluas 56.4331 ha dengan hak menggarap, anggaduh secara turun-temurun. Memasuki tahun 1919, dilakukan 'Reorganisasi Tanah' di Yogyakarta yang memberi akibat pada dihapuskannya sistem *apanage*, sehingga rakyat memiliki hak atas tanah yang kuat, tidak hanya mempunyai kedudukan seperti semula yang bersifat *anggaduh* atau menumpang tetapi memiliki hak penuh sebagai tanah milik yang dapat disertifikasi pada tahun 1926 (Soemardjan, 1981). Sejak dihapuskannya sistem *apanage*, selain berakibat pada kemudahan penggunaan tanah secara privat juga mengukuhkan hak atas tanah terhadap pemilik-pemilik individu di kampung Pogung. Sejak tanah-tanah di Pogung bergeser pada kepemilikan individu, memang banyak dari masyarakat yang kemudian memperjualbelikannya. Adanya kejelasan status kepemilikan tanah ini jugalah yang membuat kampung Pogung banyak dilirik pemilik modal untuk

berinvestasi, selain karena lokasinya yang strategis. Bukan sesuatu yang mengherankan jika harga jual tanah di kampung Pogung Kidul sangat tinggi.

Saat ini banyak dari penduduk kampung yang mematok harga sangat tinggi untuk sebidang tanah yang mereka miliki, terutama lahan-lahan persawahan yang masi tersisa di kampung itu yang lokasinya sudah berdampingan dengan bangunan-bangunan baru yang modern. Beberapa residensial termasuk Pastika Pogung Residence dan kost-kostan eksklusif kebanyakan memang dibangun diatas lahan persawahan. Menurut pengakuan dari beberapa warga, mereka sengaja mematok harga tinggi untuk harga jual sawah per meternya karena dianggap akan menciutkan nyali para pengusaha yang berusaha untuk mengakuisisi lahan-lahan produktif di kampung Pogung. Akan tetapi pernyataan tersebut menjadi paradoks manakala di satu sisi warga ingin mempertahankan areal persawahannya, namun di sisi lain juga mengejar keuntungan finansial. Artinya jika ada yang berani membayar dengan harga tinggi, tentu saja tidak menutup kemungkinan lahan-lahan tersebut akan dilepas juga. Sepertinya orang-orang tidak kuasa lagi menahan laju pertumbuhan perumahan yang merambah tanah-tanah produktif. Lambat namun sangat pasti perumahan akan terus bertambah. Kampung-kampung termasuk kampung Pogung Kidul cepat atau lambat akan "mengkota" juga. Gebyar perkotaan ibarat lampu yang menarik perhatian laron, jangankan persawahan, menurut Budiharjo dalam Reformasi Perkotaan (2014) perbukitan, pantai semuanya diserbu tanpa ampun. Bahkan, laut pun direklamasi jadi kawasan perkotaan yang dinilai menjanjikan.

Di Kabupaten Sleman sebenarnya ada Peraturan Daerah No.19/2001 mengenai pelarangan pemindahan peruntukan tanah pertanian ke fungsi lain di wilayah Sumberagung, Moyudan, Sleman. Maksud dari Perda ini sudah jelas, ingin mempertahankan areal persawahan di sebagian wilayah di Sleman agar tidak dirambah

perumahan/bangunan. Hal semacam ini memang perlu dilakukan mengingat kehidupan manusia tidak bisa hidup tanpa pasokan produk-produk pertanian untuk keberlangsungan hidupnya. Boleh saja orang merasa ”aman” dengan munculnya perda tersebut. Akan tetapi populasi penduduk yang terus bertambah dan tampaknya memang nyaris tanpa kendali, tetap saja menyebabkan kebutuhan akan pemukiman menjadi tidak terelakkan. Perubahan akan selalu terjadi dengan segenap dinamika yang menyertainya, kadang mendapat penolakan tapi tak jarang justru mendapat respons penyesuaian, dan tak selalu berimbas positif. Bila kita amati perkembangan kota-kota besar di tanah air, banyak kampung-kampung yang dikorbankan dan lahannya dipertarungkan sebagai komoditas ekonomi yang akan memberikan keuntungan. Kasus Kampung Pogung Kidul hanya satu dari lembaran-lembaran cerita kampung yang berubah dan membentuk kota kita hari ini. Kota yang menyuguhkan pembangunan kawasan dengan citra elitis dan tertata dengan gegap gempita. Kampung Pogung Kidul mengalami perubahan dari kampung agraris menjadi kampung yang dipenuhi oleh kos-kosan dan pemukiman baru, bahkan bentuk-bentuk pemukiman dan kos-kosan telah berkembang menjadi bentuk yang lebih elit seperti residence, kos eksklusif, dan apartemen. Perubahan juga terjadi pada bentuk hubungan dan orientasi masyarakatnya, dari masyarakat yang berbasis pertanian berubah menjadi masyarakat dengan aktivitas yang bernilai ekonomis. Hal ini merupakan akibat dari beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan yang diperuntukkan menjadi lahan pemukiman, serta penciptaan ruang-ruang di kampung untuk menyelenggarakan aktivitas ekonomi di luar sistem agraris.

Ketika lebih banyak orang serta manusia memasuki kawasan Pogung Kidul, kehidupan mulai berubah dan tidak selalu menjadi lebih baik. Pendatang-pendatang baru memasuki wilayah Pogung Kidul dan mereka mengasingkan diri. Muncul suasana terpecah-pecah. Pekerjaan-pekerjaan baru timbul, banyak pedagang,

pembantu rumah tangga, dan penduduk asli mengalami penurunan dalam kepemilikan tanah. Para petani dan tukang kebun berangsur-angsur menjual tanahnya dan beralih profesi menjadi pedagang atau pemilik kos-kosan. Lahan-lahan persawahan sebagian besar telah diambil alih oleh bangunan-bangunan baru, lahan-lahan kosong tidak lagi terbuka bagi mereka. Kepungan bangunan-bangunan baru tidak saja mengakuisisi keberadaan sawah-sawah yang masih tersisa di pinggiran kota itu, tetapi menjadikan wajah Pogung kian berubah tiap tahunnya. Memang, dampak-dampak tersebut tidak dapat dihindari. Perubahan sosial yang terjadi awalnya merupakan proses yang dikehendaki (*intended*), masyarakat pada fase awal sengaja menjual sawahnya dengan tujuan menambah penghasilan, namun dalam prosesnya kemudian justru berkembang ke arah yang tidak dikehendaki (*unintended*), dimana lahan-lahan yang dijual tersebut dimanfaatkan oleh pengembang dan atau pendatang untuk membangun residensial, kos-kosan, asrama, apartemen yang perkembangannya semakin massif hingga tak dapat dikontrol. Bagaimanapun, warga kampung-kota kini tidak dapat memungkiri bahwa kampung Pogung Kidul semakin berubah tanpa kendali warga di dalamnya.

FLEKSIBILITAS RUANG BERSAMA KAMPUNG BABAKAN CIAMIS, BANDUNG

Ginani Hening Utami,
Jovita Calista Romauli Sitorus, dan Yoga Adi Santoso

Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, yang ditandai dengan ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Berbeda dengan penduduk kota, kehidupan sosial warga 'kampung kota' masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan dengan ikatan kekeluargaan yang erat, meskipun kawasan tersebut merupakan bagian dari kawasan perkotaan (Hendrianto, 1992). Budaya bermukim ini kental dengan kekerabatan dan dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan bersama yang masih rutin dilakukan di banyak kampung kota di Indonesia, salah satunya adalah kampung Babakan Ciamis. Penduduk di kampung ini masih rutin melakukan berbagai aktivitas bersama, seperti kegiatan kerja bakti bersama, kegiatan rutin ibu-ibu PKK, anak-anak bermain bersama di depan rumah mereka, dan lain-lain. Namun permukiman kampung kota memiliki lahan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi, sehingga tidak menyisakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan bersama yang membutuhkan ruang yang luas. Kondisi ini juga terjadi di kampung Babakan Ciamis, kepadatan penduduknya pun sangat tinggi. Sepanjang gang utama, rumah-rumah saling berhimpitan satu sama lain tanpa menyisakan ruang untuk melakukan kegiatan.

Meskipun dengan keterbatasan lahan, warga kampung-kota tetap melakukan kegiatan sosialisasi mereka. Berangkat dari kebutuhan ruang untuk melakukan kegiatan bersama, warga RW 7 kampung Babakan Ciamis berinisiatif memanfaatkan ruang-ruang bersama seperti gang, dan membangun sebuah Gedung Serba Guna yang dapat digunakan bersama oleh warga pada kampung tersebut secara swadaya. Ruang-ruang multifungsi ini kemudian digunakan

untuk melakukan berbagai macam jenis kegiatan bersama warga Kampung Babakan Ciamis. Dimana kedua ruang ini selalu penuh dengan aktivitas masyarakat sepanjang hari.

Pemanfaatan kedua ruang yang digunakan untuk mewadahi berbagai fungsi kegiatan sosial warga ini merupakan fenomena yang menarik untuk dipelajari. Hal ini berkaitan dengan konsep fleksibilitas ruang yang terjadi akibat beberapa faktor sosial yang terjadi di suatu tempat. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana fleksibilitas ruang-ruang yang dimanfaatkan untuk mewadahi berbagai macam kegiatan bersama warga kampung Babakan Ciamis.

Kampung Babakan Ciamis

Kampung Babakan Ciamis terletak di Sumur Bandung, Bandung, merupakan kawasan permukiman tak terencana pertama di Bandung. Permukiman inkremental ini terletak pada pinggir Sungai Cikapundung, berbatasan dengan jalan Aceh di Utara, jalan Perintis Kemerdekaan di Selatan, jalan Wastukencana di Timur, dan Sungai Cikapundung di Barat. Yang dianggap sebagai kampung Babakan Ciamis sejatinya adalah RW 07 Kecamatan Sumur Bandung, Bandung. Penduduk RW 07 ini kurang lebih adalah 400 warga. Daerah kampung ini diberi nama Babakan Ciamis karena penduduk asli kampung ini kebanyakan berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Pada perkembangannya, kampung Babakan Ciamis tidak hanya dihuni oleh orang-orang dari Ciamis, tetapi juga pendatang khususnya mahasiswa dan pekerja di daerah sekitar. Kampung Babakan Ciamis memiliki perbedaan dengan kampung kota di Bandung pada umumnya karena terdapat beberapa kegiatan yang hanya terjadi di kampung ini. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: festival musik tahunan yang mengundang pemusik besar, festival makan bersama (Botram), dan adanya beberapa LSM yang turut berperan di kampung ini seperti Babakan Ciamis Institute. Selain itu, kampung Babakan Ciamis juga memiliki kegiatan bersama seperti pengajian, PKK, dan Karang Taruna.

Jalan Aceh
Kantor POS Babakan Ciamis
Masjid Jami Al Ukhuwah
ASTRA Graphia
Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat
SMEA - SMK Negeri I
Bank BNI
Keterangan:
Gedung Serba Guna
Gang

Ruang Bersama yang Ada di Babakan Ciamis

Gedung Serba Guna

Gedung Serba Guna di kampung Babakan Ciamis merupakan bangunan satu lantai dengan luas 9x6 meter. Bangunan ini dibangun secara swadaya oleh warga pada tahun 2010. Pembangunan gedung ini diperuntukkan bagi kegiatan warga kampung Babakan Ciamis secara umum maupun untuk acara pribadi. Tidak diperlukan surat izin tertentu dalam menggunakan gedung ini, tetapi warga harus melapor kepada pengurus RW terlebih dahulu.

Gang

Gang yang dimaksud adalah jalan Babakan Ciamis yang menghubungkan jalan Aceh dengan Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan ini membentang sejauh 511 meter dan memiliki lebar yang bervariasi, sekitar 3-4 meter. Sehari-hari jalan Babakan Ciamis ini dipakai sebagai sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan roda dua dan roda tiga. Tetapi pada waktu-waktu tertentu, gang juga dapat dimanfaatkan untuk mewadahi kegiatan-kegiatan warga kampung Babakan Ciamis. Tidak diperlukan izin khusus dalam penggunaan gang, hanya perlu melapor ke RW dan bersepakat dengan sesama warga kampung Babakan Ciamis.

Fleksibilitas Ruang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), fleksibel adalah lentur atau luwes, mudah dan cepat menyesuaikan diri. Sedangkan fleksibilitas adalah kelenturan atau keluwesan, penyesuaian diri secara mudah dan cepat. Sedangkan fleksibilitas penggunaan ruang adalah suatu sifat kemungkinan dapat digunakannya sebuah ruang untuk bermacam-macam sifat dan kegiatan, dan dapat dilakukannya pengubahan susunan ruang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah tatanan bangunan. Kriteria pertimbangan fleksibilitas ruang, antara lain: (a). Segi teknik, yaitu kecepatan perubahan, kepraktisan, resiko rusak kecil, tidak banyak aturan, memenuhi

persyaratan ruang. (b). Segi ekonomis, yaitu murah dari segi biaya pembuatan dan pemeliharaan. Terdapat tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versabilitas. Ekspansibilitas adalah konsep fleksibilitas yang penerapannya pada ruang atau bangunan yaitu bahwa ruang dan bangunan yang dimaksud dapat menampung pertumbuhan melalui perluasan. Untuk konsep konvertibilitas, ruang atau bangunan dapat memungkinkan adanya perubahan tata atur pada satu ruang. Untuk konsep versatibilitas, ruang atau bangunan dapat bersifat multi fungsi.

Konsep fleksibilitas dalam arsitektur dengan menggunakan berbagai macam solusi dalam mengatasi perubahan-perubahan aspek terbangun di sekitar tapak, sehingga fleksibilitas arsitektur ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sifat temporer ini dapat dianalisa pada tiga aspek dimensi sementara (*temporal dimension aspect*) yang diungkapkan oleh Carmona, et-al (2003), diantaranya: (1). *Time cycle and time management*: *Activity are fluid in space and time,environments are used differently at different times.* Pernyataan ini menjelaskan bagaimana aktivitas selalu berubah sesuai dengan ruang maupun sesuai dengan waktu, seperti sebuah zat cair yang nantinya akan memerlukan sebuah wadah untuk memberikan kekuatan aktivitas tersebut.

Disinilah arsitek sebagai pencipta ruang harus selalu kritis melihat celah-celah terbentuknya ruang yang berubah sesuai dengan perubahan waktu yang juga memberikan reaksi pada penggunaan lingkungan sekitarnya. (2). *Continuity and stability*: *Although environments relentlessy change over time,a high value is often placed on some degree of continuity and stability*. Aspek ini menjelaskan bahwa lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu sebuah keberadaan desain seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan tersebut, sehingga keberlanjutan desain yang diharapkan dari sebuah karya arsitektur memiliki fungsi optimal yang stabil dalam bereaksi dengan lingkungan terbangun. (3) *Implemented over time*. Pernyataan ini menjelaskan bagaimana desain nantinya tidak hanya bekerja di zamannya, tetapi bisa terus

digunakan melampaui zamannya. Pemikiran-pemikiran yang inovatif harus terus dihadirkan untuk menghadirkan strategi yang dapat mengatasi segala perubahan akan lingkungan.

Parameter Penentu Fleksibilitas

Untuk dapat menilai fleksibilitas ruang di Babakan Ciamis, ada beberapa parameter yang menentukan fleksibiltas ruang, berdasarkan hasil studi pustaka di atas. Dimana konsep ekspansibilitas menggunakan penentu jumlah pengguna ruang dan kemungkinan terjadinya perluasaan. Konsep versatibilitas menggunakan parameter keragaman kegiatan yang ditampung dan variasi formalitas kegiatan yang ditampung. Sedangkan konvertabilitas meliputi intensitas kegiatan, kemungkinan terjadinya perubahan tata letak komponen ruang dan waktu penggunaan ruang.

Skala Penilaian Parameter

Parameter	1	2	3	4	5
Intensitas Kegiatan	Kegiatan dilakukan tidak rutin.	Kegiatan dilakukan paling tidak satu kali dalam satu tahun.	Kegiatan dilakukan paling tidak satu kali dalam satu bulan	Kegiatan dilakukan paling tidak satu kali dalam seminggu.	Kegiatan dilakukan setiap hari.
Jumlah Penguna	Jumlah pengguna tidak tentu.	Sampai dengan seperempat dari warga RW (<=100 orang)	Seperempat sampai dengan setengah dari seluruh warga RW (100 < x <= 200 orang)	Setengah sampai dengan tiga perempat warga RW (200 < x <= 300 orang)	Tiga perempat sampai dengan seluruh warga RW (300 < x <= 400 orang)
Kemungkinan Terjadinya Perluasan	Sampai tritisan	Sampai batas bangunan seberang	sepanjang gang <= 3 rumah	sepanjang gang <= 7 rumah	Sampai batas ujung gang
Kemungkinan Terjadinya Perubahan Tata Letak	1 elemen untuk diubah susunannya	2 elemen untuk diubah susunannya	3 elemen untuk diubah susunannya	4 elemen untuk diubah susunannya	>= 4 elemen untuk diubah susunannya

Penilaian versatibilitas dilakukan terhadap gang dan ruang serbaguna dengan meninjau jumlah jenis kegiatan yang terjadi. Kegiatan yang terjadi pada ruang serba guna lebih bersifat formal dilihat dari jenis kegiatan yang berlangsung di dalamnya dibandingkan ruang gang. Selain itu, keragaman fungsi yang terjadi di ruang serba guna lebih variatif daripada di ruang gang. Hal ini didasarkan pada kebutuhan jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat membutuhkan naungan sehingga preferensi untuk mengadakan kegiatan dilaksanakan di ruang serba guna.

Penilaian Versatibilitas Ruang Serba Guna

Ruang	Versatibilitas	
	Variasi tingkat formalitas kegiatan	Keragaman fungsi yang dapat ditampung
Ruang Serbaguna	3 kegiatan formal, 1 kegiatan informal	fungsi pemberdayaan masyarakat, fungsi pendidikan, fungsi sosial
Gang	1 kegiatan formal, 3 kegiatan informal	fungsi sosial, fungsi hiburan

Berdasarkan data yang diperoleh, pengguna kegiatan pada ruang serba guna berkisar kurang dari 100 orang. Hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan yang diselenggarkan bersifat formal yang jumlah pengguna dan kegiatan bisa diprediksi dengan mudah. Meskipun demikian, ekspansi masih dimungkinkan hingga sampai batas ujung dengan kondisi penggunaannya bersifat temporer di area ekspansi dan permanen di area ruang serbaguna.

Penilaian Ekspansibilitas Ruang Serba Guna

Formalitas	Kegiatan	Ekspansibilitas	
		Jumlah pengguna kegiatan	Kemungkinan terjadinya perluasan
Formal	PKK	2	1
		56 balita, 7 kader PKK, dan 2 perangkat medis	sampai tritisan
	Paud	2	0
		12	belum ada kebutuhan untuk perluasan
	Pencak Silat	2	5
		15 orang	sampai batas ujung gang
Informal	Keperluan Individu	1	2
		Bergantung keperluan	sampai batas bangunan seberang

Berdasarkan data yang diperoleh, intensitas kegiatan yang terjadi di ruang serba guna terbilang tinggi dengan adanya sistem penjadwalan yang sudah diatur dan bersifat rutin. Kejelasan kegiatan yang terjadi berimplikasi pada penggunaan furnitur di dalam ruang serba guna yang bersifat mudah diubah baik dengan menambah atau mereduksi elemen pendukung kegiatan. Selain itu, penjadwalan yang jelas juga membuat intensitas penggunaan bisa direncanakan yang membuat ruang serba guna bisa digunakan sepanjang hari.

Penilaian Konvertibilitas Ruang Serba Guna

<table>
<tr><th rowspan="2">Formalitas</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="3">Konvertibilitas</th></tr>
<tr><th>Intensitas kegiatan</th><th>Kemungkinan terjadinya perubahan tata letak</th><th>Waktu penggunaan ruangan</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Formal</td><td rowspan="2">PKK</td><td>3</td><td>2</td><td rowspan="2">Pagi (pukul 9-11)</td></tr>
<tr><td>1 kali sebulan</td><td>membutuhkan meja dan kursi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Paud</td><td>4</td><td>3</td><td rowspan="2">Pagi (pukul 8-10)</td></tr>
<tr><td>2 kali seminggu</td><td>membutuhkan meja, kursi, dan papan</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pencak Silat</td><td>4</td><td>0</td><td rowspan="2">Malam (pukul 7-9)</td></tr>
<tr><td>2 kali seminggu</td><td>hanya membutuhkan ruang kosong</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Informal</td><td rowspan="2">Keperluan Individu</td><td>1</td><td>3</td><td rowspan="2">Sesuai kebutuhan (24 Jam)</td></tr>
<tr><td>Tidak rutin</td><td>membutuhkan meja, kursi, dan tenda</td></tr>
</table>

Berdasarkan data yang diperoleh, dengan batas ruang gang yang tidak terdefinisi, kemungkinan untuk ekspansi menjadi sangat tinggi. Namun, ekspansi yang terjadi terfokuskan pad area tertentu yang memang menjadi kesepakatan antar warga. Sejauh ini, berdasar data ekspansi ruang gang terjadi sampai sepanjang gang 5 rumah. Selain itu, ruang ekspansi yang juga tidak terdefinisi memungkinkan pengguna kegiatan untuk bisa mengakuisisi ruang sepanjang gang dan membuat ruang gang bisa menampung seluruh warga RW 7 kampung Babakan Ciamis.

Penilaian Ekspansibilitas Gang

Formalitas	Kegiatan	Ekspansibilitas	
		Jumlah pengguna kegiatan	Kemungkinan terjadinya perluasan
Formal	Festival makanan di gang (Botram)	5	4
		400 orang	sepanjang gang 5 rumah
Informal	Nonton Bareng	3	4
		200 orang	sepanjang gang 5 rumah
	Pengobatan gratis	4	3
		300 orang	sepanjang gang 2 rumah
	Pembagian Sembako	4	3
		300 orang	sepanjang gang 2 rumah

Berdasarkan data yang diperoleh, penggunaan ruang gang sebagai ruang bersama bersifat seremonial dan eventual. Hal ini dikarenakan fungsi utama gang sebagai sirkulasi masih dominan. Sedangkan, kebutuhan untuk berkumpul bersama dalam jumlah yang relatif sedikit masih bisa diakomodasi oleh ruang serba guna. Berikutnya, penambahan elemen pada ruang gang saat penggunaan relatif sedikit dikarenakan semua elemen bersifat temporer. Selain itu, penggunaan ruang gang untuk kegiatan bersama umumnya terjadi pada malam hari sehingga fungsi gang sebagai sirkulasi masih bisa terjadi saat pagi sampai sore hari.

Penilaian Konvertibilitas Gang

Formalitas	Kegiatan	Konvertibilitas		
		Intensitas kegiatan	Kemungkinan terjadinya perubahan tata letak	Waktu penggunaan ruangan
Formal	Seremoni makan di gang (Botram)	2	2	Malam (pukul 7-selesai)
		1 tahun sekali	membutuhkan panggung dan meja	
Informal	Nonton Bareng	2	2	Malam
		minimal setahun dua kali	membutuhkan proyektor dan karpet	
	Pengobatan gratis	2	3	Sesuai kebutuhan
		Minimal 3 kali setahun	membutuhkan meja, kursi, dan tenda	
	Pembagian Sembako	1	3	Sesuai kebutuhan
		tidak rutin	membutuhkan meja, kursi, dan tenda	

Dalam hal ekspansibilitas, ruang serbaguna hanya digunakan oleh kurang dari seperempat masyarakat RW 7 kampung Babakan Ciamis. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan lebih bersifat formal, dengan implikasi bahwa masyarakat yang terlibat relatif sedikit dan dengan penjadwalan yang rutin untuk mengatur pergantian kegiatan. Jika ada kebutuhan ekspansi maka ruang yang dibutuhkan secara permanen hanya sampai batas bangunan seberang sedangkan untuk ekspansi sampai batas ujung gang hanya bersifat temporer. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada ruang gang yang kegiatannya didominasi oleh kegiatan-kegiatan informal. Kegiatan informal yang diselenggarakan di gang umumnya bersifat

terbuka, dan partisipasi warganya sangat tinggi. Kebutuhan ekspansi menjadi sangat besar karena jumlah pengunjung tidak bisa diprediksi dengan jelas. Oleh sebab itu, ekspansi yang terjadi sangat tinggi dan memungkinkan dilakukan di ruang gang yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan ruang bagi masyarakat RW 7.

Perihal konvertibilitas, kegiatan pada ruang serbaguna bersifat rutin dan terjadwal. Pengaturan ini mampu menyediakan ruang bagi berbagai kegiatan dalam satu hari. Kegiatan yang bersifat mingguan dilaksanakan dengan pembagian waktu pagi dan malam. Di sisi lain, elemen pendukung kegiatan juga disediakan dengan kemudahan untuk diatur ulang sesuai kebutuhan. Tetapi dari segi penggunaan, nampaknya masih belum ada kegiatan yang diselenggarakan pada siang hari sehingga konvertibilitas ruang dirasa masih bisa dioptimalkan. Untuk ruang gang, penggunaan lebih bersifat eventual. Konversi ruang yang terjadi adalah ruang sirkulasi menjadi ruang sosial untuk kegiatan bersama masyarakat RW 7. Hal ini berimplikasi penggunaan ruang gang untuk ruang sosial terjadi pada malam hari sehingga fungsi ruang sirkulasi masih bisa terjadi pada pagi sampai sore hari. Elemen pendukung kegiatan juga bersifat mudah diatur ulang dikarenakan kegiatan yang diselenggarakan bersifat temporer.

Mengenai versatibilitas, ruang serbaguna memiliki keberagaman kegiatan fungsi yang diakomodasi. Hal ini dikarenakan ruang serbaguna dapat memberikan naungan yang permanen sehingga pengadaan kegiatan yang tidak masif diutamakan untuk diselenggarakan di ruang serbaguna. Kegiatan-kegiatan tersebut juga lebih banyak bersifat formal yang membutuhkan kenyamanan lebih dari segi kebisingan. Berbeda dengan kegiatan pada ruang gang yang lebih banyak bersifat informal. Kegiatan informal memiliki implikasi bahwa kebutuhan ruang untuk kegiatan memiliki persyaratan yang lebih minim dibanding kegiatan formal. Umumnya, kegiatan yang terjadi di ruang gang memiliki fungsi sosial dan fungsi hiburan.

Fleksibilitas suatu ruangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor kondisi ruangan secara fisik, maupun faktor sosial yang berkaitan dengan jenis kegiatan dan pengguna ruangan tersebut. Untuk menentukan apakah suatu ruang fleksibel atau tidak, perlu meninjau tingkat fleksibilitas ruang tersebut melalui tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versatibilitas. Gang utama dan gedung Serba Guna di RW 7 Babakan Ciamis memenuhi kriteria ruang yang fleksibel, namun dengan tingkatan penilaian ketiga indikasi fleksibilitas yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan kedua ruang tersebut memiliki sifat fisik yang berbeda, dimana gang utama bersifat ruang terbuka dan Gedung Serba Guna merupakan ruang yang tertutup. Faktor ini menyebabkan perbedaan luas ruang dan kapasitas ruang tersebut, sehingga mempengaruhi jenis kegiatan yang diakomodasi dan jumlah pengguna yang ditampung.

Gang utama RW 7 Babakan Ciamis lebih ekspansibel dibandingkan dengan gedung Serba Guna dikarenakan jenis kegiatan yang terjadi di ruang tersebut cenderung bersifat temporer dan informal, serta melibatkan banyak orang. Sedangkan gedung Serba Guna memiliki keterbatasan ruang secara fisik, sehingga kegiatan yang berlangsung di ruang tersebut bersifat formal, dengan peserta kegiatan yang tidak terlalu banyak, tetapi bersifat rutin. Gang utama lebih konvertibel dibandingkan dengan gedung Serba Guna karena sifat fisik ruang yang terbuka dengan elemen permanen yang sangat minim. Hal ini memudahkan terjadinya perubahan-perubahan ruang secara fleksibel untuk mengakomodasi berbagai jenis kegiatan yang berbeda dengan kebutuhkan elemen ruang yang berbeda-beda pula. Gedung Serba Guna juga tidak memiliki banyak elemen permanen, tetapi ruang ini memiliki batas-batas fisik sehingga tidak semua jenis kegiatan bisa ditampung di ruang ini.

Gedung Serba Guna lebih versatil dikarenakan variasi kegiatan yang ditampung di ruang ini lebih banyak dengan kebutuhan ruang

yang berbeda-beda, dan sifat fisik ruang yang memiliki batas-batas yang jelas sehingga memberikan perlindungan dari kebisingan. Sifat ruang ini dapat mengakomodasi berbagai macam kegiatan formal. Sedangkan kegiatan yang berlangsung di gang merupakan kegiatan-kegiatan dengan fungsi sosial massal dan fungsi hiburan, yang sifat kegiatannya relatif sama, dimana peserta kegiatan banyak dan terbuka untuk umum.

MEMBERDAYAKAN (UNTUK) MASA DEPAN
MEMBANGUN RUANG KREATIF UNTUK ANAK-ANAK DI KAMPUNG PONDOK PUCUNG, TANGERANG SELATAN

Martin L Katoppo, Ruth E. Oppusunggu,
Sugeng Triyadi, dan M. Jehansyah Siregar

Bayangkan desain sebagai sebuah generator. Desain yang bekerja selayaknya mesin generator. Desain yang bekerja bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk menerangi dan membangun yang lain. Untuk itu DAG (Design as Generator–www.dagedubrag.org) lahir sebagai sebuah ruang kumpul kreatif yang dibentuk oleh beberapa orang yang percaya bahwa desain seharusnya menjadi kampiun yang memberdayakan serta mendorong terjadinya perubahan di dalam kelompok masyarakat. Visi dan Misi DAG adalah: Menjadi ruang berbagi informasi ilmu desain praktis dan aplikatif dengan konsentrasi desain berkelanjutan ber-teknologi sederhana (low technology) untuk masyarakat Indonesia utamanya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan berharap bermuara pada penyebaran secara viral perubahan ke arah yang lebih baik melalui desain. DAG sendiri akan menjadi ruang paripurna yang bergerak dalam ruang maya hingga ruang faktual yang seluruhnya didedikasikan bagi masalah pemberdayaan masyarakat melalui desain dan arsitektur."

Maka state of the Art DAG adalah memberdayakan warga kampung-kota melalui desain dengan pendekatan partisipatif. Dalam makalah ini DAG akan mengisahkan tentang upaya membangun ruang kreatif untuk anak-anak di Kampung Pondok Pucung, Tangerang Selatan, sebuah kampung 'sisa' yang berada di tengah-tengah sebuah komplek perumahan mega modern. Bertajuk *'KaKiKuKeKo'* (Kampung Kita Kumpul Kreatif Kompak), program ini dirancang untuk mengaktivasi imajinasi anak-anak Kampung Pondok Pucung. Secara kreatif hal ini kemudian diterjemahkan

menjadi desain ruang yang dibangun secara kolaboratif serta partisipatif langsung bersama anak-anak. Mengapa anak-anak? Karena anak-anak adalah harapan dan masa depan.Untuk mencapai tujuan tersebut DAG membangun metodologi spesifik yang dapat mengakomodasi penelitian-tindakan-desain secara bersamaan. Metodologi spesifik ini digunakan untuk membangun tema strategis yang berkelindan dengan ruang dan aktivitas keseharian manusia sebagai dasar pelaksanaan penelitian-tindakan-desain DAG.[1]

Metodologi spesifik ini mengombinasikan PAR (Participatory Action Research) dan DT (Design Thinking). Menurut Taggart (1994, 2006) PAR bekerja berdasarkan praktik yang digerakkan oleh basis teoretis. PAR adalah sebuah penelitian yang berlandaskan ekplorasi dan obyektifikasi pengalaman dan pendisiplinan subyektifitas (McTaggart, 1994). Dengan demikian PAR akan membuat ruang gerak siklis dinamis antara tindakan pelaksanaan penelitian dan aksi yang bertujuan untuk memberi perubahan dalam suatu kelompok komunitas atau masyarakat. Sementara itu DT menurut Tim Brown (2008 & 2009) adalah cara berpikir mumpuni untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kiwari. Menurutnya yang paling diperlukan saat ini adalah cara berpikir komprehensif, bekerja kolaboratif dan selalu berorientasi pada kebutuhan manusia yang mengedepankan inovasi untuk memastikan keberlanjutan.

Brown dan Wyatt (2010) kemudian melihat bahwa DT dapat digunakan secara efektif sebagai alat untuk melakukan perubahan sosial dengan mendorong terjadinya inovasi yang menjadi syarat berkelanjutannya (Wyatt, 2010). Hal ini kemudian bermuara pada penyusunan alat kerja HCD (Human Centered Design) – sebuah alat kerja untuk mendorong terjadinya inovasi dalam sebuah proyek sosial. Alat kerja ini bekerja melalui 3 tahapan: (1) H(ear) – mendengarkan

---

[1] Tim DAG mengapresiasi: RCUS dan Ford Foundation beserta program Urbanisme Warganya, Yayasan daun, mahasiswa/I dan pengajar dari Prodi Desain Interior dan Desain Komunikasi Visual, *School of Design* dan Departemen Psikologi, Universitas Pelita Harapan (UPH) serta segenap warga Kampung Pondok Pucung, terutama anak-anak tercinta – yang telah memungkinkan terlaksananya program *'KaKiKuKeKo'.*

dan mengumpulkan cerita inspiratif dari komunitas; (2) C(reate) – bekerja bersama-sama anggota komunitas untuk menerjemahkan kisah-kisah tersebut menjadi kerangka kerja, identifikasi peluang, pemecahan permasalahan dan pembuatan prototipe, dan; (3) D(eliver) – saat dimana semua pemangku kepentingan bekerja sama merancang rencana implementasi yang berkelanjutan (IDEO team, 2013). DT-HCD ini akan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara dimensi sosial dan desain.

Untuk membuat kombinasi PAR dan DT ini dapat berjalan maka model kerja yang digunakan adalah model MMR (Mixed Methods Research), yaitu Sequential Embedded Experimental (model Penelitian Eksperimental Berkelindan Berkelanjutan; Creswell & Clark, 2007). Dalam rangkaian model ini PAR dan DT beroperasi dengan sangat baik untuk mengizinkan desain bekerja dan diselidiki secara kuantitatif – sebagai sebuah inovasi desain dan desain sebagai eksperimental sosial, sekaligus juga secara kualitatif – sebagai sebuah pengalaman dan apresiasi dari upaya desain yang partisipatif. Metode kombinasi ini diharapkan akan memberikan nilai baru pada desain, utamanya dalam keutamaan inovasi dan responnya terhadap konteks sosial dimana berada (Katoppo dan Sudradjat, 2015). Bagan di bawah menjelaskan hubungan tersebut dan bagaimana bekerja sebagai metodologi spesifik penelitian-tindakan-desain DAG.
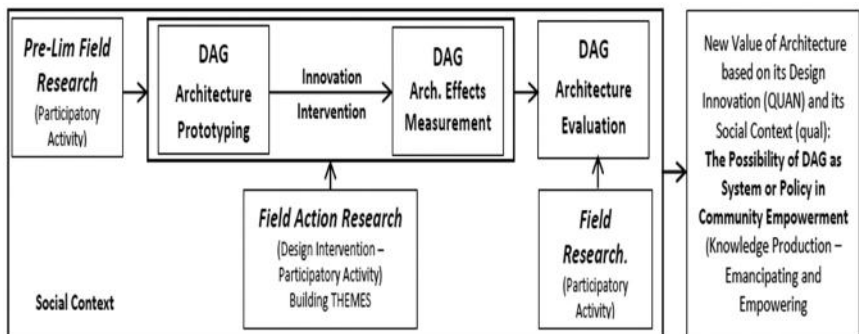
Metodologi spesifik penelitian-tindak-desain DAG
(Katoppo, Sudradjat: 2014)

Metode kerja kombinasi spesifik ini kemudian diterjemahkan secara operasional teknis dan menghasilkan 3 tema strategis pemberdayaan DAG yang dikenal dengan ‘Karsa’,‘Asa’ dan ‘Rasa’. ‘Karsa’ adalah mengenai bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai dalam suatu komunitas, dan karenanya akan selalu berhubungan dengan cara bagaimana membangkitkan kenangan terhadap situasi dan kondisi masa lampau sebagai hal yang inspiratif. ‘Asa’ adalah tentang harapan, dan karenanya akan selalu berhubungan dengan apa yang diimajinasikan komunitas tentang masa depan. ‘Rasa’ adalah tentang mengalami dan memaknai sebuah pengalaman, sehingga DAG selalu terikat ruang dan karenanya juga selalu berada di kekinian. Bagaimana 3 tema strategis pemberdayaan DAG bisa muncul melalui tautannya dengan metodologi spesifik penelitian-tindakan-desain DAG dapat dilihat pada bagan di bawah:
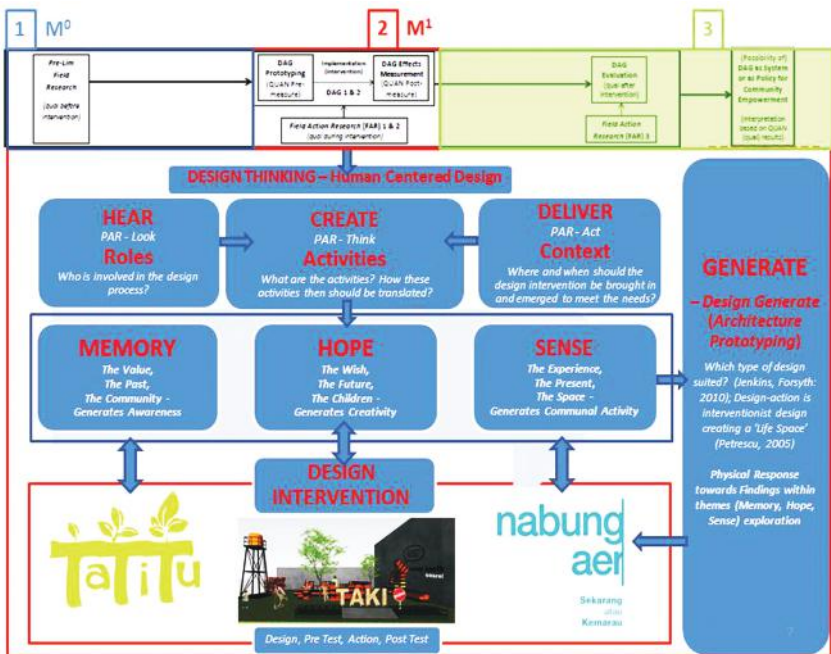
Pengembangan 3 tema strategis pemberdayaan DAG & hubungannya dengan intervensi desain (Katoppo: 2015)

Makalah ini kemudian berfokus kepada penjelajahan tema strategis DAG 'Asa' – yang berbicara tentang harapan dan imajinasi tentang masa depan bersama aktor komunitas yang paling pantas mewakili masa depan: anak-anak.

Kisah Program *'Kakikukeko'*

Kampung tempat tim DAG melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat adalah di Kampung Pondok Pucung, Tangerang Selatan, Banten, Jawa Barat. Kampung ini berada di daerah pinggir perkotaan yang sejatinya adalah kampung asli hunian masyarakat Betawi. Karena perkembangan pembangunan pemukiman modern di area pinggir kota, kampung ini kemudian terdampak melalui penjualan tanah oleh warganya secara masif kepada pihak pengembang. Maka area kampung yang tersisa ditembok oleh pengembang untuk menandakan batas antara area kampung dan area pemukiman modern yang dibangun. Secara kasat mata bisa terihat dan terasa perbedaan perkembangan kedua area tersebut. Area pemukiman modern dibangun tertata dengan segala kemapanan sarana dan infrastrukturnya, sementara area kampung yang hanya bersebelahan tetap seperti kondisi awalnya–berkembang dengan bebas sesuai status kepemilikannya, tanpa tata ruang formal, juga minim sarana dan infrastruktur yang layak maupun perhatian terhadap kondisi lingkungan yang nyaman dan sehat. Namun demikian layaknya sebuah kampung, suasana keseharian masyarakat kampung Pondok Pucung guyub, hangat, ramah nan menyenangkan. Nuansa kedekatan hubungan antar keluarga dan antar kelompok warga dengan semua warna perayaan budaya dan keagamaan juga menjadi rona sehari-hari kampung ini.

Situasi sosial dan kondisi fisik eksisting Kampung Pondok Pucung
(Katoppo, 2012-2015)

Pada tahun 2014 tim DAG mulai merancang dan membuat program untuk anak-anak kampung Pondok Pucung. Program-program yang dibuat berupaya untuk meningkatkan kreativitas dan penanaman kesadaran terhadap kebersihan lingkungan bagi anak-anak, yang dikemas dengan cara bermain bersama mereka. Tim DAG mengajak anak-anak untuk mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang di sekitar lingkungan untuk kemudian secara kreatif membuatnya menjadi permainan atau benda berguna lain yang dapat menarik minat mereka. Untuk meluaskan inisiasi program bermain bersama anak-anak, tim DAG kemudian juga berencana untuk menghadirkan sebuah taman bermain untuk anak-anak, dengan memanfaatkan lahan kosong milik warga anggota salah satu klan keluarga besar di kampung. Taman ini digagas karena tim DAG melihat bahwa masih sangat beragam aktivitas bermain anak-anak di kampung dan terjadi secara aktif di ruang luar. Akan tetapi ruang luar untuk bermain anak ini semakin lama semakin berkurang karena bertambahnya bangunan yang didirikan di dalam kampung. Ruang terbuka yang masih tersisapun seringkali digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk membuang sampah sembarangan warga. Sehingga tak jarang anak-anak bermain di lahan yang penuh timbunan sampah atau di sepanjang jalan lingkungan.

Taman yang tim DAG usulkan diberi nama *'taki'*–singkatan dari taman kita, sebagai taman yang dibuat bersama, milik dan untuk warga, adalah sebuah taman yang utamanya akan berfungsi sebagai ruang bermain anak-anak. *Taki* juga akan menjadi semacam taman

kreatif yang di dalamnya akan memiliki fitur-fitur interaksi kreatif dan edukatif mengenai pengetahuan lingkungan bestari (seperti sistem pengelolaan sampah, pemanenan air hujan, pemanfaatan tanaman produktif dan lain-lain) untuk anak-anak dan warga (Valencia dan Katoppo, 2015).

Proses penyampaian gagasan kepada warga–terutama sang pemilik lahan, perencanaan dan perancangan hingga sistem konstruksi *taki* yang modular dan dapat dipindah, pendekatan dan kelindan (*engagement*) dengan anak-anak dilakukan oleh tim DAG. Namun setelah hampir 2 tahun bernegoisasi, pemilik lahan tidak bisa memberikan izin karena lahan tersebut akan dibangun rumah sewa atau *kontrakan* bagi para warga pendatang–dan memang pada awal tahun 2016 rencana tersebut akhirnya terealisasi. Hasil evaluasi tim DAG menunjukkan bahwa pada saat awal inisiasi metode spesifik DAG masih belum terbangun dengan baik dan belum cukup teruji. Dalam kasus *taki*, ide dan desainnya muncul dengan terlalu banyak mengandalkan analisis hasil pengamatan tim saja, walaupun dilakukan secara mendalam, bukan hasil dari kelindan erat antara tim DAG dengan warga maupun anak-anak kampung Pondok Pucung, sehingga juga minim partisipasi aktif dari anggota-anggota komunitas kampung ini. Sehingga hasil desain masih berada dalam fase konsultasi obyek alih-alih hadir sebagai sebuah subyek kolaborasi.

Berbekal pengetahuan tersebut dan menolak untuk menyerah dari upaya menyediakan ruang bermain kreatif untuk anak-anak Kampung Pondok Pucung, maka tim DAG mengubah strategi pendekatan melalui 2 hal: (1) Memetakan aktivitas bermain anak–yang akan dilakukan bersama-sama dengan anak-anak, sebagai aktor utama dari program ini, dan (2) Merespon aktivitas bermain anak-anak yang berhasil dipetakan tersebut dengan intervensi-intervensi desain yang tujuannya lebih berfungsi sebagai pemantik kreativitas, dan (3) mencoba membuat simulasi ruang kreatif untuk anak-

anak Kampung Pondok Pucung. Program ini kemudian dinamakan *'KaKiKuKeKo'*–sebuah program untuk mengaktivasi ruang kreatif bagi anak-anak Kampung Pondok Pucung, dengan tujuan mencerdaskan mereka melalu cara bermain yang lebih kreatif. Nama *'KaKiKuKeKo'* sendiri digunakan untuk mengingatkan proses belajar membaca dengan penggunaan huruf hidup, dan merupakan singkatan dari Kampung Ki-ta, Ku-mpul, KrE-atif dan Ko-mpak. Program *'KaKiKuKeKo'* bertujuan untuk mendorong terjadinya produksi pengetahuan kota oleh warganya sendiri, sehingga warga bisa mendefinisikan arti ruang kota–tempat menghuni warga dalam terminologi mereka sendiri. Selain itu program ini didukung oleh Yayasan daun–yang peduli terhadap pembangunan kreativitas dan sikap inovatif anak-anak, mahasiswa/i dan pengajar Universitas Pelita Harapan (UPH) dari Desain Interior dan Desain Komunikasi Visual, *School of Design* dan Departemen Psikologi.

Fase 1 *'KaKiKuKeKo'*: Memetakan aktivitas bermain anak-anak

Translasi 'Asa' membutuhkan pendekatan partisipatif yang berbeda. Hal ini karena pengumpulan data, intervensi, pengujian, analisa dan pengambilan keputusan terjadinya perubahan dilakukan peneliti dengan dan bersama anak-anak. Secara garis besar 'Asa' menggunakan 4 tahap *Design, Pre-Test, Action & Post-Test* yang dilaksanakan melalui 3 aktivitas, yaitu (a) Ayooo MAIN…!!! adalah kegiatan *pre-lim research & PreTest** dalam bentuk pemetaan aktivitas bermain anak-anak, (b) Ayooo KREATIF…!!! sebagai kegiatan intervensi desain atas respon dari apa yang berhasil dipetakan dan, (c) Ayooo BACA…!!! Sebagai sebuah upaya pemicu aktivitas kreatif melalui membaca melalui simulasi ruang kreatif dan baca. Upaya awal dari aktivitas pertama 'Ayooo MAIN…!!!!' adalah upaya memahami interaksi aktivitas bermain anak-anak dengan area di kampung-kota. Tim DAG kemudian memetakan aktivitas tersebut melalui pengamatan preliminari, seperti yang terlihat di bawah ini:

Pemetaan prelimirari aktivitas bermain anak-anak di Kampung Pondok Pucung (Katoppo, 2015)

Dari pemetaan tersebut kita dapat melihat bahwa anak-anak bermain secara berkelompok (sesuai umur, kedekatan tempat tinggal dan jenis kelamin), menjelajah seluruh area kampung, bermain permainan fisik dan menggunakan imajinasi yang luar biasa dalam bermain dan mendefinisikan ruang bermain mereka. Namun pemetaan preliminari tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak hal yang mesti diperhatikan oleh tim DAG, termasuk melibatkan anak-anak secara lebih aktif dalam melakukan pemetaan aktivitas bermain mereka. Maka tim DAG memutuskan untuk membuat peta yang lebih komprehensif bersama anak-anak, yang akan menunjukkan aktivitas dan lokasi bermain anak-anak di kampung Pondok Pucung. Untuk memastikan data yang dikumpulkan valid, kemudian bekerja sama dengan tim psikologi dan tim pembuat video dokumenter untuk menemukan metode yang paling baik untuk itu. Semua pihak kemudian sepakat bahwa anak-anak akan menjadi aktor utama dalam kegiatan ini. Anak-anak akan diminta untuk bermain apapun yang mereka inginkan dan di lokasi di kampung tempat mereka biasa bermain permainan tersebut. Anak-anak akan dibagi ke dalam beberapa kelompok bermain yang tiap kelompoknya ditemani oleh 1 orang fasilitator bermain, 1 orang peneliti yang akan mencatat data tentang permainan yang dilakukan dan 1 orang pengambil gambar video dokumenter yang akan mengabadikan kegiatan permainan tersebut.

Pada hari yang ditentukan maka proses pengumpulan data aktivitas dan lokasi bermain anak-anak kampung Pondok Pucung-pun dilakukan. Pada hari tersebut hampir 50 orang anak-anak yang datang untuk berpartisipasi bermain bersama tim gabungan DAG. Pada hari tersebut, tim berhasil memetakan 27 jenis permainan dan semua lokasi tempat anak-anak Kampung Pondok Pucung bermain. Hasil pemetaan tersebut dibuat menjadi peta interaktif bersama tim grafis DKV – yang juga kemudian menunjukkan peta kampung Pondok Pucung secara keseluruhan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
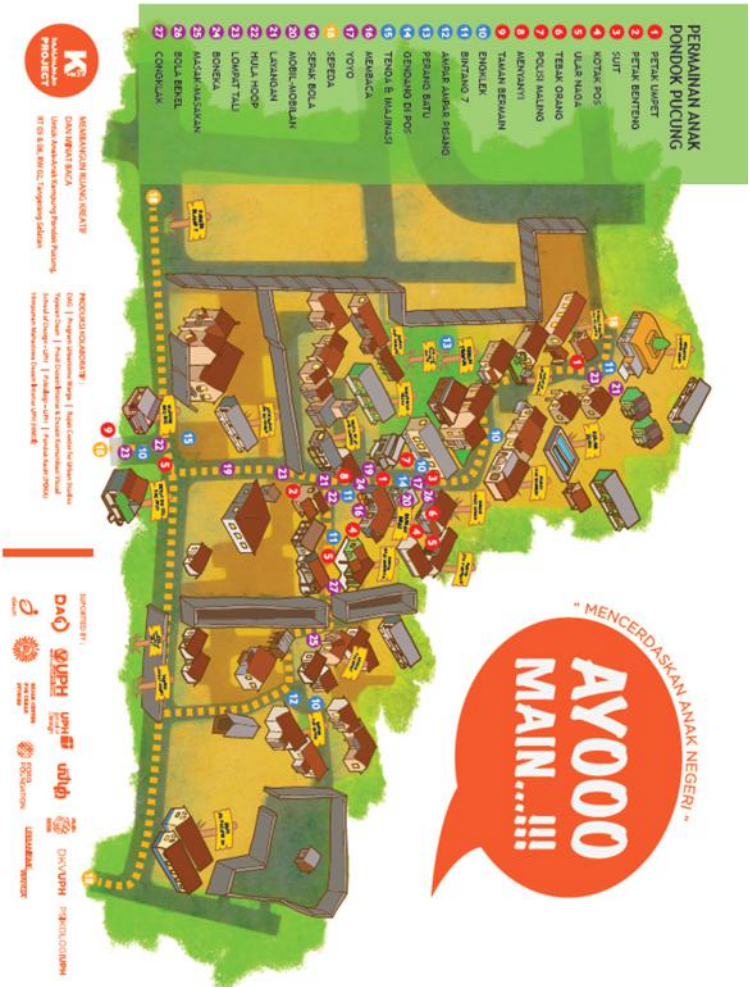
Peta aktivitas dan lokasi bermian anak-anak Kampung Pondok Pucung (sumber: Katoppo, 2015)

Fase 2 *'KaKiKuKeKo'*:
Merespon aktivitas bermain anak dengan intervensi desain

Hasil pemetaan aktivitas 'Ayooo MAIN…!!!' kemudian diberikan dan dikembalikan lagi kepada anak-anak. Tampak bahwa anak-anak menyenangi peta tersebut dan menggunakannya untuk mengidentifikasi permainan mereka sekaligus digunakan oleh anak-anak untuk menentukan akan bermain apa dan dimana di kampung-kota.

Anak-anak menggunakan peta dengan aktif (sumber: Katoppo, 2015)

Peta ini juga kemudian menjadi landasan dasar tentang apa yang akan dilakukan sebagai intervensi desain di sepanjang ruang-ruang yang tersedia di kampung. Tim DAG kemudian membagi rencana intervensi menjadi 2 model, yaitu intervensi 2D-berupa mural yang akan digambar pada dinding-dinding sepanjang kampung serta berbagai papan permainan kreatif, dan intervensi 3D-berupa alat-alat permainan kreatif yang diposisikan di lokasi bermain anak-anak menggunakan lahan-lahan 'sisa' milik warga di beberapa area kampung. Aktivitas intervensi ini dinamakan oleh tim DAG sebagai aktivitas 'Ayooo KREATIF…!!!'. Langkah awal dari 'Ayooo KREATIF…!!!' adalah dengan mengajak anak-anak membayangkan intervensi-intervensi desain yang akan dilakukan. Seperti juga strategi pemetaan, aktivitas intervensi akan dilakukan utamanya oleh anak-anak sendiri, dan ini dilakukan dengan memberikan ruang desain kepada mereka untuk mendesain sendiri purwa-rupa atau prototipe dari intervensi-intervensi tersebut. Aktivitas mendesain purwa-rupa ini dilakukan bersama 40-an anak yang dibagi ke dalam beberapa kelompok yang setiap kelompoknya, serupa dengan saat aktivitas pemetaan 'Ayooo MAIN…!!!', ditemani oleh 1 orang fasilitator, 1 orang peneliti pendata dan 1 orang videografer. Hasilnya sungguh luar biasa, anak-anak berhasil mengimajinasikan desain permainan yang paling cocok untuk mereka.

Selain itu juga tim DAG juga melihat adanya permasalahan mengenai aktivitas anak-anak berusia menjelang remaja yang gemar mencorat-coret dinding-dinding di sekitar wilayah perkampungan. Saat berdiskusi dan bertemu dengan anak-anak ini, ditemukan bahwa ada 2 kelompok besar yang melakukan aksi mencorat-coret dinding ini. Tim DAG kemudian mengajak kedua kelompok ini untuk ikut aktif dalam pengerjaan mural dalam area kampung, sebagai salah satu bentuk intervensi 2D yang digagas bersama-sama.emua hasil pengamatan dan kelindan bersama anak-anak tersebut kemudian dibawa tim ke kampus untuk didiskusikan dan didesain secara lebih mendetail, bersama-sama antara tim DAG dan pengajar serta mahasiswa/i DI dan DKV, *School of Design,* UPH. Usulan-usulan desain-desain intervensi 2D dan 3D yang dihasilkan secara berkala terus didiskusikan bersama warga, diperiksa

dan diuji kelayakannya. Uji keamanan dan kekuatan juga dilakukan untuk hasil desain intervensi 3D.

Proses desain dan uji kekuatan di kampus, berdiskusi dan mencari *feedback* dari warga (sumber: Katoppo, 2016)

Setelah semua proses desain dilaksanakan dan semua hasil desain telah disetujui oleh warga, maka tim bersama-sama warga kemudian membuat dan membangun intervensi kreatif 2D dan 3D tersebut secara kolaboratif. Proses ini dilaksanakan dengan riang gembira selama kurang lebih 3 minggu dengan melibatkan mahasiswa/i, tim teknis yang memeriksa keamanan sistem konstruksi intervensi 3D, pengajar dan seluruh anggota komunitas - para anak muda di kampung, para ibu dan bapak dan tentu saja aktor utama dari program *'KaKiKuKeKo',* anak-anak sendiri.

Proses desain dan uji kekuatan di kampus, berdiskusi dan mencari *feedback* dari warga (Katoppo, 2016)

Setelah semua proses desain dilaksanakan dan semua hasil desain telah disetujui oleh warga, maka tim bersama-sama warga kemudian membuat dan membangun intervensi kreatif 2D dan 3D tersebut secara kolaboratif. Proses ini dilaksanakan dengan riang gembira selama kurang lebih 3 minggu dengan melibatkan mahasiswa/i, tim teknis yang memeriksa keamanan sistem konstruksi intervensi 3D, pengajar dan seluruh anggota komunitas-para anak muda di kampung, para Ibu dan Bapak dan tentu saja aktor utama dari program *'KaKiKuKeKo',* anak-anak sendiri. Intervensi 2D hadir berupa: (1) Mural - yang berisi pesan-pesan yang dianggap penting oleh warga untuk generasi mudanya dan kepada kampungnya, juga tentang peta kampung yang menjadi identitas kampung. Peta kampung ini adalah peta interaktif yang dapat digunakan untuk bermain oleh anak-anak. Hal yang menarik dari pembuatan mural ini adalah munculnya inisiasi mandiri warga yang mengecat tambahan hampir 15 lokasi dinding dari hanya 5 lokasi yang direncanakan di awal akan dikerjakan pada hari tersebut, dan (2) Papan permainan interaktif–yang berisi permainan belajar membaca dan berhitung dengan menggunakan peta kampung dan papan permainan kompetitif yang memberikan pesan terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai tipe dan jenis sampah.

Sedangkan intervensi 3D dibuat di 3 lokasi, sebagai instalasi alat permainan kreatif kompetitif yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai imajinasi jenis permainan oleh anak-anak sendiri. Dari hasil pengamatan tampak bahwa anak-anak merespon dengan sangat antusias semua intervensi 2D dan 3D yang dihadirkan oleh program *'KaKiKuKeK*o' ini. Kehadiran intervensi-intervensi ini membuat anak-anak untuk kemudian bermain dan beroikir secara kreatif, utamanya karena dan saat mereka terlibat aktif dalam pembuatan intervensi-intervensi tersebut.

Fase 3 *'KaKiKuKeKo'*:
Membangun simulasi ruang kreatif dan baca untuk anak

Aktivitas terakhir yang dilakukan oleh tim DAG adalah upaya membangun simulasi ruang kreatif dan baca untuk anak-anak Kampung Pondok Pucung, yang dinamai 'Ayooo BACA…!!!'. Awalnya kegiatan ini akan dilakukan setelah pelaksanaan aktivitas kedua 'Ayooo KREATIF…!!!' – namun kemudian salah satu anggota warga yang terinspirasi oleh rangkaian kegiatan program '*KaKiKuKeKo*' menawarkan teras rumahnya untuk menjadi ruang kreatif dan membaca anak-anak. Tawaran ini tentu saja direspon secara antusias oleh tim gabungan DAG. Teras yang sering digunakan untuk belajar mengaji anak-anak tersebut kemudian ditambah fungsinya menjadi simulasi ruang kreatif dan membaca bagi anak-anak.

Simulasi ruang kreatif dan baca untuk anak-anak Kampung Pondok Pucung: (a) teras eksisting, (b) proses desain dan diskusi bersama warga, (c) proses pembangunan, (d) setelah jadi, dan (e) saat digunakan oleh anak-anak (Katoppo, 2016)

Refleksi: Inisiasi kreatif dan mandiri warga

Pengukuran pasca (*Post-Test*) program *'KaKiKuKeKo'* yang dilakukan oleh tim DAG menunjukkan beberapa temuan menarik: (1) Keterlibatan dan partisipasi aktif dari anak-anak dalam keseluruhan proses terbukti efektif. Hal ini terlihat dari antusiasme anak-anak sejak awal program, pemetaan, pembuatan purwa-rupa, desain,

saat pembuatan hingga penggunaan intervensi desain 2D dan 3D, begitu pula ruang (simulasi) kreatif dan baca oleh anak-anak. (2) Besarnya dukungan dari warga, terutama saat memberikan izin penggunaan dinding ataupun lokasi intervensi 2D dan 3D, bahkan hingga menyediakan teras rumahnya untuk dijadikan ruang kreatif dan membaca – yang bisa dibandingkan pada waktu tim mengalami kegagalan saat mencoba menginisiasi *'taki'*. Hal ini menunjukkan bahwa melibatkan banyak pemangku kepentingan jauh lebih baik ketimbang memusatkan energi terhadap 1-2 anggota komunitas. (c) Munculnya inisiasi-inisiasi kreatif dan mandiri dari warga, baik pada saat pelaksanaan, bahkan hingga setelah program selesai. Inisiasi-inisiasi kreatif dan mandiri warga ini muncul dalam bentuk pembuatan instalasi permainan dan mural-mural baru di dinding-dinding kampung.

'Asa' yang membicarakan tentang harapan dan imajinasi komunitas tentang masa depan, melalui program *'KaKiKuKeKo'* dan ke-3 aktivitas 'Ayooo MAIN, KREATIF dan BACA…!!!' mulai bisa mewujud. Pembukaan wacana dan aksi telah dilakukan, dan warga telah meresponnya dengan menunjukkan bahwa warga juga berdaya dalam mengimajinasikan dan mewujudkan wajah kampungnya yang bergeliat, kreatif dan kolaboratif melalui inisiasi-inisiasi mandirinya. Sedangkan bagi anak-anak, walaupun masih perlu dikaji kembali dampak dari program ini kepada mereka, namun paling tidak pengukuran awal menunjukkan mereka antusias menggunakan ruang-ruang baru kreatif ini. Namun justru dampak terbesar bagi anak-anak ada pada proses panjang program yang berjalan hampir 1 tahun, di mana mereka terus menerus terlibat terasah dan terpantik kreativitasnya. Bagi tim DAG ini justru baru pembukaan terhadap lembaran tema 'Asa', yang masih akan terus berlanjut bermain secara kreatif bersama-sama anak-anak kampung Pondok Pucung.

Kisah ini juga menunjukkan bahwa desain memang memiliki potensi untuk memberdayakan dan membangkitkan kreativitas

dan daya imajinasi warga. Inilah makna sesungguhnya dari pemberdayaan–saat warga kemudian menghasilkan pengetahuan dan translasi desain-nya sendiri, saat warga menentukan apa yang paling baik, bagus dan indah untuk huniannya sendiri. Saat itu terjadi, maka desain bukan hanya memberdayakan, juga membebaskan. Kisah upaya membangun ruang kreatif untuk anak-anak di kampung Pondok Pucung ini, walaupun masih jauhdari sempurna, namun sedikit memberikan nuansa terjadinya 'ruang yang hidup' (-*life space*). Ruang yang menurut Petrescu (2005) adalah ruang dimana partisipasi masyarakatnya tak perlu lagi dipertanyakan karena hadir secara alamiah dan membentuk ruang dinamis yang tak memerlukan kepastian, terbuka atas keberagaman, *ringkih,* tak terbatas kemungkinan, penuh fragmen dan berdimensi banyak. Sebuah ruang katalis, yang setiap orang di dalamnya harus mendefinisikannya secara berkelanjutan.

GEBYURAN BUSTAMAN, SEMARANG
TRADISI, GENGSI, DAN SOLIDARITAS

Ahmad Khairudin

Ada banyak cara untuk membuat masyarakat kembali menjadi solid setelah kohesivitas mereka menurun karena kesibukan dalam mencari nafkah sehari-hari. Jauh hari Durkheim telah meneliti bagaimana masyarakat bisa padu padahal mereka terdiri dari beragam latar belakang berbeda. Penelitiannya kemudian membagi solidaritas masyarakat menjadi solidaritas mekanis (dalam masyarakat terdahulu) dan solidaritas organis (masyarakat sekarang). Pembagian kerja di masyarakat modern dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kepaduan tersebut. Sedangkan dalam masyarakat lebih sederhana, keseragaman maupun homogenitas menjadi prasyarat terciptanya kepaduan. Namun bagaimana dengan masyarakat modern yang masih merawat tradisinya? Di Kampung Bustaman, mempunyai kasus yang menarik. Kampung yang terkenal sebagai penjagal kambing dan gulainya yang termahsyur ini mempunyai berbagai irisan yang membuat mereka tetap padu. Selain unsur kekerabatan yang erat melekat, mereka banyak yang terkoneksi satu sama lain karena hubungan kerja. Itu saja tidak cukup untuk merawat cita-cita kolektivitas kampung makanya mereka perlu merawat tradisi demi menjaga nilai-nilai ideal itu tetap hadir.

Adalah Victor Turner yang menyatakan salah satu fungsi ritual yakni menghadirkan kembali nilai-nilai yang sering dilupakan karena kesibukan keseharian. Fungsi ritual ini selain menguatkan kembali masyarakat juga sebagai pengingat ada hal-hal lain yang penting ketimbang kesibukan bekerja. Menurut Rudjanysah ritual adalah indeks bagi sebuah struktur yang terbangun dari kelompok-kelompok itu. Victor bahkan lebih penting dari struktur karena

merupakan ekspresi langsung dari struktur pengelompokan itu sendiri (Rudjansyah, 2015). Lebih jauh menambahkan ritual tak hanya mengekspresikan tetapi juga menguatkan kembali penghormatan yang orang miliki terhadap obyek-obyek nan sakral. Dalam kasus kampung Bustaman, warga mewujudkannya dalam bentuk ritual Gebyuran Bustaman.

Kampung Bustaman terletak di Kelurahan Purwodinatan, secara administratif kampung ini terdiri atas 2 RT, yakni RT 4 dan RT 5 di RW 3 serta dihuni sekitar 330an warga. Posisinya tidak terlalu jauh dari pusat kota lama di era Belanda. Bersama 4 kelurahan lain, yakni Tambakrejo, Kaligawe, Kemijen, Rejomulyo, dan Purwodinatan tahun lalu masuk dalam Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) karena wilayah ini dikenal sebagai kampung padat kumuh miskin. Kampung ini bisa diakses dari jalan MT Haryono dan jalan Petudungan. Bisa pula dari Jalan Pekojan Tengah maupun Bustaman Gedong, namun hanya bisa dilalui melalui jalan kaki jika melewati jalur tersebut. Bustaman juga dikenal sebagai kampungnya leluhur Raden Saleh. Karena dulunya wilayah ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Belanda kepada Kyai Kertoboso Bustam (leluhur Raden Saleh) setelah keberhasilannya mendamaikan orang Cina dengan Belanda pasca Geger Pecinan abad 18. Atas jasanya Kyai Bustam kemudian diberi hadiah sebidang tanah yang luas yang pada waktu itu berada di dekat 'kota' Semarang, dan kemudian dinamakan kampung Bustaman, hingga masa sekarang (Baharudin Marasutanfi, Raden Saleh 1807-1880).

Pada perkembangannya kampung Bustaman tidak dihuni oleh keturunan langsung Kyai Bustam. Terakhir Raden Roro Hartati (keturunan ketujuh Kyai Bustam) yang bermukim di Bustaman, itupun sekarang sudah pindah. Praktis saat ini di Kampung Bustaman tak ada satupun keturunan Kyai Bustam yang tinggal di kampung jagal tersebut. Menariknya meskipun tak ada garis keturunan warga sepakat untuk menghidupkan kembali tradisi gebyuran yang konon dilakukan oleh Kyai Bustam. Di Kampug itu juga terdapat sumur yang dipercaya sebagai petilasan Kyai Bustam sehingga koneksi antara

situs dan cerita terjalin. Namun kepercayaan bahwa Kyai Bustam memandikan keturunannya di sumur tersebut menjelang Ramadhan hanya dari mulut ke mulut. Sampai akhirnya tahun 2013 kepercayaan itu didaur ulang menjadi kebudayaan yang sama sekali baru.

Jalannya Gebyuran

Kegiatan Gebyuran diadakan seminggu sebelum puasa dan melibatkan seluruh warga di kampung Bustaman. Tidak seperti kepercayaan yang sebelumnya Kyai Bustam memandikan satu persatu, acara Gebyuran Bustaman ini warga saling lempar air satu sama lain (dari bahasa Jawa *Gebyur* yang artinya menyiram dengan menggunakan wadah air). Berbagai alat digunakan misalnya ember, gayung, tong, selang air, air yang diikat dalam kantong plastik lalu dilempar digunakan untuk membasahi warga. Berlangsung dari setelah Ashar hingga menjelang Maghrib. Warga jauh hari sudah diberi tahu akan ada ritual ini dan diperingatkan keras untuk tidak membawa alat-alat elektronik sehingga tak rusak kalau kebasahan. Siapapun yang disiram tidak boleh marah dan itu berlaku bagi siapapun yang berada di kampung.

Pengumuman melalui speaker atau sirine apapun yang bisa menarik perhatian massa karena suaranya yang keras menjadi penanda dimulainya Gebyuran. Selama kurang lebih 2-3 jam warga perang air dari segala penjuru. Area yang digunakan sebagai peperangan air ini meliputi seluruh kampung. Sebagai informasi, Bustaman tidaklah luas amat. Total seluruh wilayah kalau dibikin rata-rata adalah satu hektar saja dengan rumah saling berhimpitan. Lebar jalan 2 meter sampai 3 meter di sisi tertentu. Namun secara umum di jantung kampung luasan jalan rata-rata dua meteran sehingga hanya bisa dilewati sepeda motor, kalau saling bersimpangan biasanya ada yang mengalah terlebih dahulu. Ruang publik adalah jalanan itu sendiri dan disanalah Gebyuran terjadi. Ada yang melempar air dari atap, lantai II, jalanan, pojokan gang dan lain-lain. Tak hanya warga Bustaman yang hadir, orang dari kampung

sebelah seperti kampung Bustaman Gedong, Pekojan, dan kampung sekitar kadang datang. Wartawan juga tak pernah luput meliput kegiatan ini. Setelah pertempuran usai dan capek, warga lalu menyediakan bubur untuk dimakan bersama.

Adalah Suhari atau sering dipanggil Hari Bustaman, salah satu penggagas kegiatan ini bersama kesepakatan warga yang lain. Hari Bustaman juga terlibat sebagai donatur yang menyediakan bubur untuk warga dan para tamu yang hadir. Menurutnya ritual ini sebagai wujud untuk menyucikan diri secara simbolis menjelang bulan puasa. “Konon Kyai Bustam memandikan cucunya sebelum puasa sebagai wujud penyucian diri, sekarang dikreasikan ulang menjadi gebyuran,” ujarnya. Menariknya lagi jika biasanya ritual di Jawa dilakukan secara

ketat dengan aturan baku dan tata krama yang rigid, di Gebyuran Bustaman ini kesan selintas yang ditangkap penulis tradisi dikreasi lebih cair. Tanpa upacara tetek bengek yang sakral, adiluhung dan penuh petatah-petitih. Unsur kesenangan dan serta merta menjadi daya dorong utama. Pesan-pesan tentang penyucian dan hal-hal ideal lain mengenai kehidupan tidak disampaikan secara vulgar dan kaku. Unsur kebersamaan lebih ditonjolkan dalam event ini. Seperti diakui oleh Ketua RW 3, Wahyuno yang mengatakan "Terpenting warga gembira dan bisa melepaskan diri sesaat dari himpitan hidup, dan juga kebersamaan yang terus kami pelihara," ujarnya.

Masa Lalu sebagai Modal Kultural

Sebenarnya agak susah membayangkan apa yang dilakukan dalam Gebyuran Bustaman ini benar-benar sakral karena unsur-unsur sakral seperti dalam ciri-ciri ritual dalam agama tak banyak mendapat tempat. Dalam Gebyuran Bustaman penanda sakral yang biasanya ditandai dengan keheningan berganti dengan hingar bingar warga karena perang air. Memang dipembukaannya ada tradisi memandikan anak kecil terlebih dahulu namun tiap tahun bisa berubah. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh warga lebih dekat dengan konsep invensi tradisi yang dikembangkan oleh Eric Hobsbawm. Invensi tradisi dalam pengertian Hobbawm yakni menggunakan elemen tradisi untuk diaktualisasi, dikontstruksi, dan secara resmi dilembagakan dengan praksis berulang-ulang[1]. Materi masa lalu yakni yang dinisbatkan pada Kyai Kertoboso Bustam saat memandikan cucunya digunakan sebagai bahan mentah untuk dikembangkan dalam era kekinian dengan nilai-nilai yang baru. Fungsi masa lalu sebagai pengikat memori kolektif digunakan dalam konsep peneguhan identitas dan memori kolektif bersama. Dalam wawancara dengan narasumber berbeda, Aris Zarkasyi misalnya menceritakan embrio lain dari Gebyuran Bustaman yakni dari

[1] Inventing traditions, it is assumed here, is essentially a process of formalization and ritualization, characterized by reference to the past, if only by imposing repetition (Hobsbawm, 1983: 4)

kebiasaan warga di tiap bulan Ramadhan untuk bersih bersih kolah (tempat wudhu) mushola. Menjelang Ramadhan biasanya (alm) H Mahrus mengiming-imingi anak-anak kecil upah untuk membersihkan kolah untuk wudhu di Mushola. Kolah/kolam itu dibersihkan menggunakan kerang. Dulu waktu menguras mengundang keseruan tersendiri karena anak-anak kecil berkumpul, waktu itu sumber air untuk membilas menggunakan sumur engkel. Kolam mempunyai luasan 2 meter x 6 meter untuk wudhu dan setinggi lutut untuk bagian bersih kaki dan setengah dada dewasa untuk wudhu.

Bagi Aris momentum Gebyuran mengingatkankannya pada masa lalu dan membuat warga *guyub*. Biasanya acara diselenggarakan setelah Ashar hingga menjelang Maghrib lalu ditutup dengan makan bersama bubur sumsum. Bubur sumsum ini konon merupakan kebiasan warga jika mereka usai menghelat hajatan. Bahannya terbuat dari *gulo jowo* dibuat *kinco* atau saus, santen, dan tepung beras. Biasanya yang menyediakan ibu Salamah bersifat sukarela, sekaligus sebagai wujud *sodaqoh*. Tahun pertama didominasi warga kampung Bustaman saja dan pada tahun-tahun berikutnya orang dari luar mulai berdatangan. Pasca Gebyuran warga membersihkan sampah plastik yang berserakan. Dari pengalaman terlibat baik di Gebyuran tahun 2015-2016 selalu ada perubahan dalam tata cara Gebyuran maupun sajiannya, yang artinya syarat ketat sebagai sebuah ritual. Tahun 2015 orang yang menggebyur pertama kali yakni Suhari pada Pak Topo, sedangkan tahun 2016 Ibu Hartati dan Lurah Purwodinatan, Sukamto yang menggebyur anak kecil di depan Mushola sebagai penanda Gebyuran dimulai.

Sebelum Gebyuran oleh saran anak-anak muda mereka saling menaburkan serbuk warna-warni sehingga nampak lebih semarak. Pun dengan sajian setelah gebyuran usai, tahun lalu bubur sumsum dan kadang wedang jahe. Lebih dominan bubur sumsum karena itu sesuai dengan tradisi di kampung yang biasanya kalau ada gawe di kampung-kota entah itu nikahan, sunatan dll mereka menyuguhkan bubur sumsum untuk dimakan bersama. Bubur ini konon fungsinya untuk menguatkan stamina. Tahun ini mereka menyajikan nasi

gudangan pada warga yang terlibat. Durasinya juga berbeda, tahun lalu gebyuran berlangsung setelah asyar hingga 17.30 sedangkan tahun ini dimulai asyar dan rampung 16.15 wib. Ketiadaan alur ketat dalam prosesi ini membuat tradisi ini tak mempunya bentuk atau durasi yang ketat, bahkan pemaknaan bisa muncul saat terjadi proses wawancara. Namun secara umum warga sepakat ini adalah cara-cara positif untuk menyalurkan dendam, amarah, kebencian, dan wujud keguyuban dengan cara perang air dengan sesama.

Secara tegas, beberapa tokoh masyarakat memaknai hal ini sebagai salah satu strategi kebudayaan mereka untuk meneguhkan identitas. Ikatan dengan masa lalu atas nama tokoh penting Kyai Kertoboso Bustam, usaha menarik perhatian media massa adalah cara-cara santun untuk menegaskan keberadaan mereka. Dalam beberapa sesi diskusi dengan Aris Zarkasyi dan Hari Bustaman mereka cukup khawatir dengan fenomena lenyapnya kampung-kampung kota yang ada di Semarang. Gebyuran Bustaman adalah diplomasi kultural yang menandakan bahwa mereka ada dan penting juga bagi kota. Kekhawatiran ini bukannya tak beralasan, karena ada bagian-bagian dari rumah warga yang tidak bersertifikat. Pun jika mempunyai sertifikat bukan jaminan juga karena iming-iming uang sangat besar dari investor biasanya jika mereka minat.

Upaya ini mengingatkan saya konsep lain yakni place making: ‘placemaking today is ambitious and optimistic. At its most basic, the practice aims to improve the quality of a public place and the lives of its community in tandem. Put into practice, placemaking seeks to build or improve public space, spark public discourse, create beauty and delight, engender civic pride, connect neighborhoods, support community health and safety, grow social justice, catalyze economic development, promote environmental sustainability, and of course nurture an authentic sense of place”. (Silberberg, 2013: 2). Silberberg melanjutkan place making sebagai act to do. ‘Act to do’ ini bentuknya bermacam-macam salah satunya dengan menciptakan event. Gebyuran Bustaman sebagai sebuah tradisi belumlah ada

hingga tahun 2013. Dicipta ulang pertama kali pada tahun 2013 setelah warga terlihat antusias dalam event sebelumnya bertajuk 'Tengok Bustaman' yang menyedot animo massa dan media. Sejak itu Gebyuran Bustaman menjadi peristiwa tahunan yang dinanti-nanti. Kiranya motif-motif inilah yang serta merta, enteng, murah, dan tidak neko-neko dianggap sebagai ekpresi dalam seni rakyat yang ringan. Kondisi serupa terjadi juga praktek seni yang tumbuh di daerah Pekunden di Kendal yang pernah diteliti oleh antropolog Tjetjep Rohendi Rohidi tentang ekspresi rakyat miskin yang selalu memerhatikan efisiensi, murah, dan bisa dilakukan secara mudah. Hal yang sama dan tercermin juga dalam tradisi Gebyuran Bustaman.

Antusiasme media yang meliput juga menjadi kegemberiaan dan kebanggaan tersendiri. Pak Aris Zarkasyi, ketua RT 4/RW 3 sekaligus warga Bustaman, mengakui adanya event ini membuat kampungnya makin dikenal. "Orang tahunya Bustaman hanya gulainya atau tukang jagalnya, sekarang Gebyuran Bustaman juga menjadi kebanggaan kami," tuturnya. Dari temuan awal sekilas lintas dapat diperoleh kesimpulan Gebyuran Bustaman merupakan penggalian ulang foklore sebagian lisan yang hidup di kampung. Karena warga latar belakangnya rata-rata adalah kelas menengah ke bawah dengan dominasi tingkat perekonomian kelas bawah ekspresi yang dilakukan juga secara murah meriah, tak memakan biaya dengan penekanan pada kesenangan dan kebersamaan. Hal ini juga dimaksudkan sebagai sarana perekat social. Dan dengan modal yang tidak besar sebagai implikasi dari pendapatan kegiatan ini turut meningkatkan kebanggaan warga atas kampungnya. Penggalian ulang tradisi atau invensi tradisi ini bukannya dilakukan tanpa sebab. Banyak motif yang terkandung di dalamnya selain meneguhkan nilai-nilai juga sebagai strategi kultural warga menghadapi pembangunan yang massif di kota. Contoh kecil ini bisa menjadi model pengembangan bagi wilayah-wilayah yang menghendaki hasil yang kurang lebih sama yakni dengan menggali tradisi dalam hal ini folklore untuk meningkatan *sense of place* dan *place attachment* sehingga warga kampung-kota mampu menggunakan modal kultural ini sebagai basis advokasi diri.

PERUBAHAN GAYA HIDUP KAMPUNG SUBURBAN
PERKAMPUNGAN KARAWACI, TANGERANG

Dwiyanti Kusumaningrum

Perkembangan Metropolitan Jakarta yang sangat tinggi dan kompleks telah berlangsung sejak akhir tahun 60-an hingga sekarang. Tingginya urbanisasi mengakibatkan penduduk perkotaan memilih untuk keluar dari Jakarta dengan cara ekspansi ke wilayah pinggiran kota seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Penduduk Jabodetabek saat ini mencapai 30.378.686 jiwa (BPS, 2013). Dalam tiga dekade terakhir, lebih dari 300.000 hektar lahan pertanian di wilayah peri-urban Jakarta (Bodetabek) telah berubah menjadi pusat permukiman-permukiman baru (Winarso, Hudalah, & Firman, 2015). Di antara wilayah-wilayah pinggiran Jakarta, Tangerang yang berada di sebelah barat Jakarta merupakan salah satu wilayah yang berkembang pesat. Karawaci dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan di Tangerang yang berkembang secara signifikan dalam tiga dekade terakhir. Karawaci, terletak di Kecamatan Kelapa Dua, yaitu kecamatan yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Kabupaten Tangerang (BPS, 2013). Di Karawaci, proses konversi lahan terjadi dengan sangat signifikan; sebelumnya berupa sawah, kebun karet, dan kebun palawija kini menjadi permukiman yang sangat padat.

Limpahan penduduk kota (pendatang) menimbulkan beberapa perubahan di wilayah pinggiran, salah satunya adalah perubahan pola kehidupan penduduk kampung setempat. Oleh karena itu, penelitian ini melihat bagaimana penduduk kampung beradaptasi dengan urbanisasi, yaitu bagaimana bentuk transisi urban pada gaya hidup (*lifestyle*) yang terjadi pada penduduk kampung di daerah Karawaci akibat komodifikasi ruang dan masuknya pendatang ke

wilayah Karawaci. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan spasial dalam menganalisis perubahan gaya hidup. Gaya hidup yang akan diteliti difokuskan pada pola konsumsi. Proses perubahan gaya hidup akan dibagi ke dalam tiga periode berdasarkan unit analisis keluarga, yaitu periode generasi pertama (kakek/nenek), generasi kedua (orangtua), dan generasi ketiga (anak). Penentuan periode tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi perubahan pola konsumsi secara historis.

Tulisan ini hasil dari penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada interpretasi atas dinamika spasial dan sosial penduduk kampung Karawaci. Penelitian ini menggunakan beberapa metode di antaranya kajian kepustakaan sejarah, kajian spatiotemporal penggunaan tanah Tangerang, wawancara mendalam, serta observasi lapang. Unit spasial dalam penelitian ini adalah kampung dan unit analisis adalah rumah tangga. Penelitian ini memilih satu keluarga tiap kampung untuk diwawancara (total 5 keluarga untuk 5 kampung). Pemilihan keluarga didasarkan atas lama tinggal dan jumlah generasi di dalam keluarga. Wawancara mendalam atau *in-depth interview* dilakukan untuk menggali informasi berupa penjelasan mengenai penggunaan tanah di wilayah penelitian, sejarah kampung, gaya hidup penduduk kampung pada tiap masa, serta intensitas hubungan penduduk kampung dengan penduduk pendatang. Secara umum pembagian waktu pada penelitian ini dibagi menjadi tiga masa sesuai dengan generasi pada keluarga, yaitu: generasi pertama keluarga sebagai tahap pra-suburbanisasi, generasi kedua sebagai tahap suburbanisasi, dan generasi ketiga sebagai tahap post-suburbanisasi. Hasil dari dari wawancara mendalam kemudian dibuat pola keruangannya dengan membandingkan aspek spasial tiap masa. Hasil analisis dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan pola konsumsi penduduk kampung akibat berubahnya kondisi geografis tiap masanya. Hasil akhir divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa agar lebih mudah dipahami secara spasial.

Wilayah Karawaci, Tangerang

Wilayah penelitian Karawaci berada di dalam administrasi Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Wilayah penelitian berada di 4 desa di antaranya Desa Binong, Bencongan, Bencongan Indah dan Kelapa Dua. Penelitian ini dilakukan di 5 kampung yang berada di dalam 4 desa tersebut. Kampung-kampung tersebut di antaranya kampung Dadap, kampung Binong, kampung Bencongan, kampung Kelapa Dua, dan kampung Sabi. Sejarah mengenai tempat tidak pernah lepas dari apa yang terjadi pada masa lampau. Penggunaan ruang pada masa lampau di Tangerang merupakan cerminan dari pertarungan berbagai kekuasaan yang ada pada saat itu. Tanah yang membentang dari utara hingga selatan Tangerang (Curug hingga Jasinga) merupakan tanah-tanah yang dipercaya merupakan hasil pertarungan kekuasaan antara Pangeran Jayakarta, Kesultanan Banten, dan juga VOC. Kesultanan Banten melindungi Pangeran Jayakarta sehingga mengakibatkan retaknya hubungan kesultanan dengan VOC. Blokade atas perdagangan Banten dilakukan VOC, yaitu satu hal yang membuat Kesultanan Banten menyatakan perang dengan VOC. Peperangan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditengahi oleh Sultan Jambi. Kesepakatan tersebut adalah pembagian wilayah antara VOC dan Kesultanan Banten, dengan patokan Ci Sadane sebagai batas wilayah kekuasaan masing-masing.

Pertarungan kekuasaan tersebut menghasilkan kesepakatan pembagian wilayah kekuasaan (teritori) di Tangerang. Kesepakatan pembagian wilayah tersebut kemudian bergeser ketika anak dari Sultan Tirtayasa, Sultan Haji ternyata melunak dan dekat dengan VOC. Diiringi dengan peperangan antara anak dan ayah dalam menyikapi persoalan kedaulatan tanah di Tangerang, wilayah tersebut akhirnya dimiliki oleh VOC melalui kerjasamanya dengan Sultan Haji. Semenjak saat itu daerah Tangerang dijadikan *regentschap* (kabupaten) di wilayah Batavia (Suryana, 1992). Dibangun pula beberapa lokasi pemukiman penduduk di sekitar benteng, antara lain pemukiman

yang kemudian bernama Kampung Kalipasir, Grendeng, dan termasuk pula Karawaci (Ekajati, 2004). Salah satu bentuk kekuasaan koloni Belanda pada saat itu adalah pengangkatan dari orang-orang etnis Arab dan Cina serta kepala-kepala kampung. Mereka berhak atas kepemilikan atas tanah untuk dijadikan perkebunan. Kebijakan ini dilakukan VOC sebagai kebutuhan mengambil keuntungan dari sewa tanah yang diberikan tuan tanah tersebut dan menarik penduduk pribumi menjadi pekerja. Tanah yang dimiliki ini dikenal sebagai tanah partikelir. Di bawah pengelolaan orang-orang Tionghoa dan Eropa, mayoritas penduduk pribumi berperan sebagai buruh dan penyewa lahan. Mereka juga membayar sewa untuk tanah yang digunakan sebagai rumah, pekarangan, dan tegalan (Ujianto, 2009).

Di Karawaci, sebagian besar wilayah merupakan perkebunan karet, sawah, palawija dan berbagai komoditas pertanian lainnya (kebun campuran). Hampir semua perkebunan dan sawah tersebut merupakan tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh tuan tanah Cina. Daerah Kelapa Dua dan Karawaci sendiri dikuasai oleh beberapa tuan tanah Cina yang bekerja sama dengan pihak koloni. Menurut sejarahnya, Karawaci merupakan perkebunan karet milik tuan tanah cina yang bernama Oey Djie San. Oey Djie San merupakan seorang letnan Cina yang menguasai perkebunan di daerah Karawaci hingga Cilongok (Lohanda, 1996). Perkebunan beroperasi sampai tahun 1965, setelah itu tuan tanah bangkrut dan tanah-tanah perkebunan dibeli oleh perorangan dari tuan tanah kecil di sekitarnya. Selanjutnya, memasuki periode kemerdekaan Indonesia, sistem kapitalisasi sumber daya perkebunan tersebut dihapuskan dan terjadilah peralihan sumberdaya menjadi milik negara di hampir semua daerah termasuk Karawaci. Pada periode Orde Baru, struktur dari akumulasi modal berbeda dari yang terjadi pada periode kolonial. Pada masa lalu orientasi dari produksi dan pemanfaatan ruang difokuskan pada pertanian, pada periode Orde Baru Tangerang termasuk Karawaci dijadikan tempat yang berorientasi industri. Pembangunan jalan tol

dan pembangunan kota dari rezim pemerintahan yang berorientasi pembangunan industri menyebabkan pemanfaatan ruang bergeser, dan di saat yang sama merubah pula komposisi demografik dari wilayah Tangerang. Tuan-tuan tanah Cina secara perlahan hingga tahun 1990-an tidak lagi berkuasa penuh atas berbagai tanah perkebunan.

Di sepanjang wilayah bantaran Ci Sadane, termasuk Karawaci, industrialisasi dan orientasi pembangunan pemukiman dilakukan untuk mendukung permintaan pasar industri dan tempat bermukim para pendatang dari kota. Hal ini menyebabkan munculnya dispersi/persebaran dari petani-petani yang sebelumnya merupakan petani-petani buruh tuan tanah Cina. Struktur ruang dari Karawaci sekarang adalah kompleks industri dan juga permukiman bagi pendatang dari Jakarta atau daerah luar Jakarta yang berorientasi pada tenaga kerja industri. Pembangunan Perumnas dan juga bertumbuhnya wilayah pemukiman untuk pendatang di periode 1980an-1990an (termasuk Villa Permata, Saribumi, Lippo Village) membuat struktur spasial wilayah Karawaci menjadi lintang pukang dan mengkondisikan kesenjangan dan sekat-sekat kelas sosial yang ternyata kembali mirip dengan apa yang terjadi di periode kolonial. Sekat-sekat kelas sosial baru inilah yang memberikan pengaruh terhadap perubahan gaya hidup khususnya pola konsumsi penduduk kampung di Karawaci.

Karawaci sebagai Urban Kampung dan Enclave

Perkembangan perkotaan saat ini telah mengarah pada polarisasi secara spasial dan sosial yaitu dengan munculnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru dan munculnya perumahan-perumahan kelas menengah ke atas di antara kampung origin penghuni wilayah sebelumnya. Hal inilah yang menyebabkan munculnya istilah urban kampung, yaitu kampung sebagai permukiman tradisional yang terletak dekat dengan pusat kota (Haryadi, 1989). Ciri urban kampung yaitu adanya keragaman etnis dan perubahan

sosial yang terjadi di dalamnya akibat urbanisasi. Keragaman etnis tersebut muncul akibat adanya daya tarik kota yang menyebabkan para pendatang yang plural menetap di kampung-kota. Adanya keragaman tersebut menjadikan kampung mengalami perubahan secara sosial, yaitu berubahnya ciri-ciri kampung dari yang semula bersifat pedesaan, penduduk yang homogen, penggunaan tanah yang beragam berubah menjadi permukiman yang padat dengan penduduk yang heterogen (Haryadi, 1989). Hal ini merupakan bukti teori lama yang telah dijelaskan oleh Tonnies (1887), yaitu ketika urbanisasi telah melemahkan *gemeinschaft* (pola hidup pedesaan yang berbasis kekeluargaan dan komunitas) dan menggantikannya dengan *gesellschaft* (gaya hidup perkotaan yang individual).

Jika dilihat secara spasial, urban kampung merupakan sebuah *enclave* di tengah bangunan-bangunan kota. *Enclave* dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah kecil yang memiliki teritori khusus dan berbeda dengan unit wilayah besar yang mengelilinginya. Perbedaan antara *enclave* dengan lingkungan sekitarnya dapat dinilai dari berbagai aspek seperti ras, etnis, kelas sosial, dan sebagainya. Kebanyakan literatur mengulas tentang *enclave* etnis, khususnya pada migran di kota. Sebagaimana telah diketahui oleh para ahli, bahwa salah satu halangan terbesar bagi migran rural yang memasuki kota adalah perihal ruang permukiman yang nyaman (Berry, 1973). Kebanyakan para migran adalah orang-orang yang memiliki status ekonomi lemah dan tidak mampu membeli rumah yang layak di kota. Untuk mendapatkan kenyamanan di kota tersebut, mereka mencari sewaan flat yang murah dan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki ras yang sama dengannya. Mereka berkumpul dengan sesamanya untuk tinggal dalam flat-flat kecil yang kemudian mengelompok. Dalam kasus Harlem, inilah yang disebut dengan *enclave*, yaitu ketika sekumpulan migran kulit hitam tinggal mengelompok di Harlem, salah satu sudut kota New York, kota besar yang kini sangat kosmopolit. *Enclave* dapat juga ditemukan pada wilayah yang memiliki perbedaan kelas sosial,

contohnya di Sentosa Cove di Singapura yang berupa permukiman para elit transnasional (Pow, 2011). *Enclave* tersebut tempat tinggal para elit kaya yang kosmopolit yang dibentuk oleh keinginan para elit akan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman dan memenuhi gaya hidup mereka yang sangat mobile.

Jika dibandingkan dengan beberapa contoh di atas, yang terjadi Karawaci justru sebaliknya, kebanyakan migran adalah orang-orang kelas menengah yang berpindah dari pusat kota untuk mendapatkan lingkungan yang lebih nyaman. Oleh karena itu, urban kampung di Karawaci "terbentuk" akibat adanya pengisian ruang-ruang kota yang semula kosong yang kemudian terisi oleh bangunan-bangunan baik perumahan, pusat-pusat ekonomi dan lainnya yang menopang pendatang dari kota. Yang membedakan urban kampung dengan sekitarnya sehingga urban kampung dikatakan sebagai *enclave* adalah sifat fisiknya yang berbeda dengan sekitarnya (terdapat ketidakteraturan kampung dalam keteraturan kota) juga sifat penduduknya yang sebagian masih mempertahankan sifat rural/pedesaan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mulanya kampung-kampung di Karawaci dikelilingi oleh persawahan, kebun karet, dan *bongpai* atau kuburan Cina. Namun, kini persawahan dan kebun karet tersebut telah berubah menjadi perumahan-perumahan dan berbagai fasilitas perkotaan. Perubahan penggunaan tanah pada setting kampung tersebut tidaklah secara tiba-tiba, namun juga merupakan akibat dari campur tangan pemerintah. Jika dilihat dari sejarahnya, pada masa Orde Baru, terjadi berbagai perubahan dalam berbagai aspek salah satunya dalam bidang ekonomi. Kegiatan pembangunan pada zaman Orde Baru telah menjadikan sebuah transformasi spasial di beberapa kota besar di Indonesia (Hudalah & Firman, 2012). Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa pada masa itu telah terjadi konversi lahan rural secara masif dan maraknya pembangunan kota mandiri di pinggiran Jakarta. Hal-hal tersebut

merupakan akibat dari deregulasi dan debirokratisasi kebijakan pada masa Orde Baru di tahun 1980-an. Begitu pula yang terjadi di wilayah Karawaci, penggunaan tanah berubah seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung maraknya suburbanisasi. Dengan demikian, kampung-kota di Karawaci kini hanya menjadi kelompok-kelompok kecil di tengah perumahan dan fasilitas perkotaan yang kini semakin banyak dan padat.

Pengaruh Pendatang Terhadap Penduduk Kampung

Perpindahan distribusi populasi dimulai dengan kenaikan pada inti metropolitan (Jakarta) yang terjadi antara tahun 1960-an hingga 1970-an. Selama periode tersebut, urbanisasi di Jabodetabek terkonsentrasi di Jakarta (pusat kota). Lebih dari setengah populasi meningkat di pusat kota Jakarta. Namun konsentrasi ini mulai menurun pada tahun 1980-an. Dominasi demografik perlahan mulai teralihkan ke pinggiran Jakarta (Bodetabek). Faktanya, hingga tahun 2015, populasi suburban justru melebihi populasi kota Jakarta. Walaupun populasi pada pusat kota tetap tumbuh, rasionya secara perlahan menurun. Penduduk Jakarta yang berpindah ke pinggiran kota inilah yang kemudian mengisi ruang-ruang kosong yang ada di pinggiran kota, dalam penelitian ini khususnya wilayah Karawaci. *Spill over* atau pelimpahan penduduk kota ke pinggiran kemudian memberi dampak langsung terhadap penduduk kampung asli daerah pinggiran. Dengan masuknya pendatang, terjadi peralihan status atas kepemilikan tanah penduduk asli baik karena penggusuran ataupun penjualan tanah. Selain itu, masuknya pendatang juga menyebabkan kebutuhan penduduk di wilayah penelitian semakin meningkat. Dengan kata lain, konsumsi kolektif di wilayah penelitian meningkat dan harus didukung oleh pusat-pusat pelayanan yang memadai.

Penduduk kampung-kota yang kini sangat heterogen mengalami perubahan dalam tatanan kehidupan sejak munculnya pendatang. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam berbagai aspek seperti pekerjaan dan gaya hidup. Dalam aspek pekerjaan misalnya, penduduk kampung baik yang asli maupun rantauan dari daerah kini sudah meninggalkan pekerjaannya yang mayoritas bertani. Hal tersebut merupakan akibat dari hilangnya lahan persawahan yang biasa digarap penduduk kampung. Yang masih tersisa dari kebiasaan bertani tersebut adalah ternak. Di kampung Dadap dan kampung Sabi misalnya, masih ditemukan rumah-rumah yang memiliki kandang ayam dan kandang kambing. Peralihan pekerjaan penduduk kampung kini cenderung mengarah kepada kegiatan industri. Di sekitar Karawaci banyak bermunculan kawasan-kawasan industri baru tepatnya di sekitar kampung Dumpit, sepanjang jalan raya Curug, dan sepanjang jalan raya Imam Bonjol Karawaci. Pabrik-pabrik tersebut merekrut banyak penduduk sekitar khususnya penduduk kampung. Selain itu, munculnya berbagai pusat pelayanan baru di Karawaci juga mempengaruhi orientasi pekerjaan penduduk kampung. Kini generasi muda penduduk kampung banyak yang bekerja di bidang jasa pada pusat-pusat pelayanan tersebut.

Selain bidang pekerjaan, gaya hidup penduduk kampung pun dinamis mengikuti perkembangan yang ada. Gaya hidup merupakan cerminan pola kehidupan seseorang yang dinyatakan dalam aktivitas, minat serta pendapatnya dalam membelanjakan uang dan bagaimana mengalokasikan waktu. Penduduk kampung kini terlihat sudah meninggalkan gaya hidup "kampung"nya dan cenderung mengikuti pola hidup perkotaan yang dibawa oleh pendatang. Gaya hidup yang berubah tentu termasuk kegiatan domestik, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan konsumsi.

Pola Konsumsi Penduduk Kampung

Pola Konsumsi Generasi Pertama

Berdasarkan hasil wawancara, pada generasi pertama, pola konsumsi yang dimiliki oleh informan tiap kampung-kota hampir sama. Pada generasi pertama atau tahap pra-suburbanisasi ini penggunaan tanah masih berupa kampung yang dikelilingi oleh persawahan dan kebun. Mayoritas penduduk kampung juga masih asli, belum banyak perantau yang datang dan tinggal di kampung. Mayoritas penduduk kampung-kota masih menanam padi dan sayur-sayuran di lahan mereka masing-masing. Untuk keperluan selain beras dan sayur, biasanya para penduduk pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Pasar utama pada masa generasi pertama hanya ada dua, yaitu Pasar Anyar dan Pasar Curug. Pasar Anyar terletak di pusat kota Tangerang, sedangkan Pasar Curug berada di Curug. Pola konsumsi pada generasi pertama relatif sama. Kebanyakan dari informan memperoleh barang kebutuhan dari pasar yang ada pada saat itu, yaitu Pasar Anyar dan Pasar Curug. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan beras dan sayur-sayuran, semua informan kecuali informan kampung Bencongan mendapatkannya dari hasil panen yang mereka tanam sendiri. Kegiatan produksi beras dan sayuran masih tinggi pada generasi pertama karena lahan garapan di sekitar masih sangat luas. Dengan demikian, pada generasi pertama dapat dikatakan sebagai pola konsumsi origin pedesaan yang terbentuk pada masanya.

Berikut ini merupakan sketsa hasil ringkasan pola konsumsi primer yang dimiliki oleh generasi pertama. Secara umum, pola yang terbentuk hanyalah pola-pola yang mengarah ke dua pasar, pola konsumsi ke Pasar Curug dimiliki oleh informan dari kampung Binong (Bu Saroh), kampung Dadap (Pak Ompong), kampung Sabi (Bu Joni). Sedangkan pola konsumsi ke Pasar Anyar dimiliki oleh informan dari kampung Sabi, kampung Kelapa Dua (Bu Ami) dan kampung Bencongan (Bu Epi).
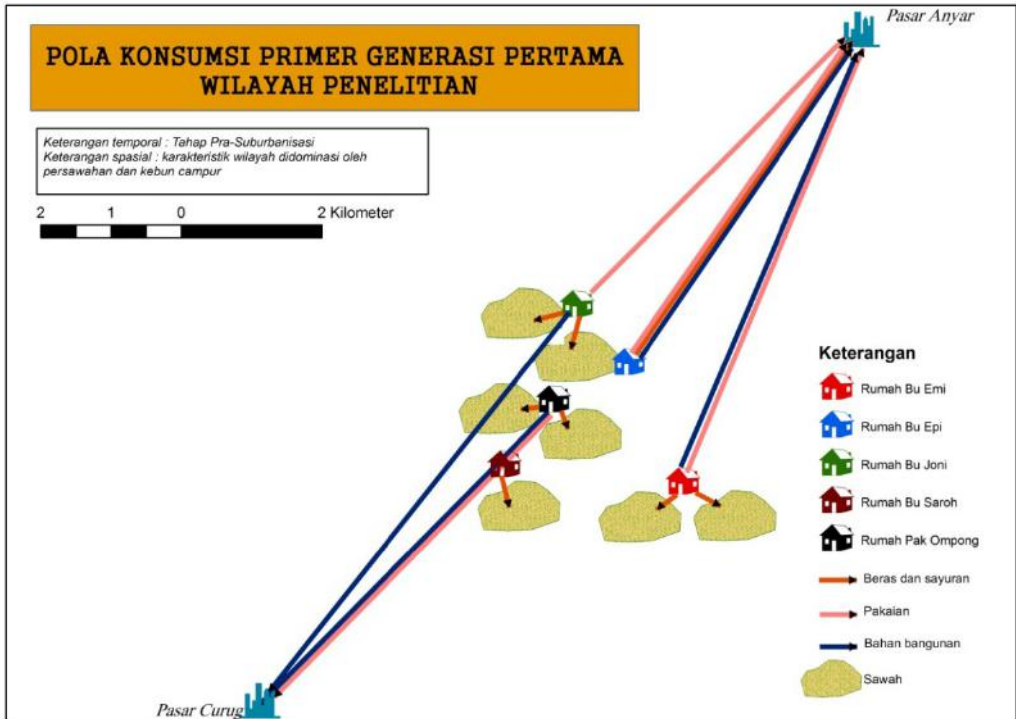
Pola konsumsi primer pada tahap pra-suburbanisasi di generasi pertama

Pola Konsumsi Generasi Kedua

Berdasarkan hasil wawancara, pada generasi kedua, pola konsumsi yang dimiliki oleh informan tiap kampung cukup beragam. Pada generasi kedua ini penggunaan tanah sudah mulai mengalami perubahan, khususnya sejak akhir 1980-an ketika pembangunan Perumnas 2 dimulai; persawahan dan kebun menjadi tanah kosong untuk persiapan pembangunan perumahan. Mayoritas penduduk kampung masih asli, tetapi perantau sudah cukup banyak yang datang dan tinggal di kampung-kota.
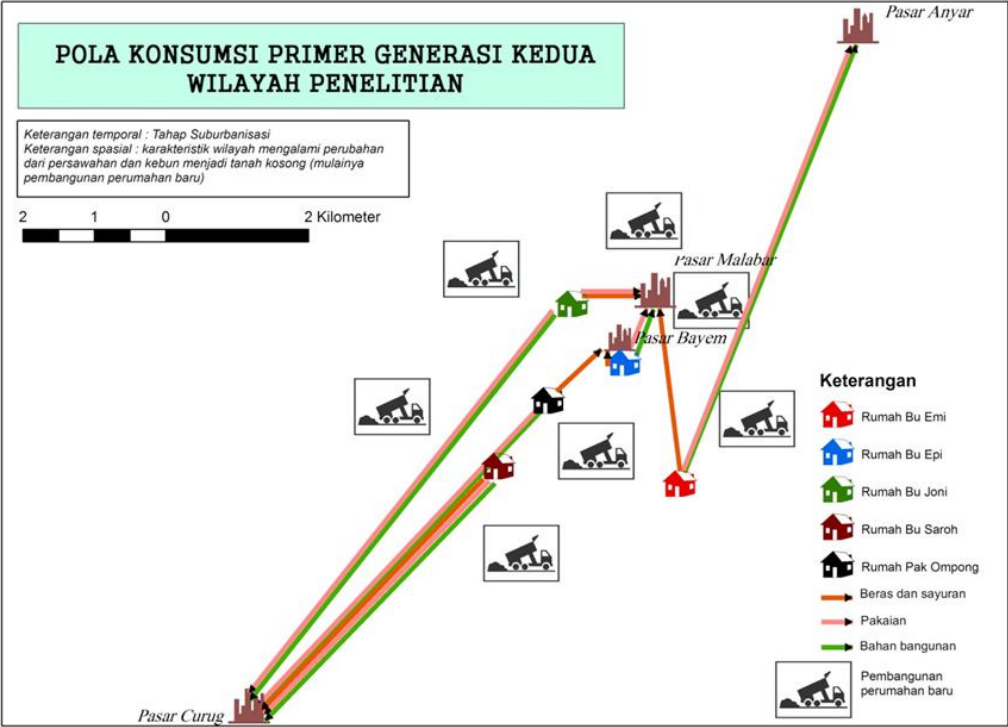
Pola konsumsi primer pada tahap suburbanisasi di generasi kedua

Untuk tujuan berbelanja, kini sudah ada pasar terdekat yang menjadi pilihan selain Pasar Curug. kini sudah ada Pasar Bayem dan Pasar Malabar yang letaknya jauh lebih dekat ketimbang Pasar Curug. Belanja kebutuhan sehari-hari seperti sayuran juga kebutuhan lain seperti barang kelontong, pakaian, perhiasan, dan lainnya dilakukan di Pasar Malabar. Pola konsumsi yang terbentuk masih bersifat sama seperti pola konsumsi pada awal mula. Kebiasaan-kebiasaan penduduk kampung masih bersifat pedesaan, walaupun pemenuhan kebutuh primer sudah mulai berubah. Kegiatan produksi penduduk kampung sudah mulai terkikis, penduduk kampung pada masa ini mulai membeli kebutuhan primer seperti beras, sayur, dan kebutuhan sehari-hari di pasar.

Pola Konsumsi Generasi Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara, pada generasi ketiga, pola konsumsi yang dimiliki oleh informan tiap kampung sudah berubah. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya fasilitas-fasilitas perkotaan dan pendatang yang mulai tinggal di wilayah penelitian. Pada awal 1990-an Perumnas 2 sudah mulai dipadati oleh pendatang. Di samping pola konsumsi yang berubah, jenis pekerjaan penduduk kampung pun berubah. Dengan ramainya Karawaci pada masa post-suburbanisasi atau saat ini banyak penduduk kampung, baik orang asli maupun perantau mencari nafkah dengan cara memasuki perumahan-perumahan tersebut dengan berjualan.

Perantau dari Jawa banyak yang mengembangkan sektor informal perdagangan dalam bentuk tukang jamu keliling, tukang ketoprak keliling, serta tukang bakso keliling. Sedangkan perantau dari Batak, kebanyakan dari mereka mengembangkan sektor informal jasa transportasi seperti angkot, kenek, dan warung kopi. Di samping itu, kebanyakan dari penduduk kampung asli, mengembangkan kontrakan sebagai penopang hidup mereka. Ada pula yang menjadi kuli cuci/setrika warga perumahan. Interaksi dengan pendatang semakin kuat pada generasi ketiga karena generasi ketiga merupakan generasi anak-anak yang masih sekolah dan bekerja (dewasa muda). Interaksi anak

pendatang dan penduduk kampung biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk generasi orangtua (pertama atau kedua) biasanya terjadi pada interaksi antara penjual dan pembeli.
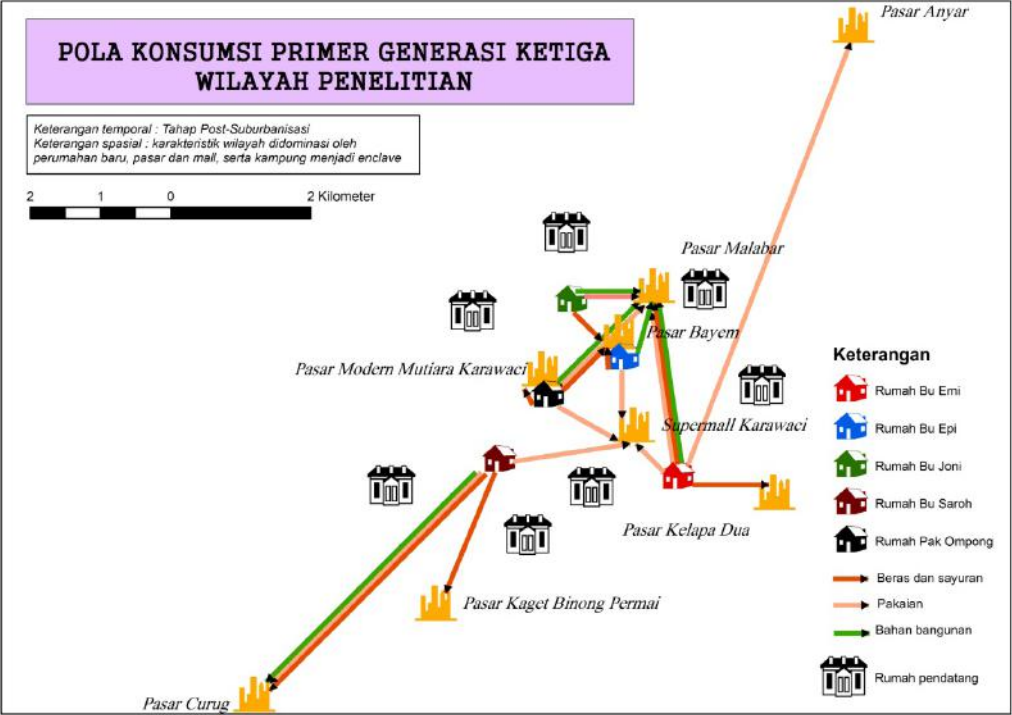
Pola konsumsi primer pada tahap post-suburbanisasi di generasi ketiga

Kini pusat-pusat pelayanan bertambah akibat sudah mulai masuk pembangunan perumahan-perumahan seperti Perumnas 2 dan komplek Harapan Kita. Pasar-pasar baru di antaranya adalah Pasar Bayem, Pasar Kaget Binong, Pasar Malabar, Pasar Modern Karawaci, Supermall Karawaci, dan Pasar Kelapa Dua. Pola konsumsi yang terbentuk sudah semakin bersifat kota. Kebiasaan-kebiasaan mereka, penduduk kampung, yang semula bersifat pedesaan, kini perlahan berubah. Sebagai contoh, bu Emi informan kampung Kelapa Dua mengaku cukup sering pergi ke mall. Kondisi tersebut menjadi

bukti bahwa memang perlahan sifat pedesaan yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan komunitas itu perlahan hilang. Penduduk kampung pun kini terlihat lebih individual ketimbang dahulu yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan dalam komunitas.

Perubahan gaya hidup akibat penetrasi modal dan perkembangan teknologi. Jika dilihat secara luas, pengaruh pendatang terhadap pola konsumsi penduduk kampung tidak terlepas dari tema-tema munculnya hubungan antara kelas-kelas sosial dan penetrasi modal di perkotaan. Sistem perkotaan di Dunia Ketiga (*Third World*) tidak dapat dikaji tanpa meluasnya akumulasi modal internasional oleh perusahaan transnasional, karena kemudahan yang disediakan oleh negara-negara Dunia Ketiga (Armstrong & McGee, 1985). Perubahan struktur sosial yang mendukung proses akumulasi modal tersebut terpusat pada produksi barang konsumsi untuk kelas menengah khususnya di kota besar. Masuknya sistem modal atau kapitalisme tersebut yang memberikan perubahan dalam sistem pedesaan dalam hal ini di kampung-kampung di Karawaci. Masuknya modal dan teknologi baru yang "dibawa" oleh pendatang menyebabkan *gemeinschaft* (pola hidup pedesaan yang berbasis kekeluargaan dan komunitas) penduduk kampung melemah dan lambat laun berubah menjadi *gesellschaft* (gaya hidup perkotaan yang individual). Hal ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian di mana generasi ketiga atau generasi saat ini sudah terlihat meninggalkan sifat "kampung"nya dan lebih cenderung bersifat kota.

Di samping penjelasan di atas, penting juga untuk mengkaji bagaimana konsentrasi modal mempengaruhi pola konsumsi. Dalam proses urbanisasi adalah penting mengkaji bagaimana proses konsentrasi modal menjurus ke divergensi (keragaman yang membesar) di bidang produksi dan konvergensi (keragaman yang mengecil) di bidang konsumsi di Dunia Ketiga (Armstrong & McGee, 1985). Adanya proses itulah yang menyebabkan pola konsumsi baru merasuki semua lapisan masyarakat, dalam hal ini penduduk

kampung. Kemampuan berproduksi kini telah tergantikan dengan kemampuan berkonsumsi. Terbukti dengan kini penduduk kampung memenuhi semua kebutuhannya dengan membeli, tidak seperti dahulu di mana kegiatan produksi masih berlangsung (berkebun dan bertani).

Perkembangan wilayah di Karawaci menimbulkan gejala segregasi karena menjamurnya berbagai perumahan-perumahan kelas menengah yang mengepung perkampungan yang sudah ada. Pembangunan permukiman kelas menengah saat ini mengarah pada "*Gated community*" di mana perumahan dibangun dengan konsep *cul-de-sac*, mengungkung kawasan perumahan tertutup dengan tembok beton yang sekaligus menutup aksesibilitas di kawasan tersebut. Selain mengakibatkan keterpisahan fisik dan menutup aksesibilitas bagi penduduk kampung, tembok-tembok tersebut juga mengakibatkan adanya keterpisahan sosial antara penduduk kampung dengan pendatang. Interaksi yang terjadi hanyalah sebatas transaksi jual beli (pedagang keliling, atau jasa asisten rumah tangga) atau hubungan antara anak sekolah penduduk kampung dan pendatang.

Segregasi spasial merupakan istilah yang tepat untuk menjelaskan jarak fisik dan jarak sosial yang muncul antara penduduk kampung dan penduduk pendatang ini. Jarak fisik dan jarak sosial yang muncul secara tidak langsung mempengaruhi perubahan pola konsumsi penduduk kampung pada generasi ketiga. Jarak fisik dilihat dari adanya keterpisahan antara penduduk kampung dengan penduduk pendatang secara fisik yaitu dalam bentuk tembok-tembok atau pagar pemisah, walaupun sebenarnya jarak antara mereka adalah dekat. Dari generasi 1 hingga generasi 3, jarak fisik dalam kegiatan berbelanja semakin beragam akibat semakin banyaknya pusat belanja saat ini. Jarak sosial merupakan keterpisahan yang dilihat dari perbedaan status ekonomi. Jarak sosial yang muncul di antara penduduk kampung dan pendatang cenderung jauh (dalam konteks bertetangga). Hal ini disebabkan oleh adanya pemisah fisik (tembok) dan pemisah sosial yaitu perbedaan status ekonomi antara penduduk kampung dengan pendatang.

Proses perkembangan perkotaan memberikan dampak langsung terhadap penduduk kampung di Karawaci dalam hal pola konsumsi. Pola konsumsi penduduk kampung berubah dari generasi pertama hingga ketiga. Perubahan pola konsumsi tersebut berubah mengikuti perkembangan wilayah khususnya perubahan penggunaan tanah. Proses perubahan gaya hidup tentu tidak terlepas dari munculnya hubungan antara kelas-kelas sosial baru dan penetrasi modal pada tahap suburbanisasi. Selain itu, adanya proses konsentrasi modal menjurus ke divergensi (keragaman yang membesar) di bidang produksi dan konvergensi (keragaman yang mengecil) di bidang konsumsi juga mempengaruhi cara hidup penduduk kampung. Saat ini penduduk kampung memenuhi semua kebutuhannya dengan membeli, tidak seperti dahulu, ketika penduduk kampung masih bisa memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan produksi (berkebun dan bertani). Perubahan gaya hidup juga dipengaruhi oleh interaksi yang dipisahkan oleh jarak fisik dan jarak sosial. Interaksi itulah yang menyebabkan perubahan pola konsumsi penduduk kampung, yaitu ketika penduduk pendatang secara tidak langsung mempengaruhi proses pengambilan keputusan penduduk kampung dalam konsumsi.

ETNIS, TAHU DAN IMAJI IDENTITAS KEDIRI

Wida Ayu Puspitosari

Etnis Tionghoa yang hidup dan berintegrasi di kota Kediri pada umumnya adalah suku Khek atau Hakka yang berasal dari provinsi Kwangtung (Canton). Etnis Tionghoa yang berdomisili di kota Kediri khususnya ialah orang-orang migrasi dari negeri Tiongkok yang telah hidup selama empat hingga lima generasi. Dengan kata lain, etnis Tionghoa yang tinggal di Kediri merupakan Tionghoa asli yang hidup dan berkembang dimana asal-usul akarnya belum begitu banyak yang telah bercampur dengan etnis lain seperti suku Hok Kian, Hai Nan dan Kong Hu. Namun demikian, secara budaya mereka sama-sama dari Tiongkok. Etnis Tionghoa dari suku Khek di Kediri lebih banyak daripada suku Hok Kian, Hai Nan, Kong Hu dan suku Tionghoa lainnya. Mereka memiliki nenek moyang yang sama namun berbeda etnis, bahasa daerah dan dialek (Puspitosari, 2008). Etnis Tionghoa hidup dan berkembang sebagaimana masyarakat Nusantara yang lainnya. Hidup dan kehidupannya berkecimpung dalam dunia bisnis. Sejarah kedatangan, kehidupan dan hubungan etnis Tionghoa dengan masyarakat yang ada di Kediri dapat dilihat dan ditelusuri dari asal muasal bagaimana mereka melakukan kontak dengan orang Kediri, hubungan atau diplomasi politik, dagang maupun hubungan kerjanya. Sebenarnya hubungan etnis Tionghoa dengan etnis Jawa, khususnya Kediri telah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun, di sini penulis akan menjelaskan bagaimana gambaran mengenai migrasi besar-besaran etnis Tionghoa di Kediri saat pemerintahan Kolonial Belanda kala itu. Alasan penulis menitik beratkan kedatangan masal etnis Tionghoa di

Kediri ialah untuk mempertajam kajian yang hendak di bahas pada bagian-bagian selanjutnya.

Migrasi besar-besaran etnis Tionghoa ke Kediri didorong oleh adanya pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1600-an. Penduduk Tionghoa di Kediri meningkat beberapa ribu jiwa setelah adanya berita mengenai hubungan politik dagang pemerintah kolonial yang dianggap menguntungkan. Seperti yang telah kita ketahui pemerintah kolonial Belanda menerapkan politik dagang yang melibatkan etnis Tionghoa, Jawa dan mereka sendiri di seluruh pulau Jawa. Seperti halnya yang ada di Kediri, politik dagang yang menempatkan etnis Tionghoa sebagai distributor barang-barang produksi dan orang Jawa sebagai produktornya seakan mampu untuk mewabahi etnis Tionghoa negeri Tiongkok yang masih bertalian darah dengan etnis Tionghoa perantauan Kediri untuk turut berpartisipasi dalam hubungan kerja yang menguntungkan ini, namun tetap dengan persetujuan Kolonial Belanda. Konon, ketika berperan sebagai distributor barang-barang yang diproduksi oleh warga lokal kepada pemerintahan kolonial, mereka tak ragu untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya (Puspitosari, 2008).

Selain itu, akibat dukungan pemerintah Hindia Belanda terutama dalam membantu ekspedisi dan kelancaran hubungan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemeritahanan kolonial. Banyaknya pekerja yang berasal dari etnis Tionghoa yang datang dan dimotori oleh Belanda ketika itu sangat membantu pemerintah terutama sebagai mitra dagang daun tembakau serta hasil perkebunan yang lainnya di sekitar Kota Kediri. Hubungan Tiongkok dengan Kediri sebenarnya telah dimulai pada abad ke 9, akan tetapi secara besar-besaran kedatangan etnis Tionghoa ke Indonesia khsusnya di Kediri terjadi pada abad ke 19. Abad ke 19 merupakan arus masuk yang deras dari sejumlah besar buruh imigran Tiongkok ke Hindia Timur Belanda untuk bekerja di pertambangan-pertambangan dan perkebunan-perkebunan, suatu penyimpangan dari aktivitas tradisional mereka yang komersial. Orang Tionghoa

telah memainkan peran ekonomi kunci di koloni Belanda sebagai orang-orang perantara yang mengumpulkan hasil bumi, ekspor; sebagai pedagang eceran; dan sebagai operator berijin untuk garam, candu serta monopoli-monopoli lain yang mendatangkan penghasilan. Tetapi posisi ekonomi mereka walaupun penting, tidak mencegah mereka dari kebinasaan, sebagaimana yang sebenarnya terjadi pada tahun 1740 ketika sejumlah besar Tionghoa di Jawa mengalami konflik dengan kepentingan kolonial.

Pemukiman Etnis Tionghoa di Kediri

Selepas kedatangan etnis Tionghoa ke kota Kediri secara berombongan yang diakomodir oleh Hindia Belanda, terjadilah suatu jaringan di antara etnis Tionghoa Kediri itu sendiri. Pada awalnya, etnis Tionghoa berdatangan ke nusantara hanya untuk berdagang. Kedatangan etnis Tionghoa ke Kediri adalah sebagai teman dalam berbisnis dan saling menjaga satu sama lain. Terjadinya hubungan diplomatik yang dirintis sejak jaman dahulu kala membuat banyak berdatangan etnis Tionghoa ke Kediri sebagai pedagang sehingga dalam ungkapan filosofi kehidupan orang Kediri disebut *Cina Toke* atau *Cina* sebagai Tauke. Artinya, etnis Tionghoa yang senang berdagang dan merantau tersebut tidak dibenci dan juga tidak dimusuhi karena mereka adalah saudagar. Dengan adanya *Toke,* masyarakat dapat bekerja pada mereka. *Toke* dalam artian selain dapat membeli barang-barang hasil dari kerajinan sekaligus, sejak dahulu etnis Tionghoa memang sudah menjalin kerjasama dengan etnis Jawa (Kediri), entah itu dalam hubungan kerja dalam bidang perdagangan dimana biasanya *Toke* Cina memiliki usaha sembako dan bahan pangan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, terciptalah suatu pemukiman yang terletak di tengah-tengah kota. Berkaitan dengan pembentukan pola pemukiman di atas.

Coppel (1994: 27-28) menyebutkannya sebagai berikut: banyak orang, baik orang luar maupun orang Indonesia sendiri, menggambarkan orang Tionghoa sebagai kelompok daerah kota yang

paling menonjol. Berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan, barangkali akan lebih tepat mengatakan bahwa golongan pribumi Indonesia lebih banyak terpusat di daerah pedesaan dan golongan penduduk Tionghoa tampaknya merupakan penduduk kota daripada yang sebenarnya. Namun tahun 1930 bukanlah tahun yang khas. Sejak pemukiman paling awal dari pedagang Tionghoa di kota-kota pelabuhan yang terletak di pantai utara itu, orang Tionghoa di Jawa selalu cenderung berkumpul dan berkelompok sendiri di kota-kota. Bagi orang Tionghoa hal ini tidaklah aneh. Kasus yang terjadi di Kediri bisa dibilang sama dengan apa yang telah diulas di atas. Tatanan kota pada tahun 1900-1930an secara sistematis terletak di Pecinan Kediri bagian barat yang kini bernamakan jalan Yos Sudarso (Pakelan) dimana bisa kita temukan Kelenteng di sana. Banyak etnis Tionghoa yang memilih tinggal di pusat kota atau di tempat yang banyak orang. Disamping itu sebelum kemerdekaan banyak etnis Tionghoa yang tinggal di pelabuhan-pelabuhan karena lebih mudah mencari informasi dan pelabuhan merupakan tempat untuk melakukan transaksi perdagangan sehingga memudahkan mereka dalam berbisnis. Kebutuhan untuk berdagang dan tuntutan menghasilkan uang sebanyak- banyaknya membuat etnis Tionghoa cenderung bertempat tinggal dengan kelompoknya sekaligus dapat dengan leluasa membuka usahanya.

Demikian halnya ketika kita memandang sebuah tatanan kota yang pernah ada di Kediri, disebutkan bahwa struktur pusat kota memang dahulu terletak pada suatu daerah yang terdapat banyak kegiatan ekonomi terutama transaksi bahan-bahan pangan. Sejalan dengan itu, tipe-tipe pemukiman etnis Tionghoa memang banyak ditemukan di daerah pinggir pelabuhan dan bantaran sungai. Ada dua alasan yang bisa penulis sajikan untuk menganalisis mengapa mereka lebih memilih untuk bermukim di daerah seperti di atas. Pertama, filosofi dari negeri moyang mereka yang pernah tinggal di bantaran Sungai Kuning, dimana sebuah realitas sejarah akan perjuangan, kehidupan untuk menuju peradaban dibangun. Realitas

ini tertaruh pada sendi-sendi kehidupan mereka hingga arti tentang aliran air yang membawa keberuntungan dan berkah melekat pada budaya mereka di manapun mereka membawanya. Sehubungan dengan etnis Tionghoa kota Kediri yang telah hidup ratusan tahun, mereka terbiasa tinggal di daerah yang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi kehidupan etnis Tionghoa berlangsung sebagaimana di daerah lainnya. Dengan kata lain, pola pemukiman yang telah biasa hidup berkelompok tersebut terkonsentrasi di Jalan Yos Sudarso (Pakelan) hingga lanjut kearah Timur di Jalan Pattimura (Jagalan dan Pandean). Pola pemukiman mereka terkonstrasi di tempat keramaian dan tempat orang-orang berbisnis, terutama dalam bidang pangan dan oleh-oleh khas kota Kediri. Jalan Yos Sudarso lanjut ke timur jalan Pattimura merupakan perkampungan etnis Tionghoa. Di sepanjang jalan Yos Sudarso dan Pattimura bisa dikatakan sebagai pusat transaksi bisnis yang sudah berdiri sejak pemerintahan Hindia Belanda dan hampir semua pertokoannya dimiliki oleh etnis Tionghoa itu sendiri.

Etnis Tionghoa dan Tradisi Tahu

Berdiri di negeri orang bukan berarti harus melupakan identitas muasal yang menjadi akar budaya mereka. Bukan hanya sekedar mencari ruang untuk terlibat dalam kehidupan sosialnya, namun juga sebagai pegangan ketika ruang sosial yang mereka hadapi tidak memiliki kesesuaian dengan tradisi mereka. Ya, makan Tahu, inilah yang merupakan tradisi kuliner warga Tionghoa yang telah mengalami akulturasi dengan ruang- ruang yang ada di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Tahu? Tahu telah berabad-abad menjadi salah satu makanan pokok di negeri ini. Bahan dasarnya yang berasal dari kedelai membuat makanan ini sangat dekat sekali dengan penduduk Indonesia yang pada umumya sangat mengenal salah satu tanaman pangan ini. Etnis Tionghoa memang dekat dengan bahan-bahan makanan yang berasal dari kedelai, sepeti halnya Tahu. Tradisi makan Tahu sendiri merupakan sebuah pola yang terjaga

sejak Etnis Tionghoa masuk ke Indonesia. Tahu adalah kata serapan dari bahasa Hokkian, *tauhu (Hanzi: hanyu, pinyin, doufu)* yang secara harfiah berarti kedelai yang difermentasi. Tahu pertama kali muncul di Tiongkok sejak zaman Dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Pen emunya adalah Liu An yang merupakan seorang bangsawan, cucu Kaisar Han Gaozu, Liu Bang, yang mendirikan Dinasti Han. Liu An adalah ilmuwan dan filosof, penguasa dan ahli politik. Ia tertarik pada ilmu kimia dan Meditasi Tadiom. Para ahli sejarah berpendapat bahwa kemungklinan besar Liu An melakukan pengenalan makanan non daging melalui Tahu. Kemungkinan besar Liu An memadatkan Tahu dengan nigari atau air *lant* dan menjadi kental seperti Tahu saat ini (Shutleff dan Aoyagi, 2011: 291)

Menurut opini para pakar sejarah, sebenarnya tidak dokumen resmi yang memungkinkan pada tahun berapakah Tahu sebagai makanan pertama kali tersebar di nusantara. Mau tak mau kita hendaknya berpijak pada cerita mulut ke mulut yang diwabahi oleh warga kota Kediri yang menyatakan bahwa Tahu pertama kali datang ke kota mereka oleh pasukan Kublai Khan tahun 1292 Masehi. Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh riwayat sejarah bahwa cerita ini bermula ketika Kublai Khan menuntut upeti dari raja Kertanegara dari Singosari, namun sang raja menolak untuk memenuhi permintaan seorang Kublai Khan. Sementara utusan Kublai Khan yang dikirim ke Jawa pada tahun 1289 Masehi, merasa terhina oleh Kertanegara yang kemudian dicacati rautnya. Hal ini membuat Kublai Khan geram dan serta merta mengirim pasukan yang terdiri dari dua puluh ribu tentara untuk memberi pelajaran pada sang raja. Bersamaan dengan itu, Jayakatwang, raja kerajaan Kediri telah menguasai Singosari dan membunuh Kertanegara (DuBois, Tan dan Mintz, 2008:197)

Raden Wijaya, menantu Kertanegara menyerukan perang dendam atas kekalahan ayah mertuanya tersebut. Bukanlah hal

yang kebetulan jika kapal ekspedisi Mongol berlabuh di Surabaya yang bernama Jong Biru dipertemukan dengan raden Wijaya yang memiliki visi yang sama untuk menuntut balas. Dengan melintasi arah selatan daerah aliran sungai Brantas mereka berlabuh di anjungan dan memimpin pasukan dalam sebuah peperangan hebat, dan mendirikan kerajaan Majapahit yang termasyur. Tempat kapal Mongol berlabuh di Kediri disebut Jong Biru yang kini diadopsi menjadi nama derah di Kelurahan Semampir, kota Kediri. Kapal Kublai Khan memiliki dapur di dalamnya; ini nampaknya merupakan asumsi yang masuk akal bahwa ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk membuat Tahu (DuBois, Tan dan Mintz, 2008:198). Hal semacam ini tak semata berhenti begitu saja, waktu yang kian menjawab pertanyaan atas ruang dan waktu lambat laun membawa melahirkan peradaban baru yang bermula dari peperangan di atas. Tentu kita mengenal tahun-tahun di mana kepedihan yang dalam turut mendera bangsa selama kurang lebih tiga setengah abad akibat pendudukan Hindia Belanda. Karena berdagang, tak sedikit pula yang menyiakan kesempatan ini termasuk etnis Tionghoa yang kemudian berbondong-bondong bermigrasi di Nusantara termasuk Kediri untuk turut terlibat di dalamnya. Bukan juga kebetulan yang melatarbelakangi mereka untuk melakukan akulturasi dengan lingkungan yang memiliki identitas berbeda. Termasuk pula Tahu yang menyimpan legenda kuliner besar yang tidak sebentar menjalani prosesnya agar diterima di masyarakat. Semenjak itulah Tahu mulai melembaga dalam kehidupan masyarakat Kediri setelah melalui proses akulturasinya yang banyak membawa nuansa peperangan dan permusuhan di kelas elit. Walau tak banyak orang Kediri yang Tahu muasal dari mana makanan khas kota mereka, tak begitu saja membuat mereka ragu untuk tetap mengkonsumsinya. Tahu banyak ditemukan di gerai-gerai di berbagai tempat di Kediri, Tahu yang paling terkenal di kota Macan Putih ini adalah Tahu Takwa, Tahu yang berwarna kuning dan padat.

Legitimasi: Perusahaan Tahu Pertama Kota Kediri

Orang Kediri menyebutnya Bah Kacung adalah seorang Cina keturunan yang sudah lama tinggal di Kediri. Nama aslinya Lauw Soe Hoek. Bah Kacung dikenal sebagai orang pertama yang membuka gerai Tahu di Kediri sejak tahun 1912. Tokonya dulu terletak di sepanjang jalan Pattimura yang merupakan pusat kegiatan ekonomi serta kompleks pecinan yang ramai. Dalam kelangsungannya berdagang Tahu, tentu tak semata berdiri sendiri untuk membuat usahanya berjalan hingga generasi ketiga dewasa ini. Bila dihitung, usaha yang telah digeluti oleh generasi ke tiga Bah Kacung ini telah mencapai satu abad lebih. Perusahaan Tahu yang pertama kali dibuka di jalan Pattimura yang mana disebut oleh sejarah kota Kediri sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sangat ramai dan padat kini semakin termasyur. Kaitan pernyataan ini ialah bagaimana ketika Bah Kacung sebagai orang pertama yang membuka pcrusahaan Tahu, menjadi pusat perhatian masyarakat kota Kediri dalam sepanjang legenda kuliner yang telah melembaga di dalamya, memberikan pengaruh yang signifikan pada tatanan struktur masyarakat yang homogen yakni pecinan itu sendiri.

Pengaruh yang dibawa oleh agen dalam hal ini Bah Kacung ialah pengaruh yang berasal dari alokasi sumber daya yang dimilikinya berupa materi nampak yakni produksi Tahu. Ada beberapa warga Tionghoa lainnya merasa tertarik untuk turut memproduksi Tahu ketika perusahaan Bah Kacung memberikan gambaran keramaian serta animo masyarakat yang kian menggemari Tahu dengan buatan resep Tiongkok asli. Beberapa perusahaan yang akan dipaparkan di bawah hanya akan dipaparkan beberapa saja karena kesangkut-pautan dengan Bah Kacung sangatlah kental. Bisa dibilang mereka berasal dari ikatan kekerabatan yang sama. Pertama adalah perusahaan Kau Long yang merupakan perusahaan kedua di Kediri setelah perusahan Bah Kacung berjalan selama 27 tahun yakni dirintis pada 1949. Kau Long diambil dari nama keluarga. Perusahan Tahu Kau Long merupakan substitusi dari perusahaan Bah Kacung di jalan

Pattimura ketika Bah Kacung memilih pindah dari jalan Pattimura ke jalan Trunojoyo dengan alasan kemandirian. Sehingga rumah yang kini dihuni oleh keluarga Kau Long ialah rumah yang sebelumnya ditempati oleh Bah Kacung yang kemudian diperjualbelikan.

Kedua adalah perusahaan LYM yang merupakan perusahaan Tahu ke tiga setelah perusahaan Tahu Kau Long. Perusahaan ini berdiri tepatnya pada tahun 1950. Bila keluarga Kau Long memilih jalan Pattimura sebagai lahan usahanya, berbeda dengan keluarga Liem yang lebih memilih jalan Yos Sudarso untuk melanggengkan usaha. Selain jalan Pattimura, jalan Yos Sudarso merupakan kompleks pecinan yang dekat dengan rumah ibadah mereka, yaitu Kelenteng. Di sini juga tak sedikit warga Tionghoa yang bermukim. Jarak antara jalan Pattimura dan jalan Yos Sudarso tidaklah jauh, sekitar 50 meter saja. Tujuan keluarga Liem mendirikan perusahaan Tahu di sini ialah untuk memberikan pelayanan kuliner di tempat yang berbeda. Perusahaaan Tahu LYM bisa dikatakan sebagai reaksi lain daripada proses kekuasaan yang terlegitimasi oleh sokongan sumber daya. Tidak menutup kemungkinan kebedaraan ruang dan waktu juga menjadi dukungan terhadap pelanggengan pengaruh yang mampu membentuk pola praktek-praktek sosial yang rekursif sehingga terciptalah suatu proses sosial berbasis etnisitas.

Sejak perusahaan Bah Kacung, Kao Loung dan LYM mulai dikenal luas warga Kediri dan sekitarnya, pengaruh besar atas tindakan mereka direalisasikan ketika kemudian banyak orang-orang Tionghoa yang tinggal di sekitar mereka turut memberikan sokongan atas pengaruh yang mereka sebarkan sendiri, yakni mendirikan perusahaan Tahu. Kini, di kota Kediri ada sekitar dua puluh lima dengan lebih anak cabang perusahan dengan yang berdiri guna melengkapi kebutuhan pasar akan animo cindera mata para wisatawan baik luar kota maupun luar negeri. Seperti halnya yang dikenal di Kediri selain tiga perusahaan Tahu di atas ialah perusahaan Tahu POO, Mikimos, LTT, LTH, Soponyono, LKK, MING dan lain sebagainya. Sejalan dengan hal di atas, rupanya tak satu pun para pengusaha Tahu etnis Tionghoa di kota ini yang tidak melihat

apa itu “pasar”. Dalam melihat pasar tentu mereka tidak sembarangan dalam mengidentifikasinya. Ada beberapa indikasi yang hendak saya jelaskan di bawah ini. Etnis Tionghoa perantauan di mana pun lebih tertarik berbisnis guna menghidupi keluarganya daripada bekerja sebagai pegawai swasta atau pegawai pemerintah. Demikian juga di beberapa negara, etnis Tionghoa sekedar dianggap sebagai perantau sehingga tidak berpeluang masuk dalam suatu sistem masyarakat atau institusi pemerintahan. Di samping itu, di Asia Tenggara sebelum abad ke 20, negara-negara Melayu masih didominasi oleh pemerintah kolonial Belanda maupun Inggris. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa selama masa pemerintahan kolonial, pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia mengganggap etnis Tionghoa sebagai kelas menengah karena berdagang, sehingga dalam masyarakat terbentuklah suatu kasta dan masyarakat menjadi terpisah antara etnis Tionghoa, kaum pribumi maupun bangsa Eropa (Usman, 2009:229).

Dalam mengidentifikasi pasar, etnis Tionghoa yang mendirikan perusahaan Tahu di kota Kediri memiliki tradisi sendiri besadarkan kebudayaan mereka yang terkenal dengan berdagangnya. Bagi mereka pasar merupakan hubungan kausalitas antara output maupun input yang harus ditentukan dalam berdagang. Umumnya konsentrasi perdagangan etnis Tionghoa yang terutama mendirikan perusahaan Tahu ialah dalam lingkungan yang sama, Hal ini tentu saja akan terkait dengan bagaimana mereka mambangun jaringan dan juga melakukan tindakan loby pada sesama pengusaha maupun pekerjanya. Realitas sejarah mengenai pola pemukiman yang digambarkan oleh peneliti di atas merupakan salah satu alasan yang bisa dibilang akurat dalam mcnelisik akar permasalahan mengapa etnis Tionghoa Kediri dalam berdagang berkonsentrasi pada struktur masyarakat yang sama dengan mereka. Menurut catatan sejarah pola perekonomian etnis Tionghoa yang diungkap oleh Usman (2009) ialah mereka juga lebih cenderung merekrut pegawai yang rumah tinggalnya tidak berada jauh dengan kompleks mereka. Menurutnya hal ini juga terkait masalah kepercayaan dan ongkos produksi yang harus ditekan.

Pasar Melalui Keluarga dan Relasi Etnisitas

Perilaku bisnis (membangun jaringan) etnis Tionghoa di Kediri terkonsentrasi di jalan Pattimura dan Yos Sudarso, serta tercatat banyak bidang yang digelutinya. Etnis Tionghoa yang berkembang di Kediri sejak awalnya diidentifikasi sebagai pengrajin. Namun sekarang, etnis Tionghoa di Kediri justru banyak bergerak di bidang bisnis kuliner yang pada umumnya adalah Tahu, rumah makan masakan oriental yang mengandung lemak babi, alat-alat listrik dan lain-lain. Etnis Tionghoa yang berbisnis di kota Kediri umumnya menjalankan bisnis keluarga. Keluarga dalam bisnis etnis Tionghoa merupakan sesuatu yang mutlak dan penting. Setiap pertokoan atau bisnis etnis Tionghoa, tokoh ayah bagi mereka merupakan manajer, dan sosok ibu sebagai wakil. Figur ayahlah yang dianggap sebagai tonggak kehidupan bisnis etnis Tionghoa di Kediri. Fenomena tersebut sangat dapat diamati pada seluruh politik bisnis Tionghoa di Kediri. Realitas tersebut seperti terlihat pada perusahaan Tahu Soponyono. Sebagai salah satu perusahaan Tahu yang terkenal dan laris di Kediri, dalam mengoperasikan usahanya memang dipimpin oleh ayah sebagai bos dan sang ibu sebagai pengawas perilaku anak buah. Penulis sering mengamati perusahaan Soponyono, bahwa setelah ayah dan ibunya, anaknya melanjutkan pekerjaan mengawasi kinerja anak buah yang pada umumnya etnis Jawa agar dapat bekerja dengan baik.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa keluarga adalah segala- galanya. Dengan kata lain, perilaku dalam membangun jaringan ini memang berorientasi pada budaya Tionghoa yang sangat cinta pada leluhurnya. Artinya keluarga, ayah adalah kunci dari kebijakan perusahaan, dan istrinya sebagai wakil kemudian disusul anaknya yang juga berkecimpung di dunia bisnis itu. Akan tetapi istri yang berperan sebagai wakil juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan perusahaan. Biasanya setelah anak-anak mereka telah cukup pengalaman bekerja dengan orang tua masing-

masing, suatu saat mereka akan membuka dan mengembangkan bisnis leluhur mereka yang bergulat dalam dunia kuliner, khususnya Tahu. Yang kedua, bisa diamati bahwa perusahaan LTH juga menunjukkan hal yang sama. Ayah sebagai manajer yang setiap saat ada di toko dan istrinya sebagai wakil juga sama- sama mengawasi perusahaannya. Di perusahaan Tahu LTH, 90% memperkerjakan etnis Jawa sebagai karyawan dan buruh produksi. Perilaku bisnis dalam membangun jaringan ini menunjukkan relasi bisnis terutama dengan karyawannya adalah dengan merekrut sebanyak-banyaknya etnis Jawa yang tinggal tidak jauh dari kompleks pecinan tersebut untuk melancarkan bisnis mereka sebagai teman bisnisnya maupun demi keamanan. Begitulah masyarakat etnis Tionghoa Kediri yang membentuk jaringan bisnis bedasarkan ikatan keluarga yang kuat dan relasi etnisitasnya. Iklim perbisnisan ini jugalah yang nantinya akan bertujuan untuk mempertahankan kelanggengan identitas keetnisan yang menunjang entah dalam aspek ekonomi, sosial, politik maupun jati diri. Bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Keluarga dalam keyakinan etnis Tionghoa Kediri merupakan bentuk identitas yang wajib dilanggengkan.

Politik Identitas Keetnisan Untuk Ruang Kota

Giddens (1991) memaparkan identitas terbentuk oleh kemampuan untuk melanggengkan narasi tentang diri, sehingga membentuk suatu perasaan terus- menerus tentang kontinuitas biografis. Cerita mengenai identitas berusaha menjawab sejumlah pertanyaan kritis. Individu berusaha mengkonstruksi suatu narasi identitas koheren di mana siri membentuk suatu lintasan perkembangan dari masa lalu sampai masa depan yang dapat diperkirakan. Pendapat Giddens sesuai dengan perspektif awam kita tentang identitas, paparan bahwa identitas diri ialah apa yang kita pikirkan tentang diri kita sebagai individu. Selain itu, juga berpendapat bahwa identitas bukan merupakan kumpulan sifat-sifat yang kita miliki; identitas bukanlah sesuatu yang kita miliki, ataupun entitas atau bendayang bisa kita

tunjuk. Agaknya identitas adalah cara berfikir tentang diri kita. Namun yang kita pikir tentang diri kita berubah dari situasi ke situasi yang lain menurut ruang dan waktunya, itulah sebabnya Giddens (1991) menyebut identitas sebagai proyek. Yang dia maksud adalah bahwa identitas merupakan sesuatu yang kita ciptakan, sesuatu yang selalu dalam proses, suatu gerak berangkat ketimbang kedatangan. Proyek identitas membentuk apa yang kita pikir tentang diri kita saat ini dari sudut situasi masa lalu dan masa kini kita, bersama dengan apa yang kita pikir kita inginkan, lintasan harapan kita ke depan. Meski identitas-diri bisa dipahami sebagai proyek atas diri kita, kita telah memahami bahwa kita lahir di dunia yang mendahului kita. Kita belajar menggunakan bahasa yang telah digunakan sebelum kita datang dan kita menjalani hidup kita dalam konteks hubungan sosial dengan orang lain. Singkatnya, kita terbentuk sebagai individu dalam proses sosial dengan menggunakan materi-materi yang dimiliki bersama secara sosial. Biasanya ini dipahami sebagai sosialisasi atau atkulturasi. Tanpa akulturasi kita tidak akan menjadi orang sebagaimana yang telah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari.

Sedikit menelisik lebih dalam tentang singgungan anatara politik identitas dengan konstruksi ruang kota, bahwasannya ruang kota yang kita pahami sekarang tak serta merta merupakan suatau tatanan yang langsung ada. Politik identitas merupakan sumber daya yang bisa dialokasikan guna membangun struktur kota mikro yang kemudian berkembang bedasarkan dukungan ruang dan waktu. Ruang kota ialah representasi atas akulturasi yang melibatkan relasi sosial, politik peran, identitas serta alam. Saat itulah struktur kota yang mikro bersinergi dengan akulturasi yang melibatkan aspek-aspek relasi sosial yang universal yang selanjutnya mampu digambarkan sebagai tatanan ruang kota yang berciri khas. Di bawah ini akan peneliti sajikan beberapa paparan tentang identitas keetnisan dalam hal ini etnis Tionghoa di Kediri sebagai alokator sumber daya dalam membentuk ruang kota yang bercitrakan. Berbicara mengenai

identitas sungguhlah menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Identitas menurut Giddens (1991) merupakan manifestasi daripada pelanggengan diri yang telah diartikulasikan dalam kenyataan sosial. Setiap individu pastilah memiliki identitas. Identitas cenderung berperan sebagai penggerak yang mengarahkan individu-individu membangun kesadaran kolektif budaya dan sosialnya. Identitas juga menjadi wadah di mana proyeksi atas sumber daya dan kekuasaan berkibar.

Bila kita melangkahkan sejenak kaki ini untuk mengembara di kota Kediri, maka nuansa yang akan kita rasakan sebagai awam ialah suatu gambaran kota kecil yang tak terlalu ramai tapi memiliki budaya kuliner yang cukup kental, yakni Tahu. Dan dari sepanjang kita melakukan pengamatan, toko-toko yang menjual Tahu pasti didominasi oleh etnis Tionghoa. Gambaran di atas menunjukkan bahwa dalam pencitraan identitas suatu etnis ternyata terdapat kekuatan politik dan ekonomi yang dirangkum dalam sumber daya tidak menutup kemungkinanterlibat dalam pengkonstruksian citra dalam suatu tatanankota. Sentimen awam tentang kota Kediri yang dikenal sebagai kota Tahu muncul atas uraian di atas. Uraian berikut ini akan memaparkan fenomena budaya yang sekarang ini berkembang yang berkaitan dengan kuasa identitas etnis, yakni persoalan proyek politik identitas. Bila kita membicarakan masalah identitas diri sebagai proyek, tentu kita ingat tentang gagasan Giddens (1991) yang mengangkat mengenai lintasan pembentuk mengenai apa yang kita pikir tentang diri kita saat ini dari sudut situasi masa lalu dan masa kini kita. Tak semata-mata proyek tentang pribadi itu beijalan dengan selonggarnya, ia adalah stimulus dari ruang dan waktu. Karena ruang dan waktulah yang membentuk jati diri, peluang untuk menciptakan potensi dan legitimasi.

Di Kediri, etnis Tionghoa dan budaya yang mereka usung adalah rintisan dari sebuah perjalanan kota. Budaya yang dimaksud di sini mengarah pada tradisi kuliner yang telah melembaga dalam

kehidupan mereka selama beribu-ribu tahun. Proses universal yang menyangkut akulturasi relasi sosial, politik peran dan alokasi sumber daya baik fisik maupun non fisik menjadikan mereka mampu bertahan di atas suatu tatanan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang beda sama sekali. Namun inilah adanya identitas, bagi masyarakat Tionghoa Kediri mereka adalah kharisma agung yang dilanggengkan melalui usaha pengolahan makanan Tahu. Semua orang mengenai Tahu dan banyak orang di pelosok negeri ini yang menggemarinya termasuk orang Kediri. Dari saat pertama kali seorang Bah Kacung yang seorang etnis Tionghoa perantauan membuka perusahaan, memungkinkan adanya suatu perubahan struktur sosial yang memberikan praktek-praktek baik sosial maupun ekonomi yang sifatnya rekursif. Politik identitas keetnisan mula-mula muncul dan digambarkan dengan tindakan mereka setiap harinya. Politik identitas keetnisan memberikan mereka ruang-ruang untuk bergerak dalam struktur kota yang lambat laun menata citra, di mana kemudian hal tersebut ditandai sebagai aktualisasi politik jati diri yang sangat kental dengan identitas, dan dikenal publik.

Kota Kediri kini tengah berjaya dengan citranya sebagai kota Tahu. Pemaparan luas di atas secara rinci memberikan gambaran detail bagaimana representasi seorang agen yang aktif memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya dalam hal ini kudapan Tahu dan membentuk alur pikir masyarakat yang mencintai Tahu. Dari satu agen menjadi beberapa agen yang turut mencurahkan segenap sumber dayanya telah membuka kemungkinan pembaharuan atas ruang kota. Di Kediri, etnis Tionghoa menjadi tonggak perjuangan lika-liku pencitraan kota. Mulanya, Tahu menjadi kudapan masyarakat yang tinggal di sekitar Bah Kacung saja, namun ketika Bah Kacung telah sukses menunjang bisnis dengan alokasi sumber daya, kini banyak ditemukan etnis Tionghoa lainnya yang turut membuka perusahaan di Kediri. Masyarakat yang dibangun cita rasanya melalui panganan Tahu melampaui beberapa proses yang tidak berjalan sebentar. Animo atau keturutsertaan masyarakat Kediri adalah bagian

yang tak terpisahkan atas pelanggengan identitas yang di dalamnya mengaitkan alur kehidupan perkotaan. Masyarakat yang menjadi bagian dari kota adalah suatu gejala yang tak dapat dipisahkan dari pola interaksinya. Maksud dari pernyataan di atas bahwasannya pola interaksi manusia yang hidup di dalamnya akan menghasilkan produk khas kota yang sifatnya universal. Interaksi mengikat orang-orang yang terlibat di dalamnya kian membentuk sebuah tatanan yang mapan dalam aktualisasinya. Demikan halnya di kota Kediri, interaksi yang dibangun oleh warga lokal dengan etnis Tionghoa melalui berbagai macam eara termasuk dengan pendekatan budaya dalam kuliner Tahu merupakan titik awal perjalanan kota dengan produk budaya yang khas dan dikenal oleh masyarakat luas. Inilah Kediri, inilah kota Tahu.

SUNGAI DAN AIR KALI JAGIR NGAGELREJO SURABAYA
SEBUAH KAJIAN ETNOEKOLOGI

Sarkawi B. Husain

Kali Jagir dan Pendekatan Etnoekologi

Kajian tentang sungai pada umumnya (Lapian 2007; Sarkawi 2006; Lucas dan Djati 2007) dan Kali Jagir (Megasari 2008) pada khususnya telah dilakukan oleh beberapa kalangan, baik oleh akademisi maupun para aktivis yang tergabung dalam berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut bertitik tolak dari paradigma yang bersifat historis dan positivistik. Menurut Ahimsa-Putra (1997:53), penelitian dengan kerangka teoretis semacam ini, pasti memiliki manfaat, tetapi sekaligus memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan itu adalah: Pertama, hasil penelitian seperti ini tidak dapat menjelaskan dengan baik pola perilaku pemanfaatan air sungai, karena tidak diberikan informasi bagaimana variabel tertentu berkaitan dengan variabel tersebut. Kedua, dalam penelitian seperti ini peneliti umumnya memakai persepsinya untuk memandang dan mendefinisikan masalah yang diteliti[1].

Peneliti tidak berusaha memahami perilaku pemanfaatan lingkungan (yakni air sungai dengan segala konteksnya) dari sudut pandang orang yang diteliti. Akibatnya, perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air sungai tidak dapat dipahami dengan baik dan hasil

---

[1] Versi panjang dari tulisan ini dimuat dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Vol. 16, No.1, 2014. Tulisan ini juga diinspirasi oleh artikel Heddy Shri Ahimsa-Putra yang berjudul: "Sungai dan Air Ciliwung, Sebuah Kajian Etnoekologi" dalam *PRISMA* No. 1 Tahun XXVI Januari 1997, hlm. 51-72. Terima kasih penulis sampaikan kepada Novin Ermawanto yang telah membantu melakukan wawancara pada penduduk Ngagelrejo.

penelitiannya kurang infomatif. Ketiga, penelitian semacam ini secara implisit beranggapan bahwa manusia tidak berbeda dengan hewan. Akibatnya, premis yang sangat penting bahwa manusia adalah "*animal syimbolicum*" atau binatang yang mampu menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi dan memberikan makna pada lingkungan dan perilakunya menjadi terabaikan. Selain itu, kata Ahimsa-Putra, kelemahan paling penting dari penelitian semacam ini adalah diabaikannya sebuah dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu dimensi makna (Ahimsa-Putra 1997: 53). Bertitik tolak dari sejumlah kekurangan beberapa pendekatan yang pernah dipakai dalam melihat hubungan penduduk dengan sungai, tulisan ini menggunakan pendekatan etnoekologi yang diyakini lebih banyak mengungkap aspek-aspek yang lebih humanis dibanding dengan pendekatan sebelumnya.

Satu hal yang masih terlihat di kampung Baru Kelurahan Ngagelrejo adalah penggunaan sungai dan air sungai Kali Jagir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang dalam pandangan masyarakat umum adalah kotor. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan masyarakat terhadap sungai, khususnya Kali Jagir yang mengalir ke sebelah timur Kota Surabaya dan bagaimana mereka memperlakukannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka pendekatan etnoekologi sangat berguna untuk diterapkan. Pendekatan ini kata Ahimsa-Putra:

"pada dasarnya bertujuan melukiskan lingkungan sebagaimana lingkungan tersebut dilihat oleh masyarakat yang diteliti. Asumsinya adalah bahwa "lingkungan efektif" (*effective environment*), yakni lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, mempunyai sifat kultural. Artinya, lingkungan tersebut merupakan lingkungan fisik yang telah diinterpretasi, ditafsirkan, lewat perangkat pengetahuan dan sistem nilai tertentu. Karena itu, lingkungan fisik yang "obyektif" sama dapat "dilihat" atau "dipahami" secara berbeda oleh masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Lingkungan yang telah ditafsirkan ini, yang disebut juga sebagai "ethno-environment" atau "cognized environment", merupakan bagian dari sistem budaya masyarakat" (Ahimsa-Putra, 1997:54)

Oleh karena pendekatan etnoekologi menjadikan bahasa sebagai tumpuan utamanya, maka perhatian pada bahasa sehari-hari, termasuk istilah-istilah khusus berkaitan dengan sungai yang digunakan oleh masyarakat di sekitar Kali Jagir menjadi fokus perhatian. Untuk merekam percapakan mereka, dilakukan serangkaian wawancara dengan beberapa penduduk, terutama kepada ibu-ibu yang sering menggunakan air sungai ini. Kenapa lebih banyak perempuan? Karena peneliti berasumsi bahwa ibu-ibulah yang lebih sering berurusan dengan urusan "domestik rumah tangga" atau lebih sering bersentuhan dengan air dibanding dengan laki-laki.

Kelurahan Ngagelrejo: Sebuah Gambaran

Wilayah kajian adalah Keluruhan Ngagelrejo, salah satu dari enam kelurahan yang ada di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Ngagelrejo merupakan kelurahan kedua yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan diapit oleh Kali Jagir di sebelah selatannya dan rel kereta api di sebelah baratnya. Kelurahan ini memiliki jumlah penduduk 35.271 jiwa dengan 10.841 kepala keluarga. Dengan jumlah ini, maka setiap keluarga rata-rata memiliki 4,4 anggota keluarga. Dari jumlah keluarga yang besar ini, 18 % di antaranya berstatus keluarga miskin, yakni 1.684 keluarga. Di kelurahan Ngagelrejo terdapat sebuah kampung-kota yang disebut dengan "Kampung Baru". Di kampung inilah kajian difokuskan. Kampung yang terletak di bantaran Kali Jagir ini dihuni oleh 78 jiwa (dengan rincian: 43 Kepala Keluarga penduduk asli Surabaya dan sisanya merupakan pendatang). Penduduk yang menghuni wilayah ini merupakan penduduk tidak tetap atau oleh para pengamat perkotaan sering disebut sebagai penduduk liar (*illegal*). Kampung-kota dengan karakteristik kampung kelas bawah ini memilki luas wilayah ± 15 x 700 m^2, dengan panjang mengikuti pagar tembok Instalasi Air Minum di Ngagel ± 700m, dan lebar mengikuti jarak antara pagar tembok Instalasi Air Minum Ngagel dengan Kali Jagir ± 15m.

Sebagian besar rumah penduduk terbuat dari triplek/papan, seng, dan ada beberapa yang terbuat dari tembok (batu bata). Umumnya rumah-rumah berkuran 3 x 5 m^2. Mereka yang tidak memiliki rumah sendiri, mengontrak atau menyewa rumah atau kamar dengan ukuran yang bervariasi, masing-masing 2,5 x 3 hingga 3 x 3 m^2, dengan biaya sewa ± Rp 250.000,-/bulan. Jumlah kamar-kamar petak yang disewakan lebih kurang 100 buah. Walaupun status kampung tidak diakui oleh pemerintah, "Kampung Baru" memiliki sejumlah fasilitas umum seperti balai pertemuan, mushola, pos ronda dan sanggar. Selain itu, terdapat beberapa MCK yang dibangun atas inisiatif sendiri. Untuk keperluan masak-memasak, umumnya warga "Kampung Baru" membeli air (*ngangsu*) di PDAM atau membeli dari pedagang air keliling. Harga air dari PDAM, satu *geledek* berisi 10 jerigen (1 jerigen = 10 liter) yaitu Rp 2.000,- sedangkan harga air dari pedagang air keliling, satu geledek berisi 10 jerigen (1 jerigen = 10 liter) yaitu Rp 6.000.

Etnoekologi Sungai Kali Jagir

Sebagai sungai buatan pemerintah kolonial Belanda, usia Kali Jagir memang tidaklah setua usia Kali Mas dan Kali Surabaya (dua sungai yang terakhir adalah anak Kali Berantas). Namun demikian sungai yang sudah ratusan tahun mengalir ke arah timur Kota Surabaya tersebut telah menjadi salah satu tumpuan masyarakat yang tinggal di sepanjang alirannya. Terdapat dua pihak yang memanfaatkan sungai ini, yakni masyarakat dan pemerintah daerah dan keduanya dijamin oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Walaupun sama-sama dijamin dengan undang-undang, pola pemanfaatan sungai oleh penduduk dan pemerintah tidaklah semuanya sama. Perbedaan ini bersumber dari pandangan masing-masing kelompok tentang fungsi yang ditunjukkan oleh sungai dalam kehidupan umat manusia. Perbedaan itu penulis kelompokkan dalam dua bagian, yakni: (1) Kali Jagir: pandangan pemerintah dan pemanfaatannya, dan (2) Kali Jagir: Pandangan masyarakat dan pemanfaatannya

Kali Jagir: Pandangan Pemerintah dan Pemanfaatannya

Berbeda dengan Kali Surabaya, Kali Jagir merupakan sungai buatan yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1856 untuk memecah air Kali Mas agar tidak menjadi sumber banjir di Kota Surabaya. Untuk kepentingan ini, maka pintu air peninggalan Belanda masih tetap kokoh berdiri dan tetap dirawat dengan baik. Dengan kata lain, Kali Jagir memiliki fungsi yang sama dengan banjir kanal yang dibangun di Jakarta. Adapun fungsi yang kedua adalah sebagai salah satu sumbe air baku PDAM Surabaya. Upaya tetap menjaga kualitas air baku PDAM Surabaya, termasuk yang berada di Kali Jagir terus dilakukan. Upaya itu antara lain mengoptimalkan prasedimentasi, koagulasi-flokulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi. Selain itu, dilakukan peningkatan pemakaian bahan additif antara lain *alumunium sulfat, gas chloor, kaporit, poly elektrolit, kaolin, cupri sulfat, karbon aktif* dan lain-lain yang berfungsi untuk menghilangkan kekeruhan, warna, dan bau. Tindakan lain adalah meningkatkan frekuensi pencucian filter dan melakukan pencucian pipa/ *flushing* pada jaringan distribusi daerah terdampak. Hanya saja, sejumlah upaya ini membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan biaya sehari-hari dengan kondisi normal (http://surabaya.detik.com/read/2012/06/07/192414/ 1935734/466/).

Kali Jagir: Pandangan Masyarakat dan Pemanfaatannya

Hubungan antara warga yang menetap di sekitar Kali Jagir dan sungai ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Umumnya, warga yang menetap di wilayah ini sudah bertahun-tahun lamanya. Bahkan salah seorang narasumber bernama Ibu Sugiran sudah menetap sejak tahun 1975. Hampir semua penduduk yang diwawancarai mengatakan kalau sungai ini adalah sungai yang bagus dan tidak pernah ada masalah. Hal ini misalnya terungkap dari penuturan dua orang informan berikut:

"Selama 10 th di sini, tidak ada rasa was-was atau takut kebanjiran. Airnya stabil nggak sampai ke atas. Ya nggak bau atau apa. Karena airnya kan mengalir terus dan nggak mampet" (Yuliana 52 tahun, wawancara 22/5/2012).

"Kalau menurut saya ya bagus, karena perhari-harinya cari nafkah ya di sini. Karena apa, mengurangi beban ekonomi lah. Agak ringan kalau air kan jadi nggak seberapa biayanya, soalnya kan di sungai. Kalau di tempat lain kan urunan biaya sanyo, listrik, kan masih pikir-pikir" (Suraji 37 tahun, wawancara, 25/5/2012).

Menurut pengamatan peneliti, aktivitas pemanfaatan Kali Jagir oleh penduduk, khususnya mereka yang menetap di 'Kampung Baru' dapat dikelompokkan kedalam beberapa pola, yakni : (1) pola penggelontor dan penyiraman; (2) pola pembersihan; (3) pola bersuci; dan (4) pola rekreasi dan mencari nafkah.

(1) Pola penggelontor: mengalirkan tinja dan menyiram jalanan. Berbeda dengan Sungai Ciliwung yang digunakan oleh penduduk di sekitarnya sebagai tempat membuang sampah (Ahimsa-Putra 1997:60), penduduk yang menetap di sekitar Kali Jagir tidak pernah menggunakan sungai ini sebagai tempat sampah. Semua penduduk yang diwawancarai mengaku bahwa mereka sejak dahulu tidak pernah membuang sampah di sungai. Tampaknya terdapat paling tidak empat mekanisme mengapa warga tidak membuang sampah di sungai: (1) Tidak jauh dari tempat tinggal mereka terdapat depo sampah yang dapat digunakan setiap waktu. Depo atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) itu berada di sekitar Lapangan Bratang Tangkis; (2) Mereka membuangnya dalam sebuah lubang dan kalau sudah penuh dibiarkan busuk sendiri hingga menjadi tanah; (3) Mereka diberi tempat sampah dan jika sudah penuh mereka membakarnya; dan (4) Terdapat sebuah aturan yang melarang warga membuang sampah di sungai dan jika ada yang melanggar mereka harus membayar denda. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan salah seorang informan, sebagai berikut:

“Kalo sampah memang ndak. Memang mulai dulu ndak boleh. Nanti membuat kotor sungai. Kalau kelihatan membuang sampah di sungai kena denda Rp 10.000,- oleh ketua kampung (pengayom).” (Budi 46 tahun, wawancara 25/5/2012).

Oleh karena itu, dalam pola ini, Kali Jagir hanya dipakai untuk menggelontor tinja dan menyiram jalanan. Penduduk memang tidak mempunyai “WC helikopter” seperti yang banyak ditemui di Sungai Ciliwung (Ahimsa-Putra 1997:58) dan beberapa sungai lainnya di Indonesia, sebaliknya mereka umumnya mempunyai WC di dalam rumah, tetapi tidak mempunyai *septik tank*. Dengan kata lain, jika penduduk sedang “buang hajat” maka tinjanya langsung ke sungai seperti yang dituturkan oleh Warsito (pengayom kampung):

“Oh disini sudah nggak ada mas (maksudnya tidak ada WC helikopter: peneliti). Kalau yang sebelah barat sana langsung ke sungai. Rata-rata di sini WC nya di dalam, tapi langsung buang ke sungai. Ada klosetnya tapi langsung terjun ke sungai’ (Warsito (57tahun), wawancara 22/5/ 2012).

Sementara itu, bagi yang tidak mempunyai WC di rumah, mereka tidak segan-segan dan tidak sungkan untuk BAB di pinggir sungai. Mereka juga tidak peduli dengan orang-orang sekitar yang melihatnya ‘buang hajat’. Tampaknya di antara sesama penduduk berlaku sebuah sikap yang “Tahu Sama Tahu (STS)”. Warga yang hidup di sekitar sungai ini tampaknya memiliki pengetahuan bahwa tinja yang mereka buang ke sungai, akan segera terbawa arus. Mereka tidak mengetahui (atau pura-pura tidak tahu) atau tepatnya tidak peduli tinja tersebut akan mampir atau mengenai siapa. Selain sebagai penggelontor tinja, beberapa warga juga menggunakan air sungai untuk menyiram jalan terutama jika musim kemarau. Hal ini mereka lakukan agar debu tidak beterbangan ke rumah mereka, terutama bila sedang dilewati oleh kendaraan.

(2) Pola Pembersihan: Mencuci, Mandi, dan Menggosok Gigi. Mandi, mencuci, dan menggosok gigi adalah tiga aktivitas yang paling sering dilakukan oleh warga yang menetap di sekitar Kali Jagir. Aktivitas ini umumnya dilakukan oleh warga yang di rumah atau di sekitar rumahnya tidak memiliki sumur atau sumurnya kering akibat musim kemarau. Kegiatan yang merupakan pekerjaan rutin ini umumnya dilakukan dua kali, yakni pagi dan sore hari. Kegiatan ini tampak seperti ritual: aktivitas pertama adalah mencuci, kemudian mandi, dan diakhiri dengan menggosok gigi.

(3) Pola Bersuci. Bersuci yang dimaksud di sini adalah berwudhu, sebuah aktivitas yang wajib dilakukan oleh masyarakat muslim sebelum melakukan ibadah shalat. Hal yang menarik adalah aktivitas ini juga dilakukan oleh warga yang menetap di sekitar Sungai Ciliwung dengan alasan yang sama, yakni air sungai itu berstatus suci karena dia mengalir (Ahimsa-Putra 1997:61) dan karena itu dapat dipergunakan untuk berwudhu. Anggapan kalau air Kali Jagir suci karena mengalir diungkapkan oleh semua informan, misalnya:

"Nah kalau tempat berwudhu kan itu nggak ada masalah. Itu air jernih pun atau air nggak jernih pun itu kan nggak masalah. Yang penting air itu kan mengalir. Nggak masalah. Kalau airnya diam, lha itu memang nggak boleh. Kecuali, kalau air itu diam tapi nggak ada lagi air, jauh dari sini, yang ada cuma itu, ya itu nggak masalah" (Budi 46 tahun, wawancara 25/5/2012). "Ya iya kan untuk wudhu juga suci itu. Kan air sungai mengalir to" (Tina 54 tahun, wawancara 21/5/2012)

(4) Pola Rekreasi dan Mencari Nafkah. Selain tiga pola pemanfaatan sungai seperti yang sudah dijelaskan, Kali Jagir dimanfaatkan juga oleh sebagian warga untuk memancing dan mencari ikan. Aktivitas yang dapat dijumpai pada sore hari ini dilakukan untuk dua hal, yakni untuk rekreasi dan untuk kebutuhan nafkah (lauk) di rumah mereka. Di Kali Jagir memang terdapat banyak ikan, yang memang sengaja dibudidayakan oleh pemerintah setempat (kelurahan). Tampaknya

masyarakat yang memancing tidak peduli apakah ikan yang mereka tangkap atau pancing tercemar oleh bakteri tertentu atau tidak. Terpenuhinya kebutuhan dapur dan kesenangan yang mereka peroleh dari aktivitas ini jauh lebih penting daripada memikirkan apakah sungai tersebut tercemar atau tidak.

Etnoekologi Air Kali Jagir

Air Kali Jagir dalam Pandangan Pemerintah

"Perusahaan Daerah Air Mandi" demikian salah satu judul berita dalan Harian *Jawa Pos*, 14/5/2012). Judul berita yang diplesetkan dari "Perusahaan Daerah Air Minum" atau PDAM itu adalah sebuah gambaran kalau air PDAM Surabaya sudah tidak layak lagi diminum akibat tercemar oleh berbagai limbah. Menurut Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I, pencemaran itu disebabkan oleh dua hal, yakni (1) limbah pabrik; dan (2) limbah domestik atau rumah tangga. Selain perusahaan atau pabrik, limbah rumah tangga juga turut menyumbang terjadinya pencemaran air baku PDAM. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan dari Perum Jasa Tirta I. Menurutnya, terdapat ratusan liter limbah kota yang masuk ke Kali Surabaya melalui dua drainase dari Gunungsari. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan kualitas air di Kali Jagir yang masuk ke instalasi PDAM (Ipam) di Ngagel? Menurut Perum Jasa Tirta I, air yang terdapat di Kali Jagir rata-rata tidak pernah lebih baik dari pada air Kali Surabaya yang masuk ke Ipam (http://surabaya.detik.com/read/2012/06/...).

Berdasarkan sejumlah berita dan laporan yang telah dipaparkan di atas, tampak bahwa kategori air yang dipergunakan bukanlah "air kotor" dan "air bersih", tetapi menggunakan kategori "tercemar" dan "tidak tercemar". Penggunaan kategori bersih atau kotor kata Ahimsa-Putra mengandung pengertian yang agak kabur, karena menurutnya, "bersih" menurut ukuran tertentu belum tentu "bersih" menurut ukuran yang lain (Ahimsa-Putra: 64).

Air Kali Jagir dalam Pandangan Masyarakat

Dari wawancara yang dilakukan dengan sejumlah informan, dapat diketahui beberapa kriteria – yang dalam laporan ini saya sebut dengan istilah "aspek" yang digunakan oleh masyarakat untuk mengklasifikasikan air. Aspek-aspek itu adalah aspek: (1) sumber; (2) bau; (3) warna; (4) gerak; dan (5) cara memperoleh.

(1) Aspek "sumber." Aspek ini adalah aspek saat masyarakat dapat memperoleh air untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk memasak, mandi, menggosok gigi, mencucui, maupun bersuci (wudhu). Aspek ini dapat diketahui dari penuturan beberapa informan seperti berikut:

"Ya orang yang nggak punya sumur, ya dipakai mandi, cuci baju. Kalau sumur saya kering ya pakai air sungai. Untuk cuci. Orang sebelah barat yang sering pakai buat mandi."

Dari potongan wawancara di atas, tersirat adanya dua sumber air, yakni air sumur dan air sungai. Berdasarkan seluruh wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa dari aspek *sumber air,* saya menemukan bahwa penduduk di Kampung Baru mengenal adanya empat kategori air, yaitu: (1) air sungai; (2) air sumur; (3) air PDAM/ ledeng; dan (4) air hujan.[2]

(2) Aspek "bau". Bau merupakan aspek klasifikasi air yang menarik sekaligus agak 'menyeramkan'. Hal ini dapat dibaca dalam potongan wawancara berikut:

"Selama ini nggak pernah (tidak pernah bau: *peneliti*). Tanda-tanda, kalau ada mayat itu cuma hanya tanda-tanda satu hari satu malam itu kan baru timbul. Andai kata pagi ini airnya bau, nanti sore mayatnya timbul. Istilahnya arus, nah memang cuma itu aja tanda-tandanya." "Kadang-kadang bau arus (berbau anyir) karena ada orang meninggal ngapung di sungai." "Nggak bau. Cuma buthek. Kalau ada mayat bau." "Ya kalau memangnya ada orang mati di sungai itu memang ada berbaunya. Tapi kalau nggak ada korban ya nggak bau."

[2] Berbeda dengan masyarakat Kampung Melayu (Ciliwung) yang mengenal air yang bersumber dari pompa, di Kampung Baru kateori itu tidak ada. Sebaliknya masyarakat Kampung Melayu tidak mengenal air sumur.

Berdasarkan aspek "bau" ini, penduduk membedakan dua jenis air, yakni: (1) air yang berbau dan (2) air yang tidak berbau. Jika kita mencermati potongan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya air kali Jagir tidak "berbau". Air menjadi bau jika ada mayat yang mengapung dan mayat inilah yang menyebabkan air Kali Jagir mengeluarkan bau amis atau anyir. Kasus mayat yang ditemukan mengapung di Kali Jagir memang beberapa kali terjadi. Mayat yang biasanya mengapung dan hanyut di sungai ditengarai sebagai korban pembunuhan atau kecelakaan karena terpeleset saat hendak "buang hajat".

(3) Aspek "warna". Aspek ini merupakan salah satu klasifikasi yang terungkap melalui serangkaian wawancara dengan beberapa informan. Ketika ditanyakan kepada beberapa penduduk, apakah mereka tidak merasa kalau air Kali Jagir "kotor", mereka menjawab: "Ya kalo memang lagi hujan memang kotor. Kalo lagi terang kayak gini, saya pikir *bagus*." "Biasanya kotorannya banyak kalo dari atas, dari Gunungsari. Sampah, ya pohon pisang." "Nggak bau. Cuma *buthek* (keruh). Kalau ada mayat bau". "Ndak, ya *bersih*. Ya namanya sungai ya gitu."

Dari jawaban informan dapat disimpulkan bahwa hujan merupakan penyebab kotornya air sungai. Jika hujan turun maka air sungai berubah warna menjadi cokelat akibat banyaknya sampah yang bercampur dengan lumpur yang berasal dari hulu sungai. Lebih jauh, dari aspek warna ini, dapat diidentifikasi beberapa kategori air, yakni: (1) air bersih atau bagus; (2) air *buthek* (keruh); dan (3) air kotor. Tidak ada kriteria yang jelas dalam keadaan bagaimana air sungai dikatakan bersih.

(4) Aspek "gerak". Dari wawancara yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa penduduk yang tinggal di bantaran kali membedakan air menjadi tiga, yakni: (1) banjir; (2) air yang mengalir terus; dan (3) mampet. Banjir adalah meluapnya sungai akibat curah hujan yang tinggi. Namun demikian, menurut sebagian besar infoman tidak pernah terjadi banjir besar yang menyebabkan kerugian harta benda atau yang menyebabkan kehilangan anggota keluarga mereka.

“Ndak pernah banjir. Cuma *peres*[3]. Ini belakang ini saya uruk terus, kalo ada orang buang geragal (bongkaran rumah) saya uruk biar nggak naik. Tapi ndak pernah kok. Ya wajar to kalo *peres*. Air dari mana-mana kan ngalire kesini.” “Pernah, tapi cuma di belakang ndak sampai naik. Dua kali.” Adapun air yang mengalir terus adalah air yang mengalir tanpa terhambat oleh sampah atau hal-hal lainnya, sedangkan air *mampet* adalah kondisi air yang tidak mengalir akibat tertahan oleh tumpukan sampah.

(5) Aspek cara memperoleh. Aspek yang terakhir ini merupakan aspek yang menentukan apakah penduduk menggunakan air sungai atau air PDAM. Hal ini misalnya tercermin dari ungkapan Ibu Yuliana dan Pak Suraji berikut ini:

“Ya dari sungai, dikasi tawas. Untuk mandi dan cuci-cuci. Kalau beli air pet ya nggak mampu. Satu gledek Rp 7.000,- kadang ya ada yang jual Rp 8.000,-. Kalau mau beli sendiri ya ada mas Rp 1.500,- tapi jauh. Buat masak sama minum.” (Ibu Yuliana)

“Nggak ada. Kalau mandi di sungai, kalau airnya lagi bersih kalo punya uang ya ditawas. Dibikin masak, ya segalanya. Kalau banyak uang ya beli di gledek Rp 1.500,-“

“Pakai air sungai mas, kalo pas-pasan ya dikasi tawas. Untuk mandi, masak, semuanya. Sebenarnya ya nggak memadai mas, tapi ya mau gimana lagi. Ya memang nafkahnya segini. Kadang beli di Bratang lapangan.”

“Kalau menurut saya ya bagus, karena perhari-harinya cari nafkah ya di sini. Karena apa, mengurangi beban ekonomi lah. Agak ringan kalau air kan jadi nggak seberapa biayanya, solanya kan di sungai. Kalau di tempat lain kan urunan biaya sanyo, listrik, kan masih pikir-pikir.” (Pak Suraji).

Dari percakapan dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa dari aspek cara memperoleh terdapat tiga kategorisasi yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga hal itu adalah: (1) tanpa biaya; (2) dengan

---

[3] *Peres* adalah sebuah kondisi di mana air hampir atau mendekati bibir sungai.

biaya tinggi, tanpa tenaga; dan (3) dengan biaya murah, dengan tenaga. Kategori pertama adalah menggunakan air Kali Jagir yang tidak dipungut sesen pun, baik oleh pemerintah maupun pengayom kampung. Kategori kedua adalah membeli air PDAM yang dijajakan oleh pedagang keliling, sedangkan kategori ketiga adalah dengan membeli air PDAM langsung di tempat penjernihan air. Selisih harga air jika membeli langsung di PDAM memang jauh, tapi tenaga yang dikeluarkan cukup besar karena jaraknya jauh dari rumah penduduk.

Beberapa kategori air yang telah diuraikan di atas merupakan model dan sistem klasifikasi air yang disebutkan oleh penduduk bantaran Kali Jagir melalui serangkaian wawancara. Ada hal yang menarik dari klasifikasi itu, khususnya berkaitan dengan aspek gerak. Hampir semua penduduk yang diwawancarai menganggap air Kali Jagir berstatus suci karena air ini mengalir secara terus-menerus dan oleh karena itu sangat layak untuk digunakan berwudhu. Hal ini misalnya dituturkan oleh seorang informan berikut: "Ya iya kan untuk wudhu juga suci itu. Kan air sungai mengalir to." (Tina 54, tahun wawancara 21/5/2015).

Pemahaman ini berasal dari pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan persoalan bersuci (*thaharah*) di mana terdapat bermacam-macam kategori dan jenis air yang boleh atau tidak boleh dipergunakan untuk berwudhu. Pemahaman penduduk ini diperoleh secara turun-temurun seperti yang dituturkan oleh salah seorang informan.

"Ya iya kotor. Tapi kan kalo mengalir itu suci istilahnya. Katanya orang dulu kan gitu." (Tina 54 tahun, wawancara 21/5/2015) "Ia, kan mengalir." (Warni 42 tahun, wawancara 25/5/ 2012)

Pemahaman yang sama juga ditemukan dalam masyarakat yang menetap di tepi Sungai Ciliwung Kampung Melayu Jakarta (Ahimsa-Putra 1997:70). Saya menduga, pemahaman seperti ini juga dapat ditemukan dalam masyarakat muslim di tempat lain yang menetap di bantaran kali. Hanya saja, ada beberapa warga yang lebih

"kreatif" dan hati-hati menggunakan air Kali Jagir untuk berwudhu, dengan cara membuatnya seperti pancuran yang kemudian diberi tawas. Hal ini misalnya dilakukan oleh Ibu Yuliana: "Iya, saya pakai tawas. Saya bikin kayak pancuran." (Yuliana 52 tahun, wawancara 22/5/ 2012).

Dengan klasifikasi seperti yang digambarkan dalam skema, terlihat bagaimana penduduk di bantaran Kali Jagir, Kampung Baru Kelurahan Ngagel Rejo, memiliki persepesi tersendiri tentang air Kali Jagir dalam sistem klasifikasi mereka. Dengan skema itu, dapat disimpulkan beberapa hal pandangan masyarakat tentang Kali Jagir, yakni: (1) air sungai ini tidak berbau, kecuali ada hal-hal khusus yang menjadi penyebabnya, yakni ada mayat yang hanyut atau mengapung; (2) pada dasarnya air sungai bersih, kecuali kalau hujan maka airnya jadi *buthek* (keruh); (3) airnya mengalir terus, sehingga tidak hanya dapat dipakai mencuci atau mandi, tetapi bahkan untuk menghadap Sang Pencipta pun dapat dipergunakan (bersuci); dan (4) berbeda dengan air *pet*/ledeng yang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkannya, air sungai dapat diperoleh dengan tanpa biaya.

Skema Air Sungai Kali Jagir dalam Perspektif Masyarakat

Dengan pandangan demikian, tidaklah mengherankan jika penduduk yang bermukim di bantaran Kali Jagir masih menggunakan air sungai ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah bahwa penggunaan air sungai ini tidak semata-mata karena persepsi yang telah dijelaskan, namun ada faktor lain seperti ketidakmampuan masyarakat untuk memasang air ledeng (PDAM) dan harga air *gledek* (ledeng) yang mahal. Dengan kata lain kemampuan ekonomi mereka sangat terbatas untuk mengakses fasilitas air bersih yang disediakan oleh pemerintah kota, dalam hal ini PDAM. Faktor yang juga tidak kalah krusialnya adalah status rumah dan tanah yang mereka tempati juga "ilegal", sehingga walaupun terdapat beberapa penduduk yang mampu berlangganan PDAM, mereka enggan melakukannya karena khawatir tergusur.

Uraian dalam bagian-bagian sebelumnya memperlihatkan bahwa adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang sungai dan kualitas air Kali Jagir Surabaya. Bagi masyarakat yang bermukim di bantara kali, keberadaan air kali ini dimanfaatkan sebagai penggelontor dan penyiraman; pembersihan; bersuci; dan rekreasi sekaligus mencari nafkah. Namun demikian, bagi pemerintah pemanfaatan sungai oleh penduduk terutama pola pertama dan kedua dirasakan sangat menganggu karena penduduk membuang tinja mereka di sungai, baik dengan cara BAB di pinggir sungai maupun melalui toilet mereka yang klosetnya langsung ke sungai. Akan tetapi, bagi penduduk air sungai ini tetap layak digunakan, baik untuk mencuci pakaian dan perabotan rumah tangga, mandi, menggosok gigi, bahkan untuk berwudhu. Hal ini mencerminkan terdapatnya peta kognitif yang berbeda oleh warga kampung-kota dalam memandang sungai. Dengan pandangan yang berbeda ini, tidaklah mengherankan jika penduduk tetap bertahan hidup di bantaran kali dengan biaya hidup yang murah dibanding jika mereka harus tinggal di rumah-rumah susun atau di tempat-tempat lain yang telah disediakan oleh pemerintah.

PERUBAHAN KAMPUNG DAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI MAKASSAR PADA AKHIR MASA KOLONIAL

Ilham Daeng Makkelo

"Iboe kota Makassar, jang terdiri deri satoe goegoesan deri beberapa ratoes kampong, jang agaknja orang asing jang beri padanja itoe nama Makassar (menoeroet nama bangsa jang mengediaminja), nanti di dalam abad ka 17 di bikin lebih bagoes dan loeas, dan boeat beberapa ratoes tahoen belakangan mendjadi tempat kedoedoekan p.t. Gouverneur Celebes" (Pemberita Makassar, 24 November 1917).

Kampung merupakan bagian penting dan menjadi realitas dalam sejarah perkotaan di Asia Tenggara sepanjang waktu. Di kota-kota Indonesia, kampung banyak dijadikan acuan awal atau dasar pertumbuhan sebuah kota, meski dalam penjelasan lebih lanjut keberadaannya acapkali dikesampingkan. Kota Makassar yang menjadi locus geografis dalam tulisan ini, juga termasuk kota yang muncul berbarengan dengan lahirnya perkampungan.[1] Tidak berhenti di situ, dalam ratusan tahun hingga hari ini, isu soal kampung tetap mengemuka dalam wacana pembangunan kota.

Kota Makassar modern didirikan oleh Raja Gowa ke-IX, Tuma'parri'si' Kallonna (berkuasa 1512-1548), dengan memindahkan ibukota lama kerajaan yang terletak di pedalaman ke pesisir laut dan dekat muara sungai. Kampung dibangun seiring dengan meningkatnya aktivitas perniagaan dan kedatangan para pedagang dari luar maupun penduduk sekitar. Penguasa kerajaan Gowa-Tallo dan selanjutnya lebih terkenal dengan Kerajaan Makassar secara khusus mendirikan permukiman untuk orang-orang yang datang

[1] Tulisan ini adalah salah satu bagian dari draft awal Disertasi saya. Terima kasih kepada Promotor saya, Prof. Dr. Bambang Purwanto, dan Dr. Sri Margana, M.Phil. atas dukungan dan saran-sarannya selama ini.

berdagang atau bermukim. Salah satu kampung paling awal dibangun dan terluas terletak di sekitar istana benteng kerajaan diperuntukkan kepada orang-orang Melayu yang diberi nama kampung Manggalekanna.[2] Kota Makassar selanjutnya berada dalam atmosfir kota pelabuhan yang kosmopolit oleh hiruk pikuk era perdagangan Asia Tenggara.[3] Penduduknya bersentuhan dengan berbagai kontak dengan negeri luar. Kampung-kampung tertentu mengalami kemajuan dan berada dalam keterhubungan dengan bagian dunia lainnya. Hal ini misalnya terlihat di Kampung Ujung Tanah yang cukup luas dan dihuni sekitar 1.584 penduduk. Pada tahun 1632 Masehi, pemukiman ini dipimpin oleh seorang bangsawan penting sekaligus cendekiawan pemuja kemajuan bernama Karaeng Pattingalloang. Tempat ini adalah pusat pengembangan kebudayaan, keagamaan dan juga pusat pendidikan dan pengajaran.[4]

Kondisi dan penggambaran atas kampung mengalami perubahan saat kejatuhan Makassar menjelang akhir abad ke-17. Kampung kehilangan otonomi yang ditandai munculnya perkampungan berdasar etnisitas sebagai bagian dari politik ruang pemerintah Belanda.[5] Dominasi atas ruang pemukiman beralih ke

---

[2] G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *Sedjarah Goa*, (Makassar: Jajajsan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, tnp.thn.), hlm. 18; Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hlm. 16-19; Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa,* (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993), hlm. 26.

[3] Lihat Anthony Reid, "The Rise of Makassar", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17 (1983): 117-160; *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Vol.2: Expansion and Crisis*, (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1993); Lihat juga B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Volume I*, (The Hogue-Bandung, 1955), hlm. 66, 68); D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1962, hlm. 56).

[4] Anthony Reid, "A Great Seventeenth-Century Indonesian Family: Matoaya and Pattingalloang of Makassar", *Masyarakat Indonesia,* 8,1 (1980): 1-28; Mattulada, *op.cit.* hlm. 126-127.

[5] Makna kampung berdasar etnis sangat cair pengertiannya, karena kampung tersebut tidak sepenuhnya didiami hanya oleh etnis tertentu. Misalnya kampung Wajo, selain dihuni oleh orang Wajo juga oleh penduduk dari etnis lain. Begitupun sebaliknya, orang Wajo tidak hanya tinggal di kampung ini namun juga tersebar di

tangan orang-orang Bugis sebagai sekutu terdekat Belanda pada Perang Makassar.[6] Istana raja Bone didirikan di Kampung Bontoala yang selanjutnya memiliki kewenangan mengatur permukiman pribumi. Aktivitas dan kehidupan kampung hingga akhir abad ke-19 sepenuhnya diatur oleh para pemimpin mereka baik yang ditunjuk atau disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang diangkat oleh penduduk kampung. Dalam taraf tertentu, kampung tetap merespon perubahan ide, keinginan, atau kebutuhan penduduknya. Misalnya pendirian *waruga* (rumah pertemuan kampung), *salasa* (istana), dan perbaikan masjid pada abad ke-18 di Kampung Wajo, dan juga kampung lainnya.

Sejak saat ini pula, stigma dan penilaian atas kampung menjadi tidak berimbang. Menurut William H. Frederick, penulis Barat setelah abad ke-18 mengambil pandangan yang kurang optimis dan cenderung untuk meremehkannya hanya sedikit lebih baik dari kondisi desa. Salah satu akibat dari pemahaman tersebut adalah kurangnya perspektif dan lebih lanjut kesulitan konseptual yang secara khusus menghambat pemahaman yang akurat tentang urbanisasi di Asia Tenggara. Kampung dan kehidupannya masyarakatnya dianggap tidak benar-benar perkotaan. Akibatnya, pengamat cenderung untuk tidak melihat kota sebagai produk dari pertumbuhan jangka panjang dari dasarnya yang didominasi pribumi. Hal tersebut mengabaikan penggambaran atas sifat dan

---

kampung lain, seperti di Kampung Bandang, Buton, Melayu, dan di tempat lainnya. Lebih lanjut lihat J. Noorduyn, "Komunitas Saudagar Wajo di Makassar", dalam Roger Tol, Kees van Dijk, Greg Acciaioli, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan,* (Makassar: Penerbit Ininnawa KITLV Jakarta, 200).

[6] Perang Makassar puncaknya berlangsung tahun 1667 saat Kerajaan Makassar mendapat kekalahan dari Belanda dan memaksakan perjanjian yang terkenal dengan "Perjanjian Bungaya". Namun penguasa dan bangsawan Makassar tidak menaati perjanjin tersebut dan berlangsung perang yang lebih dahsyat lagi yang disebut Pemerintah Belanda sebagai perang paling mengerikan yang pernah dilaluinya. Akhirnya tahun 1669, kerajaan Makassar ditaklukkan dan simbol utama kekuasaannya jatuh yakni Benteng Sombaopu. Salah satu aktor penentu kemenangan pihak Belanda adalah penguasa Bugis, Arung Palakka.

dinamika masyarakat perkotaan terutama kehidupan kampung dan juga visi komunitas perkotaan di dalam kota.[7] Hingga sekarang, dalam kajian sejarah, tema kampung belum menjadi perhatian studi secara luas. Pada sisi lain, keberadaan kampung tidak dikonstruksi sebagai bagian utama dari proses transformasi suatu kota, atau lebih ironis jika hanya ditulis sebatas pada aspek negatifnya saja. Padahal, kampung bukan hanya ekses atau ironi perkotaan, tetapi satu kesatuan dengan bagian kota lainnya dalam perjalanan yang panjang.

Isu yang paling sering muncul dalam wacana mengenai kampung sejak awal abad ke-20 hingga akhir masa kolonial adalah diskriminasi kolonial, *kampung verbetering*, dan cerita buruk kondisi serta kehidupan di dalamnya. Sedangkan perhatian pada kemampuan kampung merespons perubahan, baik dalam aspek ekonomi, sosial bahkan politik belum mengemuka. Tulisan ini bermaksud, selain menampilkan usaha perbaikan kampung oleh pemerintah, juga dinamika penduduknya dalam menyikapi kemajuan atau kebaruan.

Kampung Dalam Wacana Politik Perkotaan Kolonial

Posisi perkampungan mengalami tantangan ketika muncul ide untuk membangun kota ideal di Indonesia, yakni sebuah tiruan yang sesungguhnya dari sebuah kota Belanda lama. Kondisi ini telah dimulai oleh para pelopor pemukim awal orang-orang Belanda. Jan Pieterszoon Coen, pendiri Batavia misalnya, berkeinginan untuk mengisi kota itu dengan warga Belanda yang terhormat dan juga ingin memindahkan karakter dan dan budaya *borjuis* Belanda ke Indonesia. Namun kenyataannya, kota ini justru berkembang cepat menjadi kota Timur yang khas dan memberikan contoh akulturasi yang sangat instruktif.[8] Salah satu yang menonjol adalah adanya

---

[7] William H. Frederick, "Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia", *JSEAS*

8W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Studi Perubahan Sosial,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).

kampung-kampung yang dapat ditemukan menyebar di seluruh kota.

Tahapan penting selanjutnya adalah perubahan signifikan yang dilakukan pada abad ke-19 dengan pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Namun kebijakan dan pengaruh Barat secara keseluruhan lebih lambat dan tidak merata. Kantong-kantong pemukiman penduduk asli yang ada baik di pusat kota maupun di luar daerah ini tetap tidak tersentuh pengaturan khas kolonial. Kampung yang berpenduduk padat tidak mudah dihapus ketika bangunan Barat mulai meningkat sejak paruh terakhir abad ke-19 dan mereka bertahan dalam abad berikutnya. Dunia kampung telah berdiri terpisah dari kota Barat sejak awal abad ke-19 dan terus berlanjut hingga tahun 1930-an ditandai oleh kontras antara kedua lingkungan itu. Secara fisik, kampung digambarkan sebagian besar tertutup dari lalu lintas dan rumah dengan anyaman bambu. Pejalan kaki dan sepeda masuk melalui gerbang sempit untuk mencapai gang-gang kotor, dengan penampakan rumah sederhana yang penuh sesak dan miskin. Ini semuanya kontras dengan 'kota Barat' di luar itu.[9] Meski demikian tidak pantas jika melakukan generalisasi bahwa itulah kondisi tunggal atas kampung-kampung perkotaan. Ada banyak kenyataan lain, yang masing-masing berbeda dalam batas-batasnya.

Memasuki abad ke-20, salah satu pekerjaan utama Pemerintah Belanda adalah penataan tata ruang dan pembangunan infrastruktur kota-kota di Indonesia. Persoalan dan kondisi kampung sudah mulai dipikirkan sejak berdirinya *Gemeente*, namun dalam waktu yang lama tidak pernah terwujud kebijakan yang jelas untuk menanganinya.[10] Pada tahun 1905, untuk pertama kalinya *Gemeente*

---

[9] William H. Frederick, *op.cit.*

[10] Pemerintah Belanda pada tahun 1905 mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Desentrlalisasi berupa penetapan kota-kota di Indonesia yang memiliki otonomi. Namun baru setelah tahun 1915an, kota-kota itu memiliki kewenangan yang lebih leluasa baik dalam hal administratif maupun keuangan. lihat Staatsblad 1905 tentang otonomi daerah. Lihat *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie, 1905-1930,* (Weltevreden: Gedrukt bij G.Kolff & Co, 1930).

Batavia mengajukan perbaikan jembatan dalam kampung. Isu perbaikan kampung kembali muncul tahun 1907 ketika usulan untuk tidak membedakan perbaikan antara pemukiman orang Eropa dan kampung-kampung pribumi. Usulan kepada pemerintah pusat tersebut tidak ditanggapi bahkan pemerintah membalas dengan menyatakan bahwa *Gemeente* tidak berhak untuk mengurus kepentingan kampung seperti yang direncanakannya. Sejak awal abad ke-20, kebijakan Belanda yang bersentuhan langsung dengan penduduk kampung hanya penempatan pegawai kolonial yaitu *petoro* (ambtenar) Belanda. Berkedudukan di kantor keresidenan sebagai *controleur ter beschikking* (controlir yang diperbantukan) untuk urusan adat. Selain berurusan dengan soal keamanan, para ambtenar bertugas sebagai 'pengadil' atas berbagai pelanggaran maupun persengketaan yang terjadi di perkampungan.[11]

Pada saat *gemeente* berdiri, pemerintah pusat dan *regeeringscommissaris* menegaskan bahwa kewajiban utama *gemeente* adalah mengurusi fasilitas bagi penduduk Belanda atau Eropa. Jika waktunya sudah memungkinkan termasuk keadaan keuangan maka kewajiban itu boleh diluaskan ke *wijk* (wilayah) bukan Eropa. Pada tahun 1914, soal kampung kembali muncul yang disuarakan oleh *adviseur* urusan *decentralisatie* khususnya mengenai *woning wet* (peraturan tempat tinggal). Dalam tahun ini juga *Assistent Resident* di Semarang mengajukan *voorstel* untuk memberi penerangan jalan-jalan di kampung dengan ongkos dari *gouvernement*, tetapi juga tidak ditanggapi oleh Direktur *Binnenland Bestuur.*[12] Usaha perbaikan kampung terhambat oleh *regeering* yang tidak mengizinkan *gemeente* campur tangan dalam urusan kampung. Desakan dari beberapa *Gemeente* menyebabkan pada tahun 1917, pemerintah Belanda mengeluarkan *voorstel* untuk menyerahkan urusan kampung kepada *gemeente*, dan pada tahun 1918, *voorstel* tersebut menjadi *wet* (undang-

[11] Lihat H.J. Koerts, "Amtenar BB di Sulawesi Selatan", dalam S.L. van der Wal (peny.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942* (Jakarta: Djambatan, 2001).

[12] *Pemberita Makassar*, 30 Oktober 1922, hlm.1.

undang).[13] Sejak itu, dirancang pemberian biaya kepada *gemeente* untuk perbaikan kampung khususnya pekerjaan jalan dan selokan, tetapi karena terjadi *malaise* setelah perang, menyebabkan rencana itu tertunda untuk waktu yang lama.

Pada tahun 1927, ketika keadaan kas negara lebih baik, ditetapkan bahwa belanja *kampung verbetering* itu disubsidi oleh pemerintah pusat. Nilai pengeluaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah pusat harus dibarengi dengan pengeluaran sebanyak itu juga oleh *gemeente*.[14] Perbaikan kampung yang riil dimulai tahun 1929 dengan rencana pelaksanaan sepuluh tahun. Anggaran *kampong verbetering* tahun 1930 sebanyak *f* 340.000, dimana kota Makassar mendapatkan *f* 31.000 termasuk yang tertinggi dan sebanding dengan kota Palembang, Medan, Semarang, Surabaya, Batavia. Anggaran tersebut dipakai untuk perbaikan kampung Renggang, kampung Pisang dan kampung Lariangbangi. Untuk program 10 tahun, pemerintah pusat akan menganggarkan *f* 1.000.0000 setiap tahunnya dengan target bahwa dalam jangka waktu itu, segala permasalahan kampung dalam kota-kota di Indonesia dapat diatasi.[15]

Infrastruktur dan Tantangan Kehidupan di Perkampungan

Kebutuhan akan perbaikan infrastruktur kampung, tidak saja menjadi perhatian pihak tertentu dalam pemerintahan Belanda. Kelompok masyarakat dan organisasi politik turut memperjuangkan hal tersebut. Di Kota Makassar, Sarekat Islam (SI) dan Partai Komunis

[13] *Staatsbladen van Nederlandsch Indie*, 1918, No. 482.

[14] Persyaratan pemberian subsidi *kampongverbetering* ini diikuti dengan beberapa ketentuan, diantaranya:1) jika suatu *Gemeente* menghendaki perbaikan yang lebih bagus dari umum yang diperlukannya (ini tergantung pendapat *Technische Dienst* dari *Dienst Volksgezondheid*) maka *gemeente* itu harus memikul sendiri belanja kelebihannya. 2) uang subsidi tidak dibayarkan sebelum pekerjaan selesai sesuai yang direncanakan. Lebih detail mengenai aturan ini, lihat Surat *Gouvernements Secretarie*, 22 Februari 1929 No. 341/II.

[15] *Locale Techniek*, 1932, hlm. 5-10, 9-10.

Indonesia (PKI) pada tahun 1923 mendorong *Gemeenteraad* terlibat dalam penanganan kampung.[16] SI merumuskan suatu mosi yang didukung oleh 10 *vereeniging* (organisasi) berisikan tuntutan perlunya diadakan cukup penerangan di kampung bumiputra buat menjaga keamanan, dan selokan-selokan patut dibersihkan untuk kesehatan.[17] Selain pekerjaan jalan dan selokan, beberapa kebutuhan mendasar di perkampungan dihadirkan. *Waterleiding* meski awalnya sangat terbatas ke kampung tertentu, mulai dikerjakan sejak awal tahun 1930-an. Awalnya pembagian air itu dilakukan dengan pancuran air (*hydrant*) dengan tidak terbatas dan tanpa biaya ke segenap penduduk kampung yang tak mampu, dimana dalam kampung tersebut juga tinggal pegawai *gemeente*. Permasalahan kemudian adalah ketika bertambah luasnya kota disertai jumlah penduduk yang semakin banyak. *Gemeente* tidak mampu lagi 'membagikan' air secara percuma ke penduduk kampung. Maka ditawarkan pengaliran melalui *kraan* dengan menyambung *leiding* dan rekening yang harus dibayar tiap bulan. Namun cara yang lebih disukai penduduk kampung yaitu adanya tempat-tempat penjualan air dalam kampung. Penjual air membeli kepada *gemeente* dan kemudian dijual kepada penduduk dengan *blik petroleum.* Padahal dengan cara ini, penduduk harus membayar 10 kali lebih mahal ketimbang memasang air dengan meter.[18] Rupanya teknologi yang harusnya memudahkan dan efisien tidak bersambut dengan pola pikir dan kebiasaan tradisional penduduk kampung.

Hingga akhir 1930-an dan awal 1940-an, kampung-kampung yang memiliki banyak penduduk oleh *gemeente* dipasang satu

---

[16] *Gemeenteraad* adalah Dewan Kota yang sudah dibentuk sejak awal berdirinya *gemeente*. Ketika Kota Makassar belum memiliki *Burgemeester* (Walikota) hingga tahun 1918, Gemeenteraad menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin dan dijabat rangkap oleh Asisten Residen Makassar. *Gemeenteraad* beranggotakan perwakilan warga kota baik yang ditunjuk atau dipilih. Keanggotaan pada awalnya didominasi oleh orang Belanda, namun pada perkembangan selanjutnya perwakilan penduduk pribumi juga semakin banyak.

[17] *Pemberita Makassar*, 29 Juni 1923, hlm.1.

[18] *Locale Techniek*, 1933, hlm. 15-16.

kraan waterleiding dimana penduduk bisa mengambil air. Dengan memasukkan uang 1 *cent*, diperoleh air dua *blik* minyak tanah. Ini cara terbaik pada penduduk miskin di kampung-kampung yang butuh air bersih, tetapi tidak mampu pasang *leiding*. Meski *kraan* yang ada tidak selalu baik kondisinya, seperti keluhan warga kampung Tabaringan dan kampung lainnya yang merasa dirugikan karena meski telah memasukkan uang *cent* namun air tidak keluar atau hanya sedikit.[19] Perhatian pada kampung semakin besar sejak bertambahnya jumlah pribumi menjadi anggota *gemeenteraad*.[20] Dalam sidang-sidangnya, kebutuhan dan persoalan kampung dibicarakan, misalnya menambah WC dan tempat cuci umum di kampung lain seperti yang sudah ada di kampung Galesong. Mencari solusi atas persoalan yang timbul bagi penduduk di dekat tempat pemotongan hewan. Memperjuangkan penerangan jalan dan soal padatnya pemukiman.[21] Perubahan kampung dipikirkan secara modern. Penduduk kampung juga mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan di kampung mereka. Salah satu rujukannya adalah model "kampung baru" yang didirikan di tanah lapang S.S. Rumah-rumah memiliki pagar dan pekarangan, ada jarak antara tiap rumah untuk mencegah terjadinya kebakaran besar serta mencegah berjangkitnya penyakit menular.[22] Inisiatif lain dilakukan oleh tuan tanah dari *Stichting* Ladjangiroe yang memasang lampu *electrisch* di kampung-kampung, seperti yang dilakukan oleh H.M. Azikin pada lorong-lorong gelap di kampung Baroe.[23]

Citra kampung masa kolonial tidak semata kenangan buruk dan terkebelakang. Meskipun letaknya menyebar, beberapa kampung tetap terhubung dan tidak benar-benar terpisah dengan

---

[19] *Pemberita Makassar*, 3 Februari 1941, hlm. 2.

[20] Mengenai perbincangan soal pembangunan perkotaan oleh *gemeenteraad*, lihat Dokumen khususnya dikumen tahun 1920-an hingga tahun 1930-an.

[21] *Pemberita Makassar*, 10 Desember 1932, hlm. 2.

[22] *Pemberita Makassar*, 10 Oktober 1933, hlm. 2.

[23] *Berita Baroe*, 11 Mei 1933, hlm. 2.

bagian-bagian kota yang dianggap maju dan modern. kampung Baru atau kampung Maluku yang berada tidak jauh dari pusat kota berada diantara *Noormalschool*, *Hospitalweg*, jalan-jalan utama hingga pelabuhan Makassar yang kesohor. Penduduk kampung dapat hilir mudik di tempat-tempat tersebut dengan leluasa. Ada yang menghabiskan waktu bercampur dengan keramaian ketika ada kapal yang datang, dan lain sebagainya.[24] Atau menikmati suasana kampung yang tetap memberinya harapan. Seperti tergambar pada potongan cerita bersambung berikut ini;

"Hawa laoet jang sedjoek bertioep dengan agak derasnja mengajoen2kan ranting kajoe jang baharoe berdaoen moeda sekeliling kampoeng Baroe, seolah2 mengipasi orang jang sedang penat pada pekerdjaanja, sedang dari boeboengan roemah orang kampoeng memboeboellah asap, menjatakan bahwa perempoean2 dalam roemah2 itoe sedang memasak oentoek anak beranak sedang Hatidjah anak gadis jang tjepat tangan itoe tengah radjin poela menggantikan iboenja didapoer oentoek memasak.[25]

Di beberapa kampung terdapat fasilitas penunjang kehidupan kota, seperti bangsal ikan di kampung Wajo dan di kampung Bessi yang terletak di sebelah selatan bekas tempat penggergajian kayu Toean Wieland. Terdapat pula tempat penjualan ikan di kampung Baroe yang dibuka dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang dan jam 2 siang sampai jam 5 sore.[26] Di kampung Patunuang terdapat pasar kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan masak, buah-buahan, ikan dan daging.[27] Untuk keperluan penduduk Kampung Lajang, maka di tanah bekas kepunyaan S.S. Di ujung timur jalan Rumbia didirikan loods penjual makanan, sayur, ikan dan sebagainya. Tempat tersebut berkembang menjadi Pasar Cidu, nama yang sesuai dengan lokasi

---

[24] *Berita Baroe*, 12 Desember 1933, hlm. 3.

[25] Cerita bersambung; C.E.S.P, "Meloer Djoempandang", *Berita Baroe*, 27 Desember 1933

[26] *Pemberita Makassar*, 2 April 1917, hlm. 1.

[27] *Pemberita Makassar*, 7 Februari 1923, hlm. 2.

pasar yang ujung dari loods di sebelah utara agak runcing (cidu).[28] Kampung kadangkala dikenang sebagai tempat yang teratur meski kondisi ini bukanlah realitas utamanya, seperti potongan tulisan dalam kolom 'Surat Pembaca' di koran lokal :

"Alangkah baiknja 'patoet diperhatikan' begitoe toeroet lihat kita bahoea di ini kota hampir segala kampong2nja telah teroeroes baik loeroeng2nja, meskipon loeroeng jang mana kira2 belom ada 2 m lebarnja."[29]

Tantangan dan realitas terbesar perkampungan adalah kondisi infrastrukturnya yang terkebelakang dan cara pandang penduduknya yang masih tradisional. Menurut W.F. Wertheim, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh urbanisasi di Indonesia adalah cara hidup yang semi-pedesaan yang tidak sesuai dengan berbagai kepentingan kehidupan kota. Metode sanitasi primitif yang di daerah terbuka tidak menunjukkan adanya bahaya bagi kesehatan, akan menimbulkan keadaan yang sangat buruk di wilayah perkotaan yang keadaannya jauh lebih padat. Sikap hidup tradisional, yang cukup sesuai untuk lingkungan pedesaan, membuat penduduk kampung-kampung kota menjadi korban yang tidak terhindarkan dari penduduk yang lebih aktif.[30] Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk kampung sebahagian tergantung dari sistem klontong yaitu hasil produk dari sekitar rumahnya seperti buah-buahan maupun ternak dijual untuk membeli beras, minyak, ikan dan lain-lain. namun cara ini juga mendapat tantangan ketika *gemeente* menetapkan aturan bahwa harus ada surat izin untuk jual beli semacam ini.[31]

Rumah di kampung-kampung dalam kota Makassar terlampau amat *vochting*nya, sebab tinggi tanah dalam rumah hampir tidak ada bedanya dengan di luar rumah. Maka kebanyakan rumah tidak

[28] *Pemberita Makassar*, 27 November 1939, hlm. 4.

[29] *Pemberita Makassar*, 20 Januari 1917, hlm. 2.

[30] Lihat W.F. Wertheim, *op.cit.*

[31] *Pemberita Makassar*, 7 Juli 1937, hlm. 1.

memakai *vloer* (plester), menyebabkan basahnya tanah terutama kalau waktu hujan di luar dan di dalam rumah sama saja. Keadaan semacam itu gampang sekali mendatangkan penyakit. Meski demikian, kondisi ini tetap berjalan dalam waktu lama dan sulit menemukan penyebabnya. Selain itu, setiap musim hujan, banyak atap rumah penduduk yang bocor. Untuk hal seperti itu, pihak *gemeente* diharap menerbitkan aturan soal pendirian rumah.[32] Infrastruktur lain seperti jalanan juga umumnya tidak terpelihara dan sempit. Jalan di kampung Baraya, Maccini dan Kalukuang seringkali menyebabkan kendaraan seperti dokar serta *auto* terbalik atau tenggelam dalam lumpur.[33] Begitupun kondisi jembatan yang menyebabkan kecelakaan seperti yang sering terjadi di jembatan antara kampung Lembang Cina dan Maricaya.[34] Persoalan utama lainnya adalah kekerasan dan kriminalitas. Menurut catatan polisi, kedua hal ini menempati peringkat teratas dari laporan penduduk kampung, seperti dari kampung Bontoala, Tamalabba, Galesong, Wajo dan kampung lainnya[35]

Penduduk Kampung Dan Modernitas Kolonial

Sejauh mana masyarakat kampung menjadi bagian atau merespons modernitas kolonial. Kenyataannya, kehidupan kampung memperlihatkan hubungan erat dengan simbol atau semangat kemajuan dalam berbagai hal. Sebuah gambaran sederhana atas hal ini tergambar dalam potongan roman percintaan karya Mario yang berjudul “Mastoera, Gadis Kota Makassar”, berikut :

“Gadis remadja poeteri doedoek di tengah boenga-boengaan dihadapan roemahnja jang terletak di Kampoeng Baroe. Gadis itu memakai rok merah djamboe menoeroet goentingan mode pada waktoe itoe. Dengan amat asyiknja doedoeklah ia seboeah bangkoe

[32] *Pemberita Makassar*, 24 Januari 1921, hlm.1; *Pemberita Makassar*, 19 November 1932,

[33] *Pemberita Makassar*, 8 April 1925, hlm. 2.

[34] *Pemberita Makassar*, 1 Juni 1927, hlm. 1.

[35] *Pemberita Makassar*, 4 Juli 1921, hlm. 1.

mempeladjari peladjarannja, karena ia masih bersekolah di MULO. Gadis jang mendjadi boeah moeloet itu digelari 'boenga edjaja' artinja boenga merah bernama Mastoera.... saat bersamaan di kota Makassar ramai benar orang bertjakap-tjakap sampai di kampoeng2 tentang pertandingan bal jang akan diadakan pada 31 Agustus jang akan datang antara Osvia dan Zeevaartschool akan merebut beker (piala) jang dianoegerahkan oleh toean besar G.G. Graff van Limburg Stirum".[36]

Arti kolonial modern khususnya di kota-kota Indonesia sejak awal abad ke-20 pertama-tama dihubungkan dengan aspek pendidikan modern melalui sekolah-sekolah. Penduduk kampung melihat sekolah sebagai sarana utama mempelajari dan menuju kemajuan. Di kota Makassar, anak-anak di kampung Butung, Layang, Pisang, Baru, Galesong dan sebagainya bersemangat masuk ke sekolah-sekolah baik sekolah agama maupun sekolah yang didirikan Belanda. Ketertarikan akan pendidikan tidak saja pada kalangan umum, tapi kalangan bangsawan pun tertarik untuk itu. Di ampung Jongaya tempat bermukim keturunan raja Gowa beserta para bangsawan juga tertarik pada pendidikan. Putera mahkota raja merupakan tamatan OSVIA dan sudah bekerja sebagai *Bestuurs Assistant*.[37] Pada tahun 1930-an sekolah-sekolah agama sudah banyak berdiri di kampung-kampung. Hal ini tidak terlepas karena kampung menjadi basis organisasi baik keagamaan, pemuda dan pergerakan. Organisasi seperti Muhammadiyah aktif di beberapa kampung, Perkumpulan Ahlussunnah Waljamaah aktif di Kampung Baru sejak tahun 1929, atau organisasi kepemudaan seperti Perkoempoelan Bintang Sport yang berpusat di kampung Malimongan.[38]

Kampung tidak semata tempat berdiri atau beradanya bermacam organisasi modern. Kegiatan yang acapkali disebut sebagai modernitas kolonial tidak jarang terlihat di kampung-kampung.

---

[36] *Pemberita Makassar*, 18 Juli 1934, hlm. 5.

[37] *Pemberita Makassar*, 25 Agustus 1927, hlm. 1.

[38] *Berita Baroe*, 23 Mei 1934, hlm. 1.

Dansa yang sering dilakukan orang Belanda di *Societeit de Harmonie,* juga berlangsung tiada henti di Kampung Pisang di malam tertentu.[39] Acara dansa dirangkaikan dengan acara penduduk kampug seperti pesta naik rumah baru, hari jadi, pesta kawin, dan lain-lain. Di kampung Baru, di rumah seorang warga terpandang dilangsungkan *zang en muziek* vereeniging "Oeliasers" dengan nyanyian dan orkestra. Di kampung Balangbaru ada *roemah komedie* yang ramai dikunjungi para pemuda dari berbagai kampung lainnya. Selain pertunjukan komedi, salah satu daya tariknya adalah berkumpulnya 'perempuan malam'. Meski tempat semacam ini disenangi kalangan tertentu dan selalu meriah, namun dianggap sebagai biang permasalahan kota warga, khususnya bagi yang sudah berkeluarga.[40] Hal serupa terjadi di kampung Pisang, yang bermula sejak seorang bekas mandor pos membuka warung untuk keperluan rumah tangga, menjual kopi, susu dan roti. Di sekitar tempat ini sering berkeliaran perempuan penjaja seks yang didatangi baik oleh pemuda Tionghoa maupun pemuda Islam dengan motor, kereta maupun dokar dan acap kali menimbulkan keributan.[41] Kampung Butung juga adalah salah satu kampung yang paling sering menjadi tempat diadakannya kegiatan suatu perkumpulan, seperti rapat umum 'Pemoeda Moeslimin Indonesia', dan beberapa organisasi lainnya.[42]

Salah satu hal yang menyebabkan kehidupan kampung menjadi semarak dan bersentuhan dengan kebaruan adalah tumbuh dan

---

[39] Kampung Pisang terletak di pusat kota yang dihuni penduduk dengan beragam pekerjaan. Berada di atas tanah *eigendom* Maradekaya dan Lariang Bangi yang luasnya 1.250.000 m2. Pernah ingin dibeli oleh seorang hartawan Jepang seharga 5 million rupiah, tetapi tidak dijual. Kemudian *gouvernement* membeli sebagian dari *perceel* itu untuk B.O.W dan S.S. sebanyak 400.000 m2. Dahulu sebahagian besar tanah ada kepunyaan hartawan pribumi bernama Ladjangiroe Hadji Abdoel Madjid, namun kemudian tergadai kepada Thoeng Liong Hoei sebesar *f* 90.000 dengan bunga 11 %, yang pada tahun 1935 sudah berjalan 10 tahun. Beban utang itu menjadi tanggungan ahli waris Stichting Ladjangiroe, dan pada tahun 1935 akan dilelang jika utang tersebut tidak mampu dibayarkan. Lihat *Pemberita Makassar*, 26 Juli 1935, hlm. 2.

[40] Pemberita Makassar, 14 November 1914, hlm. 2; *Pemberita Makassar*, 12 Mei 1915, hlm. 2; *Pemberita Makassar*, 1 November 1915, hlm.2)

[41] *Pemberita Makassar*, 16 April 1914, hlm. 2.

[42] *Pemberita Makassar*, 5 September 1932, hlm. 2.

berkembangnya perkumpulan maupun organisasi sosial. Menurut William H. Frederick, pelaku utamanya adalah "kelas menengah" atau dikenal sebagai kalangan "berpunya", yang terdiri atas pengusaha, karyawan, pedagang, dan pekerja terampil. Kalangan ini menempati posisi yang benar-benar menengah di masyarakat perkotaan Indonesia, tidak hanya dalam soal pendapatan tetapi juga dalam berbagai cara hidupnya. Selain tertarik pada usaha untuk mendapatkan pekerjaan, perhatian utamanya adalah mendapatkan pendidikan. Banyak anak-anak dari kalangan kelas menengah, termasuk wanita didesak ke sekolah-sekolah sebagai usaha perbaikan hidup dan juga untuk mendapatkan "kemajuan sosial". Sebahagian besar di antaranya cukup bersedia meninggalkan tradisi untuk mendapatkan aspek-aspek kemajuan itu.[43] Bahkan pada taraf lebih jauh, kesadaran politik sudah tumbuh untuk mendorong tokoh-tokoh pribumi yang dianggap mampu memperjuangkan kepentingan kampung untuk masuk dalam pemerintahan dan khususnya di Dewan Kota (*Gemeenteraad*).

Pada pihak lain, kegiatan *gemeente* khususnya di kampung-kampung turut memberi andil bagi penyebaran ide-ide kemajuan. Seperti halnya penerangan, dengan pemutaran film kesehatan mengenai kebersihan. Film tersebut ditayangkan di kampung Layang, Malimongan, Butung, Maricaya, dan lain-lain yang ditonton oleh ribuan penduduk.[44] Kampanye bahwa kebersihan pangkal kemajuan (kesehatan) diperdengarkan. Polisi kerapkali meninjau perkampungan untuk melihat kebersihan pekarangan rumah-rumah penduduk, dan yang dianggap lalai kemudian diajukan ke pengadilan.

Meski demikian apa yang disebut sebagai diskriminasi kolonial tetap terlihat. Pihak *gemeente* tetap membeda-bedakan usaha yang dilakukan dalam kebersihan pada *wijk* orang-orang kaya di kampung Cina dan *wijk* orang Eropa, dibandingkan dengan *wijk* di kampung-

---

[43] Lihat William H. Frederick, *op.cit.*

[44] *Berita Baroe*, 14 Juni 1934, hlm. 1.

kampung pribumi. Kondisi selokan dan jalan di kampung-kampung pribumi terbuat dari tanah yang jika waktu hujan akan berlumpur dan jika panas akan berdebu, dan ini akan mengancam kesehatan. Pekarangan yang sempit dan tidak adanya gerobak pengambil kotoran di kampung tetap dibiarkan, begitupun soal penerangan lampu yang hanya menerangi bagian-bagian tertentu dari kampung.[45] Suasana dan aktivitas yang terjadi, menandakan bahwa kampung bukanlah tempat yang pasif namun aktif terlibat dalam beragam kebaruan yang muncul. Pada saat *Pandoe Hizboel Wathan* mengadakan *marcheeren* musik keliling kampung dengan tambur dan terompet, disambut dengan sangat girang oleh penduduk.[46] Untuk beberapa kampung yang kondisinya lebih maju, maka keteraturan atas berbagai kegiatan dalam kampung lebih terencana dan terkontrol.

Pemilihan imam kampung Endeh contohnya. Proses pemilihannya melalui beberapa tahapan hingga akhirnya seseorang dari beberapa kandidat terpilih dengan suara terbanyak. Calon terpilih tersebut diajukan kepada pemerintah kota untuk ditetapkan dan dilantik.[47] Begitupun saat berlangsung *vergadering* Sociteit "de Eendracht" di rumah Kapitein Kampung Wajo yang memilih *voorzitter* Sonda Daeng Matajang sebagai ketua. Saat pertemuan tersebut juga dibicarakan mengenai kelengkapan dan kegiatan-kegiatan dari organisasi tersebut.[48] Semangat ini juga terlihat saat pemilihan pimpinan orang Tionghoa setelah meninggalnya kapitein Tionghoa yang terkenal, Nio Eng Boe. Perkumpulan-perkumpulan orang Tionghoa mensyaratkan bahwa calon pemimpin yang dibutuhkan selain diterima semua pihak orang Tionghoa dan pemerintah, calonnya harus memiliki kemampun

[45] *Anak Kontji*, Agustus 1921, hlm. 2.

[46] *Pemberita Makassar*, 15 April 1932, hlm. 1.

[47] Kandidat yang dipiliha adalah; Moehammad Saleh Daeng Ladja, bekas Kapitein dalam Distrik Endeh; Naing Daeng Mamangoeng bekas khatib masjid kampung Endeh; Samoen Daeng Tawan khatib masjid kampung Endeh; Haris anak almarhum imam kampung Endeh. Suara terbanyak diperoleh Moehammad Saleh Daeng Ladja. Lihat *Pemberita Makassar*, 8 Februari 1936, hlm. 2

[48] *Berita Baroe*, 19 Februari 1935, hlm. 1.

seperti menguasai bahasa tulisan maupun lisan, pandai dalam gerakan kemajuan serta pemerintahan.[49]

Secara umum tidak terelakkan adanya narasi mengenai kampung pada masa kolonial yang ditandai dengan keterbelakangan dan kondisi fisik yang tidak memadai. Namun bukan berarti transformasi aspek-aspek modern tidak berlangsung di perkampungan. Justru bentuknya terjadi dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, dari aspek pemukiman hingga pola pikir penduduknya. Kondisi dan realitas kampung memang ambigu. Saat diskriminasi kolonial terlihat, kesempatan penduduk kampung untuk berekspresi juga tetap terbuka. Pada waktu cara-cara hidup tradisional dipraktekkan, modernitas kolonial dalam taraf tertentu juga tetap bisa dirasakan. Ketika fasilitas dan infrastruktur kampung yang tidak memadai, berbagai usaha perbaikan juga tetap dilakukan baik oleh penguasa maupun penduduk kampung sendiri. Di saat keterbelakangan selalu disandingkan dengan kampung, saat itu juga penduduk kampung antusias berpartisipasi dalam hal pendidikan, berbagai perkumpulan dan memperlihatkan inisiatif-inisiatifnya sendiri. Citra negatif kampung dalam berbagai aspeknya, tidak mampu menghilangkan ingatan dan imaji sebahagian penduduk kota terhadap kampung yang memiliki daya tarik kuat. Seperti gambaran berikut ini atas Kampung Tello di pinggiran kota Makassar dalam sebuah *roman* pada tahun 1930-an :

"Kami hendak pergi makan *gogosok* (lemper) di kampung Tello, sebagai daerah yang terkenal karena *gogosok*nya yang enak, terletak di tepi sungai Tello kira kira 3 km jauhnya dari pusat kota Makassar. Tiap tiap hari minggu dan hari besar, banyaklah orang pergi kesana untuk makan *gogosok* dengan telor asin dilengkapi dengan *ijs*, dan melihat anak negeri membuat garam".[50]

---

[49] Saat Kapitein Tionghoa Nio Eng Boe meninggal, persemayamannya dihadiri ribuan orang, baik masyarakat Tionghoa, *wurgemeester*, *asisten residen*, pemimpin firma-firma dagang, dan berbagai kalangan lainnya. Lihat *Pemberita Makassar*, 23 Agustus 1921, hlm. 1.

[50] *Pemberita Makassar*, 26 Juli 1934, hlm. Roman percintaan karya Mario, "Mastoera Gadis Kota Makassar", dimuat berseri di surat kabar *Pemberita Makassar.*

KAMPUNG (BATIK) LAWEYAN
NARASI KAMPUNG-KOTA DAN NALAR PERUBAHAN

Akhmad Ramdhon
Siti Zunariyah

Laweyan: Sebuah Ruang Dagang

Kampung Laweyan dalam sejarahnya adalah narasi yang memanjang kebelakang. Keberadaan Laweyan dikenal lebih awal sebelum berpindahnya keraton Surakarta dari Kartasura ke Kasunanan sebagai daerah *perdikan*. Sejarah lisan, merujuk Laweyan sebagai daerah pemberian kepada Kyai Ageng Henis oleh Sultan Hadiwijoyo yang mendirikan dinasti Kesultanan Pajang. Kyai Ageng Henis kemudian mewarisi kemampuan yang dimiliki oleh para pendahulunya cerdik-pandai agama Islam, pandai mengaji dan suka bertapa. Selama pengabdiannya dalam mengembangkan agama Islam di Kasultanan Pajang, Kyai Ageng Henis menjadi mengabdikan hidupnya kepada Sultan Hadiwijoyo sehingga dianugerahi daerah perdikan di Laweyan, yang kemudian terkenal menjadi Kyai Ageng Laweyan.

Nama Laweyan (*ng-lawe*) yang berarti: *tempat untuk menghukum orang/dengan hukuman gantung* atau lawe yang berarti *bahan kain dari kapas*, dikenal sejak Mas Sunan Amangkurat Mas dan merupakan daerah perdikan yang diakui baik dari masa Kasultanan Pajang hingga Mataram yang berpusat di Kartasura (Sarsono dan Suyatno, 1985). Komunitas Laweyan sendiri adalah komunitas yang mandiri oleh sebab eksistensinya sebagai ruang yang otonom menghadirkan tradisi yang relatif mandiri dari efek keberadaan keraton Surakarta, sebagai pusat budaya. Struktur ruang yang berada dalam simpang kultur keraton yang berbasis agraris dengan adanya aliran sungai besar (kali Kabanaran, kali Jenes dan kali Batangan) yang membentang dan memanjang menjadi batas

menjadikan Laweyan mampu mengembangkan budaya dagang. Situs bandar Kabanaran menjadi bukti bahwa Laweyan mempunyai tradisi berdagang yang berbeda dengan wilayah-wilayah keraton Surakarta yang berbasis agraris lainnya[1].

Keberadaan bandar tersebut menstimulan juga ruang-ruang ekonomi bagi masyarakat sekitarnya sehingga membentuk pasar Kabangan. Dimana bandar Kabanaran menjadi pusat transit atas berbagai hasil bumi yang kemudian diperdagangkan. Salah satu hasil bumi yang diperdagang adalah kapas/*lawe* yang dihasilkan dari daerah-daerah pedalaman disepanjang sungai Kabanaran. Dan kapas pulalah bahan dasar untuk pembuatan lembaran-lembaran kain, yang nantinya akan dibuat sebagai media batik. Keberadaan pasar sebagai bagian dari jalur perdagangan (yang terfasilitasi oleh keberadaan bandar Kabanaran) dan menstimulan sebuah mentalitas non agro manajerial state. Dimana pada saat yang bersamaan nilai dalam masyarakat Jawa menempatkan aktivitas berdagang sebagai sesuatu yang mesti dihindari karena menjadi aktivitas yang merendahkan diri (Anderson, 2000). Oleh karenanya masyarakat Laweyan lalu termarjinalisasikan oleh sebab aktivitas yang intens atas perdagangan. Identitas Laweyan kemudian dimarjinalisasi lewat berbagai ragam folklore yang berkembang tentang masyarakat Laweyan sebagai *bau-bakul/*buruh dan *lawe/*kapas yang rendah nilai sosialnya.

Aktivitas ekonomi masyarakat Laweyan yang berdagang menjadi penanda dalam ekonomi masyarakat kota yang ditandai dengan tumbuhnya distribusi atas berbagai hasil alam baik berupa barang dan

---

[1] Sungai tersebut adalah kali Kabanaran yang menjadi pusat perdagangan (*bandar*) dan menghubungkan pasar Laweyan dengan *bandar* Nusupan yang ada di tepi Bengawan Solo, pada masa kerajaan Pajang (1546). Kabanaran terhubung pula dengan bandar Nusupan yang berada di tepi Bengawan Solo dan salah satu simpul dari Bengawan Solo adalah aliran *kali* Pepe yang mengalir melewati depan pasar Gedhe. Aliran air (sungai; *kali*) yang memasuki ranah ruang dalam kota, dimanfaatkan untuk membawa, menukar maupun menjual berbagai hasil bumi, selain dengan menggunakan jalan darat. Lihat makalah Soedarmono, 2004.

jasa, yang melahirkan sebuah ruang yang mempertemukan proses pertukaran secara teratur (Polanyi & Pearsons, 1988). Lewat terbentuknya bandar Kabanaran (yang menghubungkan daerah-daerah penghasil kapas sebagai bahan dasar *lawe* di Pedan, Juwiring serta Gawok-Pajang) dan secara bertahap kemudian pasar Kabangan yang memperjual belikan *lawe* sebagai bahan baku tenun maupun kain. Secara bertahap keterpusatan kota sebagai ruang-ruang sosial oleh sistem sosial yang diberlakukan para pemilik kekuasaan, secara berlahan mampu mentransformasi kota sebagai sebagai pusat dan simpul-simpul bagi jaringan perdagangan (*entrepot*). Kota diletakkan sebagai simpul atas keberadaan secara geografis dengan relasinya sebagai simpul jejaring dengan kota-kota kecil yang lain.

Dengan terlembaganya aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk pasar maka yang terlihat kemudian adalah terdapatnya arus barang dan jasa yang ditransaksikan (Geertz, 1989). Bisa berupa barang-barang kecil (yang mudah diangkut dan disimpan), bahan pangan dan dalam kasus Laweyan maka barang berupa *sandang* berupa lawe menjadi transaksi yang paling dominan. Keberadaan jalur sungai Jenes dan kedekatan secara geografis dengan bandar Kabanaran menjadi penentu bagi terbentuknya corak pasar Kabangan di Laweyan. Keberadaan pasar menjadi daya tarik bagi transaksi bahan-bahan lawe yang memang sangat mudah didapatkan di bandar Kabanaran -mengingat jalur sungai tersebut menghubungkannya dengan daerah-daerah penghasil kapas di kawasan Pedan ataupun Cawas di Klaten. Baik untuk memperjual belikan bahan-bahan lawe tersebut maupun mengembangkan ketrampilannya dalam membuat pakaian karena ketersedian bahan baku yang luas di Laweyan.

Keberadaan Laweyan pada jalur perdagangan -bandar Kabanaran- yang menjadi jalur transportasi perdagangan lewat air hingga Bengawan Solo memungkinkan optimalisasi berbagai kemungkinan jaringan-jaringan perdagangan yang bisa dilakukan

lewat ketersediaan infrastruktur air tersebut (Supratikno, 1998). Ketika masyarakat Jawa didominasi dengan sistem penghidupan berbasis tanah lewat bercocok tanam dan dengan menjadi petani maka keberadaan para pedagang yang berpindah-pindah menjadi sesuatu yang asing. Para pedagang menjadi sosok yang aneh, baru dan diluar tatanan etika yang mereka miliki kemudian lagi-lagi *wong dagang* menjadi sangat rendah keberadaannya (Jennifer, 2000). Masyarakat Laweyan semakin menjadikannya dalam posisi yang 'terselip' secara sosial. Para pedagang menjadi kelas yang bukan termasuk para priyayi (*wong gedhe*) dan petani sebagi *wong cilik*, sekaligus.

Kota : Industrialisasi Awal

Terbentuknya kota-kota menjadi sesuatu yang tak terhindarkan bersamaan dengan keterlibatan kolonialisasi dalam wujud kepentingan ekonomi. Kehadiran kepentingan kolonialisasi bermula dari hasrat-hasrat ekonomis dimana perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dagang dan ekspansi yang kemudian dilakukan adalah keputusan untuk menjadi bagian dari pengembangan jaring-jaring perdagangan yang ada. Perdagangan yang pada awalnya menjadi media penghubung antara para pendatang dengan pribumi serta merta mampu menjadi media yang menghubungkan berbagai jalur-jalur perdagangan yang terdapat di Jawa, dengan berbagai belahan nusantara hingga belahan Asia hingga Eropa (Wertheim, 1999).

Kepentingan dan kebijakan kolonialisasi di Hindia-Belanda secara bertahap mentransformasikan perubahan secara simultan. Kebijakan pengguliran modal atas wilayah Vorstenlanden, akselerasi atas perubahan berlangsung makin cepat dan revolusioner[2].

---

[2] Kebijakan awal tentang pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa (*Grote Postweg*), penghapusan sistem pajak secara paksa dan mendorong petani untuk mempertinggi produksi hingga penyewaan tanah dengan kontrak dan batas waktu, memberi pondasi perubahan sistem yang feodalistik menjadi prinsip-prinsip legal-rasional. Sartono Kartodirjo, 1999: 291-293 ; MC Ricklefs, 1995:183.

Politik kolonialisasi kemudian meresmikan dan menerapkan sistem liberalisasi untuk pengembangan sektor swasta lewat *Agrarische Wet* (1870). Fase awal dari kebijakkan ini langsung diikuti dengan pembukaan investasi-investasi modal Barat untuk pengembangan perkebunan-perkebunan swasta di wilayah Vorstenlanden[3]. Yang terjadi kemudian adalah sebuah transformasi besar atas kondisi perekonomian masyarakat di Jawa dimana terjadi pola sewa tanah dimana-mana, dengan tanaman yang ditanam secara khusus seperti kopi, tebu, teh sebagai komoditi eksport. Konsekuensinya adalah makin berkembangnya ekonomi uang atas sewa tanah dan tenaga yang dilakukan sebagai konsekuensi sistem tanam paksa[4].

Pada momentum yang bersamaan, infrastruktur perdaganganpun secara berlahan disiapkan. Jalur transporasti darat yang dikelola oleh *Nederlandsch Indische Spoorweg* dilaunching dan menggantikan jalur perdagangan yang selama ini menggunakan sarana sungai dan air sehingga berdampak pula pada terbentuknya serta berpindahnya jalur-jalur perdagangan ke daerah-daerah daratan-kota. Mobilisasi manusia dan barang kemudian serta merta mengalami kenaikan bersama tersambungnya kawasan-kawasan di Vorstenlanden dengan Semarang, yang menjadi pusat administrasi Pemerintah Hindia-Belanda sekaligus pintu masuk ke pelabuhan perdagangan internasional[5]. Pengembangan

[3] Dengan berkembangnya sistem sewa tanah : tercatat pada tahun 1796 terdapat 1.134 desa yang disewakan di kawasan pantai timur laut, meningkat pada tahun 1803 terdapat 1.446 desa yang disewa oleh swasta-kolonial. Lihat Vincent JH Houben, 2002: 639-648.

[4] Perkiraan Van Neil, jumlah penduduk di Jawa pada tahun 1795 terdapat 3 juta/jiwa dan meningkat mencapai 7 juta/jiwa pada tahun 1830 kemudian meningkat lagi menjadi 9.4 juta/jiwa pada tahun 1850 (1870 terdapat 16.2 juta/jiwa dan 1890 terdapat 23.6 juta/jiwa). Dimana 70 persen keluarga petani dalam kurun waktu 1837-1851 menghasilkan komiditi eksport. Lihat Vincent JH Houben, 2000: 186.

[5] Pada tahun 1875 jalur kereta api mampu mengangkut 899.000 penumpang dan 124.000 ton barang dagangan (dengan pendapatan 2 juta *gulden*) dan meningkat pada tahun 1880 mengangkut 950.000 penumpang dengan jumlah barang yang diangkut 334.000 ton barang yang diperdagangkan (dengan pendapatan 2.6 juta *gulden*). Takashi Shirashi, 1997 : 10

jalur transportasi state railway (1884) telah mampu menjangkau Surakarta lalu menghubungkannya dengan Surabaya dan kemudian berlanjut untuk kawasan penghasil kekayaan alam dengan kawasan-kawasan perdagangan yang terdekat lewat pengembangan jalur-jalur *trem* seperti Surakarta-Semarang hingga Yogyakarta-Magelang-Parakan.

Semua itu merupakan konsekuensi atas terintegrasinya ekonomi Barat yang padat modal dengan ekonomi Timur yang padat karya, dimana keduanya tidak serta merta terelaborasi namun tak jua terpisah. Korporasi yang tumbuh bersamaan dengan ketersediaan berbagai infrastruktur ekonomi tersebut mengalami peningkatan drastis. Naluri untuk melakukan ekspansi ekonomi di Hindia-Belanda pun kemudian menggelora, jumlah korporasi yang terdata mengalami kenaikan tajam[6]. Semua proses tersebut kemudian secara perlahan mengendap dan menjadi bagian dari alam bawah sadar ekonomi masyarakat di Surakarta, termasuk perkembangan pola perekonomian batik di Laweyan (batik) yang tidak dapat menghindarkan jejaring ekonomi kolonialisasi. Proses modernisasi atas semua aktivitas ekonomi masyarakat Laweyan pun berjalan secara bertahap dan berlangsung dalam sebuah proses yang menghasilkan ekonomi modern (korporasi/firma secara tidak penuh) sekaligus masih menyisakan mentalitas ekonomi pasar, secara bersamaan.

---

[6] Lihat grafik yang disediakan JNFM. A Campo, dalam J. Thomas Lindblad, 2002: 85-109. Tentunya dengan semua catatan tentang fluktuasi jumlah oleh sebab kegagalan, pembaharuan maupun perluasan usaha. Sehingga melahirkan kategorisasi berbagai bentuk usaha seperti usaha baru (233 korporasi), melanjutkan firma (533 korporasi), pendirian kembali bekas firma (32 korporasi), membawa konsensi yang masuk (405 korporasi) hingga perkebunan yang masuk (tercatat 519 korporasi). Sebuah tabel dari Thomas Lindblad tentang distribusi korporasi kolonial : sebelum 1890 didirikan 383 usaha, hanya bertahan 157 pada tahun 1930 (41.0% bertahan hidup) ; pada 1890-1900 didirikan 982 usaha, hanya bertahan 225 pada tahun 1930 (22.9% bertahan hidup) ; dan pada 1900-1909 didirikan 1630 usaha, hanya bertahan 524 pada tahun 1930 (32.1% bertahan hidup).

Akselerasi Ekonomi Batik

Aktivitas ekonomi yang sebelumnya terangkum dalam ruang-ruang pasar kemudian secara berlahan melakukan transformasi dan bergerak ke pola usaha yang berdasarkan firma ala Hindia Belanda. Kota yang kini penuh dengan kepentingan ekonomi kolonialisasi kemudian menjadi potret untuk menggambarkan proses terbentuknya pola ekonomi baru, dalam bentuk firma. Dengan aktivitas ekonomi yang ada lebih tertata dalam melakukan berbagai usahanya, tak terkecuali pula dengan perdagangan *lawe* juga mengalami perkembangan. Keberadaan Laweyan secara geografis yang melahirkan perdagangan lawe menjadi pondasi bagi eksistensi ekonomi batik. Batik yang pada mulanya adalah pakaian yang dibuat secara tradisional dengan berbagai motif menjadi eksis tidak hanya di Laweyan sebab batik kemudian mampu menjadi sebuah tradisi yang secara massal diproduksi dan mampu memberikan penghidupan atas ekonomi masyarakat pra-industri (Soedarmono, 2006 : Sariyatun, 2005).

Batik secara perlahan bertransformasi dari sebuah ekpresi kultural yang terbatas lingkup pembuatan dan jumlah yang dihasilkan menjadi sebuah aktivitas ekonomis yang makin memusat dalam ruang-ruang kota. Keberadaan kantung-kantung penghasil batik diberbagai tempat di Surakarta diikuti pula dengan menjamurnya transaksi ekonomi yang lebih luas. Pasar dan terutama toko kemudian menjadi penyangga yang paling dominan atas terspesialisasinya aktivitas ekonomi dalam bentuk perdagangan batik. Dengan infrastruktur ekonomi kota yang mapan, ragam pendekatan perdagangan kemudian beralih makin aktif, teratur dan sistematis. Keberadaan pasar dan toko menjadi proses awal yang mentransisikan sistem ekonomi berbasis agraris dengan ekonomi praindustri, dimana (pasar) *sar* Gedhe Harjodaksino (peninggalan "*yasan ndalem jumeneng*" PB X (1893-1939), *sar* Legi (Mangkunegaran), *sar* Kembang, *sar* Kliwon, *sar* Pon hingga Slompretan (Klewer),

memfasilitasi pertemuan aktivitas ekonomi hasil bumi yang ditukar dengan uang (hasil sewa tanah) maupun hasil-hasil industri batik yang diproduksi di beberapa kawasan di Surakarta.

Ketersediaan infrastruktur dasar seperti transportasi kereta (trem) yang mempercepat proses distribusi antar ruang, berefek pada keterjangkauan yang lebih maksimal (Suhartono, 1991). Kemudian jaringan yang terbangunpun menjadi sebuah jalur-jalur perdagangan yang membentang panjang dari Batavia, Semarang hingga Surabaya. Dengan terbentuknya jalur-jalur perdagangan yang ada, mekanisasi bagi menguatnya proses industrialisasi batik maupun yang lainnya telah tersedia. Proses awal perkembangan industrialisasi kemudian diikuti oleh mobilitas tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar ke arah titik-titik industri yang sedang berlangsung. Kota kemudian meningkat secara kuantitas, tidak sekadar oleh mereka yang ingin menjadi bagian dari status yang meningkat namun juga oleh mereka yang ingin memenuhi kebutuhan secara ekonomi dengan menjadi buruh batik (Brenner, 1991). Dan perkembangan batik kemudian menjadi faktor dominan dari tumbuh kembangnya ekonomi diluar mekanisasi pertanian di Laweyan sekaligus menghasilkan identitas tentang terbentuknya ruang ekonomi dalam kota. Budaya kota yang tumbuh bersamaan dengan transformasi industri batik makin massif terutama semenjak tahun 1840an dimana metode *canting* yang mempercepat proses produksi agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan bersamaan dengan terbentuknya transaksi ekonomi yang terwadahi dalam pola-pola ekonomi firma.

Penggunaan atas produk batik yang meluas seiring pula dengan meluasnya ketrampilan untuk menghasilkan batik sebagai pakaian keseharian oleh masyarakat sehingga pada akhir abad 18an batik benar-benar telah menjadi produk yang sangat populer. Batik mengalami peningkatan kuantitas produksinya selepas anjuran pemerintah kolonial untuk menggunakan kain mori sebagai bahan dasar pembuatan lembaran-lembaran kain batik. Lalu pengenalan

atas beberapa bahan yang dapat digunakan untuk memproduksi dan memberi warna-warna yang bervariasi menjadi faktor lain yang semakin mengakselerasi atas popularitas batik. Pada abad 19an produksi kain batik menemukan momentumnya dengan penggunaan bahan-bahan pencelup yang memberi warna-warna yang lebih variatif (seperti biru, merah maupun coklat yang semakin menarik minat untuk mengenakannya) dan penemuan tehnik pengecapan pada proses pembuatan memungkinkan proses produksi yang lebih massal dengan waktu yang lebih cepat. Bahkan pada abad ini pula peningkatan import bahan dasar untuk kain batik -berupa kain mori- yang dilakukan oleh para pengusaha kolonial dari Cina maupun India untuk memenuhi kebutuhan pasar yang mengalami peningkatan tajam. Momentum tersebut menjadi titik krusial, dimana batik mulai mengalami transformasi dari kerajinan tangan yang diproduksi secara privat menjadi produk dari proses industrialisasi yang lebih besar.

Dalam konteks lain, Surakarta pada saat yang bersamaan terkena pula dampak kebijakan liberalisasi yang membuka ruang-ruang perubahan akibat kebijakan tersebut. Struktur tenaga kerja yang berubah oleh karena disewanya lahan-lahan produktif untuk digantikan dengan tanaman-tanaman yang berorientasi pada pasar internasional membuat makin maraknya industri-industri kolonial sehingga memunculkan budaya konsumsi akibat disewanya tenaga kerja dengan upah oleh industri-industri kolonial. Infrastruktur yang sedianya akan menjadi daya dukung perkembangan ekonomi-industri awal di Indonesia dengan pengadaan pengembangan jalur-jalur transportasi darat dan pengembangan trem-trem kereta api, menjadi media yang efektif untuk menghubungkan simpul-simpul ruang produktif dengan lokasi-lokasi perdagangan sekaligus pengadministrasi antar ruang-ruang yang lain. Pasar batik dikawasan Surakartapun mengalami perkembangan yang pesat bersamaan kondisi tersebut.

Keberadaan pembangunan jalur transportasi darat berdampak pada perdagangan domestik karena keterjangkauan biaya dan waktu sekaligus memungkinkan distribusi batik mulai dari Surabaya hingga membentang sampai Batavia. Sebagai sebuah ruang, Surakarta kemudian berkembang karena tersedianya beragam infrastruktur industri. Kebijakan kolonial yang mengkonsentrasikan pengelolaan administrasi di kota melahirkan pula budaya kota (*urban*) yang mulai mendominasi wajah kota Surakarta. Batik seperti menemukan momentumnya ketika menjadi bagian dari budaya kota dan mengkostruksi pula berbagai identitas masyarakat. Surakarta lalu berkembangan menjadi pasar batik nasional dimana konsumsi akan batik meningkat bersama peningkatan jumlah penduduk dan distribusi hasil untuk perdagangan yang semakin meluas[7]. Kebutuhan akan tenaga kerjapun meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan penggunaan kain batik secara massal dari tahun 1859 sampai 1860, yang produksinya melonjak. Tercatat import bahan baku ke Hindia meningkat dari 9.837 juta gulden pada 1850 menjadi 20.943 juta gulden pada 1860 dan 16.024 juta gulden pada tahun 1870 (Takashi, 1997).

Laporan De Kat Anggelo pada tahun 1930 mengenai usaha batik yang terdapat di Surakarta menunjukkan: jumlah pemilik usaha batik didominasi oleh pribumi yang mempunyai usaha batik sebanyak 236 tempat usaha, komunitas Arab sebanyak 88 tempat usaha, komunitas Cina sebanyak 60 tempat usaha dan komunitas Eropa sebanyak 3 tempat usaha. Kondisi tersebut menjadi bagian bagi berkembangnya usaha batik di Surakarta, yang juga dapat dilihat dari menjamurnya tempat-tempat penjualan batik yang berukuran kecil di daerah Kauman, Keprabon maupun Pasar Kliwon dan beberapa daerah pinggiran kota seperti Tegalsari, Kabangan dan Laweyan (mulai sekitar tahun 1870). Sehingga pada tahun akhir abad 19an, batik telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat

[7] Surakarta sejak tahun 1850 hingga 1900 pertumbuhan penduduk Jawa tiap tahun diperkirakan 1.5 % kemudian naik 1.8 % pada tahun 1942 dan naik lagi pada menjadi 2 % pada tahun 1971, lihat Koenjaraningrat, 1984 : 9-10

Jawa, Kalimantan, Sumatera serta beberapa pulau lainnya dibelahan nusantara. Dengan permintaan yang tinggi atas produk-poduk batik yang ada, peningkatan akan bahan dasar berupa kain mori *(cambrics*) pun tak terhindarkan. Import bahan baku utama kain batik dari Cina dan India ke Jawa dan Madura tercatat melebihi jumlah import yang dilakukan oleh negara-negara Asia yang lainnya[8].

Proses pembuatan batik yang panjang dan bertahap kemudian terdistribusikan. Proses yang paling dasar seperti menggambar garis-garis batas (*rengrengan/ngemplong*), membuat terusan pada pola-pola yang ada, untuk kemudian *ngiseni* dengan menambah ornament sehingga pola-pola tersebut dapat membentuk gambar lalu di-*temboki* yaitu menutup bagian-bagian dari pola yang ada dan kemudian m-*bliriki* serta n-*celup* dengan bahan-bahan pewarna. Perpindahan dari proses satu ke proses yang lain, tersebar dalam berbagai ruang dalam kota maupun diluar kemudian membentuk pola hubungan yang sifatnya patron-client. Mekanisme produksi dengan sistem distribusi antar berbagai pelaku, menumbuhkan sifat ketergantungan satu dengan lainnya[9].

Bagi pemilik usaha yang masih bisa bertahan maka mereka mampu mengembangkan usahanya secara penuh (bahan, produksi hingga pemasaran) dan bagi yang tidak maka akan mengambil strategi usaha yang disesuaikan dengan keterbatasan dan kemampuan yang ada[10]. Gambaran akan kondisi tersebut bisa dilihat

---

[8] Pada tahun 1937 tercatat 32.016 (untuk cambrics yang kasar) sedangkan negara Asia lainnya hanya 22.401, pada tahun yang sama import medium cambrics sebanyak 88.953 dan negara negara Asia lainnya hanya 35.307. Lihat Sariyatun, *Op. Cit.* halaman 64.

[9] Ada banyak ragam nama yang digunakan bagi semua proses tersebut ; *medel* bagi mereka yang mengecat dengan warna biru, *babar* bagi yang menggunakan warna kelabu, *nyelep* bagi yang bertugas mencelup dengan bahan-bahan pewarna, nge-*cap* bagi yang memberi cap pada lembaran bahan. Dibawah kelas para tukang cap adalah kuli mbabar, kuli celep, pengubeng sebagai buruh inti, untuk kemudian dilanjutkan dengan kuli mberet, kuli kerok dan kuli kemplong sebagai buruh tetap. Dan yang terakhir adalah buruh harian yang tidak terikat.

[10] Sebagai contoh mengelola buruh dengan ikatan kerja yang disesuaikan jam, hari maupun keahlian dilakukan untuk menekan upah, menjadi pemborong, produksi

dari catatan yang ada di Laweyan dari sejumlah 236 pengusaha pribumi, pada tahun 1930 (dengan catatan, usaha batik yang berkembang menghadapi ujian berat ketika memasuki awal abad 20-an dimana depresi ekonomi global (1930an), berdampak pada produksi dan tumbuh-kembangnya para pengusaha batik.

Dengan jaringan perdagangannya berkembang luas mencapai Kudus, Semarang, Pekalongan hingga di wilayah Jawa bagian timur jaringan yang terbangun menembus pasaran dipesisir Surabaya, Gresik dan Tuban, dan di Jawa bagian barat membentang pula jaringan perdagangan mencapai Cirebon, Bogor hingga Batavia[11]. Sebaran industri batik yang terdapat di Laweyan kemudian merambah kepada kemampuan untuk mengakumulasikan modal secara lebih banyak sehingga tempat untuk memproduksi batik, menjamur di berbagai ruang yang terdapat di Laweyan.

Sebagai bagian dari sebuah tradisi, batik di Laweyan diwariskan lewat mekanisme sosial dalam simpul kekeluargaan. Keluarga pemilik usaha batik menjadi pusat kepemilikan. Regenerasi dari *Mbok Mase Sepuh* (Nenek) - *Mas Nganten Sepuh* (Kakek) kepada figur seorang pengelola usaha *Mbok Mase* (Ibu rumah tangga) dengan *Mas Nganten* (Bapak ; kepala rumah tangga) kemudian *Mas Rara* (anak perempuan) dan *Mas Bagus* (anak laki-laki). Mentalitas dagang yang diwariskan dalam masyarakat Laweyan ternyata jauh lebih baik dimaknai oleh generasi perempuan di keluarga-keluarga pembatik sehingga kondisi tersebut menempatkan pengelolaan semua usaha

---

yang disesuaikan dengan musim (panen-gerebeg) hingga peminjaman hutang menjadi mekanisme bertahan atas krisis yang terjadi ketika depresi ekonomi global. Lihat P de Kat Angelino, *Op. Cit.* (transkrip halaman 78-80).

[11] Dengan catatan : 750 *kodi* selama tiga bulan produktif (per/*kodi* 40 *gulden*). Sehingga investasi yang terdistribusi di pulau Jawa saja yang bisa diperoleh para pembatik Laweyan dapat mencapai 30-40 ribu *gulden*. Lihat Soedarmono, 2006: 59. Sepenggal serat yang ditulis Raden Mas Riya Jayadiningrat I 'Suluk Mas Nganten' (1818) di Serat Wulang, yang memotret kondisi tersebut : *Ana maneh nisthane wong amemantu ; ana ta sudagar cilik ; sawatara sugihipun ; kepengin cara priyayi; ana mitrane winanoh*. Lihat Suzanne A. Brenner, *Competiting Hierarchies : Javanesse Merchant and the Piyayi Elit in Surakarta*, ASP-Cornell Vol. 52-1991: 68-75.

batik ada ditangan *Mbok Mase*[12]. Termasuk juga kewenangan dalam mengurusi semua urusan dan kebutuhan keluarga, oleh karenanya pola ikatan kekerabatan yang dikembangkanpun berbasis pada kebutuhan melestarikan pola kepemimpinan dengan melakukan rekruitmen dalam konteks dan kepentingan mengembangkan usaha batik. Seluruh anggota keluarga kemudian menjadi bagian dari semua aktivitas usaha yang yang dilakukan, terutama anak-anak perempuan yang akan mendapatkan prioritas atas semua proses usaha batik[13] ; mulai dari proses produksi hingga distribusi

Kejayaan (Akhir) Batik

Perkembangan batik sendiri kemudian berkembang semakin luas dengan sebaran kemampuan untuk menghasilkan batik yang tak lagi dimonopoli oleh Laweyan maupun Surakarta[14]. Peta distribusi yang semakin terbatas menjadi ujian awal atas bertahannya batik Laweyan dalam upaya untuk meneruskan kejayaannya. Selain itu, perseteruan para pedagang batik Laweyan yang tidak setuju atas

[12] Disamping karena model kekeluargaan yang berpusat pada ibu (*matrifokal*), ketrampilan teknis yang detil dan pengaruh pandangan Jawa yang memandang rendah aktivitas perdagangan (*non-agro manajerial state*) menjadi alasan untuk menempatkan perempuan pada posisi terdepan di Laweyan. Jennifer Alexander, 1997: 290.

[13] Proses pendidikan usaha di Laweyan, untuk usia (1-6 th) ; (20-25 th) bertugas membantu pekerjaan sekunder berupa menghitung, melipat dan mengepak kain, sedangkan usia (6-12 th) ; (25-35 th) bertugas membantu pekerjaan primer berupa pengenalan pada aktivitas distribusi kepada konsumen. Untuk usia (12-20 th) ; (35-45 th) bertugas membantu pekerjaan sebagai wakil pimpinan usaha berupa mengelola kebutuhan pasar dan konsumen secara luas dan usia (20-25 th) ; (45-55 th) mulai mendapatkan limpahan kewenangan usaha dan bertanggung jawab pada semua proses produksi dan distribusi, serta pada usia ke 55 tahun proses regenerasi mulai dilakukan. Lihat Soedarmono, 2006 : 98.

[14] Sebagai sebuah gambaran : GDP (Gross Domestics Product) per kapita Hindia Belanda pada 1933 jatuh sekitar 16% di bawah angka rata-rata tahun 1928/1930, berefek pada ketersediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi kain batik, seperti kain *mori* (cambrics), semakin susah untuk dicari dan kalaupun ada harganya amat tinggi. Sedangkan pedagang-pedagang Cina yang mempunyai toko-toko bahan-bahan kebutuhan para pengusaha pribumi enggan untuk diajak bekerjasama bahkan mereka semakin menjerat dengan memberikan kredit-kredit barang dengan bunga yang amat tinggi. Lihat makalah Amin Mudzakki, 2006.

keberpihakan pemerintah Hindia Belanda atas para pedagang Cina kemudian melahirkan konflik sosial yang melebar ke berbagai persoalan. Sarekat (Dagang) Islam yang lahir pada 1912 merupakan upaya dan bentuk perlawanan yang diberikan oleh komunitas para pedagang batik, yang membangun asosiasi ronda malam (*Rekso Rumekso*) sekaligus menegaskan kembali identitas ekonomi pribumi ditengah-tengah kepentingan kaum kolonial dan menguatnya ekonomi kaum pendatang.

Selain itu, ujian yang dihadapi oleh para pengusaha batik Laweyan-Surakarta dalam Catatan de Kat Angelino (1922-1927) mengalami surut dipasaran namun tetap menghasilkan kain batik kasar yang dihasilkan oleh buruh-buruh yang juga telah mengalami pembatasan jumlah akibat fluktuatifnya permintaan di pasar global (Rangon-Siam-Suriname). Dan kalaupun ada peningkatan maka peningkatan jumlah permintaan hanya dikarenakan adanya momentum panen hasil bumi lalu dikirim ke berbagai tempat dibelahan nusantara seperti Manado, Banjarmasin, Palembang, Sumatra hingga Aceh. Namun ujian yang hadir kemudian jauh lebih berat dari ujian-ujian sebelumnya yaitu krisis ekonomi global pada tahun 1930an[15]. Pemerintah Hindia-Belanda kemudian merespon kondisi tersebut dengan memperkenalkan Ordonansi Krisis 1930 yang membebankan kuota import terhadap barang sesuai negeri asal[16].

---

[15] Catatan perekonomian yang mengalami fluktuasi pada 1922-1927 merupakan efek tidak langsung dari kondisi pasca Perang Dunia I (1914-1918). Lihat P de Kat Angelino, *Op. Cit.* halaman 10-21. Sebuah syair menggambarkan kondisi tersebut : '*Boeat ambtenaar jang bergadjih besar dipotong 5 % tentoe tidak akan goesar sebab sisa gadjihnja toch misih besar segala keperloeannja moedah terbajar. Sebaliknja boeat pegawai rendahan jang gadjih mereka hanja poeloehan potongan 5 % lagi akan dirasa soeatoe tindihan dan bakal menambah kesoesahan*'. Djengkol, (Syair kaoem boeroeh Doenia Pegadaian 1935). Lihat Ben White, *Towards a Social History of Economic Crises : Yogyakarta in the 1930s, 1960s and 1990s*, Netherlands Institute for Advanced Studies 2000-2001: 7-8.

[16] Pada awal abad 20, Jepang telah menjadi pesaing bagi Cina, Inggris dan Belanda sendiri. Dengan total investasi di nusantara mencapai 35.5 juta gulden, arang-barang manufaktur dikuasai oleh Jepang : kain, tembikar, kertas hingga ban kemudian memenuhi pasar-pasar di Hindia-Belanda. Sebagai pemain baru, Jepang

Beberapa upaya dilakukan untuk bertahan sekaligus merespon atas kondisi tersebut dan salah satu yang dilakukan oleh para pedagang batik (baik di Laweyan maupun di Surakarta) adalah dengan membentuk *Huishoudelijk Reglement* PPBBS (Persatoean Peroesahaan Batik Boemi Poetra Surakarta)[17] pada Maret 1936 yang bertujuan untuk mendirikan lembaga ekonomi bagi bumiputra -khususnya batik- menjadi usaha yang tangguh, mampu bertahan dan mewadahi semua pedagang dalam organisasi tersebut.

Dampak krisis ekonomi 1930an menyisakan banyak beban ketika negara harus mengambil alih semua kewenangan dari kaum kolonial. Tahun-tahun awal kemerdekaan menciptakan situasi yang sulit atas semua aktivitas perekonomian, kehancuran berbagai infrastruktur menimbulkan kelangkaan dan inflasi harga yang parah. Hasil konferensi Den Haag direspon dengan melakukan nasionalisasi atas semua asset peninggalan Belanda yang ada. Perekonomian Indonesia-pun tak kunjung menemukan arahnya mengingat infrastruktur kolonial yang menyisakan agenda-agenda pembenahan. Kondisi perekonomian Indonesia kemudian menghadapi gelombang persoalan yang teramat besar akibat tidak kunjung stabilnya perekonomian : inflasi yang konstan, mata uang yang nasional yang rentan atas nilai tukar mata uang asing, kelangkaan kebutuhan pokok hingga agenda-agenda politik bagi stabilisasi kekuasaan bagi sebuah negara baru, harus dilakukan secara bersamaan.

---

telah menguasai 32% import kain, 31% benang rajutan, 53% tembikar hingga 21% tekstil dan mengalami peningkatan penguasaan import dari 10.5% dari tahun 1929 menjadi 31% pada tahun selepas devaluasi yen pada tahun 1931. Lihat J. Thomas Lindblad, 2002 : 359-361.

[17] Dengan upaya tersebut, usaha untuk memudahkan para pedagang batik mendapatkan bahan baku batik (blaco atau obat-obatan). Namun harapan tersebut tidak bertahan lama karena (selepas perpindahan dari Laweyan ke Mangundjajan) Jepang datang dan meleburkannya dalam Batik Kagyo Komisi untuk semua pengusaha baik pribumi, Arab maupun Cina. Lihat Harsono dkk, 1990 : 42-43. Pada Laporan Sarasehan, *Industri Batik, Koperasi Batik dan Perubahan Struktur Sosial Ekonomi : Perilaku Ekonomi, Agama dan Kultural di Jawa, Khususnya Daerah Surakarta*, 20 Nopember 1990.

Kegagalan meletakkan pondasi dasar perekonomian yang kuat menghadapkan negara pada pilihan untuk mengembangkan kekuatan kemitraan antar negara (modal asing) sebagai sebuah pilihan pragmatis. Kebijakkan Rencana Urgensi Pembangunan (April/1950) yang dinamai dengan Program Benteng bertugas dalam jangka pendek untuk mengkonsolidasikan usaha-usaha industrialisasi dan dalam jangka panjang melepaskan ketergantungan pada kepentingan ekonomi asing, ternyata memberi ruang awal bagi swasta untuk terlibat (Yahya, 1991: Thee Kian Wee, 2004). Dalam situasi tersebut, para pengusaha batik-pun mencoba keberuntungannya dengan membentuk Koperasi Batik Timur Asli Republik Indonesia (BATARI)[18] dalam wilayah Eks Surakarta dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI)[19] yang mengkonsolidasikan kepentingan para pemilik usaha batik di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Bandung dan Jakarta pada 1948. Dengan keberadaan simpul-simpul politik yang ada, kepentingan untuk bertahan secara ekonomi kemudian dipertautkan kembali dengan para pemimpin bangsa (terutama era Masjumi dan jaringannya pada 1949-1952) lewat pendirian NV Batik Trading Company yang bertugas sebagai agen dalam mengimport kain mori (eksport batik yang sudah jadi) dan bahan-bahan celup untuk didistribusikan kepada anggota GKBI. Dengan memegang jalur-jalur posisi-posisi strategis di Parlemen, GKBI mendapatkan hak monopoli untuk mengimpor kain mori (termasuk ketika GKBI berstrategi dengan melikuidasi anak perusahaannya tersebut dan mengambil alih semua hak monopoli impornya)[20].

---

[18] Batari sendiri kemudian terbagi (berdasar Penpres No. 60 Tahun 1959) ke dalam 10 koperasi primer : Koperasi Perbatikan Nasional (KPN) yang mengelola usaha di kawasan Pasar Kliwon dan Jebres, Persatuan Pamong Batik Surakarta (PPBS) yang mengelola usaha di kawasan Laweyan dan Batari sendiri mengelola di Banjasari serta Serengan. Sisanya masing-masing otonom di Boyolali, Klaten, Wonogiri dan Karanganyar. Harsono dkk, *Op. Cit.* halaman 44-47.

[19] GKBI mempunyai 40 koperasi dan mewakili 8.000 usaha batik rumah tangga. Lihat Richard Robinson, *Indonesia : The Rise of Capital*, 1986: 56-57

[20] Program Benteng dihentikan pada 1957 dengan GKBI tetap memegang

Selepas ketidakstabilan politik nasional oleh pergantian kabinet pada Demokrasi Parlementer 1950-1957, melahirkan kebijakkan Deklarasi Ekonomi 1963 dan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Delapan (1961-1969) yang kental nuansa politiknya ketimbang program ekonomi yang tersusun rapi. Dokumen Rencana Lima Tahun (Repelita : Sept/1956) yang secara progresif meletakkan ide pengembangan industri dasar, pelayanan umum dan jasa bagi sektor publik agar dapat merangsang penanam modal bagi swasta. Namun semua program berujung pada suksesi kepemimpinan nasional yang mengusung Tiga Tuntutan Amanat Rakyat (1966) yang salah satunya tuntutannya adalah diturunkannya harga barang-barang kebutuhan pokok yang melambung sangat tinggi.

Bandul kekuasaan yang baru, langsung membuka diri pada modal asing untuk segera melakukan stabilisasi ekonomi dengan memberlakukan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968, sebagai upaya untuk menggerakkan kembali geliat ekonomi swasta. Pilihan investasi dan pertumbuhan industrialisasi yang mempunyai kemampuan daya dongrak tinggi salah satunya adalah industri pakaian jadi dengan hanya mempunyai 72 pabrik pakaian jadi (dengan kelas besar-menengah) pada 1975 mampu menyerap 2.804 pekerja[21]. Dan pada 1986 jumlah investasi pada usaha industri pakaian

---

hak monopoli impor kain mori. Dan catatan Amin Mudzakki, menegaskan efek dari kebijakkan Benteng adalah kemudahan mendapatkan kredit dari bank dan proses administasi yang mudah, tentunya dengan mekanisme pembentukan koperasi dan jaringan-jaringan koperasi inilah yang kemudian menjadi pondasi bagi bertahannya usaha batik di tahun 1950an.

[21] Usaha bertahan para pengusaha batik lewat GKBI mencoba mengadaptasi perubahan tersebut dengan dibangunnya PT. Primatexco (hasil join venture dengan Daiwabo dan Nichimen dari Jepang) dan PT. Primissima pada tahun 1970an yang mensuplai bahan baku berupa benang, grey dan cambrics secara mandiri. Dengan upaya injeksi pemerintah pusat, daya tahan pengusaha batikpun secara bertahap membaik bahkan pada tahun 1990 mampu memperluas usahanya (ke hilir) dengan mendirikan PT. Tokai Texprint Indonesia dan PT. Koprima yang mempoduksi tekstil printing dan benang. Harsono dkk, *Op. Cit*. halaman 51-53.

jadi kemudian meningkat secara tajam menjadi 565 buah dan mampu mempekerjakan kira-kira 63.575 orang pekerja. Dengan jumlah mesin jahit pada 1980-1990 (sebagai alat dasar dari industri pakaian jadi) yang meningkat jumlahnya dari 14.350 menjadi 105.007 buah maka hasil dari industri kecil pakaian jadi meluber serta meningkatkan -secara tajam- jumlah neraca eksport Indonesia[22].

Dengan pangsa pasar eksport yang masih luas terutama ke Amerika dan Jerman, industri pakaian jadi dan tekstil semakin menuntut investasi modal dalam jumlah yang besar. Termasuk juga investasi dalam sisi teknologi -Alat Tenun Mesin- dimana kebutuhan untuk melakukan diferensiasi (*product technology*) dan pencanggihan mutu produk (*process technology*) terus menerus diupayakan dan dilakukan.

Upaya Bangkit dari Masa Lalu

Dinamika kota Surakarta sesudahnya cenderung abai terhadap batik dan kampung Laweyan. Kondisi yang bertahan relatif lama, sampai menjelang hadirnya memontum desentralisasi yang menginisiasi pemilihan kepala daerah ditingkat lokal paska Orde Baru. Kepemimpinan kepala daerah hadir menawarkan berbagai agenda bagi perkembangan kota Surakarta. Dengan visi menjadikan kota dicoba dimaknai dalam arti agenda kota yang bisa mengangkat potensi dalam perdagangan, jasa, pariwisata, pendidikan dan olah raga. Pemimpin yang baru segera mengembangkan manajerial pemerintahan kota, dalam suasana budaya, untuk itu beberapa agenda kota kemudian direncanakan[23]. Dengan latar pertumbuhan

---

[22] Dengan jumlah eksport pakaian jadi dan tekstil yang meningkat : 1985 (339.6 eksport pakaian jadi –219.7 eksport tekstil), 1985 (518.8-278.7), 1987 (597.7-417.5), 1988 (795.8-582.6), 1989 (1.169.2-833.1) dan 1990 (1.200.4-892.6). Yang kemudian memberi input pada, tabel 1. Output dan Eksport Pakaian Jadi Indonesia, 1970-1980. Lihat Thee Kian Wee, *Industrialisasi di Indonesia : Beberapa Kajian* (LP3ES 1994) halaman 249.

[23] Dokumen : Visi, Misi dan Program Berseri Tanpa Korupsi oleh Joko Widodo dan FX. Hadi Rudyatmo ; dokumentasi *Peraturan dan Keputusan KPU Kota Surakarta dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2005* (KPU Kota Surakarta 2005) halaman 261-269 : Joko Widodo, *Kota Solo Harus Jadi Lebih Baik* (Solopos Nopember 2005).

ekonomi selama 2002-2005 telah mencapai angka 5.51 pesen per tahun, nilai PDRB per kapita mencapai besaran 9.55 persen per tahun selama kurun waktu 2000-2005, lalu angka inflasi dibawah 10 persen (2004-2005 angka inflasi kembali meningkat mencapai 13.88 persen), kegiatan ekspor -yang belum dapat bangkit kembali- sampai dengan tahun 2004 nilai ekspor hanya mencapai jumlah US $ 33.742.243.07.

Maka berlatar kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya, agenda untuk menjadikan Surakarta sebagai Kota Budaya kemudian implementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta (RPJPD) Tahun 2005–2025, yang antara lain menegaskan : Kebijakan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi wisata dan kebijakan untuk melestarikan, Mengembangkan dan mengapresiasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai jati diri warga kota. Point terakhir kemudian menjadi lokomotif atas pengembangan kota, spirit untuk mengembalikan kota sebagai kota yang beridentitas budaya (pariwisata) yang menjadi spirit kolektif untuk kemudian ikut menggerakan denyut perdagangan, jasa maupun pendidikan[24].

Komitmen tersebut secara permanen menjadi program bagi pengembangan pariwisata di Surakarta. Lewat rencana strategis pengembangan pariwisata kota ke depan adalah mewujudkan kota Surakarta sebagai daerah tujuan wisata terkemuka dan untuk itu program-program pengembangan pariwisatapun dirancang. Komitmen akan penataan ruang-ruang dalam kota agar lebih baik dan berdampak

---

[24] Catatan sebelum krisis ekonomi 1997, kerusuhan Mei 1998 dan kerusuhan Oktober 1999 : PDRB 1995 dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberi kontribusi 21,42 persen dan upaya recovery-nya telah menunjukkan 23.06 persen (dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik : 6.46 %). Efek yang diharap dari perkembangan pariwisata adalah tumbuhnya sektor *tersier* kota seperti, perdagangan, hotel, rumah makan, angkutan-komunikasi, keuangan, persewaan hingga jasa. Sektor ini menyumbang kekuatan ekonomi kota hampir 58 %, bandingkan dengan sektor *primer*, seperti pertanian, pertambangan (-2 %) maupun sektor *sekunder* seperti industri, konstruksi hingga listrik, gas dan air (40-an %). Lihat *Laporan Akhir PDRB Kota Surakarta tahun 2003* (Bappeda-BPS kota Surakarta 2003) halaman 28-32 : Bappeda kota Surakarta (2006) halaman III.18-III.19

secara nilai bagi pengembangan pariwisata kemudian menemukan ketegasannya pada kepemimpinan kota pasca Pilkada. Komitmen untuk menjadikan kota lebih baik kemudian didengung-dengungkan dengan slogan *Solo the Future-is the Past* yang melandasi berbagai agenda pengembangan kota yang lainnya. Pemaknaan masa depan kota ke depan, adalah kota yang beridentitas dan mempunyai keluhuran nilai-nilai budaya (yang seharusnya dijadikan tuntunan dan panutan dalam berkehidupan) menjadi prioritas. Semua artefak peninggalan masa lalu dijadikan bagian dari pembangunan kota ke depan dan menjadi patokan bagi pembangunan yang ada.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005–2025 arah kebijakan pengembangan kota ditegaskan akan mencakup fungsi pariwisata dan budaya. tersebut, komitmen untuk mendukung semua upaya pengembangan kota menjadi kota wisatapun dilakukan. Dukungan atas agenda tersebut menjadi inisiasi bagi berkembangnya kawasan-kawasan kota untuk dibenahi dan dijadikan sebagai lokasi kunjungan wisata, yang menyajikan penggalan-penggalan sejarah kota. Batik dan kampung Laweyan kemudian menjadi salaha satu program yang diunggulkan. Selain mereka yang mempunyai usaha batik, keberadaan Laweyanpun kemudian dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha pariwsata sejarah dan perdagangan. Pola tersebut dapat berupa, para pemilik usaha batik sekaligus toko sebagai show room (dengan sebagian yang lain dipasarkan sesuai dengan jaringan-jaringan pemasaran yang ada), toko yang hanya menyediakan hasil yang diambil dari para produsen ataupun usaha toko lain yang menyediakan daya dukung wisata kampung berupa hasil olahan limbah batik berupa kerajinan tangan, merchandise hingga properti lain yang terkait. Dan semuanya akan tampak dalam potret keseharian warga yang terkonsentrasi dititik-titik usaha produksi batik, dalam rumah-rumah besar serta tertutup atau disimpul-simpul usaha berupa toko-toko yang terdapat pada ruas-ruas jalan. Keberadaan bangunan-bangunan rumah para pemilik usaha batik yang sebagian masih

digunakan untuk memproduksi batik -didalamnya terdapat para pekerja yang menggambar pola, memberikan lilin-lilin pada pola-pola yang ada hingga mewarnainya dalam beragam warna yang indah- menjadi daya tarik bagi mereka yang berkunjung dan menginginkan batik sekaligus melihat semua proses pembuatannya. Disamping itu, terdapat pula situs-situs sejarah yang pernah menjadi bagian dari masa lalu nan panjang kampung Laweyan. Kombinasi arsitektur bangunan, batik dan prosesnya hingga situs bersejarahlah yang kemudian menjadi agumentasi atas gagasan pengembangan wisata kampung-kota di Laweyan.

Kesadaran dan inisiasi atas gagasan pengembangan wisata di Laweyan dimulai dari para pemilik usaha batik yang merindukan kembalinya denyut kehidupan batik di kampung Laweyan. Keberadaan Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL) menjadi awal atas usaha tersebut. Beragam upaya komunikasi dilakukan untuk mensinkronkan gagasan pengembangan wisata di Laweyan dengan agenda-agenda pengembangan kota Surakarta, terutama dengan agenda pengembangan pariwisata kota secara keseluruhan. Dan kebijakan pemerintah kota yang merancang Grand Design Kampoeng Batik Laweyan menjadi pondasi sekaligus awal bagi agenda pengembangan kampung Laweyan[25]. Grand Design Kampoeng Batik Laweyan (2006) yang meliputi penataan ruang-ruang dalam wilayah Kelurahan Laweyan sebagai wilayah inti penataan, dengan beberapa wilayah disekitarnya sebagai kawasan pendukung dan pengembangan antara lain Kelurahan Sondakan, Bumi serta Pajang. Dengan visi menjadikan kawasan Laweyan sebagai *kampung wisata batik dan cagar budaya melalui pengembangan industri batik, pelestarian situs sejarah, aristektur rumah-rumah, lingkungan alam serta sosial-budaya*. Bangunan Tugu Batik menjadi titik simpul yang menandai kawasan dengan obyek yang ada disekitarnya.

[25] *Laporan Akhir : Grand Design Kawasan Kampoeng Batik Laweyan Surakarta* (Bappeda Kota Surakata 2006) halaman I.4-I.5. Bappeda Kota Surakata (2006) *Op. Cit.* halaman IV.1-IV.3.

Desain yang dilakukan oleh Bappeda Surakarta bersama komitmen warga yang tergabung dalam Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan dan dukungan dari pihak swasta kemudian menjadi awal bagi dilaunchingnya Kampoeng Batik Laweyan. Pameran Batik dan Kerajinan di kampung batik Laweyan, mengawali proses panjang ke depan dari eksisnya kampung Batik Laweyan dan kini upaya untuk mensosialisasikan gagasan kampung batik Laweyan terus menerus dan dilakukan secara intensif. Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan bersama berbagai stakeholder kota, pengusaha dan yang paling utama adalah pemerintah kota Surakarta terlibat lebih dalam dan serius guna mengembangkan asset wisata di kampung Laweyan maupun kota secara keseluruhan. Kini penataan batik di kampung Laweyan secara bertahap dilakukan seperti variasi produk, kemasan, jaringan, modal hingga pola komunikasi dengan Pemerintah. Kepentingan ekonomi para pengusaha batik kini bertemu dengan kepentingan ekonomi pariwisata kota, yang kemudian menjadi jalan tengah bagi berdenyutnya kembali usaha batik di kampung Laweyan. Memanfaatkan bekal tradisi masa lalu yang terus dipertahankan, kemandirian para pengusaha batik secara perlahan diupayakan tegak kembali dan diuji kembali oleh gerak zaman yang senantiasa berubah.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1985. *Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan*, dalam *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, Tahun XII, No. 2

Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 1997. *Sungai dan Air Ciliwung, Sebuah Kajian Etnoekologi* dalam *PRISMA* No. 1 Tahun XXVI Januari 1997

Amstrong, W & McGee, T.G. 1985. *Theatres of Accumulation: Studies in Asia and Latin American Urbanization*. The Human Consequences of Urbanisation; Divergent Paths in the Urban Experience of the Twentieth Century. Macmilla

Anderson, Benedict R.OG. 2000. *Kuasa Kata : Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Mata Bangsa

Arndt, HW. 1991. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga* : UGM Press

Bachtiar, Harsja W. dkk. 2009. *Raden Saleh: Anak Belanda, Mooi Indie & Nasionalisme*. Komunitas Bambu

Bhalla, A.S. and Frederic Lapeyre. 2004. Poverty and Exclusion in a Global World. Palgrave Macmillan

Bois, D. Tan, C dan Mintz, S. 2008. *The World of Soy*. McGraw Hill Press: California

BPS 2013. Publikasi BPS Provinsi DKI Jakarta.

BPS. 2013. Publikasi BPS Provinsi Banten.

Brenner, Suzanne A. 1991. *Competiting Hierarchies : Javanesse Merchant and the Piyayi Elit in Surakarta* (ASP-Cornell Vol. 52-1991)

Brenner, Suzanne A. 1991. *Domesticating The Market : History, Culture and Economy in a Javanes Merchant Community*. Cornell

Brown T, Katz B. 2009. *Change by Design*. New York: HarperCollins Publishers

Brown, T. & Wyatt, J., 2010. *Design Thinking for Social Innovation*. Stanford Social Innovation Review: Stanford School of Business, pp. 29-35

Brown, T., 2008. *Design Thinking*, Harvard Business Review. 2008.

Burger, D.H., 1962. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*. Pradnya Paramita

Carry, P. 1985. *Masyarakat Jawa dan Masyarakat Cina*. Jakarta

Coppel, C. A. 1994. *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*. Pustaka Sinar

Creswell JW. & Clark VLP., 2007. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publication

D. Magenda, Burhan. 2005. *Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal*. Universitas Nasional

De Jonge, Huub. 2004. *Abdul Rahman Baswedan and the Emancipation of the Hadramis in Indonesia*. Brill

De Jonge, Huub. 2005. *In search of Identity: The Hadhrami Arabs in pre- and Post-war Indonesia*. Radboud University Nijmegen

Ekajati, E. S. 2004. *Sejarah Kabupaten Tangerang*. Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Foweraker, Joe. 1995.*Theorizing Social Movement*. Pluto Press

Fraser, Nancy. *Injustice at Intersecting Scales: on 'social exclusion' and the global poor*. European journal of social theory 2010 13:363-371. Sage Publication

Frederick, William H., ___. Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia", *JSEAS*

Geertz, Clifford. 1986. *Mojokuto : Dinamika Sebuah Kota di Jawa* : Grafiti

Geertz, Clifford. 1989. *Raja dan Penjaja : Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota*. Yayasan Obor Indonesia

Giddens, A. 1991. *Modernity and Self Identity*. Stanford University Press Standford

Gray, Leslie and Michael Kevane. *Diminished Access, Diverted Exclusion: Women and Land Tenure in Sub- Saharan Afrika*. African Studies Review, Vol 42, No.2 (Sep., 1999)

Hall, Derek, Philip Hirsch dan Tania Murray Li. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.* NUS Press

Hall, Derek. *Land grabs, land control, and Southeast Asian Crop Booms.* The Journal of Peasant Studies Vol 38 No. 4, October. 2011

Hari Mulyadi -dkk 1999. *Runtuhnya Kekuasaan Kraton Alit : Studi Radikalisasi Sosial Wong Solo dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*. LPTP

Harvey, David. 2010. *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Insist Press

Haryadi. 1989. *Resident Strategies for Coping With Environmental Press: Relation to House-Settlement System in a Yogyakarta Kampung, Indonesia*.

Hess, Charlotte, Elinor Ostrom. 2007. *Understanding Knowledge as Commons*. MIT Press

Hobsbawm, Eric. 1983. *Introduction : Inventing Traditions*, dalam Eric Hobsbawm dan Terence Ranger (ed.) *The Invention of Tradition*. Cambridge University Press

Hudalah, D., & Firman, T. 2012. *Beyond Property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region*. *Cities*, *29*(1), 40–48. doi:10.1016/j.cities.2011.07.003

IDEO team, IDE, Heifer international and ICRW. 2013. *Human Centered Design (HCD) Toolkit: Design Thinking Toolkit for Social Innovation Project* 2nd.ed, *funded by Bill and Melinda Gates Foundation*. Licensed under The Creative Commons Attribution, Non Commercial, Share A-Like 3.0 Unported License

Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie, 1905-1930. 1930. Weltevreden: Gedrukt bij G.Kolff & Co

Jones P B., Petrescu D. Till J, ed. 2005. *Architecture and Participation.* NY: Spon Press

Judge, David et al.,eds.1995. *Theories of Urban Politics.* Sage Publication

Katoppo M. & Sudradjat, I., 2015. *Combining Participatory Action Research (PAR) and Design Thinking (DT) as an Alternative Research Method in Architecture*. Procedia-Social and Behavioral Sciences

Khaladi, Mehdi. 2009. *The Dillemas of Pan-Islamic Unity*. Currents Trends in Islamic Ideology Journal vol 9

Kian Wee, Thee. 1994. *Industrialisasi di Indonesia : Beberapa Kajian*. LP3ES

Kian Wee, Thee. 2004. *Indonesia's Fisrt Affirmative Policy : The Benteng Program in The 1950s*.

Koerts, H.J., 2001. Amtenar BB di Sulawesi Selatan", dalam S.L. van der Wal (peny.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942*. Djambatan

Koonings, Kees dan Dirk Kruijt. 2009. *Megacities: The Politics of Urban Exclusion and Violence in The Global South.* Zedbookk

Kunnemann, Rolf dan Sofia Monsalve Suarez. 2013. *International Human Rights and Governing Land Grabbing: A View from Global Civil Society*. Globalization, 10:1, 123-131. DOI: 10.1080/14747731.2013.760933

Kupier, K. 2011. *The Culture of Tionghoa*. Britanica Educational Publishing. New York

Kustianingrum, D. 2010. *Tatanan Spasial Permukiman Tak Terencana Kampung Babakan Ciamis Kota Bandung*. Reka Karsa Itenas

Lapian, A.B. 2007. *Sungai sebagai Pusat Peradaban*. Makalah disampaikan pada Seminar Perubahan DAS Brantas dalam

Perspektif Sejarah yang diselenggarakan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jendral Sejarah dan Purbakala, Jakarta, 6 Nopember 2007

Laporan Akhir, Grand Design Kawasan Kampoeng Batik Laweyan Surakarta. Bappeda Kota Surakata 2006

Laporan Sarasehan, 1990. *Industri Batik, Koperasi Batik dan Perubahan Struktur Sosial Ekonomi : Perilaku Ekonomi, Agama dan Kultural di Jawa, Khususnya Daerah Surakarta*. UMS

Levien, Michael. *The Politics of Dipossession: Theorizing India's "Land Wars"*. Politic & Society 2013: 351 DOI: 10.1177/0032329213493751. Sage Publication

Lindblad, J. Thomas Lindblad. 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. PSSAT UGM-Pustaka Pelajar

Liputra, E. 2013. *Prinsip Fleksibilitas Ruang*. 21 November 2015

Lohanda, M. 1996. *The Kapitan Cina of Batavia, 1837-1942 : a History of Chinese Establishment in Colonial Society*. Djambatan.

Machribie, Budi. 18 April 2012. '*Riwayat Kyai Boestam Kertoboso*'. ://intranet2012.wordpress.com/2012/04/18/riwayat-kyai-boestam-kertoboso. 5 Juni 2016

Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota.* Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan UGM

Mattulada, 2011. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*. Penerbit Ombak

McTaggart, R., 1994. *Participatory Action Research: issues in theory and practice*, Educational Action Research, 2:3, pp. 313-337

Megasari, Hernita, 2008. *Pemukiman Bantaran Sungai Jagir Surabaya: Perkembangan dan Perubahannya 1964-1976*. Skripsi pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, 2008.

Mobini Kesheh, Natalie. 2007. *Hadrami Awakening*. Jakarta Akbar

Mudzakki, Amin. 2006. *Perkembangan Ekonomi Pengusaha Santri di Tasikmalaya 1930-1980an*

Noorduyn, J., 2000. Komunitas Saudagar Wajo di Makassar", dalam Roger Tol, Kees van Dijk, Greg Acciaioli, *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Penerbit Ininnawa KITLV

Nowosielski, Michal. Challenging Urban Exclusion? Theory and Practice.

Ombudsman Tinjau Warga Kebun Sayur Ciracas Jakarta Timur. Diakses di http://ahok.org/berita/ombudsman-tinjau-warga-kebun-sayur-ciracas-jakarta-timur/

Patunru, Abd. Razak Daeng, 1993. *Sejarah Gowa.* Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan

Pillai, Janet. 2013. *Cultural Mapping: A Guide to Understanding Place, Community and Continuity*. Strategic Information and Research Development Centre

Polish Sociological Review, No. 179 (2012), pp. 369-383

Puspitosari, W. A. 2008. *Etnis Tionghoa, Tahu dan Kota (Terbangunnya Identitas Kota Kediri)*. FISIP Universitas Sebelas Maret

Ramelan, R. dkk. 2007. *"Gang" Kampung Kota, Sarana Sirkulasi Multi Fungsi*.

Reid, Anthony, 1980. A Great Seventeenth-Century Indonesian Family: Matoaya and Pattingalloang of Makassar", *Masyarakat Indonesia,* 8,1: 1-28.

Reid, Anthony, 1993. The Rise of Makassar", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 17 (1983): 117-160; *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680. Vol.2: Expansion and Crisis*. New Haven, Conn.: Yale University Press

Ribot, Jesse C dan Nancy Lee Peluso. 2003. *Theory of Access*. Rural Sociology, Juni 2003; 68.2; PA Research II Periodical

Ricklefs, MC. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. UGM press

Ringkasan Laporan Human Rights Watch, "*Masyarakat yang Tergusur: Pengusiran Paksa di Jakarta*". Volume 18 No.10 (C). Hlm. 2. Diakses https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0906sumandrecsBIweb.pdf

Robinson, Richard. 1986. *Indonesia, The Rice of Capital*. ANU

Rospriandana, N. 2013. *Menghidupkan Lagi Nyawa Kampung Kota*. http://www.kompasiana.com/naufalr/menghidupkan-lagi-nyawa-kampung-kota-2_552af2b7f17e619057d623d8. 21 November 2015.

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Bappeda Kota Surakarta 2006

Safira. 2014. *Perkembangan Komunitas Pedagang Arab di Surabaya Tahun 1870-1928.* Universitas Negeri Surabaya

Sariyatun, 2005. *Usaha Batik Masyarakat Cina di Vorstenlanden Surakarta : Awal Abad XX* : UNS press 2005

Sarkawi, 2006. *Sungai dan Perkembangan Kota di Indonesia pada Masa Kolonial: Sebuah Kajian Awal* dalam *Mozaik, Jurnal Kebudayaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2006

Sarsono dan Suyatno, 1985. *Suatu Pengamatan Tradisi Lisan dalam Kebudayaan Jawa: Studi Kasus Masyarakat Laweyan di Surakarta*. Depdikbud

Sartono Kartodirjo, 1977. *Masyarakat Kuno dan Kelompok-Kelompok Sosial*. Bhratara

Schrieke, B., 1955. *Indonesian Sociological Studies, Volume I*. The Hogue-Bandung

Shirashi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak : Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Grafiti

Shurtleff, W. dan Aoyagi, A. 2001. *The Book of Tofu*. Then Speed Press California

Silberberg, Susan. 2013. *Places in the Making: How placemaking builds places and communities*. Massachusetts Institute of Technology

Siregar, Sandi Aminuddin. 1990. *Bandung, The Architecture of A City in Development*. Departement Architectuur Katholieke Universiteit Leuven

Soedarmono, 1999. *Sala Tempo Doeloe Dalam Semangat Perdikan dan Budaya Tandingan*. Makalah

Soedarmono, 2004. *Surakarta : Morfologi Kota Kerusuhan*. Makalah

Soedarmono, 2006. *Mbok, Mase : Munculnya Pengusaha Batik Laweyan Abad XX*. WWF

Staatsbladen van Nederlandsch Indie, 1918, No. 482.

Suhartono W Pranoto, 2003. *Solo dalam Perspektif Historis, 1890-2000: Perkembangan dan Gejolak*. Makalah

Supratikno Rahardjo, 1998. Makalah diskusi ilmiah Banda Jalur Sutra, *Kota-kota Pelabuhan di Pantai Utara Pulau Jawa : Gambaran Umum Sekitar Periode 1400-1600*. Depdiknas

Surat *Gouvernements Secretarie*, 22 Februari 1929 No. 341/II.

Suryana, N. 1992. *Sejarah Kabupaten Banten*. Pemda Tk II Tangerang dan LPPM UNIS Tangerang

Syahra, Rusydi. 2010. *Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan.* Jurnal Masyarakat dan Budaya, Edisi Khusus

Usman, R. 2009. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*. Yayasan Obor

Valencia P., Katoppo M. 2015. *Taki, the Community (sustainable) Sensory garden*. *ICoRD' 2015 - Research into Design Across Boundaries Volume 2, Chakrabarti, A.(Ed.),* New Delhi Heidelberg New York Dordrecht London. Springer Publication

Van den Berg, L.W.C. 2010. *Orang Arab di Nusantara.* Komunitas Bambu

Wertheim, W.F. 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Studi Perubahan Sosial.* Tiara Wacana

White, Ben. 2000. *Towards a Social History of Economic Crises : Yogyakarta in the 1930s, 1960s and 1990s*.

Widjaja, P. 2013. *Kampung Kota Bandung*. Graha Ilmu

Wolhoff, G.J. dan Abdurrahim, _____. *Sedjarah Goa*. Makassar Jajaran Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara

Wong, B. 1998. *Ethnicity and Entrepreneurship: The New Chinese Immigrants in the SanFrancisco Bay Area*. Allyn & Bacon A. San Francisco State University

INDEKS

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

PENULIS

A Nimas Kesuma Negari. Mahasiswa pasca sarjana Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada. Bisa dihubungi via animas.kesuma@gmail.com

Adil Abdullah Albatati. Menekuni kajian subyek Arab di Indonesia dan tergabung dalam lembaga penelitian Menara Surabaya. Bisa dihubungi via the.alba.omega@gmail.com

Ahmad Khairudin. Aktif mengelola Hysteria Semarang. Bisa dihubungi via mbuh.adin@gmail.com

Akhmad Ramdhon. Staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret. Aktif mengelola kampungnesia (dot) org. Bisa dihubungi via wacana3000gmail.com

Andesha Hermintomo. Arsitek dan menekuni kajian perkotaan. Bergiat di Rujak Center for Urban Studies Jakarta. Bisa dihubungi via andesh.tomo@gmail.com

Anindita Taufani. Arsitek dan menekuni kajian perkotaan. Bergiat di Rujak Center for Urban Studies Jakarta. Bisa dihubungi via anindita.taufani@gmail.com

Devy Dhian Cahyati. Asisten peneliti Research Centre for Politics and Government-PolGov, Universitas Gadjah Mada. Bisa dihubungi via devy.dhian@gmail.com

Dwiyanti Kusumaningrum. Akti menekuni kajian geografi perkotaan dan sejarah sosial budaya kampung dan mengelola Komunitas Desakota. Bisa dihubungi via dwiyanti.kusumaningrum@gmail.com

Ginani Hening Utami, **Jovita Calista R Sitorus**, dan **Yoga Adi Santoso**. Mahasiswa Arsitektur Intitute Teknologi Bandung. Bisa dihubungi via jovita.calista@aiesec.net

Ilham Daeng Makkelo. Staf pengajar Ilmu Sejarah FIB Universitas Hasanuddin. Bisa dihubungi via ilhamdaengmakkelo@gmail.com

Marco Kusumawijaya. Arsitek dan menekuni kajian perkotaan. Bergiat di Rujak Center for Urban Studies Jakarta. Bisa dihubungi via mkusumawijaya@gmail.com

Martin L Katoppo. Staf Pengajar di Desain Interior, School of Design, Universitas Pelita Harapan. Bisa dihubungi via euselfvita@gmail.com

Ruth E. Oppusunggu. Aktif mengelola Design as Generator (DAG), Tangerang Selatan. Bisa dihubungi via 200rumahbesi@gmail.com

Sarkawi B. Husain. Staf pengajar Ilmu Sejarah FIB Universitas Airlangga. Bisa dihubungi via sarkawihusain@gmail.com

Siti Zunariyah. Staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret. Aktif mengelola kampungnesia (dot) org. Bisa dihubungi via zunariyah@gmail.com

Wida Ayu Puspitosari. Staf pengajar Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya. Bisa dihubungi via widapuspitosari@live.de

Buku ini adalah hasil Srawung Kampung-Kota: dimana kerja-kerja kami selama ini dalam mendokumentasikan kampung tiba pada beberapa momentum untuk berjejaring. Skema Srawung Kampung-Kota kemudian jadi agenda untuk mengundang banyak teman di berbagai kota, lintas disiplin pengetahuan untuk menulis dan berbagi semua bentuk pengalaman berada di kampung-kota, menjadi bagian dari kampung maupun mendampingi kampung-kota. Beberapa *workshop* dengan agenda dari berbagai komunitas juga dibuat menjadi agenda yang tak terpisahkan dari Srawung Kampung yang kami lakukan. Buku ini hadir, sebagai penanda atas beberapa momentum yang pernah kami buat, sekaligus memberi sumbangan kecil bagi upaya untuk meletakkan kota pada skema perubahan dan menempatkan pengetahuan sebagai basis pengambilan kebijakan. Memotret, merekam, mendokumentasikan dan menghadirkan narasi keseharian kampung-kota dalam beragam dimensi, baik dalam fisik maupun non fisik adalah upaya untuk menempatkan kampung sebagai bagian nan substansial dari kota. Eksistensi kota yang tumbuh dan membentuk sejarah kota-kota modern di nusantara tak bisa dilepaskan begitu saja dari semua penggalan mentalitas budaya warga yang membentuk kota dan kini hadir menghuni kampung-kota.

BUKU LITERA
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
bukulitera@gmail.com